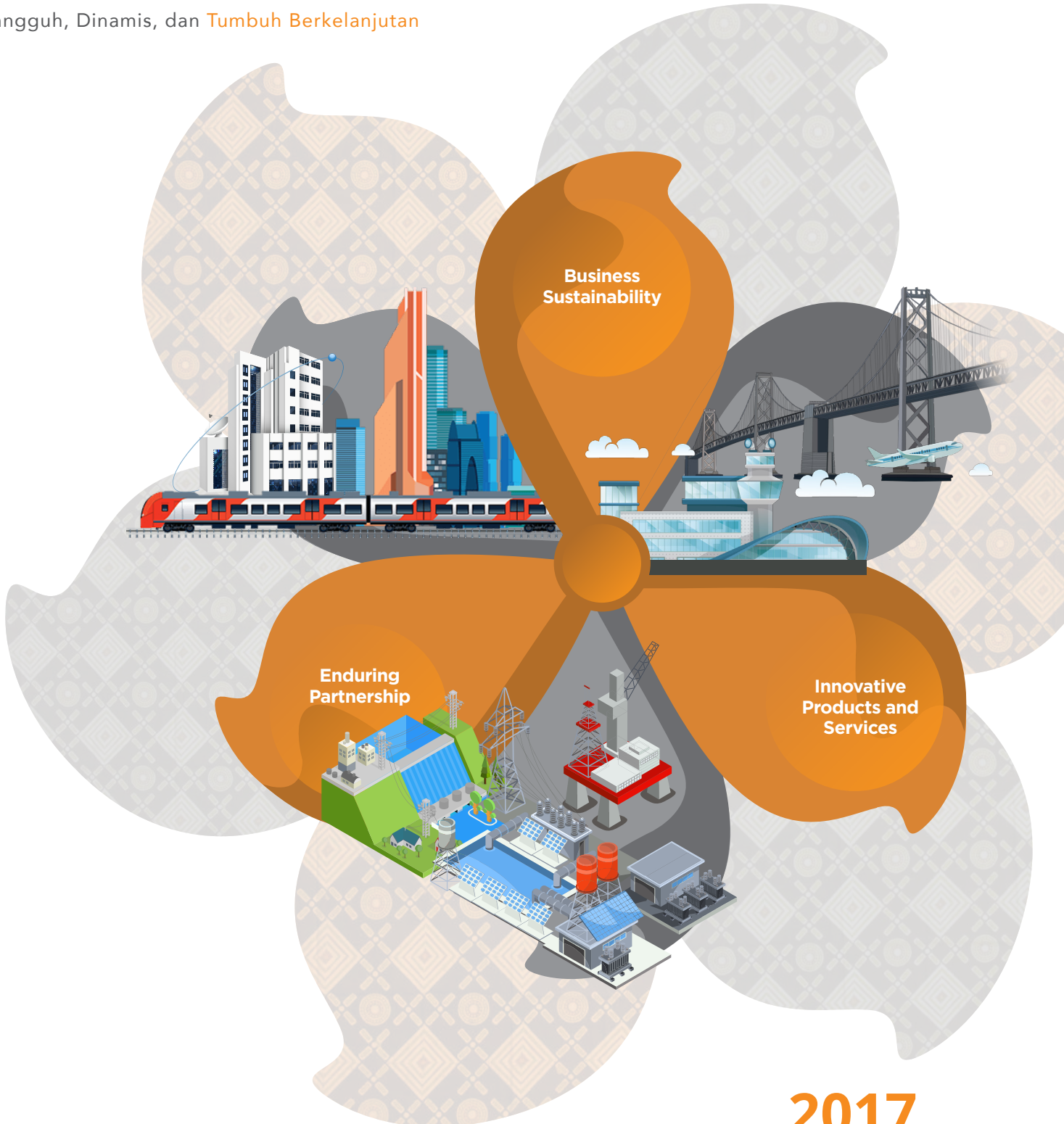


Resilient, Dynamic, and **Continuous Growth**

Tangguh, Dinamis, dan **Tumbuh Berkelanjutan**



2017

Laporan Tahunan
Annual Report

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

KILAS KINERJA 2017

Flashback Performance of 2017

- 4 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights
- 5 Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights Chart
- 6 Pencapaian Penting IIF
IIF's Notable Achievements

LAPORAN MANAJEMEN

Management Reports

- 8 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report
- 14 Laporan Direksi
Board of Directors Report

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

- 26 Data Perusahaan
Corporate Data
- 27 Sekilas Perusahaan
Company at a Glance
- 28 Jejak Langkah
Milestones
- 30 Peristiwa Penting 2017
2017 Event Highlights
- 33 Visi dan Misi
Vision and Mission
- 34 Produk dan Layanan
Products and Services
- 36 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders' Composition
- 37 Struktur Organisasi
Organization Structure
- 38 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
- 48 Profil Direksi
Board of Directors Profile
- 53 Profil Manajemen Eksekutif
Executive Management Profile
- 54 Portofolio IIF
IIF portfolio
- 56 Lokasi Proyek
Project Location

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Overview on Business Support

- 60 Manajemen Risiko
Risk Management
- 64 Sosial & Lingkungan
Social & Environmental (S&E)
- 71 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 76 Teknologi Informasi
Information Technology

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

- 80 Tinjauan Umum
Overview
- 81 Infrastruktur Untuk Pembangunan Bangsa
Infrastructure For National Development
- 82 Solusi atas Tantangan Pembangunan Infrastruktur
Solution of The Infrastructure Development Challenges
- 82 Pencapaian Korporasi
Corporate Achievement
- 87 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Overview Per Business Segment
- 89 Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis
- 95 Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Keuangan
Information and Material Fact After The Financial Statement Date
- 95 Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Rare and Extraordinary Events
- 95 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transaction Containing Conflict of Interest with Affiliated Parties
- 95 Informasi Transaksi Dengan Pihak Berelasi
Information On Transaction With Related Parties
- 96 Transaksi Derivatif dan Lindung Nilai
Derivative Transaction And Hedging

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional, proyeksi usaha yang ditampilkan dalam bab analisis dan pembahasan manajemen, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan Perusahaan 2017 dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin adanya hasil tertentu yang pasti tercapai berdasarkan informasi yang disajikan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Indonesia Infrastructure Finance yang menjalankan bisnis dalam bidang pengembangan dan pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Adakalanya kata "IIF" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Indonesia Infrastructure Finance secara umum.

This Annual Report contains financial conditions, operational results, projections on business presented in the management discussion and analysis chapter, plans, strategies, policies, as well as objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

Prospective statements in this 2017 Annual Report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company and the business environment where the Company conducts its business. The Company does not guarantee that all information presented herein will bring specific results as expected.

This Annual Report also contains the word "Company", hereinafter referred to PT Indonesia Infrastructure Finance, as the company that operates business in the development and financing of commercially viable infrastructure projects. The word "IIF" is occasionally used to simplify and refer to PT Indonesia Infrastructure Finance in general.

96	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan Changes In Laws and Regulations That Have Significant Impact On The Company's Performance	144	Komite Advisory Advisory Committee
96	Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Pada Tahun Buku 2017 Changes In Accounting Policy That were Implemented In 2017 Fiscal Year	146	Komite Sumber Daya Manusia HR Committee
96	Kebijakan Dividen Dividend Policy	146	Komite Pengarah TI IT Steering Committee
96	Industri Infrastruktur di Indonesia dan Prospek Usaha Perusahaan Infrastructure Industry In Indonesia and The Company's Business Outlook	150	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
99	Aspek Pemasaran Marketing Aspect	152	Audit Internal Internal Audit
101	Strategi Perusahaan Company's Strategy	156	Auditor Eksternal External Auditor
		157	Kode Etik dan Budaya Perusahaan Code of Conduct and Corporate Culture
		161	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy
		161	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
		163	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
		164	Perkara Penting 2017 Legal Cases in 2017
		164	Sanksi Administratif Administrative Sanction
		164	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Employee Stock Option Plan
		164	Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa System and Procedure of Goods and Services Procurement
		166	Akses Informasi Perusahaan Access To Company Information
			TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility
		168	Pemenuhan Standar Keberlanjutan bagi Proyek Infrastruktur Fulfillment of Sustainability Standards for Infrastructure Projects
		169	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup Social Responsibility to the Environment
		172	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility in Manpower and Occupational Health and Safety
		175	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social Responsibility in Social Community Development
		175	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Konsumen Social Responsibility to Consumers
		176	Explore to Conserve The Biodiversity at Parigi Moutong – Sulawesi Tengah, Teluk Tomini
			Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Indonesia Infrastructure Finance Statement of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the 2017 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance
101	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan Changes In Laws and Regulations That Have Significant Impact On The Company's Performance		
96	Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Pada Tahun Buku 2017 Changes In Accounting Policy That were Implemented In 2017 Fiscal Year		
96	Kebijakan Dividen Dividend Policy		
96	Industri Infrastruktur di Indonesia dan Prospek Usaha Perusahaan Infrastructure Industry In Indonesia and The Company's Business Outlook		
99	Aspek Pemasaran Marketing Aspect		
101	Strategi Perusahaan Company's Strategy		
	TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE		
105	Organ Utama GCG GCG Primary Organs		
105	Dasar Hukum dan Prinsip Penerapan GCG Legal Basis and Principles of GCG Implementation		
108	Struktur Tata Kelola Governance Structure		
109	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
111	Dewan Komisaris Board of Commissioners		
116	Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees under Board of Commissioners		
116	Komite Audit Audit Committee		
122	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee		
125	Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris Risk Oversight Committee of The Board of Commissioners		
128	Komite Investasi-Dewan Komisaris Board of Commissioners – Investment Committee		
130	Direksi Board of Directors		
136	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi Affiliation Between Board of Commissioners and Board of Directors		
136	Dewan Komisaris dan Direksi Sebagai Pembicara Pada Beberapa <i>Event</i> Di Tahun 2017 Board of Commissioners and Board of Directors As Keynote Speakers In Several Events In 2017		
138	Komite di Bawah Direksi Committees under The Board of Directors		
138	Komite Investasi-Direksi (BOD-IC) Board of Directors – Investment Committee		
139	Komite Aset dan Liabilitas (BOD-ALCO) Assets and Liabilities Committee		
141	Komite Manajemen Risiko-Direksi Risk Management Committee of The Board of Directors		

Resilient, Dynamic, and Continuous Growth

Tangguh, Dinamis, dan Tumbuh Berkelanjutan

Sepanjang 2017, IIF dihadapkan situasi dan kondisi yang penuh tantangan serta menimbulkan tekanan yang cukup berat untuk perusahaan. Namun berkat integritas serta kerja keras yang dilakukan, IIF mampu melakukan perbaikan secara cepat serta menjaga performa usaha ke arah yang positif. Sebagai entitas usaha yang bergerak di segmen pembiayaan infrastruktur, IIF secara berkelanjutan berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas usahanya dengan menghadirkan layanan terbaik pada produk pembiayaan dan *Advisory*. IIF juga senantiasa melakukan pengembangan, inovasi serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas bisnis secara dinamis dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan klien baik yang berasal dari sektor publik maupun swasta.

Upaya tersebut merupakan bagian dari usaha IIF dalam membangun fondasi usaha yang kuat dan berkelanjutan serta perwujudan atas visi usaha IIF untuk dapat menjadi pelopor katalisator pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Melalui Laporan Tahunan Perusahaan 2017, IIF mengangkat tema *Resilient, Dynamic dan Continuous Growth* guna merepresentasikan kemampuan Perusahaan dalam menghadapi tantangan yang ada serta langkah strategis pengelolaan usaha dalam rangka mencapai peningkatan kinerja usaha secara berkelanjutan.



Throughout 2017, IIF faced a challenging situation that put quite a heavy pressure for the Company. However, IIF managed to recover quickly and maintained its business performance on the positive trend; all because of the integrity and hard work that IIF exerted during the year. As a business entity engaged in the infrastructure finance segment, IIF is continuously committed to improve its business quality by providing the best service in its financing products and Advisory. Realizing this spirit, IIF continues to create development, innovation, and capacity and capability improvement in a dynamic manner by taking into account the needs of the clients, both from the public and private sectors.

This effort is part of IIF's attempt to build strong and sustainable business foundation as a manifestation of IIF's business vision to become the pioneer of Indonesia's infrastructure development finance catalyst.

Through this 2017 Annual Report, IIF raised the "Resilient, Dynamic, and Continuous Growth" theme to represent the Company's endurance in overcoming the existing challenges and taking the strategic steps of business management in pursuing sustainable business improvement.

01

Kilas Kinerja 2017

Flashback Performance of 2017

- 4 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights
- 5 Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights Chart
- 6 Pencapaian Penting IIF
IIF's Notable Achievements



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

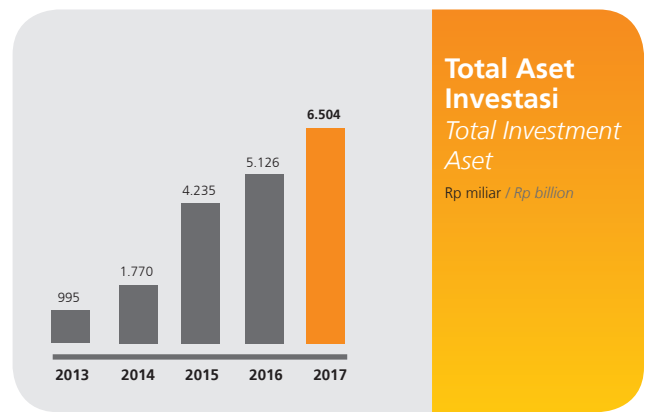
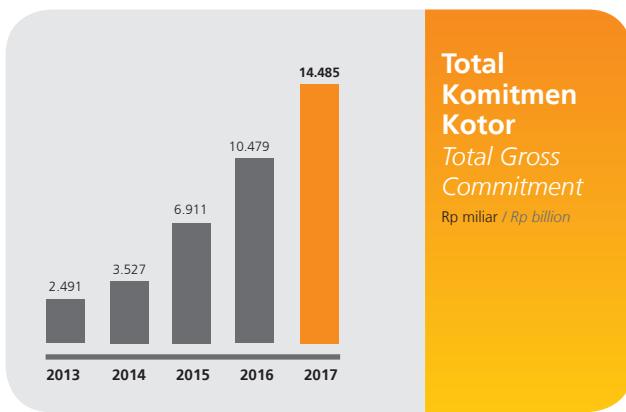
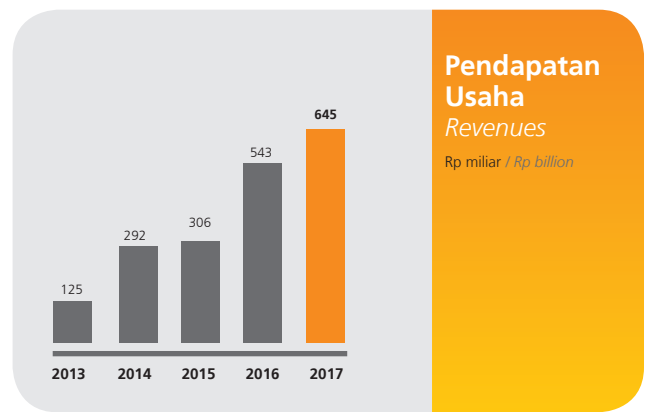
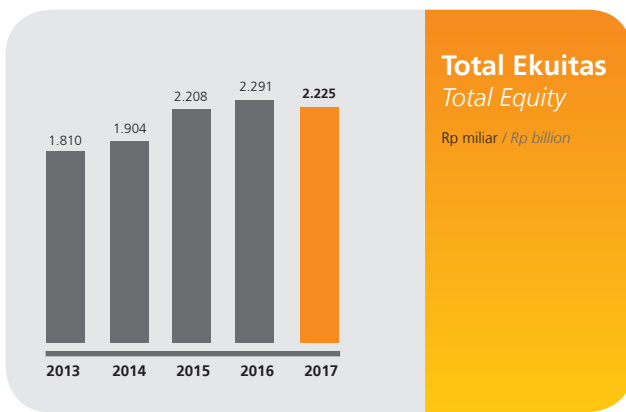
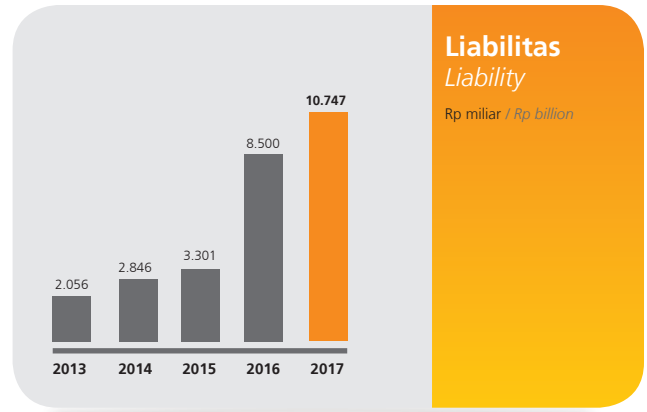
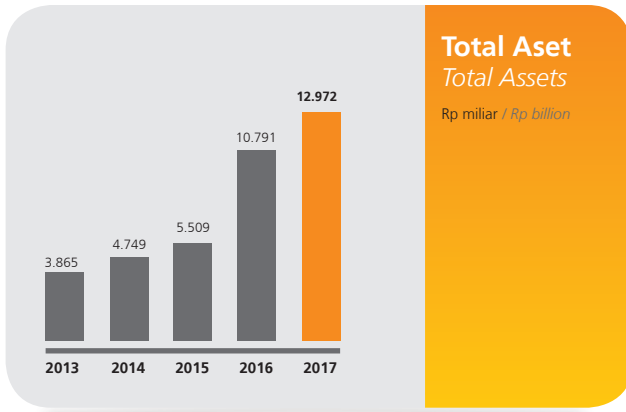
Ringkasan Laporan Keuangan dan Rasio (Rp juta)

Summary of Financial Statements and Ratios (Rp million)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Description
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF			STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME			
Pendapatan usaha	124.916	291.833	306.347	543.547	644.639	Revenues
Beban usaha	(91.573)	(169.904)	(202.921)	(406.443)	(739.091)	Expenses
Laba sebelum pajak	33.343	121.929	103.426	137.104	(94.452)	Income before tax
(Beban) manfaat pajak	(5.807)	(30.105)	(28.786)	(35.311)	12.830	Tax (expense) benefit
Laba setelah pajak	27.536	91.824	74.640	101.793	(81.622)	Income after tax
Pendapatan komprehensif lain	3.809	2.234	(2.847)	(19.366)	36.571	Other comprehensive income
Laba komprehensif	31.345	94.058	71.793	82.427	(45.051)	Comprehensive income
LAPORAN POSISI KEUANGAN			STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION			
Kas dan setara kas	2.461.933	2.645.625	1.025.744	3.538.279	3.965.964	Cash and cash equivalents
Surat berharga dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	366.332	268.808	905.166	2.428.246	2.967.385	Securities and marketable securities purchased under resale agreement
Investasi saham	-	167.925	144.566	114.106	-	Equity Investments
Pinjaman diberikan	993.489	1.610.886	3.371.328	4.569.601	5.690.847	Loans
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.184)	(19.005)	(28.426)	(60.732)	(144.887)	Allowance for impairment losses
Aset pajak tangguhan	30.446	31.000	27.589	22.349	61.313	Deferred tax assets
Lain-lain	16.448	44.009	63.022	178.912	431.783	Others
Jumlah aset	3.865.463	4.749.248	5.508.989	10.790.761	12.972.405	Total assets
Utang lain-lain dan beban masih harus dibayar	19.510	50.460	44.576	45.217	30.151	Other payables and accrued expenses
Pinjaman diterima	-	348.566	528.355	4.281.483	6.544.571	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	2.031.864	2.441.210	2.720.354	2.628.137	2.622.652	Subordinated loans
Penerbitan obligasi	-	-	-	1.519.933	1.521.722	Bond issuance
Lain-lain	4.419	5.285	7.629	25.490	28.218	Others
Jumlah liabilitas	2.055.793	2.845.521	3.300.914	8.500.260	10.747.314	Total Liabilities
Modal saham	1.175.000	1.770.868	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Capital Stock
Tambahan modal disetor	17.500	26.378	29.800	29.800	29.800	Additional paid-in capital
Uang muka modal saham dipesan	604.746	-	-	-	-	Advances for capital stock subscription
Pendapatan komprehensif lain	3.123	5.302	2.165	(16.683)	21.283	Other comprehensive income
Laba ditahan (akumulasi kerugian)	9.300	101.179	176.110	277.384	174.008	Retained earnings (deficit)
Jumlah ekuitas	1.809.669	1.903.727	2.208.075	2.290.501	2.225.091	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	3.865.463	4.749.248	5.508.989	10.790.761	12.972.405	Total liabilities and equity
Pengembalian terhadap ekuitas	1,8%	4,9%	3,6%	4,5%	(3,6)%	Return on equity
Pengembalian terhadap aset	0,9%	2,1%	1,4%	1,3%	(0,7)%	Return on assets
Rasio utang terhadap ekuitas	1,12x	1,47x	1,47x	3,66x	4,80%	Debt to equity ratio

Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights Chart



Pencapaian Penting IIF

IIF's Notable Achievements



PEMENANG: Asia Pacific M&A 2017

Penghargaan dari IJGlobal
Proyek: Pembiayaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan kapasitas 227 MW di Jawa Barat.

WINNER: Asia Pacific M&A 2017

Awards from IJGlobal
Financing of 227 MW Chevron Geothermal Power Plant in West Java



LNG Tangguh - Papua

Menerima penghargaan dari Finance Asia, Hongkong - Kategori Best Project Financing 2016

LNG Tangguh - Papua

Received Awards from Finance Asia, Hongkong - Best Project Financing 2016



Komodo Bond

IIF berpartisipasi dalam Obligasi dengan denominasi rupiah pertama yang dicatatkan di London Stock Exchange. Hasil Obligasi ini akan digunakan untuk membiayai rencana ekspansi JSMR untuk membangun jalan tol mereka menjadi 1.260 km pada 2019.

Komodo Bonds

IIF participated in the first Rupiah denominated Global Bonds listed in the London Stock Exchange. The net proceed of this issuance is allocated to finance JSMR's expansion plan to extend their toll road network to 1,260 km by 2019.



Proyek Air Transaksi M&A

Nilai proyek terbesar untuk jasa financial advisory untuk proyek air transaksi M&A senilai USD 92,87 juta atau setara dengan Rp1,24 triliun.

Water Project M&A Transaction

The largest deal for IIF's financial advisory services for a water project M&A transaction worth USD 92.87 million or equivalent to Rp1.24 trillion.



Kemitraan Strategis Baru dengan JICA

Menandatangani perjanjian utang dengan Japan International Corporation Agency (JICA) senilai JPY 8.000.000.000.

New Strategic Partnership with JICA

Signed loan agreement with Japan International Corporation Agency (JICA) at the amount of JPY 8,000,000,000.

02

Laporan Manajemen **Management Report**

- 8 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report
- 14 Laporan Direksi
Board of Directors Report



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Di tahun 2017, IIF berhasil memperoleh 14 kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp3.965 miliar, sehingga total gross commitment menjadi Rp14.485 miliar di akhir tahun 2017. Adapun proyek unggulan di tahun ini adalah proyek pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 227 MW berlokasi di Jawa Barat.

In 2017, IIF succeeded to acquire 14 new financing commitments worth Rp3.965 billion in total, making the aggregate gross commitment Rp14.485 billion at the end of 2017. While the flagship project this year was the financing of the geothermal power plant project with the capacity of 227 MW located in West Java.

M. Chatib Basri

Presiden Komisaris - Komisaris Independen

President Commissioner - Independent Commissioner

Para Pemegang Saham yang Terhormat, Dear Shareholders,

Di tengah berbagai tantangan ekonomi baik global dan nasional yang terjadi, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa kami dapat melalui tahun 2017 dengan tetap menjaga performa bisnis yang seimbang serta menguatkan fondasi bisnis melalui kebijakan-kebijakan strategis yang diperlukan.

Tahun 2017 sendiri merupakan tahun yang cukup menantang bagi IIF. Dari segi kinerja keuangan, Perusahaan mengalami hambatan pertumbuhan yang didorong oleh tingginya jumlah risiko kredit yang mengharuskan Perusahaan melakukan pencadangan keuntungan dalam menghindari kerugian yang

Despite challenging global and national economic conditions, we are grateful that with the grace of God the Almighty, we are able to maintain our balanced business performance and strengthen the foundation through the implemented strategic programs.

2017 was indeed a pretty challenging year for IIF. Financial-wise, the Company's growth was quite challenged by the high rate of credit risk that required the Company to make provisioning in order to minimize material loss. Credit risk faced in 2017 mainly derived from poor debtor's performance that led to high NPL

dalam. Risiko kredit di tahun 2017 terjadi akibat terdapat beberapa kinerja debitur yang tidak sesuai dengan harapan dan berimplikasi terhadap tingginya *Non Performing Loan* (NPL) melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengamatan Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko terhadap laporan yang disampaikan Direksi Perusahaan, meskipun NPL Perusahaan meningkat namun angkanya masih dalam keadaan terkendali. Hal ini dapat dilihat dari NPL Gross yang tercatat sebesar 3,6% dan NPL Net sebesar 2,5%.

Di sisi lain, penurunan kinerja keuangan hanya disebabkan oleh tingginya beban provisi dan pencadangan namun tidak dari sisi realisasi komitmen pembiayaan yang tetap memuaskan. Hingga 31 Desember 2017, IIF bahkan dapat memenuhi target komitmen yang ada. Hal tersebut didorong oleh masih tingginya angka realisasi proyek infrastruktur baik dalam bentuk pembangunan proyek baru maupun pengembangan.

Tentunya pemerintah semakin serius untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi dan daya saing yang distimulus melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air demi terbentuknya daya saing yang tinggi. Keseriusan tersebut didorong oleh cita-cita untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2019.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Dari aspek pemenuhan Rencana Kerja dan Anggaran, Direksi telah melakukan upaya maksimal dalam merealisasikan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dalam rapat gabungan yang dilaksanakan tiap triwulannya, jumlah kesepakatan pembiayaan yang dicapai terus mengalami peningkatan. Di tahun 2017, IIF berhasil memperoleh 14 kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp3.965 miliar, sehingga *total gross commitment* menjadi Rp14.485 miliar di akhir tahun 2017. Adapun proyek unggulan di tahun ini adalah proyek pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga geothermal dengan kapasitas 227 MW berlokasi di Jawa Barat.

Terkait penurunan laba usaha yang didorong oleh faktor NPL, Dewan Komisaris menilai bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali operasional Perusahaan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang tidak dapat dimitigasi. Dengan adanya NPL tersebut, terjadi peningkatan dari segi provisi yang cukup

rate which was above the set target. Nevertheless, based on the observation of the Board of Commissioners and the Risk Management Committee on the report submitted by the Board of Directors, the Company's Non Performing Loan (NPL) rate was still within the normal range despite the increasing figure from last year. This can be seen from NPL Gross that was recorded at 3.6% and NPL Net at 2.5%.

On the other hand, the declining financial performance was only attributed to high provision expenses, while the realization of the Company's financing commitment remained satisfactory. As of 31 December 2017, IIF even managed to achieve its commitment target. This is supported by a significant number of infrastructure project realizations, be it new project construction or project expansion.

The government is certainly getting more serious in increasing production capacity and competitiveness by ensuring infrastructure development growth all across regions to stimulate high competitive edge. This is predominantly driven by the ambition to realize 5.4% economic growth in 2019.

ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

With regards to the aspect of the Work Plan and Budget fulfillment, the Board of Directors has performed its best to carry out the plan. Based on the evaluation results in quarterly joint meetings, there was an encouraging increment in the number of financing deals. In 2017, IIF succeeded to acquire 14 new financing commitments worth Rp3,965 billion in total, making the aggregate gross commitment Rp14,485 billion at the end of 2017. While the flagship project this year was the financing project of geothermal power plant with the capacity of 227 MW located in West Java.

Speaking of the decrease in operating profit caused by NPL, the Board of Commissioners believes that it was all beyond the Company's operational control and caused by numerous factors that are unable to mitigate. High rate of NPL led to the rising provision and decreasing investment value. However,

banyak dan tambahan pengurangan nilai investasi. Namun Dewan Komisaris melihat, secara fundamental IIF masih memiliki kemampuan yang baik dalam menopang dampak yang diakibatkan oleh faktor NPL maupun beban keuangan lainnya melalui strategi keuangan yang tepat.

Dewan Komisaris juga menyimpulkan bahwa debitur yang performanya kurang baik bukan berasal dari debitur yang komitmennya dilakukan di tahun lalu. Dengan demikian, secara proses bisnis kami menganggap Direksi telah menjalankan proses bisnis yang sesuai dan mengedepankan kaidah kehati-hatian. Hanya saja dengan terjadinya perubahan situasi, kondisi yang dihadapi oleh IIF tidak dapat terantisipasi dengan maksimal. Untuk itu, Dewan Komisaris berpandangan bahwa proses Restrukturisasi terhadap pembiayaan yang mengalami NPL yang diambil oleh Direksi merupakan langkah yang tepat dalam menciptakan kinerja keuangan yang lebih baik di masa depan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada tahun buku 2017, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi beserta jajaran terkait di bawahnya telah memenuhi arahan terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan IIF. Direksi Perusahaan telah melakukan peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan melakukan internalisasi atas standar *compliance* yang ada, baik yang berasal dari regulator maupun dari Pemegang Saham yang diberlakukan pada masing-masing unit kerja di IIF.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpendapat peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan telah berjalan secara proporsional baik dalam hal kesiapan infrastruktur maupun *soft structure* tata kelola. Selain aspek kesiapan, implementasinya pun telah berjalan dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan IIF dalam menjalankan mekanisme tata kelola yang baik dapat dilihat dari adanya pengakuan dari Bank Dunia berupa tambahan pinjaman subordinasi sebesar USD200 juta yang diberikan kepada IIF, yang hanya bisa didapatkan dengan memenuhi standar audit tata kelola yang telah ditetapkan.

the Board of Commissioners observes that fundamentally, IIF is well-equipped to overcome the impacts arising from the NPL and other financial burdens through the appropriate financial strategy.

The Board of Commissioners also views that debtors with poor performance are not those whose commitments were implemented last year. As such, in terms of business process, we view that the Board of Directors has properly performed the business process and carried out prudential principles. Nevertheless, due to the situational circumstances IIF faced conditions which could not be fully anticipated. To that end, the Board of Commissioners agrees that the restructuring process regarding the NPL, carried out by the Board of Directors was the best way to create a better financial performance in the future.

OPINION ON CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

In the 2017 fiscal year, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors and its related subordinates has implemented its directives in carrying out Good Corporate Governance (GCG) in IIF. The Company's Board of Directors has improved the implementation of GCG by internalizing the existing compliance standards from both the regulator and Shareholders as applied to each unit in IIF.

Holistically, the Board of Commissioners views that the quality of the GCG implementation in the Company is improving proportionally in terms of readiness of its infrastructure as well as its soft structure. One of the factors indicating IIF's success in undertaking good governance mechanism is by obtaining additional subordinated loan worth USD200 million from the World Bank. This loan was granted to IIF by being able to meet the corporate governance audit standard.

Di masa yang akan datang, Dewan Komisaris akan terus mendorong IIF untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perusahaan tidak hanya bersandar pada aspek pemenuhan regulasi yang ada (*compliance*) namun juga dapat menjadi budaya Perusahaan untuk diterapkan secara berkesinambungan.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perusahaan dalam melakukan aktivitas pengawasan dan pemberian saran dibantu oleh Komite-Komite yang berada langsung di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris menilai, keseluruhan komite tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan pandangannya kepada Direksi. Secara sistem, Komite-Komite Dewan Komisaris secara aktif dan profesional melaksanakan rapat internal rutin dalam melakukan pembahasan terkait ruang lingkup tanggung jawabnya.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris bersama-sama Direksi telah melakukan kajian terkait prospek usaha IIF untuk tahun-tahun mendatang baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Melihat dari laporan kinerja di tahun 2017, beberapa analisis makro terkait tren ekonomi global-nasional, serta kebijakan moneter dan fiskal yang ada, kami berpendapat bahwa prospek industri pembiayaan infrastruktur di masa mendatang akan semakin strategis. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah masih menempatkan belanja infrastruktur sebagai komponen yang memiliki alokasi tinggi setelah sektor pendidikan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun di tahun 2018 atau tumbuh sebesar 5,8% dari tahun 2017. Untuk merealisasikan target pembangunan yang ada, diperlukan peran swasta dalam berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas ruang fiskal Pemerintah yang terbatas. Secara regulasi, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang membuka ruang bagi swasta untuk masuk ke dalam sektor infrastruktur. Dengan kondisi tersebut, peluang usaha yang dijalankan IIF ke depan akan semakin menarik.

In the future, the Board of Commissioners will continue to encourage implementation of good corporate GCG that aims principally to make it a culture that will be continuously applied instead of merely a fulfillment of regulations (*compliance*).

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In conducting supervisory and advisory roles, the Company's Board of Commissioners is supported by Committees under the Board of Commissioners, namely Audit Committee, Investment Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Oversight Committee. The Board of Commissioners considers that the entire committee has performed its functions well in assisting the Board of Commissioners in giving insights to the Board of Directors. These committees have also performed the established mechanism to actively and professionally conduct regular internal meetings to discuss matters related to their responsibilities.

OVERVIEW ON BUSINESS OUTLOOK

The Board of Commissioners together with the Board of Directors have conducted study related to IIF's business prospects in the upcoming years, either for the short, medium and long term. Looking at the performance report in 2017 as well as several macro analyses on global-national economic trend and the existing monetary and fiscal policy, we are of the opinion that the future prospects of the infrastructure finance industry is getting significant in the market. Based on 2017 State Budget, the government still allocates a considerable amount of budget for infrastructure expenditure after education sector.

In 2018, the Government has allocated Rp410,7 trillion or an increase of 5.8% from 2017 for infrastructure. Such budget allocation is insufficient to achieve the infrastructure development target. Thus, the private sector's involvement in investing for infrastructure project is necessary considering the limited fiscal space of the Government. From a regulatory point of view, the Government has enacted a law which opens up the opportunity for the private sector to engage in the infrastructure business. Given this situation, IIF's business outlook is getting attractive.

PEMBERIAN ARAHAN KEPADA DIREKSI

Hingga 31 Desember 2017, Dewan Komisaris telah memberikan pandangan serta arahan kepada Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi serta pertemuan-pertemuan lainnya yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan aspek kepatuhan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan pemberian arahan kepada Direksi sepanjang 2017 adalah:

1. 4 kali rapat Dewan Komisaris di kantor Perusahaan;
2. 3 kali *teleconference*;
3. 2 hari kunjungan kerja terhadap beberapa proyek portofolio Perusahaan.

Secara garis besar, Dewan Komisaris telah melakukan arahan kepada Direksi yang berkaitan dengan hal berikut:

1. melaksanakan peran pengawasan dan pengarahan dalam mengelola organisasi dan operasional untuk kepentingan pemegang saham, sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan;
2. mengawasi kebijakan Direksi, termasuk pencapaian atas tujuan Perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
3. mengevaluasi dan memberikan arahan secara berkala atas pelaksanaan dari manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memberikan persetujuan atas perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif mengenai sistem tersebut;
4. melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan bisnis yang terkait dengannya, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2017, terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris IIF yang disahkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 Tgl. 9 Agustus 2017. Melalui keputusan tersebut, Bapak Marwanto Harjowiryo secara hormat dinyatakan tidak lagi menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan dibebaskan dari segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Untuk selanjutnya, dalam keputusan yang sama Perusahaan juga mengangkat Bapak Bhimantara Widyajala sebagai anggota

PROVIDING DIRECTIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Up to 31 December 2017, the Board of Commissioners has given their insights and directions to the Board of Directors through joint meeting with the Board and other valid meeting approved by law. The details on insight-giving activity to the Board of Directors throughout 2017 are as follows:

1. 4 times Board of Commissioners meetings at the Company's office;
2. 3 times teleconference meetings;
3. 2-day work visits to a few of the Company's portfolio project.

In general, the direction from the Board of Commissioners is related to the following matters:

1. conducting supervisory and advisory functions in managing the organization, business and operations for the interests of shareholders, in line with the Company's vision, mission and goals;
2. supervising Board of Directors' policies, achievement of the Company and compliance with the prevailing laws and regulations;
3. periodically evaluating and providing advice regarding risk management implementation and internal control system, and giving approval for the required changes or corrective actions that must be taken regarding the system;
4. performing duties for the sake of the Company and related business, by taking into account the needs and interests of all stakeholders.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In 2017, the composition of IIF's Board of Commissioners changed and was ratified in Circular Resolution of Shareholders No. 07 dated August 9, 2017. Based on the decision, Mr. Marwanto Harjowiryo is honorably dismissed as the Company's member of the Board of Commissioners and is exempted from all duties and responsibilities. Furthermore, the decision also resolves to appoint Mr. Bhimantara Widyajala as the Company's member of the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris Perusahaan. Saya mewakili seluruh jajaran Dewan Komisaris Perusahaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Marwanto Harjowiryo atas masukan, saran serta arahan yang diberikan selama ini kepada Perusahaan. Selanjutnya, kami ucapkan selamat atas diangkatnya Bapak Bhimantara Widyajala sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Dengan perubahan komposisi ini, kami berharap Dewan Komisaris Perusahaan tetap mampu memertahankan meningkatkan kinerja pengawasan dan pemberian saran bagi kemajuan IIF di masa mendatang.

PENUTUP

Mewakili seluruh jajaran Dewan Komisaris Perusahaan, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemegang Saham atas dukungan serta masukan yang diberikan sepanjang 2017 dalam rangka penguatan visi bisnis IIF secara berkelanjutan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada jajaran Direksi atas kerja keras dan komitmen yang begitu luar biasa dicurahkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, guna mengurangi implikasi negatif dan menyeimbangkan kinerja bisnis hingga akhir tahun buku 2017. Kami berharap, dinamika yang dihadapi IIF di tahun 2017 akan semakin memperkuat kapabilitas IIF dalam menjalankan kegiatan usaha di tahun-tahun mendatang dalam rangka menuju visi bisnis IIF di sektor infrastruktur.

On behalf of the Board of Commissioners, I would like to thank Mr. Marwanto Harjowiryo for his input, suggestions and assessment thus far to the Company. Furthermore, we wish to congratulate Mr. Bhimantara Widyajala as a member of the Company's Board of Commissioners. With this new composition, we hope that the Company's Board of Commissioner's organs will be able to maintain and even improve our supervisory and advisory performance for IIF's development in the long run.

CLOSING

On behalf of the Company's Board of Commissioners, I would like to extend our gratitude to all Shareholders for their support and input throughout 2017 in order to sustainably strengthen IIF's business vision. I also wish to thank the Board of Directors for their hard work and extraordinary commitment to overcome the challenges in order to mitigate adverse impact and balance business performance until the end of fiscal year 2017. We hope that the dynamics IIF faced throughout the course of the year can further support IIF in undertaking its business going forward towards realizing its vision in the infrastructure sector.

Jakarta, Maret / March 2018

Atas nama Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



M. Chatib Basri

Presiden Komisaris - Komisaris Independen
President Commissioner - Independent Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Posisi IIF sebagai entitas bisnis di sektor pembiayaan juga masih sangat strategis, dengan kompetensi yang dimiliki serta integrasi atas layanan yang dibutuhkan, IIF dapat menempatkan dirinya sebagai lembaga utama yang dapat mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur sebagai pendamping dan alternatif dari lembaga perbankan.

IIF's position as a business entity in the financing sector also remains strategic. Supported by our competence and integrated services, IIF is already well-placed to excel as the primary institution that provides financing support for many infrastructure projects while serving as an advisor and alternative for clients to choose among banking institutions.

ARISUDONO SOERONO

Presiden Direktur & CEO

President Director & CEO

Pemegang Saham dan Pemangku kepentingan yang terhormat,

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Bersama laporan ini, mewakili seluruh jajaran Direksi perkenankan saya untuk menyampaikan laporan kinerja usaha yang dijalankan IIF sepanjang tahun 2017. IIF senantiasa berupaya untuk terus menempatkan posisinya sebagai katalisator dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan dilakukan secara berkelanjutan.

Berkaca pada situasi dan performa kinerja sepanjang tahun, tahun ini menjadi tahun yang penuh tantangan serta menimbulkan tekanan yang cukup berat bagi Perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perubahan dinamika di beberapa sektor, yang secara langsung mempengaruhi kinerja klien IIF dan ujungnya berdampak terhadap kinerja IIF.

On behalf of the Board of Directors of IIF, I would like to present the report that covers the Company's business performance over the year of 2017. IIF strives to continuously maintain its position as the catalyst of infrastructure financing in Indonesia in a sustainable manner.

Reflecting on the situation and business performance throughout the year, 2017 was quite a challenging period for us. The Company had to endure heavy pressure which was attributed to several changes and dynamics in a number of sectors that directly affected the performance of our clients and IIF itself.

Meski demikian, kami melihat dan menyikapi hal-hal tersebut sebagai suatu dinamika dan proses yang akan membentuk kekuatan fondasi usaha IIF di masa mendatang. IIF telah melakukan beberapa inisiatif strategis yang diperlukan seperti penguatan fondasi keuangan dengan meningkatkan kontribusi *fee-based income* melalui pengembangan layanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar, memformulasikan strategi pengelolaan aset yang lebih produktif, meningkatkan mekanisme *monitoring* risiko usaha dan sistem, serta melakukan penguatan terhadap struktur modal maupun pendanaan.

KINERJA PERUSAHAAN

Kinerja Keuangan

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2017, IIF berhasil membukukan pendapatan operasional senilai Rp759,8 miliar, beban operasional senilai Rp648,9 miliar serta laba sebelum pencadangan senilai Rp110,9 miliar. Untuk menjaga posisi keuangan agar tetap solid, IIF telah meningkatkan jumlah beban pencadangannya atas kerugian penurunan nilai aset keuangan menjadi Rp205,3 miliar pada tahun 2017 sehingga membukukan kerugian sebesar Rp81,6 miliar setelah memperhitungkan manfaat pajak sebesar Rp12,8 miliar.

Kontribusi pendapatan terbesar IIF di tahun 2017 berasal dari pendapatan dari segmen usaha pembiayaan yang tumbuh sebesar 26% dari tahun 2016. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan oleh penarikan dana atas komitmen yang dibukukan di akhir tahun 2016 serta kontribusi dari komitmen yang terealisasi di tahun 2017. Namun, dari kinerja keuangan, Perusahaan mengalami hambatan dalam mempertahankan tingkat labanya. Hal tersebut disebabkan oleh keperluan untuk melakukan pencadangan dan penilaian nilai wajar investasi yang pada gilirannya berdampak negatif kepada laba IIF di tahun 2017. Manajemen berpandangan bahwa pencadangan dan penilaian ulang nilai investasi yang dilakukan, walaupun berdampak negatif di 2017, justru akan memperkuat neraca IIF di tahun-tahun mendatang.

Nevertheless, we face those challenges as dynamic in business and a process through which we can strengthen IIF's business foundation for the upcoming years. To that end, IIF has responsively addressed to this challenging situation by taking various strategic initiatives essential to the improvement of the business. For instance, IIF has strengthened the financial foundation by increasing the contribution of fee-based income through service development that are tailored to the market needs, devising a more productive asset management strategies, improving business risk monitoring mechanisms and systems, and solidifying our capital and financing structure.

PERFORMANCE OF THE COMPANY

Financial Performance

Based on financial statements for the year, IIF managed to record operating income amounting to Rp759.8 billion operating expenses amounting to Rp648.9 billion and pre-provision profit amounting to Rp110.9 billion. To maintain solid financial position, IIF increased its allowance expense for impairment losses on financial assets to Rp205.3 billion in 2017 which resulted in a loss of Rp81.6 miliar after calculating the tax benefits of Rp12.8 billion.

The largest contributor to IIF's revenue in 2017 was the financing business segment which grew by 26% compared to 2016. This increase was due to the withdrawal of funds on financing contracts posted at the end of 2016 as well as contributions from contracts realized in 2017. However, it was also quite a challenge for the Company to maintain its revenue growth. The Company needed to create provision and reevaluate fair investment value which in turn negatively affected IIF's profit in 2017. The management views that despite the unfavorable effect to the financial performance during the year, the provision-making and revaluation of investment value are actually forming an even solid foundation for IIF's balance sheet going forward.

Perlu dicatat bahwa dari 34 proyek yang didanai IIF, hanya satu proyek yang tercatat ke dalam *non-performing loan*. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum portfolio pembiayaan IIF berada dalam kondisi yang sehat.

Beberapa langkah yang dilakukan IIF dalam menyikapi kondisi tersebut adalah dengan meningkatkan peran aktif treasury dalam menyeimbangkan keuangan Perusahaan, serta memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja proyek-proyek yang didanai.

Selain itu, IIF juga melakukan *rebalancing* terhadap portfolio pendanaan perusahaan, untuk lebih dapat menghasilkan *cost of fund* yang lebih efisien.

Kinerja Investasi dan Advisory

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kinerja investasi IIF di tahun 2017 justru menunjukkan performa yang membanggakan. Secara historis, total komitmen yang dibukukan IIF sejak awal pendirian terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2017, IIF berhasil meningkatkan komitmen sebesar Rp3,97 triliun. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian di tahun 2016, dimana penambahan komitmen pada tahun 2016 adalah IDR3.7 triliun.

Dari segi penarikan (*drawdown*) komitmen, IIF masih mengalami kendala dalam rangka mempercepat klien melakukan penarikan. Hal tersebut mengingat karakteristik segmen *project finance* dengan durasi proyek yang panjang sehingga seluruh penarikan dana pembiayaan tidak dapat dilakukan dalam sekali penarikan melainkan dilakukan secara bertahap. Untuk mengantisipasi hal tersebut, IIF memiliki tim *project supervision* yang bertujuan menjaga hubungan dengan klien sehingga mendorong percepatan penarikan.

Secara keseluruhan, pasar investasi pembiayaan infrastruktur di tahun 2017 cukup menantang dan berjalan dengan dinamis. Meski demikian, IIF tidak serta merta bergantung pada proyek-proyek KPBU semata, potensi pasar pembiayaan infrastruktur masih memberikan peluang yang tinggi bagi Perusahaan. Posisi IIF sebagai entitas bisnis di sektor pembiayaan juga masih sangat strategis, dengan kompetensi yang dimiliki serta integrasi atas layanan yang dibutuhkan, IIF dapat menempatkan dirinya sebagai lembaga utama yang dapat mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur sebagai pendamping dan alternatif dari lembaga perbankan.

It is also important to note that non-performing loan recorded this year only came from one project out of 34 other projects that IIF financed. This shows that IIF's overall financing portfolio is truly in a healthy state.

In response to such conditions, we strived to actively increase significant contribution of the treasury in offsetting the Company's financial structure as well as more intensively supervise and monitor the performance of projects being financed.

To complement the above strategy, IIF also rebalanced the company's financing portfolio to seek more efficient cost of fund.

Investment and Advisory Performance

As previously mentioned, investment performance of IIF turned out to demonstrate more satisfactory results this year. Historically, the total commitment recorded by IIF since its establishment has been steadily improving. In 2017, IIF has achieved an additional commitment of Rp3,97 trillion. This achievement is higher than 2016, whereas the additional commitment throughout 2016 was Rp 3.7 trillion.

In terms of commitment drawdown, IIF experienced various issues in relation to its purpose in accelerating clients' drawdown. This challenge was closely linked to the characteristics of project finance segment having a long realization duration, which led to gradual drawdown of fund instead of lump sum withdrawal. To anticipate this situation, IIF then established a project supervision team that would closely maintain relationship with the clients so that drawdown was expected to be realized ahead of schedule.

Broadly speaking, the infrastructure financing investment market in 2017 remained challenging and dynamic. However, we did not merely rely on this kind of project, as the infrastructure financing market continued to offer appealing opportunities for the Company. IIF's position as a business entity in the financing sector also remains strategic. Supported by our competence and integrated services, IIF is already well-placed to excel as the primary institution that provides financing support for many infrastructure projects while serving as an advisor and alternative for clients to choose among banking institutions.

Performa yang memuaskan juga terjadi pada segmen *advisory* yang mampu membukukan pendapatan sebesar Rp17 miliar. Selain karena kerja keras dalam memasarkan *advisory*, peningkatan pendapatan ini juga didorong oleh upaya Perusahaan dalam memperhatikan basis biaya yang dikeluarkan. Untuk mengatasi kekurangan performa *transaction advisory* dikarenakan proses yang cukup panjang serta berimplikasi dari segi pendapatan, IIF di tahun 2017 menghadirkan keberagaman layanan. Di tahun ini, *advisory* menghadirkan layanan *Merger & Acquisition Advisory* (M&A) mengingat semakin dibutuhkannya jasa tersebut di sektor infrastruktur dewasa ini. Selain M&A, IIF juga menyediakan jasa pendampingan dalam melakukan penyusunan *corporate strategy* dan *corporate finance* dan penggalangan dana (*fundraising*).

PENDUKUNG BISNIS

Pengembangan Berkelanjutan Manajemen Risiko

Perhatian yang mendalam atas pengelolaan risiko Perusahaan terus ditingkatkan IIF sepanjang tahun 2017. Mengingat ruang lingkup usaha IIF yang berfokus pada sektor pembiayaan, penyesuaian secara berkelanjutan terhadap kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) menjadi bagian dari rencana strategis IIF dalam menjaga kualitas aset hingga operasional Perusahaan terhadap potensi risiko yang ada.

Fondasi pengelolaan risiko IIF juga tidak hanya bersandar pada prosedur yang dimiliki serta kapabilitas unit kerja manajemen risiko dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran dan penetapan batas risiko (*risk tolerance* dan *risk appetite*), namun secara berkesinambungan juga aktif dalam melakukan implementasi pengelolaan risiko dengan melibatkan organ-organ pengambil keputusan dan pengawasan guna menciptakan *checks and balances* pengelolaan risiko di IIF. Mengacu pada kerangka kerja ERM yang diterapkan, IIF senantiasa melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengawasan risiko dengan didukung oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) pada masing-masing organ sehingga berimplikasi pada penguatan pengelolaan risiko di Perusahaan. Peran yang diberikan oleh organ tersebut mampu memberikan inisiatif strategis dalam pelaksanaan maupun pemberian masukan terkait pengembangan pengelolaan risiko yang dibutuhkan. Di tahun 2017 IIF, memprakarsai beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan risiko.

Advisory segment also delivered a satisfactory performance with Rp17 billion of income recorded for the year. Aside from the fruit of hard work in marketing advisory service, this revenue growth was also a result of the Company's careful spending management. In order to anticipate below-expectation performance of transaction advisory due to its extensive series of process that consequently impacted on revenues, in 2017, IIF brought diverse services in the advisory business. This year, we offered Merger & Acquisition Advisory (M&A) service considering the growing demand for merger and acquisition in the infrastructure sector nowadays. Aside from M&A service, IIF also provided an assistance service in composing corporate strategy, corporate finance and fundraising.

BUSINESS SUPPORTS

Sustainable Development on Risk Management

IIF continued to sharpen its focus on the Company's risk management throughout the year. As its business scope centers on the financing sector, IIF strives to sustainably adjust its Enterprise Risk Management (ERM) as part of its strategic plans to maintain its asset quality and operations as well as business pillars against risk potential.

IIF's risk management foundation is built not only on the existing procedure and the capability of risk management work unit to run risk identification, measurement, and threshold determination processes (*risk tolerance* and *appetite*), but also on the consistency to actively implement risk management where decision-makers and supervising organs are actively engaged in order to create checks-and-balances in IIF's risk management activities. Referring to the existing ERM framework, IIF always involves the Board of Commissioners and the Board of Directors in the course of its risk management where each organ is supported by a Risk Management Committee to further strengthen risk management practices in the Company. Both organs play a significant role in initiating strategic risk management programs and providing input related to risk management activities under pipeline. In 2017, IIF initiated several programs aimed at enhancing capacity and risk management capabilities. In terms of financing risks, the Company conducted several programs, among others, reviewing and updating the existing Risk Rating System to

Dari segi risiko pembiayaan, Perusahaan melakukan beberapa hal diantaranya peninjauan terhadap *Risk Rating System* yang saat ini digunakan untuk dilakukan pengkinian kedepannya, kerja sama dengan Pefindo Biro Kredit guna membuka akses bagi IIF atas kebutuhan sistem informasi manajemen risiko dalam melakukan penilaian calon debitur, serta melakukan pembaruan terhadap *Sector Allocation Guidelines* dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan di masa depan sembari mempertahankan *portfolio risk* yang diinginkan.

Dari segi kompetensi IIF terkait pengelolaan risiko berbasis Sosial dan Lingkungan (*Social and Environment / S&E*) di tahun 2017, Perusahaan terus melakukan *monitoring* secara aktif terhadap proyek-proyek yang dibiayai. Pada beberapa proyek, IIF bahkan menggandeng konsultan eksternal untuk ikut melakukan pendampingan dan pemberian saran kepada proyek yang telah dibiayai agar prinsip-prinsip S&E dapat terpenuhi secara baik dan menciptakan aspek keberlanjutan pada proyek tersebut. Meskipun masih terdapat kendala yang diakibatkan oleh tidak terbiasanya penerapan S&E di dalam negeri, IIF sebagai satu-satunya institusi pembiayaan infrastruktur di Indonesia yang memiliki spesialisasi tersebut berupaya secara maksimal untuk terus melakukan edukasi secara simultan.

Salah satu bentuk upaya IIF dalam melakukan edukasi S&E yaitu melalui program-program *capacity building* yang diadakan. Selain melakukan edukasi, IIF senantiasa mendorong terbangunnya tren S&E dalam setiap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri sebagaimana yang terjadi secara global saat ini. Sisi positif dari terciptanya tren tersebut selain dapat menciptakan harmonisasi, hal lain yang dapat dirasakan adalah semakin mudahnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor ini dalam memperoleh investor atau pembiayaan dari luar negeri (*international funding*).

Mencetak Profesional di Sektor Pembiayaan Infrastruktur

Rencana pengembangan SDM IIF telah dilakukan secara bertahap dengan sangat baik dan sesuai pada kebutuhan di tiap fasenya. Di tahun 2014-2015 seiring dengan organisasi IIF yang semakin solid serta mulai banyaknya proyek-proyek yang ditangani, IIF melakukan perekrutan SDM berlatar belakang profesional guna mengejar kebutuhan yang ada. Setelah

cater to current market conditions, forging partnership with Pefindo Biro Kredit to open access for IIF to fulfill its risk management information system needs that will help IIF in assessing debtor's quality, as well as updating Sector Allocation Guidelines in order to accommodate financing needs for the upcoming years while maintaining the expected risk portfolio.

In terms of IIF's competence related to Social & Environment (S&E) based risk management in 2017, the Company continued to actively monitor the projects it financed. In some projects, IIF even collaborated with an external consultant so that they can provide assistance and advice for the financed projects regarding how to comply with S&E principles and create sustainability on the projects. Despite challenges during the process as S&E adoption is not yet common in business practice nationally, as the only infrastructure finance institution having specialization in that field, IIF is always ready to give its best to simultaneously educate people about S&E.

Among the Company's efforts in educating people on S&E is the implementation of capacity building program. In addition to education itself, IIF has always taken part to promote S&E in every infrastructure project execution at home to keep up with the global trend. Aside from business-social-and environmental harmony resulting from the adoption of S&E trend, companies in Indonesia engaged in the infrastructure sector begin to experience the benefit of having added value to the project, resulting in them acquiring international funding more easily.

Molding Professionals in the Infrastructure Finance Sector

IIF's stage-by-stage human resource development plan has been realized well according to the needs in each phase. In 2014-2015 alone, along with the more solid organization and the many projects being handled, IIF had recruited several qualified professionals to accommodate business needs. After strengthening the composition and structure of its workforce,

Dari segi kompetensi IIF terkait pengelolaan risiko berbasis Sosial dan Lingkungan (*Social and Environment / S&E*) di tahun 2017, Perusahaan terus melakukan monitoring secara aktif terhadap proyek-proyek yang dibiayai. Pada beberapa proyek, IIF bahkan menggandeng konsultan eksternal untuk ikut melakukan pendampingan dan pemberian saran kepada proyek yang telah dibiayai agar prinsip-prinsip S&E dapat terpenuhi secara baik dan menciptakan aspek keberlanjutan pada proyek tersebut.

In terms of IIF's competence related to Social & Environment (S&E) based risk management in 2017, the Company continued to actively monitor the projects it financed. In some projects, IIF even collaborated with an external consultant so that they can provide assistance and advice for the financed projects regarding how to comply with S&E principles and create sustainability on the projects.

melakukan penguatan komposisi dan struktur karyawan, di tahun 2016 IIF masuk dalam fase optimalisasi atas struktur SDM guna mengikuti dinamika usaha yang terjadi.

Di tahun 2017, IIF menyadari pentingnya untuk mencetak profesional muda yang memiliki kompetensi khusus di sektor pembiayaan infrastruktur yang andal serta mampu menjawab tantangan di sektor pembiayaan infrastruktur dengan pendekatan dan karakteristik usaha yang dimiliki IIF begitu juga dalam mempersiapkan regenerasi yang terukur kedepannya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, IIF melakukan strategi pengelolaan SDM berbasiskan program pengembangan profesional.

Menindaklanjuti rencana tersebut, IIF telah melaksanakan *Officer Development Program* (ODP) yang telah merekrut sebanyak lima (5) orang calon profesional di sektor pembiayaan infrastruktur. Dengan pendampingan dari praktisi maupun profesional senior, IIF berharap regenerasi dapat berlangsung secara baik serta mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan dalam aspek pemasaran produk pembiayaan infrastruktur. Perlu disampaikan bahwa program ODP yang diluncurkan melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ternama tersebut menuai minat yang sangat tinggi dari lulusan perguruan-perguruan tinggi tersebut.

in 2016, IIF entered the HR structure optimization phase to follow current business dynamics.

IIF realizes the importance of creating young professionals specialized in infrastructure finance sector in 2017, who are competent and able to address infrastructure finance issues with an approach and business characteristics that IIF has introduced, and is currently preparing the measured regeneration system going forward. To that end, IIF has devised HR management strategy based on professional development program.

Following such plan, IIF organized an Officer Development Program (ODP) that resulted in the recruitment of as many as five (5) professional candidates in the infrastructure finance sector. With the assistance from practitioners and senior professionals, IIF hopes that this regeneration can run according to the plan and able to cater to the needs in marketing the infrastructure financing products. It should be pointed out that the ODP program launched through cooperation with several reputable universities has drawn so much interest of many graduates from these colleges.

Operasi dan Teknologi

Pengembangan dari sisi aplikasi terus dilakukan secara berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan, penambahan fitur bisnis, dan penyesuaian dengan aturan dari pihak otoritas. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan dari sisi sistem informasi manajemen juga terus dilakukan secara intensif, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif berlandaskan data aktual.

Dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen risiko, terutama risiko yang berhubungan dengan bencana, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia maupun faktor alam, Perusahaan telah menyusun program *Disaster Recovery Plan* ("DRP") untuk memitigasi terjadinya bencana dan memulihkan gangguan pada infrastruktur teknologi informasi Perusahaan dan telah mengimplementasikan DRC on cloud pada akhir 2016. Pada tahun 2017, IIF melakukan dua kali DRC test untuk melakukan simulasi prosedur penanganan bencana terhadap infrastruktur teknologi informasi dengan melibatkan tim TI, tim Operational Risk tim pengguna Core Systems yaitu Credit Operation, Treasury Operation, Finance & Accounting serta Corporate Planning. Hasil test DRC dinyatakan berhasil yang ditunjukkan dengan aliran data transaksi yang disinkronisasikan secara otomatis dari Data Center ke DRC on Cloud.

Peningkatan Proses Bisnis

Salah satu kegiatan operasi utama IIF adalah menyediakan pembiayaan untuk proyek infrastruktur. Guna memastikan pertumbuhan bisnis investasi yang positif dan alur kerja yang lancar, IIF perlu melaksanakan kegiatan investasi seefisien mungkin dengan tetap menjaga efektivitas kegiatan penilaian risiko. Seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha IIF yang ditandai oleh meningkatnya portofolio investasi, manajemen berpandangan bahwa *Standard Operating Procedure* ("SOP") yang berlaku saat ini dapat ditingkatkan agar dapat mengikuti dinamika perubahan bisnis.

Pada 2017, Manajemen memprakarsai Proyek Peningkatan Proses Bisnis ("Proyek BPI") dengan membentuk sebuah satuan tugas lintas-direktorat. Proyek BPI diadakan untuk membentuk kembali proses kerja yang ada sehingga karyawan dapat bekerja secara efisien dan IIF dapat terus unggul di pasar.

Operations and Technology

The development of applications is continuously conducted to spur the Company's business growth, improve business features, and make adjustments to conform to the regulations issued by the authorities. In line with this, the development of a management information system is also conducted intensively so that the decision-making process can be carried out objectively based on actual data.

In carrying out the risk management system, particularly for disaster-related risks due to human error or force majeure, the Company has developed a Disaster recovery Plan ("DRP") to mitigate such disasters and recover the Company's information technology infrastructure when disaster strikes and the Company has also implemented DRP on cloud at the end of 2016. In 2017, IIF conducted DRC test twice to carry out disaster handling procedure simulation on information technology infrastructure by involving IT team, Operational Risk team, Core Systems user team, namely Credit Operation, Treasury Operation, Finance & Accounting and Corporate Planning. The DRC test result is declared successful as shown by the transaction data flow synchronized automatically from Data Center to DRC on Cloud.

Business Process Improvement

One of IIF's main operating activities is to provide financing to infrastructure projects. To ensure positive investment business growth and smooth workflow, it is necessary that IIF conducts the investment activities as efficiently as possible, whilst still maintaining a robust risk assessment. As IIF continues to grow its business operations with a growing investment portfolio, the management views that the current Standard Operating Procedures ("SOP") can be improved to meet the changing business environment.

In 2017, the Management initiated Business Process Improvement Project ("BPI Project") by establishing a cross-directorate task force. The BPI Project is to re-shape the existing work process in order for the employees to be able to work efficiently and for IIF to be able to stay ahead in the market.

Proyek BPI terdiri dari 2 paket, yaitu: (i) peningkatan proses bisnis investasi dan (ii) penyempurnaan memo kredit. Dengan selesainya Proyek BPI, Manajemen berharap Perusahaan dapat memiliki proses bisnis yang lebih efisien serta *template* memo kredit yang lebih komprehensif yang dapat menghemat waktu dan/atau biaya pemrosesan. Selain meningkatkan efisiensi, proses bisnis yang baru diharapkan dapat membuat IIF lebih responsif terhadap perkembangan pasar.

Pada akhirnya, proses bisnis yang meningkat ini diharapkan dapat membuat kinerja IIF menjadi jauh lebih baik lagi.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Perusahaan pada dasarnya memiliki program 5 (lima) tahunan yang masuk dalam program usaha jangka menengah yang berisi rencana dan strategi bisnis yang terukur di masa mendatang. Tiap tahunnya, IIF melakukan internalisasi atas strategi 5 (lima) tahunan tersebut dalam bentuk strategi tahunan dalam bentuk anggaran dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disesuaikan dengan kondisi bisnis dan dinamika di sektor pembiayaan infrastruktur.

Di tahun 2017, IIF masih melaksanakan beberapa program yang telah dijalankan di tahun sebelumnya seperti program *High-Quality Client*. Perusahaan di tahun ini juga akan menasar pada pengembangan produk yang lebih bersifat junior untuk mengimbangi imbal hasil dari *high quality client*, guna mencapai target pendapatan. Selain itu, IIF juga melakukan pengembangan produk *non-fund based* dan memperluas *fee-based income* seperti menjajaki kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan non-bank lainnya, serta pembuatan produk *credit enhancement*. IIF terus bekerjasama dengan lembaga seperti Bank Dunia dan Green Climate Fund dalam merancang produk yang tepat untuk mempercepat keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

PROSPEK USAHA

Kami menilai prospek usaha IIF di sektor pembiayaan dan *advisory* infrastruktur di masa mendatang masih terbuka luas. Dengan keberagaman produk dan jasa yang ditawarkan, posisi IIF di pasar tentunya masih sangat dibutuhkan.

The BPI Project consist of 2 packages, which are: (i) improvement of investment business proses, and (ii) perfection of credit memo. With the completion of BPI Project, the Management expected the Company to have a more efficient business processes as well as a more comprehensive credit memo templates that can reduce processing time and/or processing cost. Aside from improved efficiency, the new business process is expected to make IIF more responsive to the market.

As the end result, the improved business process is expected to lead IIF into better corporate performance.

COMPANY'S STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

Fundamentally, the Company has a 5 (five)-year program which is incorporated into the mid-term business program containing measured business plan and strategy going forward. Each year, IIF internalizes this 5 (five)-year strategy in the form of annual strategy for budget and Key Performance Indicators (KPIs) tailored to the business conditions and dynamics in the infrastructure financing sector.

In 2017, IIF continued to perform several programs that have been implemented in the previous years, for instance, the High-Quality Client program. This year, the Company also focused on developing junior loan products to offset return from high quality client as part of its strategy to achieve revenue target. In addition, IIF then developed non-fund based products and expanded fee-based income sources by means of making financing deals with other non-bank financial institutions and creating credit enhancement products. IIF continued to maintain its partnership with the World Bank and Green Climate Fund in developing the appropriate product that can stimulate the participation of the private sector in Indonesia's infrastructure development.

BUSINESS OUTLOOK

We remain optimistic on the prospects of the Company in the infrastructure financing and consulting service sectors. With a variety of products and services offered, IIF further strengthens its existence in the market to a higher level. In terms of project

Dari segi produk pembiayaan proyek (*project financing*), kontribusi terbesar saat ini memang masih berasal dari produk pembiayaan tradisional. Nyatanya, IIF sendiri masih memiliki produk dan keahlian pembiayaan *mezzanine* dan *equity* yang saat ini gencar ditawarkan ke pasar. Di tahun mendatang pun IIF akan lebih banyak memasarkan produk baru seperti *Credit Enhancement* yang berperan dalam memberikan peningkatan *credit worthiness* klien sehingga dapat membantu klien dengan profil risiko tinggi dalam mendapatkan bantuan pendanaan dengan bunga yang lebih ringan.

Menilik progres pengembangan infrastruktur Indonesia saat ini, dari beberapa proyek infrastruktur yang digagas, diantaranya tengah masuk masa perampungan dan membutuhkan peralihan dari fase konstruksi ke pengelolaan. Oleh sebab itu, prospek jasa *Transaction Advisory* akan semakin dibutuhkan oleh pasar. Di sisi lain, perkembangan regulasi yang ada saat ini juga memberi kemudahan swasta untuk terjun ke bisnis infrastruktur, sehingga membuka peluang yang besar bagi IIF dalam memasarkan *advisory*. Saat ini, IIF tidak hanya memiliki jasa *Transaction Advisory* dan sindikasi namun juga telah mengembangkan produk *advisory* dengan meluncurkan *Merger & Acquisition Advisory* (M&A), jasa pendampingan penyusunan *corporate strategy* dan/atau *corporate finance* serta penggalangan dana (*Crowd Funding*). Dari sudut pandang profitabilitas, produk-produk baru tersebut memiliki karakteristik siklus proyek yang lebih singkat dibandingkan *advisory* yang ada sebelumnya sehingga akan berdampak dari sisi peningkatan pendapatan yang berasal dari *non-interest income* di masa mendatang.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sebagai entitas bisnis yang memiliki visi usaha berkelanjutan, IIF senantiasa menjunjung komitmen penerapan tata kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang ada serta diterjemahkan ke dalam bentuk standarisasi pengelolaan usaha yang tidak hanya mencakup aspek *governance* saja. Selain mengadopsi standar tata kelola yang berlaku di Indonesia, IIF tentunya juga menerapkan standarisasi tata kelola yang berlaku secara global mengikuti standar yang digunakan oleh pemegang saham utama IIF seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, DEG dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

financing product, the current largest contribution derives from the traditional financing product. In fact, IIF still has mezzanine finance and equity products and expertise that we have intensively promoted to the market. Going forward, IIF's marketing activities will focus more on new products, such as Credit Enhancement, which aims to improve client's credit worthiness in order to help clients with high risk profile to obtain financing support with lower interest rate.

Considering the current progress of infrastructure development in Indonesia, from several of the initiated infrastructure projects, some of them are now entering completion phase and requires transition from construction phase into management phase. Therefore, the prospect of Transaction Advisory service seems to be increasingly favorable to meet market needs. On the other hand, there is also positive regulatory trend from year to year for the private sectors to penetrate into the infrastructure business, thus opening great opportunities for IIF to market its consulting services. IIF does not only have the Transaction Advisory and Syndication services, but currently also offers and develops consulting service product by launching Merger & Acquisition Advisory (M&A), advisory service in the preparation of corporate strategy and/or corporate finance, as well as crowd funding. In terms of profitability, these new products naturally have a shorter project cycle compared to the existing consulting services, which is expected to increase revenue contribution from non-interest income going forward.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a company envisioning sustainable business, IIF commits to implement Good Corporate Governance (GCG) according to the prevailing principles and interpreting such principles into business management standard that enforces matters beyond governance aspect. In addition to adopting the governance standards applicable in Indonesia, IIF implements the governance standards that apply globally, in accordance with the standards used by IIF's major shareholders, such as the World Bank, Asian Development Bank, DEG and Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Salah satu bentuk pencapaian GCG Perusahaan adalah diterimanya tambahan pinjaman subordinasi sebesar USD200 juta dari Bank Dunia di tahun 2017 sebagai bentuk terpenuhinya aspek tata kelola yang disyaratkan dengan terlebih dahulu melalui proses audit. Dari aspek berkelanjutan, IIF di awal pendiriannya telah mensinergikan syarat terciptanya harmonisasi di dalam bidang sosial dan lingkungan (S&E) dengan cukup ketat baik untuk proses bisnis di internal maupun kepada mitra yang menjalin kerja sama dengan IIF.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi menilai kinerja Komite di bawah Direksi seperti Komite Investasi, Aset dan Liabilitas (ALCO), Manajemen Risiko (RMC), *Advisory*, SDM dan Pengarah Teknologi Informasi telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman kerja dan tata-tertib kerja yang ditetapkan. Komite-komite tersebut di tahun 2017 telah banyak memberikan masukan kepada Direksi dalam hal peningkatan kualitas proses bisnis yang dijalankan IIF serta mampu memberikan pandangan yang *reliable* kepada Direksi terutama dalam proses pengambilan keputusan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Bapak Wito Krisnahadi mengajukan pengunduran diri selaku Direktur Pelaksana & CRO efektif terhitung sejak 31 Oktober 2017 digantikan sementara oleh Ibu Hilda Savitri. Dengan demikian terjadi perubahan dalam struktur Direksi IIF di tahun buku 2017 sehingga susunan Direksi pada akhir tahun 2017 terdiri dari:

Presiden Direktur & CEO	: Arisudono Soerono
Direktur Pelaksana & CFO	: Indrawati Darmawan
Direktur Pelaksana & CIO	: Harold Tjiptadjaja
Direktur Pelaksana & CRO (interim)	: Hilda Savitri

Perusahaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, integritas dan kontribusi profesional Bapak Wito Krisnahadi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya selama menjabat sebagai anggota Direksi.

One of the Company's GCG achievements was the receipt of additional subordinated loans of USD200 million from the World Bank in 2017, as a recognition of IIF's compliance with required governance parameters, which was verified through audit process. From the sustainability aspect, since its first establishment, IIF has rigorously incorporated the requirements for complying with the social and environmental (S&E) standards into business process in order to create harmony, be it for internal purposes or to be applied by IIF's partners.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors assessed that the performance of the Committees under the Board of Directors, such as Investment Committee, Assets and Liabilities Committee (ALCO), Risk Management Committee (RMC), Advisory Committee, HR Committee and IT Steering Committee, had been properly implemented in accordance with the stipulated charters and regulations. Throughout the year, the Committees had provided much input on quality improvement of the implemented business process as well as given reliable insights to the Board of Directors, particularly in the decision-making process.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

Mr. Wito Krisnahadi has submitted his resignation as the Managing Director and CRO effective since 31 October 2017. Thus, there was a change in IIF's Board of Directors structure in the fiscal year of 2017. The composition of the Board of Directors of IIF in 2017 is as follows:

President Director & CEO	: Arisudono Soerono
Managing Director & CFO	: Indrawati Darmawan
Managing Director & CIO	: Harold Tjiptadjaja
Managing Director & CRO (interim)	: Hilda Savitri

The Company would like to extend its deepest gratitude for the dedication, integrity and professional contribution of Mr. Wito Krisnahadi in carrying out his duties, responsibilities, and authority while serving as a member of the Board of Directors.

Dengan ditetapkannya komposisi tersebut, kami selaku jajaran Direksi berkomitmen untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan sebaik-baiknya dengan berpegang pada pedoman kerja Perusahaan, Anggaran Dasar dan rencana kerja tahunan yang telah disepakati bersama.

APRESIASI

Mewakili seluruh jajaran Direksi Perusahaan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas arahan, masukan serta penilaian terkait rencana kerja maupun aktivitas pengelolaan usaha yang dilakukan sepanjang tahun 2017. Masukan yang diberikan tentunya membantu kami dalam menjalankan aktivitas bisnis secara profesional serta memberikan pandangan yang luas dalam rangka pengambilan keputusan. Kami selaku jajaran Direksi tentunya memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan IIF dan mewujudkan visi IIF untuk menjadi pelopor katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Direksi, seluruh karyawan di berbagai level atas kerja sama yang solid sepanjang tahun buku 2017 serta komitmen dalam menciptakan kinerja yang lebih baik sepanjang tahun 2017 dan dalam merencanakan kinerja di masa mendatang.

With the stipulation of this composition, we as the Directors are committed to perform our duties, responsibilities and authority to our best abilities while continuously adhering to the Company's work guidelines, Articles of Association, as well as the agreed annual work plan.

APPRECIATION

On behalf of the Company's Board of Directors, I wish to thank all stakeholders for the direction, feedback, and assessment related to the work plan and business management activities carried out throughout 2017. The input given will certainly help us in conducting our business activities professionally and provide a broad insight for decision making. We as the Board of Directors must have a strong commitment to develop IIF and realize its vision to be the pioneer of Indonesia's infrastructure finance development catalyst. We also offer our gratitude to our fellow Board of Directors and all employees at various levels for the solid cooperation throughout the fiscal year 2017 as well as commitment to create an even more thriving performance throughout 2017 fiscal year and in planning the performance and strategy ahead.

Jakarta, Maret / March 2018

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



ARISUDONO SOERONO

Presiden Direktur & CEO

President Director and CEO

03

Profil Perusahaan

Company Profile

- 26 Data Perusahaan
Corporate Data
- 27 Sekilas Perusahaan
Company at a Glance
- 28 Jejak Langkah
Milestones
- 30 Peristiwa Penting 2017
2017 Event Highlights
- 33 Visi dan Misi
Vision and Mission
- 34 Produk dan Layanan
Products and Services
- 36 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders' Composition
- 37 Struktur Organisasi
Organization Structure
- 38 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
- 48 Profil Direksi
Board of Directors Profile
- 53 Profil Manajemen Eksekutif
Executive Management Profile
- 54 Portofolio IIF
IIF portfolio
- 56 Lokasi Proyek
Project Location



Data Perusahaan

Corporate Data

Nama Perusahaan Company Name	PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
Bidang Usaha Line of Business	Pembiayaan proyek infrastruktur Infrastructure project financing
Produk Products	Produk Investasi (<i>Fund-based</i> dan <i>Non Fund-based</i>) dan <i>Advisory</i> Investment Products (Fund-based and Non Fund-based) and Advisory
Status Perusahaan Company Status	Perusahaan Swasta Private Company
Kepemilikan Saham Share Ownership	<ul style="list-style-type: none"> • PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero): 30% • International Finance Corporation (IFC): 19,99% • Asian Development Bank (ADB): 19,99% • Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG): 15,12% • Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC): 14,90%
Tanggal Berdiri Date of Establishment	15 Januari 2010 January 15, 2010
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	<p>Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010, dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 100/2009</p> <p>Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated 6 August 2010, and was regulated in Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009</p> <p>Akta Nomor: 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123</p> <p>Deed Number: 34 dated 15 January 2010 drawn up before Aulia Taufani, SH, as the substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree Number: AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 dated 28 April 2010 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 11 March 2011, Supplement No. 5123</p>
Kantor Pusat Head Office	<p>The Energy Building, Lt.30 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 11A Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190</p> <p>Telepon/Telephone : 021 – 2991 5060 Faksimili/Fax : 021 – 2991 5061 <i>Email</i> : info@iif.co.id Situs/Website : www.iif.co.id</p>

Sekilas Perusahaan

Company at a Glance

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 100/2009. Sebagai institusi yang menawarkan solusi jangka panjang bagi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan menjawab adanya kesenjangan dalam peranan institusi bagi pengembangan infrastruktur dan pembiayaan di Indonesia, IIF hadir untuk turut meningkatkan peran aktif sektor swasta dalam mengembangkan infrastruktur negeri melalui beragam layanan keuangan dan non-keuangan. Guna mendukung tujuan tersebut, IIF menyediakan berbagai produk pendanaan jangka panjang seperti pinjaman senior dan *mezzanine* serta produk non-pinjaman seperti penjaminan dan layanan berbasis *fee*.

Kehadiran Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia serta pinjaman dari beberapa institusi keuangan global dalam struktur modal IIF menjadi kekuatan bagi IIF dalam mendukung kelancaran kegiatan usahanya. Sejak pendirian hingga saat ini, IIF telah berhasil menunjukkan kinerja yang kuat baik di sisi operasional maupun finansial. Keberhasilan ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi IIF sebagai katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Selain sebagai institusi pembiayaan infrastruktur, IIF juga dikenal sebagai pusat keahlian dan keterampilan dalam pengembangan dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Pencapaian tersebut tentunya tidak akan tercapai tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan solid.

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) was established on January 15, 2010, based on decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated on 6 August 2010 to confirm the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009. As a specialized institution that offers long-term solutions to cater the infrastructure financing needs in Indonesia and addresses to the gap in the role of institutions in spurring the growth of Indonesia's infrastructure and financing, IIF has emerged to enhance private sector's contribution to infrastructure development of the country by providing a wide range of financial and non-financial services. To support this goal, IIF provides long-term fund-based products that include senior loans, mezzanine finance and equity participations, as well as non-fund-based products such as guarantees and fee-based services.

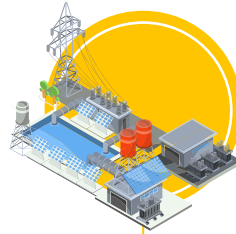
The participation of World Bank, Asian Development Bank, and other institutions in the global banking community in IIF's capital structure further forms a solid foundation for IIF to support its business activities. Since its inception, IIF managed to demonstrate thriving performance in both operational and financial sectors. Such achievement is the key factor in realizing the vision of IIF to become the leading catalyst for infrastructure financing development in Indonesia.

In addition to its role as an infrastructure financing institution, IIF is known for its experience, respected repository of knowledge, and skills in the field of commercially viable infrastructure project development and financing. Certainly, we could not earn this recognition without the support of our superlative, professional, and substantial human capital.

Jejak Langkah Milestones



Pendirian Perusahaan pada 15 Januari 2010 dengan pemegang saham pendiri PT SMI (Persero), IFC, ADB, dan DEG
The Company's establishment on 15 January 2010 with founder shareholders PT SMI (Persero), IFC, ADB, and DEG



- Membangun kapabilitas organisasi
- Membangun kesadaran pasar/potensi pasar & pengenalan terhadap produk
- Sumitomo Mitsui Bank Corporation masuk menjadi salah satu Pemegang Saham IIF
- Pendanaan dari ekuitas mencapai Rp1.777.868.000.000
- Pengembangan aset
- Penandatanganan pinjaman komersial pertama senilai Rp500 miliar untuk proyek Jalan Tol Cipali
- Building organizational capability
- Building market awareness & brand recognition
- Sumitomo Mitsui Bank Corporation became one of IIF's Shareholders
- Funding from equity up to Rp1,777,868,000,000
- Asset building
- Signed the 1st commercial loan with commitment of Rp500 billion for Cipali Toll Road project

2010

2011

2012-2013

2014

- Memperoleh pendanaan dari Bank Dunia-Subordinated Loan sebesar USD 100 juta
- Memperoleh pendanaan dari ADB-Subordinated Loan sebesar USD 100 juta
- Funding from the World Bank Subordinated Loan Agreement at the amount of USD 100 million
- Funding from the ADB Subordinated Loan Agreement at the amount of USD 100 million



- Penyelesaian pengembangan organisasi & kelembagaan (Human Capital, Manajemen Risiko & Operasional Teknologi Informasi)
- Meningkatkan kerangka & platform manajemen Risiko
- Pendanaan dari pinjaman IFC A/B sebesar USD 250 Juta
- Pengembangan aset & perbaikan *yield*
- Penyaluran dana ekuitas & SLA yang masih tersedia untuk proyek-proyek yang layak
- Mencapai total aset sebesar Rp4,7 triliun, dan komitmen investasi sebesar Rp2,5 triliun
- Completing institutional & organizational development (Human Capital, Risk Management & Information Technology Operations)
- Enhancing the risk management platform & framework
- Funding from an IFC A/B loan at the amount of USD 250 million
- Asset building & yield improvement
- Channeling the remaining equity & SLA funds to viable projects
- Reaching total assets of Rp4.7 trillion and investment commitment of Rp2.5 trillion

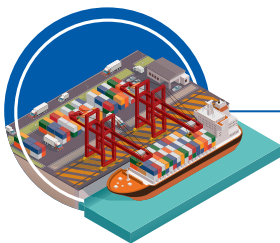


- Meraih peringkat AAAidn dari Fitch Indonesia
- Mengembangkan kemampuan/kapasitas
- Peningkatan modal disetor menjadi Rp2 triliun dalam rangka untuk mematuhi peraturan
- Merampungkan instalasi sistem baru
- Penguatan *brand equity* IIF melalui partisipasi dalam konferensi Euromoney
- Berhasil membentuk tim sindikasi
- Menetapkan risiko kredit berdasarkan parameter IIF
- Penyesuaian model pemeringkatan risiko IIF
- Pelaksanaan *stress test* portofolio
- Meningkatkan kepatuhan SEMS IIF dengan IFC PS 2012
- Rated AAAidn by Fitch Indonesia
- Capacity building
- Additional paid-up capital to reach Rp2 trillion in order to comply with applicable regulations
- Completion of new installation systems
- Strengthening of IIF's brand equity through top-level sponsorship of the Euromoney conference
- Establishing syndication team
- Developing credit risk appetite statement based on IIF's parameters
- Adjusting IIF's risk rating model
- Conducting portfolio stress test
- Augmenting IIF's SEMS compliance with IFC PS 2012

2015

2016

2017



- Meraih peringkat idAAA dari Pefindo
- Penerbitan obligasi perusahaan pertama senilai Rp1,5 triliun
- Menjadi *Mandated Lead Arranger* untuk pertama kalinya dalam proyek KPBU IIF yang pertama
- Memperoleh pendanaan dari sindikasi bank asing senilai USD150 juta
- Rated idAAA by Pefindo Rating
- Issuance of the company's maiden bond of Rp1.5 trillion
- Obtained the 1st Mandated Lead Arranger role for IIF's 1st of two PPP projects
- Obtained syndicated funding from regional banks with the amount of USD150 million



- Segmen *Advisory* sebagai *financial advisory* untuk proyek Merger & Acquisition (M&A) terbesar senilai USD 92,87 juta atau setara dengan Rp1,24 triliun
- IIF berpartisipasi dalam obligasi global yang diterbitkan di Indonesia pertama kali berdenominasi USD. *Komodo Bonds* tersebut senilai Rp2 triliun diterbitkan oleh BUMN operator jalan tol.
- Menandatangani perjanjian kredit dengan Japan International Corporation Agency (JICA) sebesar JPY 8.000.000.000
- IIF mendapat penghargaan dari IJGlobal untuk akuisi proyek pembangkit listrik geo thermal Chevron berkapasitas 227 MW di Jawa Barat
- From advisory segment, as financial advisory largest Merger & Acquisition (M&A) project worth USD 92.87 million or equivalent to Rp1.24 trillion
- IIF participated in the first denominated USD settled Global Bond issued in Indonesia. The Komodo Bond amounted to IDR 2 trillion and issued by SoE toll road operator company.
- Signed loan agreement with Japan International Corporation Agency (JICA) at the amount of JPY 8,000,000,000
- IIF received award from IJGlobal for the project acquisition of 227 MW Chevron Geothermal Power Plant in West Java

Peristiwa Penting 2017 2017 Event Highlights

FEBRUARI • FEBRUARY

10 Februari / 10 February

Penandatanganan *Revolving Credit Facility* dan *Senior Term Loan* dengan salah satu perusahaan jasa provider telekomunikasi.

The signing of *Revolving Credit Facility* and *Senior Term Loan* with a telecommunication provider services company

MARET • MARCH



23 Maret / 23 March

Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Perusahaan.

The implementation of AGMS and EGMS of the Company

APRIL • APRIL

4 April

TXF Indonesia: Diskusi Roundtable mengenai Ekspor & Pembiayaan Proyek.

TXF Indonesia: Export & Project Finance Roundtable Discussion.

7 April

PEFINDO menegaskan peringkat idAAA untuk PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Obligasi I/2016 yang masih beredar. Peringkat kredit korporat ke depan diprediksi akan "stabil".

PEFINDO has affirmed its "idAAA" ratings to PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) and its outstanding Bond I/2016. The outlook for the corporate credit rating is "stable".

MEI • MAY

2 – 3 Mei / 2 – 3 May

Workshop Manajemen Risiko Sosial dan Lingkungan antara IFC-IIF.

IFC-IIF Workshop on Environmental and Social Risk Management.

17 Mei / 17 May

Penandatanganan kredit sindikasi senior term loan senilai USD 660 juta untuk menjalankan operasi aset Pembangkit Listrik Geothermal 227 MW di Jawa Barat.

Signing of USD 660 million syndicated senior term loan for an operating asset of 227 MW Geothermal Power Plant in West Java.

17 - 18 Mei / 17 -18 May

Sponsor Platinum dalam Euromoney Conference di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

Platinum sponsor for the Euromoney Conference in Grand Hyatt Hotel, Jakarta.

30 Mei / 30 May

Workshop Sosial & Lingkungan bagi Karyawan PT Meta Adhya Umbulan.

Workshop on Social & Environment for PT Meta Adhya Tirta Umbulan's Personnel.

31 Mei / 31 May

Penandatanganan Kontrak Pinjaman Transaksi Khusus senilai Rp1,5 triliun antara Bank Mandiri dengan Perusahaan.

Signing Ceremony of Special Transaction Loan worth Rp1.5 trillion between Bank Mandiri and the Company.



JUNI • JUNE

13 Juni / 13 June

Buka Puasa Bersama dengan Institusi di bawah Kementerian Keuangan RI
“Mewujudkan Sinergi, Mensejahterakan Negeri”

Mass Break-fasting with Institutions under the Ministry of Finance, RI, with the theme of “Creating Synergy, Realizing Welfare for the Country”

22 Juni / 22 June

Pinjaman ke-3 dari IFC

Penandatanganan fasilitas pembiayaan sindikasi A&B senilai USD 150 juta.

- Senilai USD 50 juta untuk pinjaman A dengan IFC sebagai *Mandated Lead Arranger*.
- Senilai USD 50 juta untuk pinjaman B1, dengan ANZ sebagai *joint bookrunner*.
- Senilai USD 50 juta untuk pinjaman B2 dengan ANZ sebagai *joint bookrunner*.

Third IFC-loan for the signing of A&B syndicated loan facility worth USD 150 million.

- USD 50 million for A loan, IFC as the Mandated Lead Arranger
- USD 50 million for B1 Loan, joint bookrunner: ANZ
- USD 50 million for B2 Loan, joint bookrunner: ANZ

JULI • JULY

21 Juli / 21 July

Penandatanganan Pinjaman Bilateral untuk pembangunan ruas Pemalang – Batang sepanjang 39 KM yang merupakan bagian dari Trans Jawa
Signing of Bilateral Loan for the development of Pemalang – Batang toll road of 39 KM that is part of Trans Java toll road project.

27 -29 Juli / 27 - 29 July

Perusahaan menggelar acara *Outing* dengan karyawan ke Ubud, Bali dengan mengusung tema “Mission Impossible: The Road to Glory”
The Company held employee outing in Ubud, Bali, under the theme “Mission Impossible : The Road to Glory”



25 Juli / 25 July

IIF bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) (Persero) menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Finance Forum 2017. Forum ini merupakan bagian dari kampanye “Voyage to Indonesia” dimana Indonesia menjadi tuan rumah untuk Rapat Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali.

IIF in cooperation with Ministry of Finance (MoF), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) and PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) (Persero) host Indonesia Infrastructure Finance Forum 2017; the forum will be a part of Voyage to Indonesia campaign in the event that Indonesia becomes the host of IMF-World Bank Annual Meetings 2018 in Bali.

SEPTEMBER • SEPTEMBER

3 September

Tim *Advisory* IIF ditunjuk sebagai penasihat dalam proyek M&A untuk akuisisi proyek air minum.

The Advisory Team has been appointed as the advisor for one of the bidders in a water project M&A transaction.

19 September

Penandatanganan Pinjaman Bilateral untuk mengembangkan reservoir dan pipa untuk Sistem Air Minum di Jawa Timur.

Signing Bilateral Loan for development of reservoir and pipeline of Drinking Water System in East Java.

26 September

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Subordinasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai tambahan pembiayaan dari Bank Dunia untuk mendukung investasi infrastruktur di Indonesia dengan total dana senilai USD 200 juta.

Signing Subordinated Loan Agreement between PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) and PT Indonesia Infrastructure Finance for additional financing provided by the World Bank to support infrastructure investments in Indonesia with total amount of USD 200 million.

OKTOBER • OCTOBER

31 Oktober / 31 October

Penandatanganan perjanjian pinjaman modal kerja untuk salah satu BUMN di industri infrastruktur.
Signing agreement of Working capital loan for one of the SoEs in infrastructure industry.

NOVEMBER • NOVEMBER

1 November

Peningkatan kapasitas dalam aspek S&E bagi salah satu klien di sektor minyak dan gas.

Capacity Building on S&E Aspect for One of the Clients in Oil & Gas sector.

6 November

IIF berpartisipasi dalam Obligasi Proyek pertama di Indonesia yang diterbitkan untuk sektor Jalan Tol. Obligasi proyek senilai Rp1,5 triliun. IIF participated in the first Project Bond issued for Toll Road sector in Indonesia. The Project bond amounted to IDR 1.5 trillion.

30 November

IIF berpartisipasi dalam obligasi global yang diterbitkan di Indonesia pertama kali berdenominasi USD. *Komodo Bonds* tersebut senilai Rp2 triliun diterbitkan oleh BUMN operator jalan tol. IIF participated in the first denominated USD settled Global Bond issued in Indonesia. The Komodo Bond amounted to IDR 2 trillion and issued by SoE toll road operator company.

DESEMBER • DECEMBER



11 Desember / 11 December

Pinjaman JICA

Penandatanganan perjanjian pinjaman senilai ¥ 8.000.000.000 dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengembangkan proyek infrastruktur yang sesuai dengan standar sosial dan lingkungan, khususnya yang terkait dengan energi terbarukan.

JICA loan

Signed a loan agreement for the amount of ¥ 8,000,000,000 with Japan International Cooperation Agency (JICA) to develop infrastructure projects which comply with the social and environment standard especially related to the renewable energy.

12 Desember / 12 December

Fitch Ratings Indonesia telah menegaskan peringkat 'AAA(idn)' atas Peringkat Jangka Panjang Nasional dan *senior unsecured notes* PT Indonesia Infrastructure Finance. Peringkat ke depan diprediksi "Stabil".

Fitch Ratings Indonesia has affirmed PT Indonesia Infrastructure Finance's (IIF) National Long-Term Rating and senior unsecured rating at 'AAA(idn)'. The Outlook is Stable.

17 Desember / 17 December

Gathering Akhir Tahun IIF dengan tema "Punye Gaye".

IIF Year End Gathering 2017 "Punye Gaye"

20 Desember / 20 December

Peningkatan kapasitas dalam Aspek S&E bagi salah satu klien di Sektor Bandar Udara. Capacity building on S&E Aspect for one of the clients in Airport Sector.



Visi dan Misi

Vision and Mission

Visi

Vision

Menjadi pelopor katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia

To become the leading catalyst for financing infrastructure development in Indonesia

Misi

Mission

- **Menjamin tercerminnya kepentingan pelaku investasi di dalam struktur kontrak dan konsesi;**
 - **Mempelopori ketersediaan beragam instrumen pembiayaan yang tepat bagi proyek infrastruktur; dan**
 - **Menjadi mitra bagi lembaga keuangan dan lembaga investasi nasional lainnya dalam menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang di Indonesia.**
- To ensure investor's needs are reflected in contractual structures and concessions;
 - To lead in offering a mix of financing instruments appropriate for infrastructure; and
 - To work with Indonesia's financial institutions and other institutional investors to channel the nation's savings into long-term development of Indonesia's infrastructure.



Produk dan Layanan

Products and Services

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 2, kegiatan usaha Perusahaan adalah memberikan jasa pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Produk Investasi

1. Fund-based

- Menyediakan pinjaman dalam bentuk antara lain: pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine finance*, pembiayaan talangan, *take out financing* dan/atau pembiayaan ulang;
- Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan oleh peraturan, dan;
- Investasi ekuitas.

2. Non Fund-based

- Menyediakan jaminan dalam bentuk antara lain: pemenuhan tanggung jawab keuangan, peningkatan kualitas kredit, dan/atau jaminan pelaksanaan; dan

Advisory

A. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR PUBLIK

1. Layanan Konsultan Transaksi

Menyediakan layanan konsultan transaksi kepada klien sektor publik, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara lembaga pemerintah yang berwenang dan pihak swasta, dimana pihak swasta menyediakan layanan publik dengan menanggung risiko finansial, operasional, dan teknis dalam proyek tersebut.

Jenis proyek infrastruktur yang dapat diberikan layanan konsultan transaksi dapat mencakup:

- a. Proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015; dan
- b. Proyek-proyek non-KPBU, antara lain proyek IPP di sektor pembangkit listrik atau proyek B2B PDAM di sektor air minum.

Based on the Company's Articles of Association section 2, the Company's business activities is to provide financing services for the infrastructure development in Indonesia.

Investment Product

1. Fund-based

- Providing loans in the form of senior loans, subordinated loan/*mezzanine financing*, bridge financing, take out financing, and/or refinancing;
- Financing other activities related to infrastructure projects as permitted by laws, and;
- Providing equity investment.

2. Non Fund-based

- Providing guarantees in the form of guarantee, stand-by-financing, credit enhancement, and/or performance bonds; and

Advisory

A. SERVICES FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS

1. Transaction Advisory Services

Providing specialized transaction advisory services to public sector that may include ministries, regional governments and state-owned/regional-owned enterprises with regards to infrastructure projects that involve a contract between the public sector authority and a private party, in which the private party provides a public service and assumes substantial financial, technical and operational risks in the project.

The type of infrastructure projects can be either:

- a. Public Private Partnership (PPP) projects as regulated under Presidential Regulation No. 38/2015; and
- b. Non-PPP projects, such as IPP projects in the power sector or PDAM B2B projects in the water sector.

Lingkup dari layanan konsultan transaksi antara lain pelaksanaan uji tuntas dan perencanaan proyek, pelaksanaan konsultasi pasar, studi kelayakan, analisis dukungan pemerintah, penyiapan struktur komersial, negosiasi, pelaksanaan proses tender/pengadaan, dan proses institusionalisasi dengan tujuan alokasi risiko yang optimal dan proyek yang *bankable* disamping juga meningkatkan kualitas layanan yang dihasilkan proyek tersebut.

2. Layanan Konsultasi Kebijakan

Menyediakan layanan konsultasi kepada klien di sektor publik seperti kementerian dan pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan/atau peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur.

B. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR SWASTA

Layanan Konsultan Keuangan dan Transaksi

Menyediakan layanan konsultan keuangan dan/atau transaksi kepada klien sektor swasta pada setiap tahapan siklus proyek infrastruktur. Lingkup layanan konsultan keuangan antara lain adalah pelaksanaan uji tuntas proyek, penyiapan proyek, penyiapan struktur komersial, studi kelayakan, penyiapan penawaran lelang untuk memenangkan tender konsesi, negosiasi perjanjian konsesi, penggalangan dana ekuitas dan/atau pinjaman proyek, valuasi, transaksi *joint venture* dan merger & akuisisi.

The scope of the transaction advisory services may include pre-transaction due diligence and planning, market consultation, feasibility analysis, government support analysis, commercial structuring, negotiation, procurement implementation process and institutionalization with the objective to ensure optimal risk allocation and bankability of the project as well as to improve the quality of project outcome.

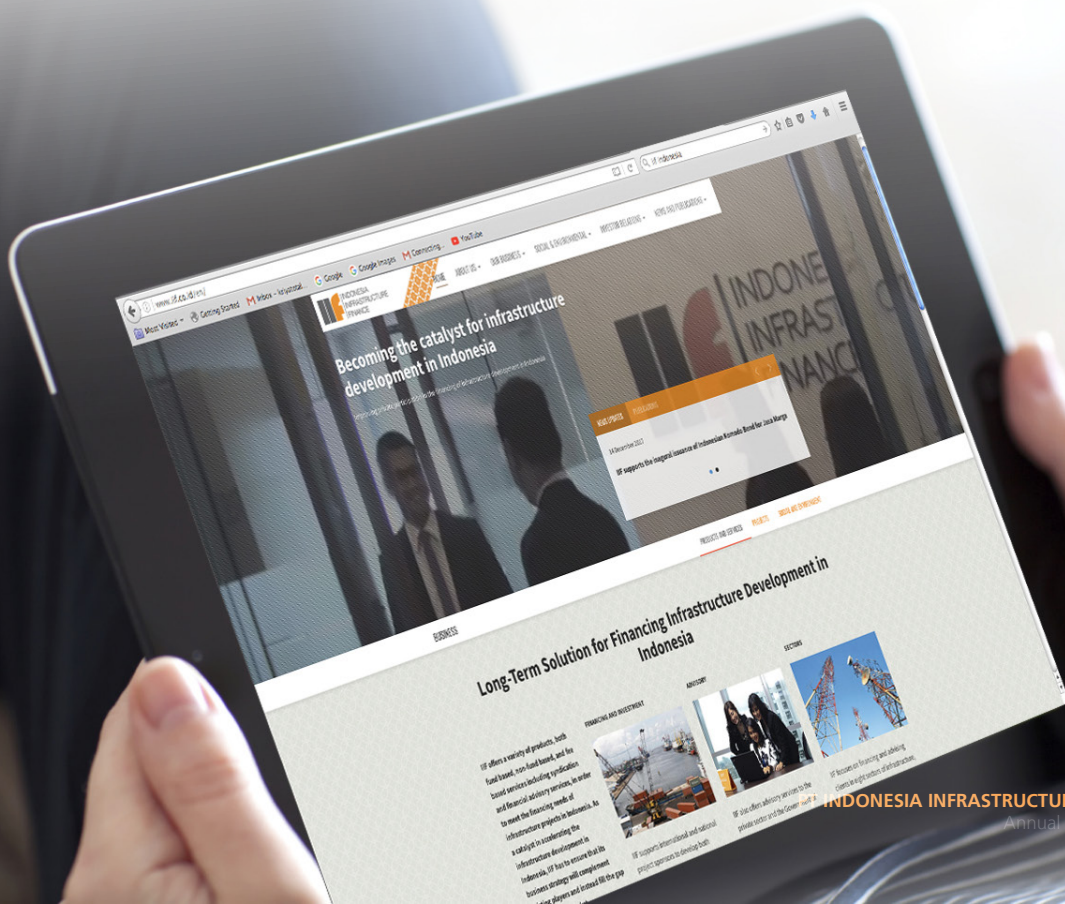
2. Policy Advisory Services

Providing services to public sector that may include ministries and regional governments in formulating infrastructure-related policies and/or increasing government capacities for the purpose of accelerating and improving infrastructure delivery.

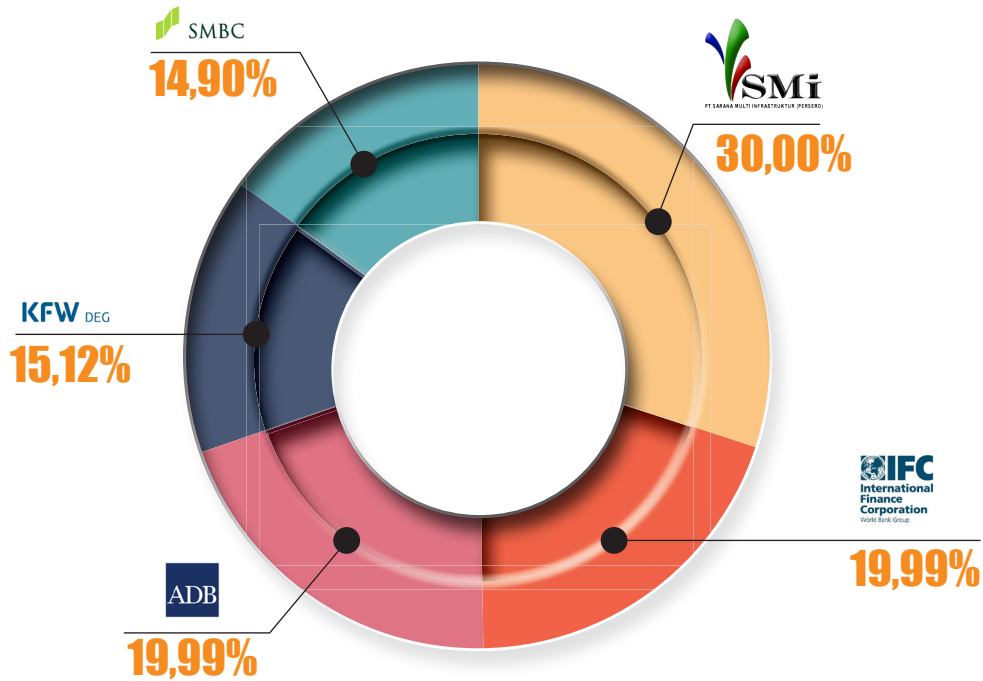
B. SERVICES FOR PRIVATE SECTOR CLIENTS

Financial and Transaction Advisory Services

Providing financial and/or transaction advisory services to the private sector throughout the entire life cycle of an infrastructure project. The scope of financial advisory services may include project due diligence, project preparation and structuring, feasibility analysis, concession bid preparation, concession negotiation, loan and/or equity fundraising, valuation, joint venture transaction advisory and merger & acquisition transaction advisory.

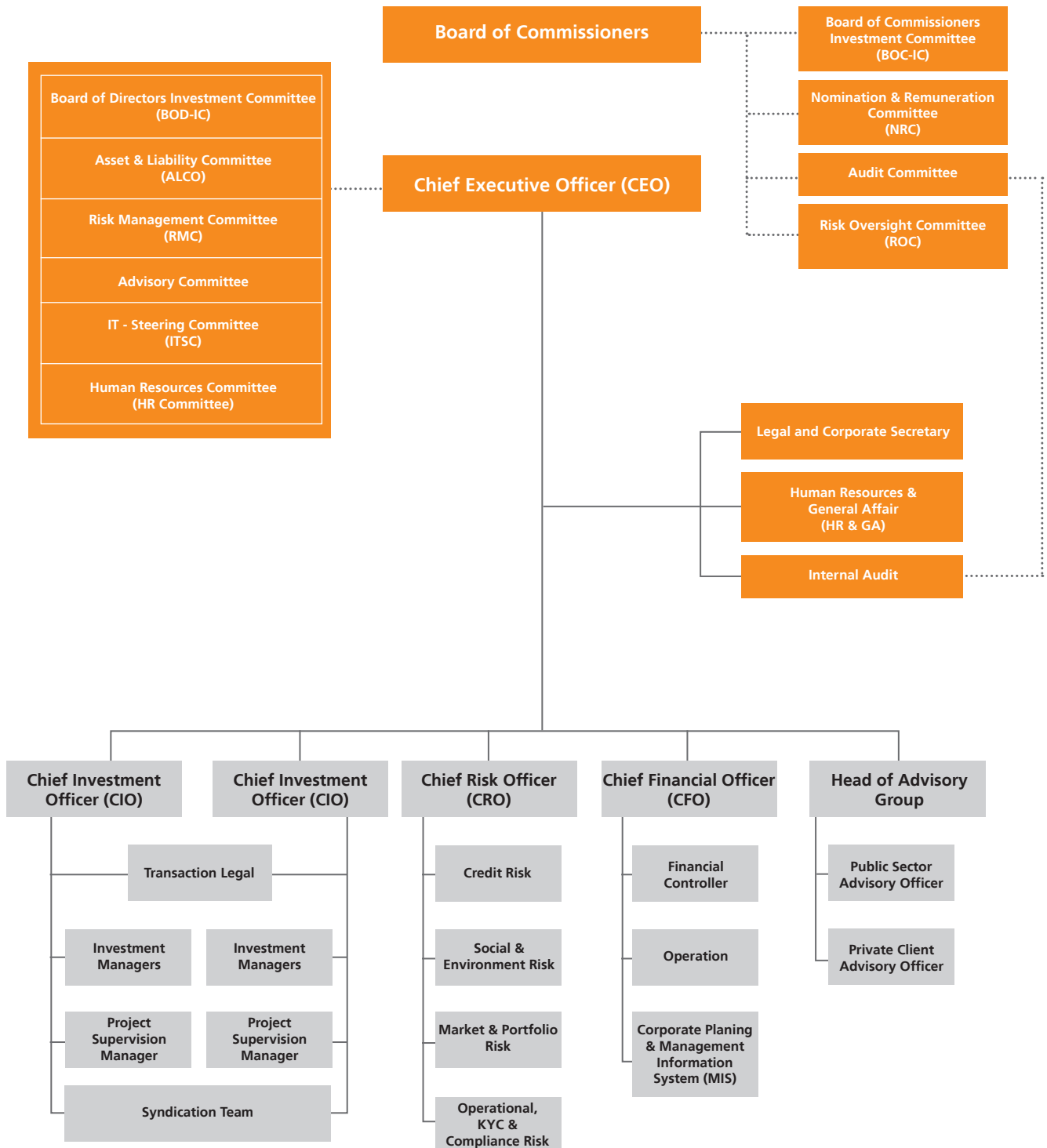


Komposisi Pemegang Saham Shareholders' Composition



Pemegang Saham / Shareholders	Saham / Shares	Nilai Nominal (IDR) / Nominal Value (IDR)	Persentase / Percentage
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero)	600.000	600.000.000.000	30,00%
International Finance Corporation (IFC)	399.800	399.800.000.000	19,99%
Asian Development Bank (ADB)	399.800	399.800.000.000	19,99%
DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)	302.400	302.400.000.000	15,12%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	298.000	298.000.000.000	14,90%
Total	2.000.000	2.000.000.000.000	100,00%

Struktur Organisasi Organizational Structure



Struktur organisasi ini telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanggal 16 Juni 2015.

This organizational structure has been reported to the Financial Services Authority by virtue of a letter dated on 16 June 2015.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



M. CHATIB BASRI

Presiden Komisaris - Komisaris Independen

President Commissioner -
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Bapak M. Chatib Basri saat ini juga menjabat sebagai Senior Partner dan pendiri Creco Research, serta menjadi salah satu Dosen Senior di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Beliau memiliki keahlian dalam bidang Perdagangan Internasional, Ekonomi Makro dan Politik. Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris & Komisaris Independen di IIF, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di beberapa perusahaan swasta seperti PT Astra International Tbk dan PT Semen Gresik Tbk. Di bidang pemerintahan, beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis seperti Kepala BKPM dan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berakhir pada Oktober 2014

Bapak Basri meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia, dan Gelar Master dan Phd. Jurusan Pembangunan Ekonomi dari Australian National University. Beliau memberikan sumbangsinya dalam sejumlah karya ilmiah dan menjadi anggota organisasi internasional termasuk di High Level Trade Expert Group dan Independent Regional Advisory Group untuk Asia Pasifik, Dana Moneter Internasional (IMF). Di sepanjang perjalanan karirnya, beliau telah menulis banyak buku dan berpartisipasi dalam kegiatan penelitian di tingkat global. Beliau juga aktif dalam menulis buku dan menulis artikel untuk beberapa media internasional.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan, beliau adalah Senior Partner dan pendiri Creco Research dan menjadi salah satu dosen senior di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia.

Indonesian Citizen, 52 years old. Mr. Chatib Basri is concurrently a Senior Partner and Founder of Creco Research, and a Senior Lecturer at the Department of Economics, University of Indonesia. Mr. Basri has expertise in International Trade, Macroeconomic and Political economy. Prior to serving as President Commissioner & Independent Commissioner at IIF, he served as Independent Commissioner at private companies, such as in PT Astra International Tbk and PT Semen Gresik Tbk. In the government agency, he held several strategic positions, such as Head of BKPM and also served as the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, which ended in until October 2014.

He earned his Bachelor's degree in Economics from the University of Indonesia, and his Master's and Doctoral degrees and in Economic Development from Australian National University. Mr. Basri has been an active participant in scholarly works and international organizations including in High Level Trade Expert Group and Independent Regional Advisory Group for Asia Pacific, International Monetary Fund (IMF), of which he was also a member. During the long course of his career, Mr. Basri has authorized numerous books and been involved in research activities at the global level and written articles for the global press.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the President Commissioner of the Company, he also serves as Senior Partner and Founder of Creco Research and Senior lecturer at the Department of Economics in the University of Indonesia.

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Sebelum bergabung dengan IIF, Bapak Edwin Gerungan telah memegang sejumlah jabatan penting di beberapa perusahaan swasta terkemuka, di antaranya sebagai Direktur Utama PT BHP Billiton dan sebagai Senior Advisor di Atlantic Richfield. Beliau mulai meniti karirnya semenjak bergabung dengan Citibank NA hingga mencapai posisi Vice President, Head of Treasury. Beliau juga pernah menempati berbagai posisi kunci di BUMN termasuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk dan juga sebagai Komisaris Independen di Bank Danamon dan Bank Central Asia. Beliau meraih Sarjana di bidang Filsafat dari Principia College, Elsay, Illinois, USA.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau saat ini tidak memiliki jabatan lain selain sebagai Komisaris Perusahaan.

Indonesian Citizen, 69 years old. Prior to joining IIF, Mr. Edwin Gerungan held several key positions at private companies, including as President Director of PT BHP Billiton and as Senior Advisor at Atlantic Richfield. He began his career at Citibank NA and left his last position at the bank as Vice President, Head of Treasury. His roles in state-owned enterprises include as President Commissioner of PT Bank Mandiri Tbk and as Independent Commissioner at Bank Danamon and Bank Central Asia. He earned his Bachelor's degree in Philosophy from Principia College, Elsay, Illinois, USA.

Information on Concurrent Position

He currently does not hold other position.



EDWIN GERUNGAN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



ZULKIFLI ZAINI

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Saat ini Bapak Zulkifli Zaini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Komisaris Independen di Indonesia Infrastructure Finance (IIF), dan Komisaris Independen PT Triputra Agro Persada.

Bapak Zulkifli Zaini adalah Komisaris PLN pada Juli 2013 s.d. Maret 2015, Komisaris Bank BNI pada Maret 2015 s.d. Maret 2016. Sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2010 di Bank Mandiri berturut-turut sebagai Direktur Distribution Network, Direktur Commercial & Business Banking, dan Direktur Technology & Operations.

Bapak Zulkifli Zaini memiliki pengalaman menyeluruh di bidang perbankan, termasuk bidang *branch network, operations, IT infrastructures*, manajemen risiko, dan *wholesale product management*. Dia juga pernah berinteraksi langsung dengan nasabah dari berbagai segmen, diantaranya retail, *Small and Medium Enterprise (SMEs), mid-corporates* atau *Commercial Segment* dan juga institusi pemerintahan. Bapak Zulkifli Zaini memperoleh gelar MBA dari Washington University, St Louis USA dan gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Triputra Argo Persada.

Indonesian Citizen, 61 years old. Mr. Zulkifli Zaini is a Chairman of Indonesian Bankers Association (IBI), Independent Commissioner of Indonesia Infrastructure Finance (IIF), and Independent Commissioner of PT Triputra Agro Persada.

Mr. Zulkifli Zaini serves as a Commissioner of PLN from July 2013 until March 2015 and Commissioner of Bank BNI from March 2015 until March 2016. He previously served as a President Director of Bank Mandiri from 2010 until 2013. From 2003 until 2010, he held the position in Bank Mandiri as Distribution Network Director, Commercial & Business Banking Director, and Technology & Operations Director.

Mr. Zulkifli Zaini has an extensive experience in banking sector, including in branch network, operations, IT infrastructure, risk management, and wholesale product management. He also directly interacts with the customers from various segments, among others retail, Small and Medium Enterprises (SMEs), mid-corporates or Commercial Segment, and government institutions. Mr. Zulkifli Zaini earned his Master's degree in Business Administration from Washington University, St. Louis, USA, and Bachelor's degree in Engineering from Bandung Institute of Technology.

Information on Concurrent Position

Besides serving as Commissioner of the Company, he also serves as Independent Commissioner of PT Triputra Argo Persada.

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Sebelum menjabat sebagai Komisaris di IIF, Bapak Marwanto pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Eksekutif di Asian Development Bank (ADB) pada 2009-2011 dan juga menjabat sebagai Ketua Komite Etik dan Anggota Komite Anggaran ADB. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan gelar Master dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, serta gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada. Bapak Marwanto adalah perwakilan dari Pemerintah Indonesia.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Indonesian Citizen, 58 years old. Prior to serving as Commissioner at IIF, Mr. Marwanto served as Director General of Fiscal Balance after serving as Executive Director of Asian Development Bank (ADB) from 2009-2011 and also as Chairman of the Ethics Committee and Member of the Budget Review Committee of ADB. Currently, he also serves as Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. He obtained Bachelor's degree in Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta, and Master's degree from Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA as well as Doctoral degree from Gadjah Mada University. Mr. Marwanto is a representative of the Government of Indonesia.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Commissioner of the Company, he does not hold any position in other companies.

* Berakhir sejak 28 Juli 2017 / Term of service ended as of 28 July 2017



MARWANTO HARJOWIRYONO

Komisaris*
Commissioner*

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



RICHARD RANKEN

Komisaris

Commissioner

Warga Negara Australia, 69 tahun. Saat ini, Bapak Richard Ranken menjabat sebagai Direktur dan membawahi Komite Audit di Xac Bank, Mongolia. Beliau juga menjadi Direktur di sebuah perusahaan reksadana swasta di Kepulauan Pasifik. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur pada sebuah perusahaan ternama di Australia yang bergerak dalam penyediaan infrastruktur dan air untuk keperluan irigasi agribisnis, dimana beliau juga memimpin Komite Risiko dan Kepatuhan selama bertugas. Beliau juga menjadi Direktur pada International Finance Corporation of Global Manufacturing, Direktur untuk kawasan Sub-Sahara Afrika, dan Direktur kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Pertanian dan Magister Administrasi Negara dari Australian National University. Beliau telah menyelesaikan studi di World Bank/Harvard Business School Executive Program dan merupakan lulusan dari Australian Institute of Company Directors. Bapak Ranken bertugas sebagai perwakilan dari IFC.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, beliau adalah Direktur do Xac Bank in Mongolia.

Australian Citizen, 69 years old. Currently, Mr. Richard Ranken is a Director of Xac Bank in Mongolia where he chairs the Audit Committee, and of a private equity fund for the Pacific islands. Previously, he was a Director at a major Australian provider of infrastructure and water for irrigated agribusiness where he chaired the Risk and Compliance Committee. He had also served as the International Finance Corporation's Director of Global Manufacturing, Director of Sub-Saharan Africa, and Director of East Asia and Pacific including for Indonesia. He holds a Bachelor's degree in Agricultural Economics and a Master's degree in Public Administration from the Australian National University. He had completed the World Bank/Harvard Business School Executive Program, and is a graduate member of the Australian Institute of Company Directors. Mr. Ranken is the representative of IFC.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Commissioner of the Company, he also serves as a Director of Xac Bank in Mongolia.

Warga Negara Jerman, 70 tahun. Hans-Juergen Hertel memulai karirnya di DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) pada tahun 1990 dan menjabat sebagai Direktur di kantor DEG Jakarta sejak Januari 2007 hingga Desember 2011 sebelum akhirnya pension pada awal 2012. Pengalaman kerja sebelumnya termasuk sebagai Vice President di DEG Cologne /Jerman, Project Team Leader di Friedrich Ebert Foundation, Jakarta, serta Kepala Audit di Treuarbeit, sebuah perusahaan auditor Jerman yang saat ini merupakan mitra dari Pricewaterhouse Cooper. Selain itu, beliau juga pernah bekerja sebagai relawan Jerman di Uganda, Afrika Timur. Bapak Hans-Juergen Hertel memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman bisnis di Indonesia di mana ia memiliki jaringan yang baik untuk bisnis dan komunitas sosial di Indonesia. Beliau fasih berbahasa Indonesia. Sejak 2009 sampai dengan 2014, beliau adalah Komisaris dari perusahaan asuransi jiwa Indonesia PT Avrist Assurance. Beliau lulus dari Free University of Berlin, di mana beliau memperoleh gelar master di Ekonomi Politik dan Administrasi Bisnis.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

German Citizen, 70 years old. Hans-Juergen Hertel began his career in DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) in 1990 and has served as Director of DEG Office Jakarta from January 2007 until December 2011 before retiring from work and becoming a pensioner in early 2012. His previous working experience includes holding positions as Vice President of DEG in Cologne/Germany, Project Team Leader of the Friedrich Ebert Foundation, Jakarta as well as Head of Audit in Treuarbeit, a German based auditing company that as of today is a partner of Pricewaterhouse Cooper. Among others, he has also been working for the German Volunteer Service in Uganda, East Africa. Hans-Juergen Hertel has more than 20 years of business experience in Indonesia where he has a good network to the Indonesian business and social community. He speaks fluent Bahasa Indonesia. From 2009 until 2014 he was a Commissioner of the Indonesian life insurance company PT Avrist Assurance. He graduated from Free University of Berlin, where he obtained a Master's degree in Political Economy and Business Administration.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Commissioner of the Company, he does not hold any position in other companies.



HANS-JUERGEN HERTEL

Komisaris
Commissioner

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



ROBERT O. DOLK

Komisaris

Commissioner

Warga Negara Belanda, 62 tahun. Bapak Robert Dolk telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang jasa keuangan, dengan bekerja di Australia, Eropa dan Asia untuk organisasi seperti BNP Paribas dan Deutsche Bank. Beliau diangkat sebagai Komisaris IIF sejak tanggal 15 Agustus 2012. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Independen Non-Eksekutif Zurich Financial Services Australia Limited (Desember 2008 - Desember 2017), Direktur Lawcover Insurance Pty Limited (April 2010 - April 2016), dan di Amber Holdings (Maret 2011 - Maret 2017). Beliau adalah Australian Chartered Accountant. Bapak Robert Dolk adalah perwakilan dari ADB.

Dutch Citizen, 62 years old. Mr. Robert Dolk has an extensive experience for over 30 years in financial services, working in Australia, Europe and Asia for organizations such as BNP Paribas and Deutsche Bank. He was appointed as Commissioner of IIF on August 15, 2012, and also served as Independent Non-Executive Director of Zurich Financial Services Australia Limited (December 2008 - December 2017), Director of Lawcover Insurance Pty Limited (April 2010 - April 2016), and Amber Holdings (March 2011 - March 2017). He is an Australian Chartered Accountant. Mr. Robert Dolk is the representative of ADB.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, beliau menjabat sebagai Direktur Independen Non-Eksekutif Zurich Financial Services Australia Limited.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Commissioner of the Company, he serves as Non Executive Independent Director of Zurich Financial Services Australia Limited.

Warga negara Indonesia, 58 tahun. Setelah meraih gelar Sarjana Akuntansi di sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan PhD dari University of North Carolina di Chapel Hill, AS, di bidang Ekonomi jurusan Public Finance, Bapak Robert Pakpahan mengembangkan karirnya dan telah bekerja selama lebih dari 11 tahun di Kementerian Keuangan Indonesia.

Saat ini, Bapak Robert Pakpahan menduduki beberapa posisi di beberapa perusahaan, termasuk sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan Indonesia, sebagai anggota Majelis Wali Amanat di Millenium Challenge Account (MCA), dan sebagai anggota Direksi serta Ketua Komite Audit, Penjaminan Kredit, dan Fasilitas Investasi di Asian Development Bank (mewakili negara-negara ASEAN).

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, beliau juga menjabat sebagai Direktur Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesian Citizen, 58 years old. Graduated with a Bachelor's degree in Economics majoring in Accounting from the State College of Accountancy Indonesia and a Doctoral degree from the University of North Carolina at Chapel Hill, USA in Economics majoring in Public Finance, Mr. Robert Pakpahan has over 11 years of experience working with the Ministry of Finance in Indonesia.

Currently Mr. Robert Pakpahan has several major positions in different companies including at Indonesia's Ministry of Finance as the General Director of Budget Financing and Risk Management, at the Millenium Challenge Account (MCA) as the Board of Trustee member, and lastly at Asian Development Bank as the Board of Directors (representing ASEAN countries) and Chairman of Audit Committee, Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF).

Information on Concurrent Position

In addition to serving as Commissioner of the Company, he also serves as Director General of Taxation, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.



ROBERT PAKPAHAN

Komisaris
Commissioner

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



RAJEEV V. KANNAN

Komisaris

Commissioner

Warga negara Singapura, berusia 45 tahun. Saat ini, beliau adalah *Executive Officer* dan *Head of Investment Banking, Asia* di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Sebelumnya, beliau adalah Direktur & General Manager di Structured Finance Department (SFD) dari SMBC di Tokyo. Dalam perannya saat ini, beliau bertanggung jawab atas semua tim produk dan solusi investor di Asia dan Australia, termasuk dalam *infrastructure & project finance, M&A finance, real estate finance, asset finance, securitisation, syndication & distribution* dan *derivatives business*. Beliau memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di Asia Pasifik dan Timur Tengah dalam hal memberikan saran kepada klien atas berbagai infrastruktur, PPP, dan transaksi energi. Beliau memperoleh Sarjana Manajemen dan Rekayasa dari Birla Institute of Technology and Science (BITS), Pilani. Rajeev adalah perwakilan dari SMBC.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, beliau juga menjabat sebagai anggota Direksi Clifford Capital Pte Ltd dan anggota Komite Investasi Core India Infrastructure Fund.

Singaporean Citizen, 45 years old. Currently, he is the Executive Officer and Head of Investment Banking, Asia in Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Previously, he was the Director & General Manager, Structured Finance Department (SFD) of SMBC in Tokyo. In his current role, he is responsible for all the products and investor solutions teams in Asia and Australia including infrastructure & project finance, M&A finance, real estate finance, asset finance, securitisation, syndication & distribution as well as derivatives business. He has over 25 years of experience in Asia Pacific and Middle East region, advising clients on various infrastructure, PPPs, and energy transactions. He earned his Bachelor's degree in Management and Engineering from Birla Institute of Technology and Science (BITS), Pilani. Rajeev is the representative of SMBC.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Commissioner of the Company, he also serves as Board member of Clifford Capital Pte Ltd and Investment Committee member of Core India Infrastructure Fund.

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Bapak Bhimantara memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang kuat serta pengalaman panjang baik di sektor pemerintahan maupun sektor korporasi. Beliau adalah seorang Analis Perencanaan Strategis Senior untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Surat Utang Negara (2011-2012) dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (2012-2013) di Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai komisaris PT Indonesia Power, perusahaan pembangkit tenaga listrik di tahun 2009 sampai 2013 dan PT Perusahaan Pengelola Aset, sebuah perusahaan pengelola aset milik Negara dari tahun 2012 hingga 2013.

Sebelum bergabung dengan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif untuk Asian Development Bank di Manila, Filipina (Juli 2013-Juni 2017). Beliau mewakili konstituen yang terdiri atas delapan Negara anggota, yakni Armenia, Kepulauan Cook, Fiji, Indonesia, Republik Kirgistan, Selandia Baru, Samoa, dan Tonga. Selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi ADB, beliau terlibat aktif dalam keanggotaan beberapa Komite Dewan Komisaris sebagai berikut: Ketua dan anggota Komite Dewan Etika (November 2015 - Juni 2017), Ketua Komite Dewan Audit (Juli 2014 - November 2015), Anggota Komite Dewan Tinjauan Kepatuhan (Juli 2013 - November 2015), dan Anggota Dewan Komite Audit (Juli 2013 - Juni 2017). Bapak Widyajala juga adalah Dean untuk Dewan Direktur ADB (Januari - Juni 2017).

Beliau memiliki beberapa gelar/sertifikasi profesi dalam bidang pemeriksaan keuangan/audit intern (*Certified Internal Auditors*), manajemen risiko (*Certification of Risk Management Assurance*) dan pemeriksaan kecurangan (*Certified Fraud Examiners*) yang mencerminkan kompetensi profesional dan kredensial yang kuat dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kompetensi profesionalnya menangani berbagai tugas membawanya untuk mengunjungi lebih dari 30 negara di lima benua selama dua dekade terakhir.

Bapak Widyajala meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan *Master of Science in Finance* dari the George Washington University, Washington D.C., Amerika Serikat.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, beliau adalah Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Indonesian Citizen 50 years old. Mr. Bhimantara Widyajala has a strong educational and professional training background as well as a wide range long list of experience in both government and corporate sectors. He is a senior Strategic Planning Analyst of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Director of Government Debt Securities (2011-2013) and later on Secretary to Directorate General of Debt Management Office (2012-2013) in the Ministry of Finance. He served as a commissioner of PT Indonesia Power, a power generation company from 2009 until 2013 and PT Perusahaan Pengelola Aset, a state owned asset management company from 2012 until 2013.

Prior to joining PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), he served as an Executive Director of Asian Development Bank in Manila, the Philippines (July 2013-June 2017). He represented a constituency of eight member countries, Armenia, Cook Islands, Fiji, Indonesia, Kyrgyz Republic, New Zealand, Samoa and Tonga. During his term as the ADB Board of Directors members, he actively served some Committees of the Board as follows: Chairman and a member of Ethics Committee of the Board (November 2015 - June 2017), Chairman of Audit Committee of the Board (July 2014 - November 2015), Member of Board Compliance Review Committee (July 2013 - November 2015), Member of Audit Committee of the Board (July 2013 - June 2017). Mr. Widyajala also was a Dean of the ADB Board of Directors (January - June 2017).

His international designations in auditing (*Certified Internal Auditors*), risk management (*Certified Risk Management Assurance*) and fraud examining (*Certified Fraud Examiners*) represent his credential and strong professional competence in good corporate governance. His professional competence handling a variety of tasks brought him to visit more than 30 countries in five continents during past two decades.

Mr. Widyajala earned his Bachelor's degree in Law from University of Indonesia and Accountant from the State College of Accountancy (STAN) and Master of Science degree in Finance from the George Washington University, Washington D.C., USA.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Commissioner of the Company, he also serves as Assessment Expert for Strategic Planning at the Sekretariat General of the Ministry of Finance.



BHIMANTARA WIDYAJALA

Komisaris*
Commissioner*

* Mulai menjabat sejak 28 Juli 2017 / Term of service commenced as of 28 July 2017

Profil Direksi

Board of Directors Profile



ARISUDONO SOERONO

Presiden Direktur & Chief Executive Officer

President Director & Chief
Executive Officer

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Bapak Arisudono Soerono berpengalaman 20 tahun lebih di bidang corporate finance, merger dan akuisisi, pengembangan strategi, dan pengelolaan sehari-hari perusahaan di industri transportasi, logistik dan jasa keuangan. Sebelum bergabung dengan IIF, beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer di PT Blue Bird (2012-2013). Sebelumnya, beliau bekerja di Credit Suisse London, Accenture Jakarta dan Seoul, dan Citibank Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Infrastruktur di KADIN. Beliau meraih gelar MBA dari London Business School pada 2000, dan Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada 1994.

Hingga tahun 2016, beliau telah mengikuti beberapa pelatihan diantaranya program eksekutif dalam Manajemen Risiko Perbankan di INSEAD, Perancis, dan pelatihan kepemimpinan dari the Kennedy School of Government - Harvard University.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Indonesian Citizen, 47 years old. Mr. Arisudono Soerono has more than 20 years of experience in corporate finance, mergers & acquisitions, strategy development, and day-to-day management of companies, with industry experience in transportation, logistics, and financial services. Prior to joining IIF, he served as Chief Financial Officer in PT Blue Bird (2012-2013). Prior to that, he worked in Credit Suisse London, Accenture Jakarta and Seoul, and Citibank Jakarta. He was Deputy Head of the Standing Committee for Infrastructure Development at the Indonesian Chamber of Commerce (KADIN). He obtained his Master's degree in Business Administration from London Business School in 2000, and Bachelor's degree in Chemical Engineering from Bandung Institute of Technology in 1994.

Mr. Soerono has participated in a number of training programs over the years, including the executive program in Risk Management in Banking in INSEAD France and an executive course on Leadership from the Kennedy School of Government - Harvard University.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the President Director of the Company, he does not hold any position in other companies.

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Sebelum bergabung dengan IIF sebagai Chief Financial Officer, Ibu Indrawati Darmawan pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di Standard Chartered Securities Indonesia selama 6 tahun sejak 2010. Sebelumnya, beliau merupakan Senior Vice President di Barclays Capital Indonesia (2008) dan UBS Indonesia (2007). Beliau juga pernah mengemban posisi penting di beberapa perusahaan, diantaranya: Direktur Pelaksana di Mandiri Sekuritas (2004-2007), Wakil Presiden Direktur di Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2003), dan Associate Director di Deutsche Morgan Grenfell (1994-1997). Di masa-masa awal karirnya, beliau menjabat sebagai Project Manager pada PT Makindo Securities selama satu tahun sejak 1993 dan juga sebagai Auditor Senior di KPMG Peat Marwick sejak 1991. Ibu Darmawan meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Texas Christian University, AS, pada 1989 serta meraih gelar Master bidang Bisnis Internasional dari West Coast University, AS, pada 1991.

Ibu Darmawan telah mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya The Capital Market for Infrastructure Investment yang diadakan di Manila dan diselenggarakan oleh Capital Market.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perusahaan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Indonesian Citizen, 51 years old. Prior to joining IIF as the Chief Financial Officer, Ms. Indrawati Darmawan served as the President Director at Standard Chartered Securities Indonesia for 6 years since 2010. Previously she was the Senior Vice President at Barclays Capital Indonesia (2008) and at UBS Indonesia (2007). She had also held key positions at several companies, including: Managing Director at Mandiri Sekuritas (2004-2007), Vice President at Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2003), and Associate Director at Deutsche Morgan Grenfell (1994-1997). Earlier to her career, she served at PT Makindo Securities for a year since 1993 as the Project Manager, and also served as a Senior Auditor at KPMG Peat Marwick starting in 1991. Ms. Darmawan obtained her Bachelor's degree in Business Administration from Texas Christian University, USA in 1989, and graduated with a Master's degree in International Business from West Coast University, USA in 1991.

Ms. Darmawan was involved in a number of training, among others, The Capital Market for Infrastructure Investment held in Manila, hosted by the Capital Market.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Director of the Company, she does not hold any position in other companies.



INDRAWATI DARMAWAN

**Direktur Pelaksana & Chief
Financial Officer**

Managing Director & Chief
Financial Officer

Profil Direksi

Board of Directors Profile



HAROLD TJIPTADJAJA

Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer

Managing Director & Chief
Investment Officer

Warga Negara Indonesia berusia 46 tahun. Bapak Harold Tjiptadjaja diangkat sebagai Managing Director dan Chief Investment Officer IIF pada Desember 2011. Sebelum bergabung dengan IIF, beliau memegang jabatan sebagai Vice President di Earth Investment Group (2010 - 2011), Corporate Finance Partner di Indoconsult Prima (2009 - 2011), Vice President di Sinar Mas Group (2007 - 2008) dan Vice President di Northstar Equity Partners (2006). Setelah menamatkan studinya di Erasmus University Rotterdam, Belanda pada 1997 dengan gelar Master of Science bidang Ekonomi Keuangan, beliau bekerja selama lebih dari 10 tahun di Belanda sebelum kembali ke Indonesia pada 2006.

Beliau pernah berpartisipasi dalam pelatihan 10 hari Executive Education on Infrastructure in a Market Economy yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School, pelatihan 5 hari Executive Education on Global Challenges in Transport yang diselenggarakan oleh Oxford University, Inggris, dan sesi pelatihan mengenai High Performance Communication dari IMD Business School/Mandiri Leadership Insights.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perusahaan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Indonesian Citizen, 46 years old. Mr. Harold Tjiptadjaja was appointed as Managing Director and Chief Investment Officer of IIF in December 2011. Prior to joining IIF, he acted as Vice President of Earth Investment Group (2010 - 2011), Corporate Finance Partner of Indoconsult Prima (2009 - 2011), Vice President at Sinar Mas Group (2007 - 2008) and Vice President at Northstar Equity Partners (2006). Upon obtaining his Master of Science degree in Financial Economics from Erasmus University Rotterdam, the Netherlands in 1997, he has spent more than 10 years working experience in the Netherlands prior to returning to Indonesia in 2006.

For the period up to 2016, he has attended a 10-days Executive Education on Infrastructure in a Market Economy from Harvard Kennedy School, a 5-days Executive Education on Global Challenges in Transport from Oxford University, U.K. and a session on High Performance Communication from IMD Business School/Mandiri Leadership Insights.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Director of the Company, he does not hold any position in other companies.

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Ibu Hilda Savitri telah bekerja di bidang perbankan investasi dan korporat serta di perusahaan swasta di bidang audit dan ekuitas selama 20 tahun. Sebelum bergabung dengan IIF, beliau merupakan Direktur Investasi di Tael Management (2007-2015) dan manajer pendanaan regional yang telah mengelola dana sebesar lebih dari AS\$550 juta dari banyak investor badan usaha luar negeri. Sebelumnya, beliau bekerja di UOB Asia Ltd dari 2004 hingga 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Associate Director dan bertanggung jawab atas penataan, pelaksanaan, dan pendistribusian berbagai transaksi merger dan akuisisi, kredit sindikasi, pembiayaan proyek, penyertaan saham, dan transaksi pembiayaan terstruktur lainnya untuk klien-klien yang berasal dari Indonesia. Sebelumnya, beliau mengembangkan karir di PT Danareksa (Persero) (1995-1999 dan 2001-2002) dan PT Nusantara Securities (2002-2004) di divisi perbankan investasi. Beliau juga pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Harsono (anggota Coopers & Lybrand International) (1994-1995). Beliau meraih gelar MBA dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2011) melalui studi Masternya dengan beasiswa penuh dari New Zealand Overseas Development Award dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1994).

Ibu Savitri telah mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya: The Renewable Energy Workshop yang diselenggarakan oleh SEAS di Singapura.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perusahaan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Indonesian Citizen, 46 years old. Ms. Hilda Savitri has 20 years of experience in investment banking, corporate banking, private equity and auditing firms. Prior to joining IIF, she was an Investment Director at Tael Management (2007-2015), a regional fund manager managing of more than US\$550 million fund from offshore institutional investors. Prior to that, she worked for UOB Asia Ltd from 2004 to 2007 with the latest position as an Associate Director, responsible for structuring, execution and distribution of various merger and acquisition transactions, loan syndications, project financing, shares placement and other structured financing transactions for Indonesia clients. Previously she worked for PT Danareksa (Persero) (1995-1999 and 2001-2002) and PT Nusantara Securities (2002-2004) in the investment banking division. She also has a working experience at an accounting firm, Siddharta Siddharta & Harsono (member of Coopers & Lybrand International) (1994-1995). She has a Master's degree in Business Administration from Victoria University of Wellington, New Zealand (2011) with full scholarship from New Zealand Overseas Development Award, and Bachelor's degree in Accounting from University of Indonesia (1994).

Ms. Savitri has participated in numerous trainings such as: The Renewable Energy Workshop that was held in Singapore hosted by SEAS.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Director of the Company, she does not hold any position in other companies



HILDA SAVITRI

Direktur Pelaksana
Chief Investment Officer*
Interim Chief Risk Officer**
Managing Director
Chief Investment Officer*
Interim Chief Risk Officer**

* Berakhir masa jabatan per tanggal 8 Agustus 2017 / Term of service ended as of 8 August 2017

** Mulai menjabat per tanggal 8 Agustus 2017 / Begin serving as of 8 August 2017

Profil Direksi

Board of Directors Profile



WITO KRISNAHADI

Direktur Pelaksana*
Chief Risk Officer**
Managing Director*
Chief Risk Officer**

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Sebelum bergabung dengan IIF pada 2012 sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer, Bapak Wito Krisnahadi menjabat sebagai Kepala Credit Risk di PT Rabobank International Indonesia sejak 2010. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Senior Credit Manager pada PT Bank DBS Indonesia dari 2008 hingga 2010, Investment Officer pada International Finance Corporation sejak 1998 hingga 2008, serta Senior Analyst di PT Astra International sejak 1996 hingga 1998. Beliau merupakan seorang profesional yang ahli di bidang keuangan dan risiko kredit dengan pengalaman kerja yang luas di perbankan domestik dan internasional, *corporate finance*, *project finance*, dan *loan workouts*. Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce Degree dari Curtin University of Technology, Perth, pada 1996, dan MBA dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, dan Rotterdam, Belanda, pada 2004.

Pelatihan terbaru yang diikuti oleh Bapak Krisnahadi adalah Chief Risk Officer Academy yang diselenggarakan oleh Euromoney di London, Inggris, pada 15-19 September 2014, pelatihan Leadership on High Performance Communication di Jakarta, pada 26 Oktober 2016, serta The Essentials of Business Valuation yang diselenggarakan oleh RSM di Rotterdam, Belanda, pada 6-7 Oktober 2016. Beliau juga meraih beasiswa sebagian dari Renac Academy sebagai Delegasi Green Banking di Jerman pada 10-14 Oktober 2016 serta menghadiri konferensi dan seminar lainnya baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di kawasan Asia Pasifik Timur.

Indonesian Citizen, 44 years old. Prior to joining IIF in 2012 as a Managing Director and Chief Risk Officer, Mr. Wito Krisnahadi served as the Head of Credit Risk in PT Rabobank International Indonesia from 2010. Previously, he was a Senior Credit Manager at PT Bank DBS Indonesia from 2008 to 2010, an Investment Officer at International Finance Corporation from 1998 to 2008 and a Senior Analyst at PT Astra International during 1996 to 1998. He is a dedicated finance and credit risk professional with extensive local and international experience in banking, corporate finance, project finance and loan workouts. He obtained his Bachelor's degree in Commerce from Curtin University of Technology, Perth in 1996, and Master's degree in Business Administration from the Rotterdam School of Management, Erasmus University, and Rotterdam, Netherlands in 2004.

Recently, Mr. Krisnahadi also participated in the Chief Risk Officer Academy from Euromoney in London, UK, on 15-19 September 2014, Leadership training on High Performance Communication in Jakarta, on 26 October 2016, The Essentials of Business Valuation in Rotterdam hosted by RSM in Rotterdam, Netherlands during 6-7 October 2016. He also received a partial scholarship from the Renac Academy to join Green Banking Delegation in Germany on 10-14 October 2016 and participated in other conferences and seminars both locally and in the East Asia Pacific region.

* Berakhir masa jabatan per tanggal 31 Oktober 2017 / Term of service ended on 31 October 2017

** Berakhir masa jabatan per tanggal 8 Agustus 2017 / Term of service ended on 8 August 2017

Profil Manajemen Eksekutif

Executive Management Profile

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Bapak Irman Boyle bergabung dengan IIF pada April 2012. Beliau memiliki pengalaman selama 15 tahun di berbagai institusi multilateral dan firma konsultan (IFC, APB, IIE/Energy Group, dan PA Consulting), bekerja di bidang layanan *advisory* dan *public sector lending* untuk proyek-proyek di bidang energi dan infrastruktur. Bersama IFC, beliau bekerja di Departemen *Transaction Advisory* di IFC Jakarta, memberikan saran kepada klien pemerintahan pada proyek batubara IPP dan proyek pengelolaan persediaan air. Hingga Agustus 2011, beliau juga merupakan perwakilan Indonesia untuk Private Finance Advisory Network (PFAN) dimana beliau memberikan saran untuk proyek-proyek dan dalam hal keuangan untuk memperoleh perjanjian pada beberapa proyek energi yang dapat diperbarui untuk IPP. Irman memperoleh gelar MBA dari Cass Business School at City University, London, Inggris (1999), dan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1993).

Bapak Boyle terlibat dalam *workshop* eksekutif tentang Ports Financing an Investing in Singapore yang diselenggarakan oleh Global Ports Forum. Beliau juga berpartisipasi dalam Green Banking Online Training, the Green Banking In Energy Efficiency and Renewable Energy yang dikelola oleh Renac.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perusahaan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun

Indonesian Citizen, 48 years old. Mr. Irman Boyle joined IIF in April 2012. He has about 15 years of experience in multilateral institutions and consulting Firms (IFC, APB, IIE/Energy Group, and PA consulting), working in advisory service and public sector lending for energy and infrastructure project. With IFC, he worked in the PPPs Transaction Advisory Department at its Jakarta office, advising government clients on a coal-fired IPP project and a water supply project. Until August 2011, he was also Indonesia's representative for the Private Finance Advisory Network (PFAN) where he provided project and finance advice for successful finance closings of several renewable energy IPP projects. Mr. Boyle holds a Master's degree in Business Administration from Cass Business School at City University London, UK (1999), and a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology, Indonesia (1993).

Mr. Boyle was involved in the executive Workshop on Ports Financing an Investing in Singapore hosted by Global Ports Forum, he also participated in a Green Banking Online Training, the Green Banking In Energy Efficiency and Renewable Energy hosted by Renac.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Director of the Company, he does not hold any position in other companies



IRMAN BOYLE

**Executive Vice President –
Head of Advisory Group**

Executive Vice President –
Head of Advisory Group

Portofolio IIF

IIF portfolio

JALAN TOL

Membiayai ruas jalan tol dengan total panjang 213.62 km.

TOLL ROAD

Financing toll road with total length 213.62 km.



TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA

Membiayai pengembangan perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang memiliki lebih dari 7.500 menara telekomunikasi tersebar di seluruh Indonesia.

TELECOMMUNICATION AND INFORMATICS

Financing telecommunication providers that have in total of more than 7,500 telecommunication towers spread all around Indonesia.

Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional sepanjang 1.676 km dan menghubungkan 17 kota/kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Development of national fiber optic networks with total length of 1,676 km across 17 cities/municipalities in East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South East Sulawesi and North Maluku.



KETENAGALISTRIKAN

Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik dan *temporary power*, dengan total kapasitas mencapai 1.900 MW:

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): 180 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH): 10 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG): 633 MW:
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): 2 MW.
- Temporary Power: 1.075 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP): 660 MW

ELECTRICITY

The construction and development of power generations and temporary power business which collectively reaches 1,900 MW:

- Hydroelectric Power Plant (HEPP): 180 MW
- Mini Hydro Power Plant (MHPP): 10 MW
- Gas fired power plant: 633 MW
- Solar Energy Power Plant: 2 MW
- Temporary Power: 1,075 MW, and
- Geothermal Power Plant: 660 MW.

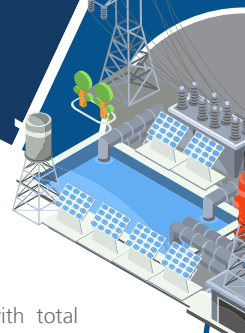


AIR MINUM

- Proyek penyediaan air minum Umbulan dengan panjang 92.3 km berkapasitas 4.000 liter/detik, dengan target untuk dapat memenuhi kebutuhan air 1,3 juta warga.
- Proyek pengolahan air bersih dengan kapasitas 3.500 liter/detik.

DRINKING WATER

- Drinking water supply project with total length of 92.3 km with total capacity of 4,000 liter/second. The drinking water is targeted to meet the water needs of 1.3 million residents.
- Water Treatment Plant with total capacity of 3,500 liter/second.



BANDAR UDARA

Pembangunan Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta yang meningkatkan kapasitas tampung menjadi 45 juta penumpang per tahun dan pengembangan 5 bandara dengan total peningkatan kapasitas tampung dari 25,4 juta penumpang per tahun menjadi 71,6 juta penumpang per tahun.

AIRPORT

The development of Terminal 3 Soekarno-Hatta airport increasing total passenger's capacity to 45 million passengers per year and development of five airports to increase the total passengers capacity from 25.4 million passengers per year to 71.6 million passengers per year.

MINYAK BUMI DAN GAS

- Pembiayaan pabrik LPG dengan kapasitas 40 MMSCFD dengan output 440 ton LPG per hari dan Train LNG dengan kapasitas 3.8 juta ton per tahun.
- Pembiayaan pembangunan pipa gas sepanjang 13.5 KM yang akan digunakan untuk menyalurkan gas sebesar 40 MMSCFD.
- Sistem Automasi Terminal BBM
- Floating Storage Offloading (FSO).

OIL AND GAS

- Financing LPG plant with total capacity of 40 MMSCFD with LPG output reaches 440 ton/day and LNG train with capacity of 3.8 million ton per year.
- Financing development of 13.5 km gas pipeline system for gas distribution up to 40 MMSCFD.
- Terminal Automation System
- Floating Storage Offloading (FSO)

PELABUHAN LAUT

- Pengembangan Operator Terminal Pelabuhan yang meningkatkan kapasitas tampung container menjadi 600 ribu TEUs per tahun.
- Pengembangan Pelabuhan Laut, yang akan meningkatkan kapasitas tampung container menjadi 2,4 juta TEUs per tahun, vessel mencapai 560,5 juta GT per tahun, non container menjadi 187,4 juta ton/m³ dan kapasitas tampung terminal penumpang sampai dengan 6 juta penumpang setiap tahun.

SEAPORT

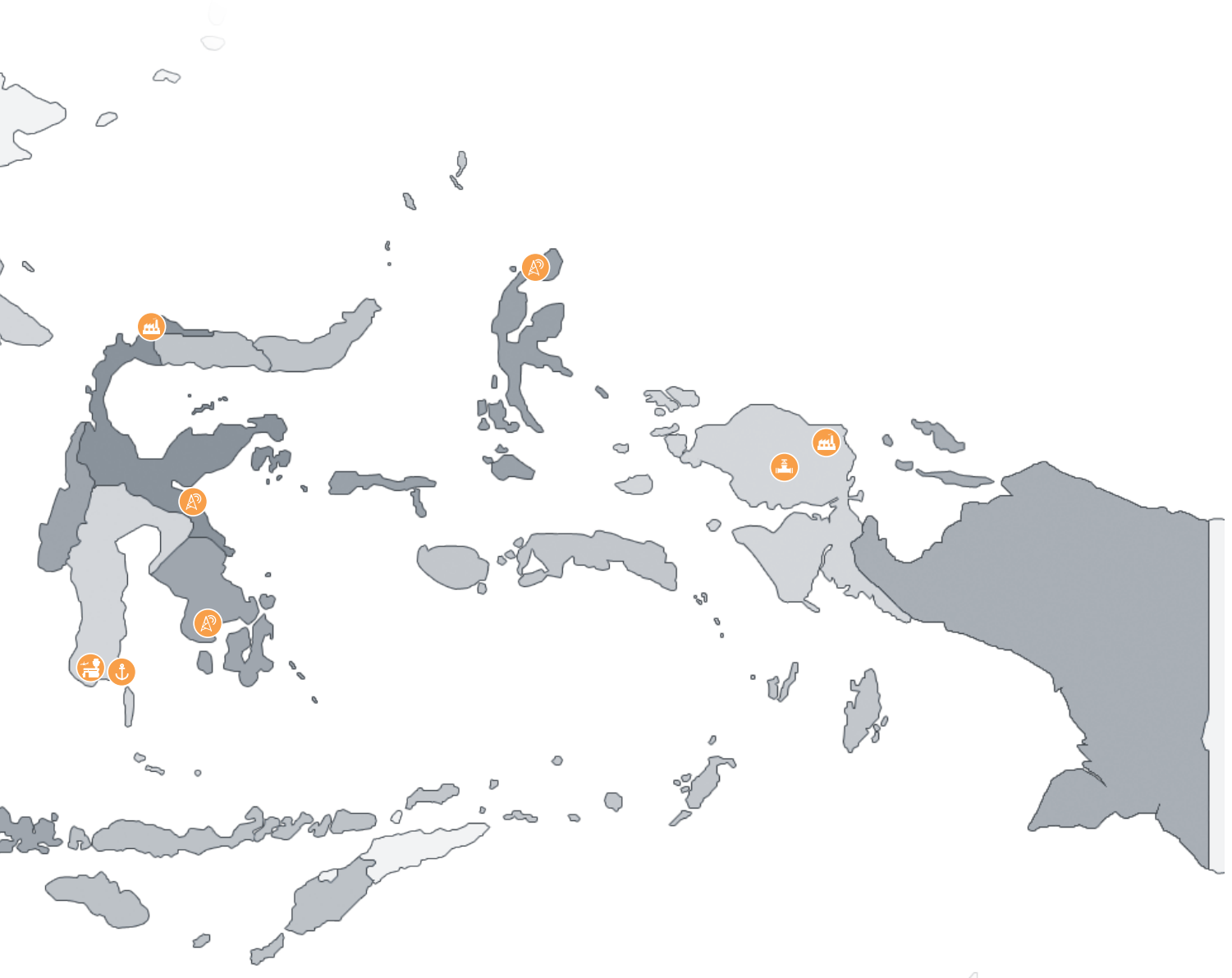
- Development of port terminal operator by increasing container's capacity to 600 thousand TEUs per year.
- Seaport development to increase total container's capacity to 2.4 million TEUs per year, vessel's capacity reaches 560.5 million GT, capacity for non-container to 187.4 million ton/m³ and increase in capacity for passengers terminal to serve 6 million passengers per year.

Lokasi Proyek

Project Location



- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|
|  | Telecommunication |  | Electricity |
|  | Airport |  | Seaport |
|  | Oil & Gas |  | Others |
|  | Road |  | Water |



No	Sektor / Sector	Lokasi / Location
1	Bandar Udara Airport	Semarang - Jawa Tengah / Central Java; Banjarmasin - Kalimantan Selatan / South Kalimantan D.I. Yogyakarta; Surabaya - Jawa Timur / East Java; Makassar - Sulawesi Selatan / South Sulawesi; Cengkareng - Banten
2	Pelabuhan Laut Seaport	Makassar - Sulawesi Selatan / South Sulawesi
3	Jalan Tol Toll Road	Cikampek - Jawa Barat / West Java
4	Telekomunikasi Telecommunication	DKI Jakarta; Indonesia Bagian Tengah / Central Indonesia; Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara / North Maluku
5	Ketenagalistrikan Electricity	Sumatera: D.I. Aceh, Asahan - Sumatera Utara; Sangir - Sumatera Barat / West Sumatera; Pekanbaru - Riau, Dumai - Riau; Jambi; Batam - Kepulauan Riau; Palembang - Sumatera Selatan / South Sumatera; Lampung Kalimantan: Bontang - Kalimantan Timur / East Kalimantan; Balikpapan - Kalimantan Timur / East Kalimantan Pontianak - Kalimantan Barat / West Kalimantan Jawa: DKI Jakarta, Bekasi - Jawa Barat / West Java Sulawesi: Gorontalo Papua Barat / West Papua: Sorong
6	Air Water	Pasuruan - Jawa Timur / East Java
7	Minyak Bumi & Gas Oil & Gas	Batam - Kepulauan Riau; Gresik - Jawa Timur / East Java; Semarang - Jawa Tengah / Central Java D.I. Yogyakarta; Tangguh - Papua Barat / West Papua

04

Tinjauan Pendukung Bisnis **Overview on Business Support**

- 60 Manajemen Risiko
Risk Management
- 64 Sosial & Lingkungan
Social & Environmental (S&E)
- 71 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 76 Teknologi Informasi
Information Technology



Manajemen Risiko

Risk Management

Sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien merupakan elemen penting dalam mendukung kelancaran aktivitas usaha yang dilakukan suatu perusahaan. Sebagai institusi pembiayaan di sektor infrastruktur, IIF senantiasa melakukan pengembangan sistem pengelolaan risiko secara berkesinambungan agar mampu menyesuaikan kemungkinan risiko yang ditimbulkan atas operasional Perusahaan dan pembangunan proyek sekaligus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi aktual yang ada. Hal ini menjadi penting, mengingat dinamisnya perkembangan yang terjadi di sektor infrastruktur dewasa ini.

Perusahaan mengelola paparannya terhadap berbagai macam potensi risiko melalui Direktorat Manajemen Risiko yang dikepalai oleh seorang Chief Risk Officer (CRO). Dalam hal proses pengambilan keputusan bisnis, unit usaha menjadi lini pertahanan terdepan, sedangkan unit manajemen risiko menjadi lini kedua. Proses ini selanjutnya juga diperkuat oleh adanya fungsi audit yang merupakan lini pertahanan ketiga. Terdapat beberapa komite pada tingkatan Direksi dan Komisaris yang terlibat dalam pengawasan proses mulai dari awal hingga pengambilan keputusan. Konsep *four eyes principle* diterapkan secara konsisten dalam setiap proses bisnis, sehingga dengan demikian, Perusahaan senantiasa mengedepankan proteksi berlapis dalam mengelola berbagai macam risiko yang dihadapinya.

TANTANGAN PENGELOLAAN RISIKO 2017

Berbeda dengan kondisi yang terjadi di tahun 2016, tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi dunia usaha termasuk IIF dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun IIF telah memiliki dan senantiasa memperbarui kerangka manajemen risiko sebagai bagian dari *Enterprise Risk Management* (ERM) Perusahaan, namun beberapa hal yang tidak dapat diprediksi seperti perubahan kebijakan maupun strategi pemerintah di bidang infrastruktur dapat turut mempengaruhi pengelolaan risiko yang ada di Perusahaan.

Guna meminimalisasi hal tersebut, selain melakukan kajian maupun pembaruan, IIF juga melakukan optimalisasi terhadap organ-organ terkait seperti komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi untuk secara bersama-sama membuka komunikasi yang aktif dalam memantau potensi risiko yang ada. Pandangan-pandangan yang diberikan tentunya akan digunakan untuk memperkuat analisis terkait *feasibility study* terhadap suatu proyek atau program-program yang dijalankan Perusahaan.

An effective and efficient risk management system is essential to support the Company's robust business activities. As an infrastructure finance company, IIF continues to develop risk management system that can adjust to any risks arising from the operational activities and project development, as well as current actual conditions. This is important considering today's dynamics in the development of the infrastructure sector.

The Company manages its exposures to various potential risks through the Directorate of Risk Management headed by a Chief Risk Officer (CRO). During the business decision-making process, the business unit will be the first line of defense, while the risk management is the second line. The process is further strengthened by the audit function as the third line of defense. There are several committees at the level of the Board of Directors and the Board of Commissioners involved in overseeing the process from the initiation of a business opportunity until final approval is made. The concept of the four eyes principle is consistently implemented in any business process, thus the Company always has multiple lines of defense in place in managing various risk exposures.

CHALLENGES OF 2017 RISK MANAGEMENT

In contrast with the condition in 2016, 2017 is indeed a very challenging year to many businesses, including IIF in implementing its business agenda. Even though IIF has already established and continuously updated its risk management framework as part of the Company's Enterprise Risk Management (ERM), there are several issues which are unpredictable and may affect the existing risk management practice in the Company, such as changes in the government policy or strategy in the infrastructure sector.

To minimize such risk, apart from conducting evaluation and renewal, IIF also optimizes relevant organs such as the committees under the Board of Commissioners and Board of Directors to be able to actively communicate in monitoring the risk potential. Any insights given will certainly be used to deepen the analysis related to the feasibility study of a project or program conducted by the Company.

2017 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi dunia usaha termasuk IIF dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun IIF telah memiliki dan senantiasa memperbarui kerangka manajemen risiko sebagai bagian dari Enterprise Risk Management (ERM) Perusahaan, namun beberapa hal yang tidak dapat diprediksi seperti perubahan kebijakan maupun strategi pemerintah di bidang infrastruktur akan turut mempengaruhi pengelolaan risiko yang ada di Perusahaan.

2017 is a very challenging year to many businesses, including IIF in implementing its business. Even though IIF has a risk management framework as part of the Company's Enterprise Risk Management (ERM) that is continuously updated, there are still several issues which are unpredictable and may affect the existing risk management practice in the Company, such as changes in the government policy or strategy in the infrastructure sector.

Perusahaan terus melakukan pengembangan pengelolaan risiko untuk beberapa area berikut:

1. Menjaga portofolio aset yang baik

Upaya IIF dalam menjaga aset yang baik di tahun 2017 adalah memprakarsai beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan risiko. Dari segi risiko pembiayaan, Perusahaan melakukan beberapa hal diantaranya peninjauan terhadap Risk Rating System yang saat ini digunakan untuk dilakukan pengkinian kedepannya, kerja sama dengan Pefindo Biro Kredit guna membuka akses bagi IIF atas kebutuhan sistem informasi manajemen risiko dalam melakukan penilaian calon debitur, serta melakukan pembaruan terhadap *Sector Allocation Guidelines* dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan di masa depan sembari mempertahankan *portfolio risk* yang diinginkan.

Perusahaan secara berkesinambungan terus melakukan proses pemantauan terhadap portofolio pembiayaan melalui kajian *stress-test* secara berkala untuk mengukur dampak merugikan yang mungkin dapat terjadi pada saat kondisi ekstrim seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga secara ekstrim. Secara umum, portofolio IIF secara keseluruhan masih dinilai berkelanjutan.

The Company has continuously developed the risk management areas as follows:

1. Maintaining good asset portfolio

In maintaining good asset portfolio in 2017, IIF initiated several programs aimed at enhancing capacity and risk management capabilities. In terms of financing risks, the Company conducted several programs, among others, reviewing and updating the existing Risk Rating System to cater to current market conditions, forging partnership with Pefindo Biro Kredit to open access for IIF to fulfill its risk management information system needs that will help IIF in assessing debtor's quality, as well as updating the Sector Allocation Guidelines in order to accommodate financing needs for the upcoming years while maintaining the expected risk portfolio.

The Company has continued to conduct a monitoring process on its lending portfolio through regular stress-test exercises in order to measure any potential adverse impact that might occur during extreme conditions such as a slowdown in economic growth, extreme changes in foreign exchange rates and interest rates. In general, IIF's overall portfolio is still deemed to be sustainable.

2. Memperbaiki proses kredit

Baik Direktorat Investasi maupun Direktorat Manajemen Risiko telah mengkaji ulang dan memperbarui SOP untuk memastikan prosedur tetap diperbarui sesuai dengan kondisi aktual.

3. Parameter risiko

Risk Dashboard dibentuk agar mempermudah manajemen dalam proses pemantauan risiko-risiko melekat Perusahaan. Parameter-parameter risiko yang digunakan terus diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan & situasi bisnis.

4. Social & Environment (S&E)

Divisi S&E (SED) dibawah Direktorat Manajemen Risiko terus berupaya menjangkau peminjam proyek dengan melakukan pengenalan dan pendampingan dalam penerapan prinsip S&E, agar memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola risiko S&E secara efektif, serta memenuhi persyaratan prinsip-prinsip S&E melalui pemantauan Rencana Tindakan Perbaikan (CAP).

5. Memperkuat pengelolaan risiko operasional

Perusahaan terus memperkuat upaya mitigasi risiko operasional diantaranya dengan hal-hal berikut:

- a. membangun Disaster Recovery Center (DRC) untuk melindungi IIF dan meminimalisasi risiko operasional dari potensi bencana alam;
- b. terus memelihara dan memperbarui cakupan asuransi untuk mengurangi setiap risiko operasional;

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko Perusahaan senantiasa mengedepankan kerangka kerja yang memadai yang mampu beradaptasi dengan perkembangan segala jenis risiko usaha yang ada. Untuk itu diperlukan perbaikan serta peningkatan terhadap mekanisme manajemen risiko Perusahaan secara berkelanjutan serta peninjauan terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko yang dilakukan secara berkala.

Di internal Perusahaan, mekanisme pengelolaan risiko dipantau secara terbuka dan berjenjang melalui infrastruktur tata kelola yang ada. Pembahasan serta evaluasi risiko Perusahaan di tahun 2017 dilakukan melalui mekanisme di bawah ini yaitu:

2. Improving the credit process

Both the Directorate of Investment and Directorate of Risk Management has reviewed and updated the existing SOP to ensure that the procedure is up-to-date to adjust to the actual condition.

3. Risk parameters

Risk Dashboard has been established to facilitate the management in monitoring the Company's inherent risks. The risk parameters used have been continuously updated to be in line with business development & condition.

4. Social & Environment (S&E)

The S&E Unit (SEU) under the risk Management Directorate has continued the effort to embrace more project borrowers by providing them with assistance related to the implementation of S&E principles, in order to strengthen their capability to effectively manage S&E risks and comply with the S&E-related requirements through the monitoring of Corrective Action Plans (CAPs).

5. Strengthening operational risk management

The Company has continued to strengthen its operational risk mitigation, among others, with the following:

- a. a.establishing a Disaster Recovery Center (DRC) to protect IIF and to minimize operational risks arising from natural disasters;
- b. continuously maintaining and renewing insurance coverage to mitigate operational risks;

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

The Company continues to put forward appropriate framework that is adaptable to any potential business risks. Therefore, continuous improvement of the Company's risk management mechanism and routine evaluation on the implementation of risk management are required.

The risk management mechanism is transparently monitored on a tiered basis through the existing governance infrastructure. Discussion and evaluation on the Company's risks in 2017 were conducted through the following mechanism:

1. 12 kali pertemuan dengan ALCO;
2. 4 kali pertemuan dengan RMC;
3. 4 kali pertemuan dengan ROC;
4. 51 kali pertemuan dengan BoD-IC;
5. 10 kali pertemuan dengan BOC-IC; dan
6. 5 kali pertemuan dengan Komite Audit.

Risk Appetite

Unit-unit pengelola risiko IIF senantiasa menjalankan komunikasi yang baik dan terbuka dalam merumuskan *risk appetite* Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis. Perumusan dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka kerja manajemen risiko serta faktor-faktor lainnya seperti peluang investasi, regulasi, keuangan dan operasional. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko dalam upaya optimalisasi performa usaha yang dilakukan.

Dalam proses penilaian risiko, Perusahaan telah menetapkan beberapa parameter terkait, yang telah diukur dan diperhitungkan secara rutin untuk memberikan informasi tentang tingkat eksposur risiko IIF dalam periode waktu dan kategori tertentu. Parameter tersebut dikategorikan dalam risiko-risiko terukur (kuantitatif) seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya (seperti risiko bisnis dan risiko reputasi); maupun risiko-risiko tidak terukur (kualitatif) seperti risiko bisnis, risiko regulasi & hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi, tingkat temuan audit, serta kondisi makroekonomi dan politik. Evaluasi terhadap pengukuran risiko dilaksanakan Perusahaan secara periodik untuk selanjutnya dilaporkan setiap triwulan ke Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi dan Komite Pengawasan Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk dibahas secara mendalam di dalam meeting. Hasil akhir dari proses tersebut akan didistribusikan dalam bentuk laporan berkala kepada pemegang saham Perusahaan.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko 2017

Efektivitas sistem manajemen risiko dievaluasi secara periodik berdasarkan parameter-parameter yang telah ditetapkan tersebut di atas. Meskipun pelaporan dilakukan dalam periode triwulan, pemantauan terhadap parameter parameter risiko dilakukan secara bulanan. Sampai dengan saat laporan ini dituliskan, pemantauan terakhir dilakukan sampai dengan akhir bulan November 2017, sedangkan pelaporan secara

1. 12 meetings with ALCO;
2. 4 meetings with RMC;
3. 4 meetings with ROC;
4. 51 meetings with BoD-IC;
5. 10 meetings with BOC-IC; and
6. 5 meetings with Audit Committee.

Risk Appetite

Risk management units in IIF continuously uphold transparent and open communication in formulating the Company's risk appetite, especially relating to strategic issues. The risk appetite is formulated by taking into account the risk management framework as well as other factors such as investment opportunities, regulations, and financial and operational conditions. This approach is instrumental in the Company's risk management as part of its efforts to optimize business performance.

For the risk assessment process, the Company has determined various related parameters, which have been measured and calculated regularly in order to provide information on what level of risk exposure IIF has within certain periods and categories of measurement. These parameters are categorized into measurable risks such as credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk and other risks (among others, business risk and reputational risk); as well as non-measurable risks such as regulatory & legal risk, compliance risk, insurance risk, severity of audit findings, and macroeconomic and political conditions. Evaluation on risk measurement is conducted periodically by the Company, which is then reported on a quarterly basis to the Risk Management Committee of the Board of Directors and the Risk Oversight Committee of the Board of Commissioners to be discussed thoroughly in the meetings. The final results of the process will be distributed in the form of a periodic report to the Company's shareholders.

Evaluation of the Effectiveness 2017 Risk Management System

The effectiveness of risk management system is evaluated periodically based on the above established parameters. Despite the quarterly reporting period, risk parameters are monitored on a monthly basis. As of the date of this report, risk monitoring is most recently conducted at the end of November 2017, while quarterly report for the period of December 2017 will just be submitted at the end of March

triwulan untuk periode Desember 2017 baru akan dilakukan di akhir Maret 2018 bersamaan dengan pelaporan tahunan. Untuk posisi triwulan terakhir sampai dengan akhir November 2017, secara agregat efektivitas sistem manajemen risiko dinilai memadai dengan hasil pengukuran parameter risiko yang masih sesuai dengan risk appetite Perusahaan dengan tingkat risiko dalam kisaran rendah-sedang. Hasil ini didasarkan pada pengukuran aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dari sisi aspek kuantitatif; parameter risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko lainnya berada di tingkat risiko rendah-moderat, sedangkan parameter risiko operasional berada pada tingkat rendah. Untuk aspek kualitatif, secara umum hasil evaluasi menunjukkan tingkat risiko rendah-sedang juga.

2018 along with the annual report. Based on the report of the last quarter up until the end of November 2017, the aggregate risk management system is deemed adequate, as indicated by the risk parameter assessment result that is still within the risk appetite of the Company, showing low-to-moderate risk level. This result is based on the measurement on both quantitative and qualitative aspects. In light of the quantitative aspect; the credit risk, market risk, liquidity risk, and other risks parameters are in the low-to-moderate risk level, while the operational risk parameter shows a low risk level. In view of the qualitative aspect, the evaluation result generally also indicates a low-to-moderate risk as well.

Sosial & Lingkungan

Social & Environmental (S&E)

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya di sektor pembiayaan infrastruktur, IIF senantiasa menekankan terpenuhinya dimensi sosial dan lingkungan (*social and environmental/S&E*) pada proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar proyek infrastruktur yang dikerjakan di Indonesia dapat tersinergi dengan prinsip-prinsip S&E yang diusung seperti terpenuhinya hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan di mana proyek infrastruktur dijalankan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pada akhirnya tidak meninggalkan permasalahan laten dikemudian hari.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan pada proyek infrastruktur, IIF senantiasa menekankan pemenuhan standar S&E bagi investor maupun pihak pelaksana proyek di lapangan. IIF telah meningkatkan dan menyelaraskan *Social and Environmental Management System (SEMS)* yang telah ada untuk memenuhi standar kinerja IFC 2012, yang juga diterapkan oleh pemegang saham Perusahaan yang dapat diinisiasi oleh proyek IIF. Ruang lingkup prinsip S&E IIF meliputi:

1. Sistem manajemen sosial dan lingkungan;
2. Tenaga kerja dan kondisi kerja;
3. Pencegahan polusi, pengurangan dan perubahan iklim;
4. Kesehatan masyarakat, keselamatan dan keamanan/keselamatan bendungan;
5. Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela;

In running infrastructure finance business, IIF continues to emphasize the fulfillment of social and environmental aspects on the financed infrastructure projects. This is done solely to ensure synergy between infrastructure projects in Indonesia and S&E principles that we strongly uphold, such as the fulfillment of human rights and sustainable environmental conservation in the infrastructure project sites. To that end, infrastructure development is expected not to leave latent defect in the future.

In granting lending facilities for any infrastructure project, IIF always underlines the compliance of S&E standard to investors and project officers in the field. IIF has augmented and harmonized its Social and Environmental Management System (SEMS) to comply with IFC's 2012 performance standards, which are also applied by the Company's shareholders that could be triggered by IIF's project. The scope of IIF's S&E principle covers:

1. Social and environmental management system;
2. Workforce and work condition;
3. Pollution prevention, climate change and mitigation;
4. Public health, dam safety and security;
5. Land acquisition and involuntary resettlement;

6. Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
7. Masyarakat adat; serta
8. Kepemilikan dan warisan budaya.

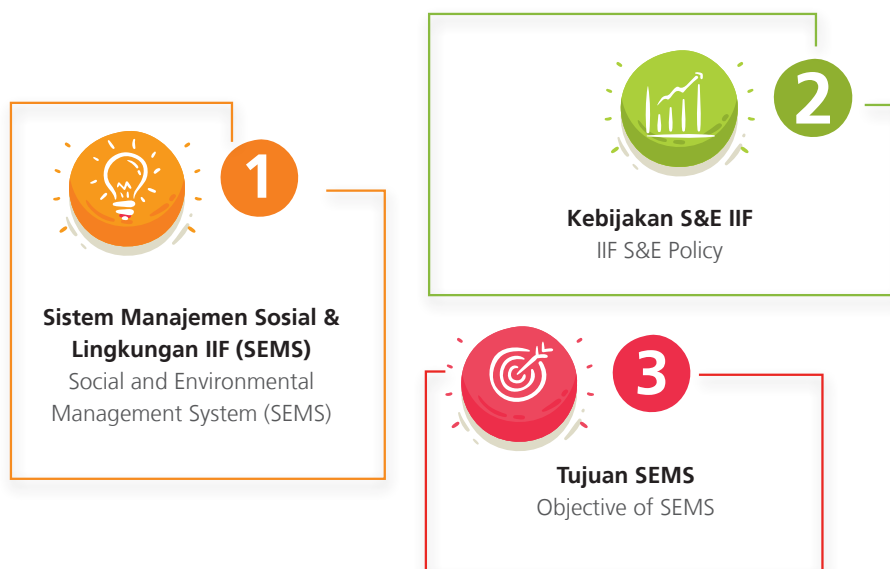
6. Conservation of biodiversity and management of sustainable natural resources;
7. Indigenous people; and
8. Cultural heritage and property.

Dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip S&E yang dimiliki IIF dari aspek sosial dan lingkungan yang terintegrasi berperan membantu klien dalam mengidentifikasi potensi risiko dan dampak yang berkaitan dengan risiko sosial dan lingkungan, sehingga setiap proyek infrastruktur dapat memperoleh manfaat dari praktik-praktik terbaik secara internasional dari pengelolaan dan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

IIF's program to implement S&E principles which integrate social and environmental aspects contribute in assisting clients to identify potential risk and impact related to social and environmental risks. Hence, every infrastructure project is expected to reap benefit from the best international practices of the social and environmental sustainability and management.

Sistem Manajemen S&E Perusahaan

Company S&E Management System



Dalam menjalankan S&E, IIF memiliki pedoman yaitu Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) yang telah dimutakhirkan pada Desember 2014 sehingga sesuai dengan IFC "Performance Standard 2012". Di dalam SEMS, Perusahaan menyajikan informasi-informasi terkait prosedur dan mekanisme operasional S&E yang meliputi:

IIF has established a guideline for the implementation of S&E practice, namely the Social and Environmental Management System (SEMS) which has been updated on December 2014 to conform to IFC "Performance Standard 2012". The Company provides information related to the operational procedure and mechanism of S&E in SEMS that covers:

- Panduan Operasi
- Kebijakan S&E
- Tujuan dan Ruang lingkup SEMS
- Persyaratan kinerja S&E
- Prinsip-prinsip S&E IIF
- Prosedur operasi sosial dan lingkungan: tahap kajian awal
- S&E prosedur operasi: tahap penilaian proyek

- Operational Guideline
- S&E Policy
- Objective and Scope of SEMS
- S&E performance requirements
- S&E principles of IIF
- Operational procedure of social and environmental: initial study stage
- Operational procedure of S&E: project assessment stage

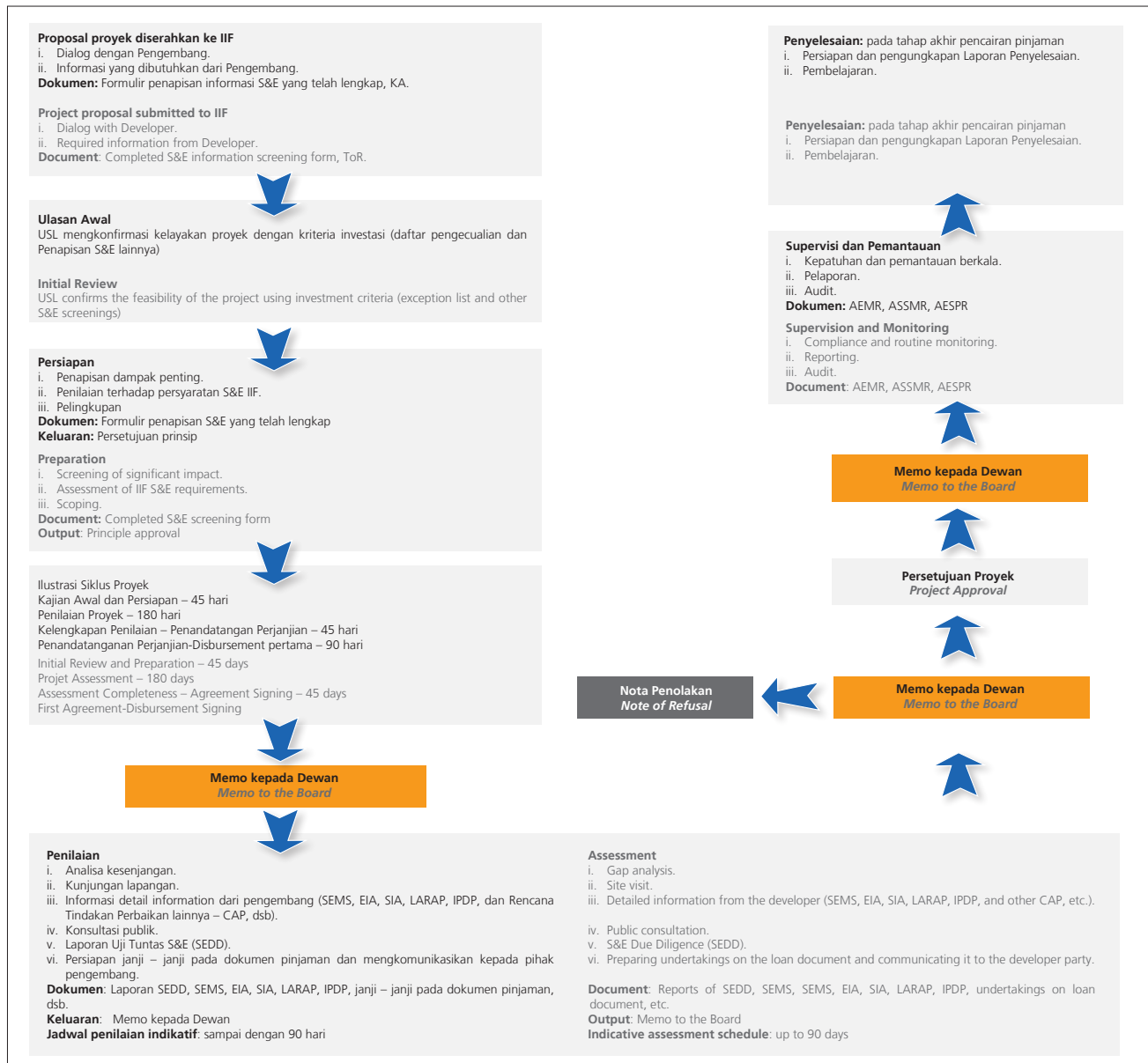
- Prosedur operasi S&E: pasca perjanjian dari sebuah pinjaman
- Tahap penyelesaian proyek

- Operational procedure of S&E: post loan agreement
- Project completion stage

Ilustrasi Siklus Proyek

Project Cycle Illustration

Gambar 4.2: Ilustrasi Siklus Proyek / Picture 4.2: Project cycle illustration



Daftar Pengecualian IIF

- Daftar kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai IIF adalah:
1. Segala kegiatan yang menggunakan bahan-bahan radioaktif;
 2. Operasi penebangan kayu komersial dari hutan basah tropis primer;

IIF Exclusion List

List of activities that will not be financed by IIF:

1. Any activity with the use of radioactive materials;
2. Commercial logging operations in primary tropical moist forest;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan perikanan laut yang menggunakan jaring insang hanyut (<i>drift net</i>); 4. Kegiatan yang mengintroduksi rekayasa genetik organisme; 5. Perjudian, kasino dan kegiatan usaha sejenis; 6. Pertambangan atau pengambilan terumbu karang hidup; 7. Produksi cat dengan menggunakan timbal; 8. Produksi atau perdagangan tembakau; 9. Produksi atau perdagangan bahan-bahan radioaktif; 10. Produksi atau perdagangan produk yang mengandung PCB; 11. Produksi atau perdagangan minuman beralkohol; 12. Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi; 13. Produksi dan/atau produk yang mengandung bahan asbestos; 14. Produksi, diseminasi dan penjualan pestisida ilegal; 15. Produksi atau perdagangan atau pemakaian serat asbes yang tidak berikat (<i>unbond</i>); 16. Produksi atau perdagangan kayu atau produk hutan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara berkelanjutan; 17. Produksi atau perdagangan bahan-bahan perusak atau yang dapat menipiskan lapisan ozon yang tunduk pada larangan internasional; 18. Produksi atau perdagangan bahan-bahan farmasi yang tunduk pada larangan internasional; 19. Produksi atau perdagangan bahan-bahan pestisida/herbisida yang tunduk pada larangan internasional; 20. Produksi atau perdagangan segala produk atau kegiatan yang dianggap ilegal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional; 21. Produksi atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan segala bentuk eksploitasi pemaksaan atau membahayakan buruh atau membahayakan buruh anak; 22. Produksi, perdagangan, penyimpanan atau transportasi dalam volume yang signifikan dari bahan-bahan beracun dan berbahaya, atau penggunaan bahan-bahan kimia beracun dan berbahaya dalam skala komersial; dan 23. Produksi atau kegiatan yang dilakukan di lahan tanah yang dimiliki, atau diklaim di bawah adjudikasi, oleh Masyarakat Adat, tanpa persetujuan yang didokumentasikan secara utuh dari masyarakat tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> 3. Drift net fishing in the marine environment; 4. Introduction of genetically engineered organisms; 5. Gambling, casinos and related businesses; 6. Mining or excavation of live coral; 7. Production of lead paints; 8. Tobacco production or trade; 9. Radioactive materials production or trade; 10. PCB-containing product production or trade; 11. Alcoholic beverages production or trade; 12. Weapons and amunitions production or trade; 13. Asbestos-containing product production and/or trade; 14. Production, dissemination and sale of illegal pesticides; 15. Production or trade or use of unbonded asbestos fibres; 16. Production or trade of wood or other forestry products from forests not sustainably managed; 17. Production or trade of ozone-depleting substances prohibited globally; 18. Production or trade of pharmaceutical materials prohibited globally; 19. Production or trade of pesticides/herbicides prohibited globally; 20. Production or trade of any product or activity deemed illegal under host country laws or regulations or international conventions and agreements; 21. Production or activities involving harmful or exploitative forms of forced labour/ child labour; 22. Production, trade, storage, or transport of significant volumes of hazardous and toxic chemicals, or commercial usage of hazardous and toxic chemicals; and 23. Production or activities that impinge on the lands owned, or claimed under adjudication, by Indigenous Peoples, without full documented consent from such peoples. |
|--|---|

Evaluasi Kinerja Unit S&E 2017

Selama tahun 2017 Divisi S&E telah berpartisipasi dalam program pelatihan dan lokakarya/seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dari Divisi S&E. Pelatihan/lokakarya ini termasuk yang diselenggarakan oleh investor supranasional (IFC dan DEG) dan juga pemberi pinjaman (IBRD / Bank Dunia) dan institusi lainnya yang berhubungan dengan isu *safeguards*. Semua spesialis S&E telah mengikuti beberapa pelatihan atau lokakarya selama tahun 2017, antara lain:

- IFC-IIF *Workshop on Environmental and Social Risk Management* (Mei 2017)
- DEG-IIF-InnovativKonzept *Training and Coaching on S&E Management* (Agustus 2017)
- Renac *Green Finance Specialist Training* (September – November 2017)

Penjangkauan dan bantuan langsung IIF mengenai *Safeguards* (perlindungan) S&E kepada klien eksisting dan potensial juga memperkuat kapasitas Divisi S&E IIF dalam mengelola risiko S&E sehingga memenuhi persyaratan SEMS. IIF telah secara aktif mempromosikan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan dengan berbagi prinsip dan pengalaman S&E dengan beberapa klien eksisting di dalam negeri. Selama tahun 2017, penjangkauan dan pelatihan tersebut telah dilakukan, antara lain, kepada:

- Salah satu *existing client* di sektor *water* – Pelatihan dan Pengenalan Prinsip-prinsip S&E IIF (May 2017)
- Salah satu *existing client* di sektor *oil & gas* – Pengembangan Kapasitas S&E (November 2017)
- Salah satu *existing client* di sektor *airport* – Pengembangan Kapasitas S&E (February dan Desember 2017)

Sejalan dengan pencapaian tersebut, IIF telah berhasil melaksanakan dengan baik Uji Tuntas untuk Sosial dan Lingkungan untuk pengembangan bisnisnya dan berhasil menerapkan SEMS secara konsisten untuk semua proyek portofolionya.

2017 Evaluation of S&E Unit Performance

Throughout 2017, the S&E Division has participated in training programs and workshops/seminars to enhance the knowledge and capacity of the S&E Division. These training activities/workshops include those held by supranational investors (IFC and DEG) as well as lenders (IBRD /World Bank) and other institutions dealing with safeguards issues. All S&E specialists have attended several training courses or workshops during 2017, among others:

- IFC-IIF *Workshop on Environmental and Social Risk Management* (May 2017)
- DEG-IIF-InnovativKonzept *Training and Coaching on S&E Management* (August 2017)
- Renac *Green Finance Specialist Training* (September - November 2017)

IIF's outreach and direct assistance on S&E *Safeguards* (protection) to existing and potential clients also strengthens the capacity of the S&E Division of IIF in managing S&E risks to meet SEMS requirements. IIF has actively promoted sustainable infrastructure financing by sharing S&E principles and experience with existing domestic clients. Throughout 2017, these outreach and training have been conducted, among others, to:

- One of existing clients in water sector - Training and Introduction of IIF's S&E Principles (May 2017)
- One of existing clients in oil & gas sector - S&E Capacity Building (November 2017)
- One of existing clients in airport sector - S&E Capacity Development (February and December 2017)

In line with these achievements, IIF has successfully implemented the Social and Environmental Due Diligence for its business development and has consistently applied SEMS to all its portfolio projects.

Upaya Kami untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Our Work Towards Sustainable Development

IIF bekerja sama secara erat dengan kliennya demi memastikan bahwa prinsip-prinsip S&E dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat proyek. Hal ini dilakukan untuk menjaga bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

IIF is working closely with its clients to ensure that IIF's S&E principles are well implemented at project level. This is to safeguard the infrastructure projects financed by IIF is aligning with sustainable development goals.

Program peningkatan kesejahteraan di proyek jalan tol

IIF membantu klien dalam mengembangkan program peningkatan kesejahteraan yang tepat sasaran bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek. Sejalan dengan hal tersebut, IIF juga turut memonitor kemajuan program tersebut. Program ini diharapkan dapat meningkatkan atau mengembalikan kesejahteraan Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek.

Livelihood restoration program in a toll road project.

IIF is assisting the client in developing the right livelihood restoration program for the Project Affected People. Along the way IIF is also helping the Company in monitoring progress of the program. In the program is expected to improve or restore the livelihood of the Project Affected People.



Bantuan dan pemberdayaan ternak kambing untuk masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol. / Assistance and empowerment for livestock groups of goats for the toll road project affected people.



Dalam membuka toko kelontong di Jatiwangi bagi masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol. / The toll road concessionaire accompanied the project affected people in opening grocery stores in Jatiwangi.

Mendukung Pembangunan Bangunan Efisien Energi

IIF mendukung program efisiensi energi dengan memberikan pinjaman bagi pengembangan bangunan efisien energi dari Hangar bandara kepada *Aircraft Maintenance Facility*.

Supporting the Development of Energy Efficiency Building

IIF is promoting energy efficiency initiatives by providing finance for the development of the energy efficiency building of the Hangar aircraft for the Aircraft Maintenance Facility project.



Ukuran *Hangar 4* yang ramping (berbentuk seperti kupu-kupu) memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pesawat terbang. Bangunan ini dilengkapi dengan skylight pada bagian atap dan sisinya untuk memaksimalkan sinar matahari yang masuk pada siang hari untuk mengurangi konsumsi energi. Bangunan ini didesain sedemikian rupa untuk meminimalisasi turbulensi melalui sirkulasi udara yang maksimal, sehingga dapat mengurangi penggunaan AC yang berdampak pada berkurangnya konsumsi energi / *Hangar 4 narrow body (butterfly-shape like)* allows more flexible movement of the airplanes. The building is equipped with skylight on the roof and on the side to maximize lighting during daytime to reduce energy consumption. The building is designed to allow minimum air turbulence with maximum air circulation, thus reducing the use of AC which resulted low energy consumption.

Ringkasan Portfolio IIF 2017

IIF Portfolio Summary in 2017

Jalan Tol

Membiayai ruas jalan tol dengan total panjang 213.62 km

Telekomunikasi dan Informatika

Membiayai pengembangan perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang memiliki lebih dari 7.500 menara telekomunikasi tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional sepanjang 1.676 km dan menghubungkan 17 kota/kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Ketenagalistrikan

Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik dan *temporary power*, dengan total kapasitas mencapai 1.900 MW: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): 180 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH): 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG): 633 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): 2 MW, *Temporary Power*: 1.075 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP): 660 MW

Minyak Bumi dan Gas

- Pembiayaan pabrik LPG dengan kapasitas 40 MMSCFD dengan output 440 ton LPG per hari dan Train LNG dengan kapasitas 3.8 juta ton per tahun
- Pembiayaan pembangunan pipa gas sepanjang 13.5 KM yang akan digunakan untuk menyalurkan gas sebesar 40 MMSCFD
- Sistem Automasi Terminal BBM
- *Floating Storage Offloading* (FSO)

Air Minum

- Proyek penyediaan air minum Umbulan dengan panjang 92.3 km berkapasitas 4.000 liter/detik, dengan target untuk dapat memenuhi kebutuhan air 1,3 juta warga
- Proyek pengolahan air bersih dengan kapasitas 3.500 liter/detik

Bandar Udara

Pembangunan Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta yang meningkatkan kapasitas tampung menjadi 45 juta penumpang per tahun dan pengembangan 5 bandara dengan total peningkatan kapasitas tampung dari 25,4 juta penumpang per tahun menjadi 71,6 juta penumpang per tahun.

Pelabuhan Laut

- Pengembangan Operator Terminal Pelabuhan yang meningkatkan kapasitas tampung container menjadi 600 ribu TEUs per tahun
- Pengembangan Pelabuhan Laut, yang akan meningkatkan kapasitas tampung container menjadi 2,4 juta TEUs per tahun, vessel mencapai 560,5 juta GT per tahun, non container menjadi 187,4 juta ton/m³ dan kapasitas tampung terminal penumpang sampai dengan 6 juta penumpang setiap tahun

Toll Road

Financing toll road with total length of 213.62 km.

Telecommunication and Informatics

Financing telecommunication providers that have in total of more than 7,500 telecommunication towers spread all around Indonesia. Development of national fiber optic networks with total length of 1,676 km across 17 cities/municipalities in East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi and North Maluku.

Electricity

The construction and development of power generators and temporary power business which collectively reaches 1,900 MW: Hydroelectric Power Plant (HEPP): 180 MW, Mini Hydro Power Plant (MHPP): 10 MW, Gas-fired Power Plant: 633 MW, Solar Energy Power Plant: 2 MW, Temporary Power: 1,075 MW, and Geothermal Power Plant: 660 MW.

Oil and Gas

- Financing LPG plant with total capacity of 40 MMSCFD with LPG output to reach 440 ton/day and LNG train with capacity of 3.8 million ton per year
- Financing development of 13.5 km gas pipeline system for gas distribution up to 40 MMSCFD
- Terminal Automation System
- Floating Storage Offloading (FSO)

Drinking Water

- Drinking water supply project with total length of 92.3 km with total capacity of 4,000 liter/second. The drinking water is targeted to meet the water needs of 1.3 million residents
- Water Treatment Plant with total capacity of 3,500 liter/second

Airport

The development of Terminal 3 Soekarno-Hatta Airport increasing total passenger's capacity to 45 million passengers per year and development of five airports to increase the total passengers capacity from 25.4 million passengers per year to 71.6 million passengers per year.

Seaport

- Development of Port Terminal Operator by increasing container's capacity to 600 thousand TEUs per year
- Seaport development to increase total container's capacity to 2.4 million TEUs per year, vessel's capacity reaches 560.5 million GT, capacity for non-container to 187.4 million ton/m³ and increase in capacity for passengers terminal to serve 6 million passengers per year

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Dalam merumuskan kebijakan SDM, Perusahaan senantiasa bersandar pada nilai-nilai inti IIF yaitu:

- **Kolaborasi**
IIF memiliki komitmen terhadap kepercayaan, rasa hormat, komunikasi terbuka, pengakuan atas prestasi, pemahaman atas tujuan organisasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.
- **Keunggulan**
IIF memiliki komitmen terhadap keunggulan, seperti ketelitian hingga ke hal-hal yang mendetil, tidak memberikan toleransi terhadap kesalahan, akurat, mampu memenuhi harapan, mengedepankan sikap profesionalisme dalam pekerjaan, dan mampu memecahkan masalah.
- **Komitmen terhadap bisnis infrastruktur**
IIF memiliki komitmen untuk menjadi pakar bisnis infrastruktur di Indonesia.

Nilai-nilai ini diharapkan dapat dihayati oleh tiap individu Perusahaan dalam bekerja sebagai tim dan berinteraksi dengan para mitra bisnis. Selaras dengan komitmen IIF dalam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam merangkul seluruh karyawan, penerapan nilai-nilai tersebut juga diharapkan dapat menjembatani kebutuhan berbagai pemangku kepentingan secara harmonis. Penerapan prinsip kesetaraan tersebut juga tercermin dari komposisi karyawan IIF, dimana Perusahaan tidak membatasi peran pekerja wanita dalam ikut membangun Perusahaan. Pada tahun 2017, sebesar 46% dari jumlah karyawan IIF terdiri dari karyawan wanita. Beberapa pekerja wanita bahkan menempati posisi kunci, seperti manajer, manajer senior, serta direktur.

ORGAN PENGELOLA SDM PERUSAHAAN

Guna menciptakan pengelolaan SDM yang terintegrasi serta sesuai dengan tujuan maupun rencana Perusahaan, IIF memiliki Divisi SDM yang berperan melakukan tugas-tugas terkait kebutuhan rekrutmen, pengembangan, dan penilaian kinerja SDM di Perusahaan.

REKRUTMEN

Perkembangan pembangunan infrastruktur di tahun 2017 yang semakin menemukan arahnya terutama dalam hal pemenuhan aspek legal-formal yang memberikan keleluasaan bagi pihak swasta untuk terlibat, tentunya semakin membuka potensi khususnya dalam hal pemenuhan produk pembiayaan

The Company continuously formulates its HR policy based on IIF's core values, namely:

- **Collaboration**
IIF is committed to collaborate with trust, respect, open communication, recognition of achievements, understanding of organizational goals and collaboration to achieve them.
- **Excellence**
IIF is committed to excellence with an approach that is detailed-oriented, intolerant of mistakes, accurate, meeting expectations, with an emphasis on professionalism, quality in our work and the ability to solve problems.
- **Commitment to infrastructure business**
IIF is committed to be an expert in infrastructure business in Indonesia.

Each individual in the Company is expected to internalize these values, particularly in working together as a team and in interacting with all business partners. In line with IIF's commitment to uphold the equality principle in its treatment of all employees, the application of these values is expected to harmoniously bridge the needs of many stakeholders. IIF holds true to this commitment, as evidenced in its employee composition development whereby the Company does not limit the role of women in building the Company. As of 2017, women accounted for 46% of IIF's total workforce, some of whom hold key positions, such as managers, senior managers and directors.

HR MANAGEMENT ORGAN OF THE COMPANY

In order to create an integrated HR management that is in line with the goals and plans of the Company, IIF has established an HR Division that is responsible for carrying out tasks related to recruitment, development, and evaluation of HR performance in the Company.

RECRUITMENT

The rapid development of infrastructure construction in 2017, especially in the fulfillment of legal-formal aspects which provides ample room for the private sector to participate, has certainly opened wide opportunities, particularly in providing financing and consulting services that are indeed IIF's added

dan *advisory* yang selama ini menjadi nilai lebih IIF dibanding institusi keuangan umum seperti perbankan. Dalam rangka memaksimalkan potensi tersebut, IIF mempersiapkan kuantitas karyawan yang proporsional dan telah disesuaikan dengan rencana bisnis yang ditetapkan.

Di tahun 2017, IIF menyadari pentingnya untuk mencetak profesional muda yang memiliki kompetensi khusus di sektor pembiayaan infrastruktur yang andal serta mampu menjawab tantangan di sektor pembiayaan infrastruktur dengan pendekatan dan karakteristik usaha yang dimiliki IIF begitu juga dalam mempersiapkan regenerasi yang terukur kedepannya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, IIF melakukan strategi pengelolaan SDM berbasis program pengembangan profesional.

Menindaklanjuti rencana tersebut, IIF telah melaksanakan program *Officer Development Program* (ODP) yang telah merekrut sebanyak lima (5) orang calon karyawan yang berasal dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dengan pendampingan dari praktisi maupun profesional senior, IIF berharap regenerasi dapat berlangsung secara baik serta mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan dalam aspek pemasaran produk pembiayaan infrastruktur. Perlu disampaikan bahwa program ODP yang diluncurkan melalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ternama menuai minat yang sangat tinggi dari lulusan perguruan-perguruan tinggi tersebut.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Guna meningkatkan kompetensi karyawan IIF dalam menghadapi dinamika serta perkembangan di sektor pembiayaan infrastruktur, IIF senantiasa memberikan serta memfasilitasi karyawannya untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan. Pemberian kesempatan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan IIF untuk memperkuat kompetensi karyawan baik teknis maupun non teknis. Dengan adanya kesempatan tersebut, IIF berharap akan terbentuk sikap profesionalisme yang tidak hanya baik dari segi kompetensi namun juga karakter pribadi & kepemimpinan.

Sepanjang 2017, IIF telah mengikutsertakan sebanyak 85 orang karyawan, 4 Direktur dan 1 Manajemen Eksekutif di berbagai pelatihan, seminar dan workshop yang diklasifikasikan ke

value that might not be offered by common financial institution like banks. In order to maximize such potential, IIF has ensured that the number of its workforce is proportionate to the needs and able to meet the established business plan.

IIF realizes the importance of creating young professionals specialized in infrastructure finance sector in 2017, who are competent and able to address infrastructure finance issues with an approach and business characteristics that IIF has introduced, and is currently preparing the measured regeneration system going forward. To that end, IIF has devised an HR management strategy based on professional development program.

Following such plan, IIF organized an Officer Development Program that resulted in the recruitment of as many as five (5) potential candidates coming from a very respected university in Indonesia. With the assistance from practitioners and senior professionals, IIF hopes that this regeneration can run according to the plan and able to cater to the needs in marketing the infrastructure financing products. It should be pointed out that the ODP program launched through cooperation with several reputable universities has drawn so much interest of many graduates from these universities.

EMPLOYEE EDUCATION AND TRAINING

IIF continues to provide and facilitate its employees to participate in various educational courses and trainings to improve the employees' competency to adopt to the dynamics and development of the infrastructure financing. The opportunity to develop the competency through education and training aims to strengthen the basic competence of the people, provide ammunition that can support them to complement and improve the employees' competences both in the technical aspect & non technical aspect. IIF expects that such opportunity will bring out professional attitude from each employee, in term of competency, personal character & leadership.

Throughout 2017, IIF has sent 85 employees, 4 Directors and 1 Executive Committee members in various training courses, seminars, and workshop classified into basic, advanced and

dalam pelatihan dasar, lanjutan dan profesional dengan rata-rata hari pelatihan, per karyawan per tahun di atas 7 hari kerja tiap tahunnya. IIF telah melakukan investasi sebesar Rp500.359.837 melalui pelaksanaan program pengembangan karyawan.

Selain itu, IIF juga menyediakan pelatihan untuk 5 orang karyawan ODP yang telah direkrut dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan pelatihan *in class*.

KOMPOSISI KARYAWAN

Hingga 31 Desember 2017, jumlah karyawan Perusahaan tercatat sebesar 85 orang yang terdiri dari 6 karyawan baru, 5 orang karyawan pengganti, 5 orang ODP dan 69 orang karyawan eksisting. Berikut adalah pembagian jumlah karyawan berdasarkan klasifikasi yang ada.

professional training with the average training days per employee per year is reaching above 7 working days every year. IIF has invested Rp500,359,837 through the implementation of employee development program.

In addition of above, IIF also provided training for the recruited ODP (5 person) starting from leadership training and in class training.

EMPLOYEE COMPISITION

As of December 31, 2017, the total number of employees in the Company reached 85 people which consisted of 6 new employees, 5 substitute employees, 5 ODP and 69 existing employees. The following is the composition of the number of employees based on the existing classification.

Komposisi Karyawan berdasarkan Pendidikan

Pendidikan / Education	2016	%	2017	%	Hasil Perbandingan/ Comparison Result	
					Perubahan/Changes	%
Diploma	5	6	5	6	0	0
Strata 1 / Bachelor	37	47	41	48	4	11
Strata 2 / Master	37	47	39	46	2	5
Jumlah / Total	79	100	85	100		

Employee Composition based on Education

Komposisi Karyawan berdasarkan Status Karyawan

Status Karyawan / Employee Status	2016	%	2017	%	Hasil Perbandingan/ Comparison Result	
					Perubahan/Changes	%
Tetap / Permanent	73	94	79	93	6	8
Kontrak / Contract	6	6	1	1	(5)	(83)
ODP	0	0	5	6	5	100
Jumlah / Total	79	100	85	100		

Employee Composition based on Employee Status

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin / Gender	2016	%	2017	%	Hasil Perbandingan/ Comparison Result	
					Perubahan/Changes	%
Laki-Laki / Male	43	54	47	55	4	9
Wanita / Female	36	46	38	45	2	6
Jumlah / Total	79	100	85	100		

Employee Composition based on Gender

Komposisi Karyawan berdasarkan Level Jabatan**Employee Composition based on Position**

Level Jabatan / Position	2016	%	2017	%	Hasil Perbandingan/ Comparison Result	
					Perubahan/Changes	%
Eksekutif / Executive	23	29	21	25	(2)	(9)
Manajer Madya / Middle Managers	32	41	35	41	3	9
Pelaksana / Staff	24	30	29	34	5	21
Jumlah / Total	79	100	85	100		

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia**Employee Composition based on Age**

Berdasarkan Usia / Base on Age	2016	%	2017	%	Hasil Perbandingan/ Comparison Result	
					Perubahan/Changes	%
22-30	21	27	22	26	1	5
31-40	32	41	36	42	4	13
41-50	23	29	23	27	0	0
51-54	3	4	4	5	1	33
Jumlah / Total	79	100	85	100		

MANAJEMEN KINERJA

Dalam rangka memantau kinerja karyawan untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan, Divisi SDM telah mengembangkan program manajemen kinerja dengan menggunakan modul penilaian yang berbasis Indikator Kinerja Utama.

Program Retensi

IIF senantiasa memberikan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif dan proporsional bagi seluruh karyawan. Selain sebagai bentuk komitmen IIF bagi pemenuhan kesejahteraan karyawan, program ini juga berperan dalam menciptakan loyalitas dan integritas karyawan terhadap Perusahaan.

Komunikasi Karyawan

IIF senantiasa membuka ruang komunikasi yang luas bagi seluruh karyawan dalam menyampaikan aspirasi terkait permasalahan-permasalahan kepegawaian serta tata hubungan antara pegawai dan Perusahaan dengan mengadakan forum-forum yang dilaksanakan secara berkala.

PERFORMANCE MANAGEMENT

In an effort to monitor employees' performance as to ensure the completion of the Company's objective, the HR Division has developed a performance management program by using an assessment module based on Key Performance Indicators.

Retention Program

IIF continues to provide a competitive and proportionate compensation and benefits package for all of its employees. As part of its commitment to improving employees' welfare, this program also helps create loyalty and integrity among the employees in respect of the Company.

Employee Communication

IIF is committed to provide an open communication platform that allows all employees to raise their concerns on any employment issues and facilitates communications between the employees and the Company through forums that the Company routinely holds. Throughout 2017, IIF has held 6

Sepanjang 2017, IIF telah mengadakan pertemuan sebanyak 6 (1 kali *townhall* dan 5 kali *mini townhall meeting*) dengan seluruh pegawai dengan agenda pembahasan yang beragam.

Turnover Karyawan

Sepanjang 2017, terdapat 2 *turnover* pada posisi karyawan kunci karena IIF mampu mengelola SDM dengan baik dan mengantisipasi hal tersebut dengan penyiapan jalur karir bagi karyawan untuk mengisi posisi yang kosong serta melalui proses rekrutmen baru.

Remunerasi Karyawan

Dalam menjaga kinerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan sebagai aset utama dalam mencapai target yang lebih baik di masa mendatang, IIF menyediakan program kesejahteraan karyawan, diantaranya:

1. Gaji dan Bonus Kinerja

Struktur gaji dan bonus kinerja bagi karyawan didasarkan pada tingkat atau pangkat masing-masing karyawan ditambah dengan prestasi yang telah dicapai dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.

2. Fasilitas dan Tunjangan

Selain gaji pokok, tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi, Perusahaan juga memberikan fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan lainnya, antara lain:

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Kesehatan.
- Tunjangan Hari Raya yang diberikan setahun sekali.
- Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya.
- Tunjangan keanggotaan olahraga.

meetings (1 *townhall* and 5 *mini townhall*) attended by all employees to discuss various agenda.

Employee Turnover

There was two key person turnover in 2017 since IIF was able to properly manage its human capital. Employee turnover was anticipated by preparing a career path for employees to occupy vacant positions and through the recruitment process.

Employee Remuneration

In maintaining performance, loyalty, and productivity of employees as the main asset in achieving a better target in the future, IIF provides employee welfare programs, among others:

1. Salary and Performance Bonus

The structure of salary and performance bonus for employees is based on the level or rank of each employee plus the achievements that have been made as well as contributions to the Company.

2. Facilities and Allowances

In addition to basic salary and allowances for transportation, the Company also provides other facilities and allowances, namely:

- Employment Social Security Administrative Bodies (BPJS Ketenagakerjaan).
- Health Social Security Administrative Bodies (BPJS Kesehatan).
- Annual Religious Holiday Allowance (THR).
- Reimbursement for outpatient and inpatient medication for employees and their family members.
- Sport membership allowance.

Teknologi Informasi

Information Technology

Memasuki era digitalisasi ekonomi saat ini, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam memberi dukungan terhadap aktivitas bisnis suatu entitas usaha telah menjadi sebuah keniscayaan. Setiap entitas usaha kini tengah dituntut untuk mampu memberikan layanan yang efisien dan jika dimungkinkan minim dari faktor-faktor gangguan yang dapat memperlambat suatu proses yang ada. Untuk itu, posisi TI dalam menghadirkan solusi atas kelemahan-kelemahan suatu proses bisnis menjadi sangat penting dewasa ini. Selain itu, pemanfaatan TI juga diperlukan terkait kesiapan suatu perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan maupun kompetisi yang ada. Melalui upaya pengintegrasian seluruh proses bisnis, suatu perusahaan akan mampu memperkuat posisinya melalui keunggulan-keunggulan yang dimiliki.

Berdasarkan pemahaman tersebut, IIF sebagai entitas bisnis yang bergerak di sektor pembiayaan juga memiliki kebutuhan dalam melakukan efektivitas seluruh proses bisnis yang ada melalui pemanfaatan TI. Fokus operasional TI di Perusahaan menekankan pada dua objek utama yang meliputi aspek inti (*core*) dan aspek pendukung (*support*). Terkait aspek inti, IIF senantiasa melakukan pengembangan dan pemutakhiran pada sistem kegiatan usaha yang meliputi mekanisme Sistem Informasi Keuangan dan *mandatory system* terkait kegiatan bisnis yang dijalankan sehari-hari. Untuk aspek pendukung, departemen TI juga berupaya menyediakan infrastruktur serta sistem yang meliputi tugas-tugas pengarsipan serta penyediaan *database* atas berbagai dokumen penting Perusahaan. Hal ini menjadi penting mengingat kegiatan usaha Perusahaan di bidang pembiayaan membutuhkan dokumentasi terkait rekam jejak klien dalam rangka pengambilan keputusan pendanaan.

Sementara itu, pengembangan dari sisi aplikasi terus dilakukan secara berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan, penambahan fitur bisnis, dan penyesuaian dengan aturan dari pihak otoritas. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan dari sisi sistem informasi manajemen juga terus dilakukan secara intensif, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif berlandaskan data aktual.

PENGEMBANGAN TI 2017

Disaster Recovery Plan

Dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen risiko, terutama risiko yang berhubungan dengan bencana, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia maupun faktor alam,

As we now enter economic digitalization era, the utilization of Information Technology (IT) is inevitably useful in supporting business activities of any enterprise. They currently face strong demand for efficient services, more importantly, those with minimum disruption risks that may hinder the existing process. Hence, the role of IT to provide solutions to many complications in a business process is increasingly vital. The use of IT is also necessary to equip the company in tackling various challenges and competitions. Through the integration of the whole range of business processes, a company will be able to strengthen its position by capitalizing on its competitive edge.

Based on that understanding, IIF as a business institution engaged in the financing sector also needs to effectively run the existing business process by utilizing IT. The Company's IT focuses its operations on two major aspects, namely core aspect and supporting aspect. Regarding the core aspect, IIF continues to perform developments and upgrades its business systems covering the Financial Information System and mandatory systems relevant to routine business activities. For the supporting aspect, the IT department strives to provide infrastructure and systems that include archiving as well as providing a database for the Company's important documents. This is significant considering the Company's business activities in the financing field requires proper documentation system in relation to clients' records and accounts for the sake of making decisions on the financing process.

Meanwhile, the development of applications is continuously conducted to spur the Company's business growth, improve business features, and make adjustments to conform to the regulations issued by the authorities. In line with this, the development of a management information system is also conducted intensively so that the decision-making process can be carried out objectively based on actual data.

IT DEVELOPMENT 2017

Disaster Recovery Plan

In carrying out the risk management system, particularly for disaster-related risks due to human error or force majeure, the Company has developed a Disaster recovery Plan ("DRP")

Perusahaan telah menyusun program *Disaster Recovery Plan* ("DRP") untuk memitigasi terjadinya bencana dan memulihkan gangguan pada infrastruktur teknologi informasi Perusahaan dan telah mengimplementasikan DRC on cloud pada akhir 2016. Pada tahun 2017, IIF melakukan dua kali DRC test untuk melakukan simulasi prosedur penanganan bencana terhadap infrastruktur teknologi informasi dengan melibatkan tim TI, tim Operational Risk, tim pengguna Core Systems yaitu Credit Operation, Treasury Operation, Finance & Accounting serta Corporate Planning. Hasil tes DRC dinyatakan berhasil yang ditunjukkan dengan aliran data transaksi yang disinkronisasikan secara otomatis dari Data Center ke DRC on Cloud.

Operational Excellence

Dalam rangka menerapkan *best practice* kegiatan usaha di seluruh lini terutama terkait kegiatan operasional usaha, pada tahun 2017 IIF melakukan beberapa pengembangan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti Document Management System (DMS) untuk Corporate Secretary Division, IFRS, HR Administrative System, IT Helpdesk Ticketing System.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Komitmen IIF dalam mendukung terciptanya proses bisnis yang efisien, modern dan berkelanjutan melalui pemanfaatan TI dituangkan melalui perumusan rencana pengembangan TI untuk jangka panjang. Dari rencana tersebut, IIF melalui Divisi TI akan merumuskan kebijakan strategis tahunan maupun jangka menengah dalam melakukan peningkatan kualitas penerapan TI di lingkungan perusahaan. Rencana-rencana tersebut juga akan diajukan kepada organ-organ pengawasan yang ada seperti Komite ITSC Direksi maupun Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan maupun arahan yang diperlukan.

Rencana pengembangan penerapan TI di tahun mendatang meliputi:

- DMS untuk Departemen Credit Operation
- DMS untuk Divisi Finance dan Accounting
- DMS untuk Divisi HR & GA
- *Project Appraisal Memorandum Template* (untuk proposal yang berasal dari kredit)
- *Employee Self Service*

to mitigate such disasters and recover the Company's information technology infrastructure when disaster strikes and the Company has also implemented DRC on cloud at the end of 2016. In 2017, IIF conducted DRC test twice to carry out disaster handling procedure simulation on information technology infrastructure by involving IT team, Operational Risk team, Core Systems user team, namely Credit Operation, Treasury Operation, Finance & Accounting and Corporate Planning. The DRC test result is declared successful as shown by the transaction data flow synchronized automatically from Data Center to DRC on Cloud.

Operational Excellence

In implementing the best practices of business activities at all levels, particularly related to the business operational activities, IIF conducted several developments in supporting the operational activities of the company in 2017, such as Document Management System (DMS) for Corporate Secretary Division, IFRS, HR Administrative System, IT Helpdesk Ticketing System.

FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

IIF is committed to develop efficient, modern, and sustainable business process through the utilization of IT which is formulated in the long-term IT development plan. The IT division of IIF will formulate the annual or mid-term strategic policy in improving the quality of IT implementation within the Company. The proposal will be submitted to the existing supervising organs, such as ITSC Committee of Board of Directors and Board of Commissioners to gain necessary input or direction.

IT implementation development plan in the following year includes:

- DMS for Credit Operation Department
- DMS for Finance and Accounting Division
- DMS for HR & GA Division
- *Project Appraisal Memorandum Template* (for proposal coming from credit)
- *Employee Self Service*

PENILAIAN ATAS KINERJA TI 2017

Dalam melakukan penilaian atas kinerja TI 2017, IIF menggunakan parameter *quality and time* yang indikator penilaiannya meliputi:

1. *99% up time of IT environment*
2. *Stable and zero critical issues in core systems*
3. *Timely completion of IT services and support*

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, disimpulkan bahwa IT telah berhasil mencapai target yang diberikan oleh Manajemen pada tahun 2017. Selain itu IT juga telah memberikan nilai tambah kepada *user* dalam hal mendefinisikan kebutuhan atas sistem baru, dan juga dalam melakukan testing dan pengoperasian sistem-sistem baru.

PERENCANAAN KORPORASI

Perusahaan terus meningkatkan sistem manajemen kinerja yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan pencapaian kinerja Perusahaan. Secara keseluruhan, proses siklus manajemen strategis di IIF meliputi: perumusan strategi, pelaksanaan strategi, serta penilaian terhadap kinerja manajemen. Perumusan strategi dilakukan melalui rapat kerja yang diikuti oleh seluruh manajemen senior di mana mereka memutuskan untuk menyepakati asumsi dan inisiatif serta memastikan apakah manajemen IIF memiliki arah dan tujuan yang sama. Asumsi dan inisiatif kemudian tercermin dalam Rencana dan Anggaran Bisnis IIF yang akan dilaksanakan sepanjang tahun. Selain itu, Divisi ini menggunakan Key Performance Indicator ("KPI") Perusahaan sebagai perangkat yang digunakan untuk menilai kinerja IIF.

Sepanjang tahun 2017, berikut ini hal-hal yang sudah berhasil dilakukan oleh Divisi Perencanaan Korporasi :

1. Melakukan evaluasi dan analisis yang mendalam dan lengkap atas kinerja Perusahaan melalui laporan berkala dan adhoc
2. Memenuhi seluruh kriteria atas laporan manajemen sesuai dengan kebutuhan manajemen

EVALUATION OF IT PERFORMANCE IN 2017

In evaluating IT performance in 2017, IIF used quality and time parameters with the evaluation indicator covering:

1. *99% up time of IT environment*
2. *Stable and zero critical issues in core systems*
3. *Timely completion of IT services and support*

Based on the result of the performance evaluation, it is concluded that IT has successfully achieved the target given by the Management at the end of 2017. In addition, IT has also provided added value to the use in defining needs for new system and in testing and operating new systems.

CORPORATE PLANNING

The Company continues to improve its performance management system which is conducted systematically in order to ensure the Company's performance achievement. The overall strategic management cycle in IIF consists of: strategy formulation, strategy implementation, and evaluation of management performance. The strategy is formulated at the work meeting attended by all senior management where they decide to approve the assumptions and initiatives and to ensure that IIF has already set common directions and goals. The assumptions and initiatives are then incorporated in IIF's Business Plan and Budget to be realized for the year. In addition, this Division uses the Company's Key Performance Indicator ("KPI") as the tool to measure IIF's performance.

In 2017, the following are the achievements of the Corporate Planning Division:

1. Conducted in-depth and comprehensive evaluation and analysis on the Company's performance through periodical and adhoc reports.
2. Fulfilled the entire criteria of the management report according to the management's needs.

05

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

- | | | | |
|----|--|-----|---|
| 80 | Tinjauan Umum
Overview | 96 | Kebijakan Dividen
Dividend Policy |
| 81 | Infrastruktur Untuk Pembangunan Bangsa
Infrastructure For National Development | 96 | Industri Infrastruktur di Indonesia dan Prospek Usaha
Perusahaan
Infrastructure Industry In Indonesia and The Company's
Business Outlook |
| 82 | Solusi atas Tantangan Pembangunan Infrastruktur
Solution of The Infrastructure Development Challenges | 99 | Aspek Pemasaran
Marketing Aspect |
| 82 | Pencapaian Korporasi
Corporate Achievement | 101 | Strategi Perusahaan
Company's Strategy |
| 87 | Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Overview Per Business Segment | | |
| 89 | Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis | | |
| 95 | Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah
Tanggal Laporan Keuangan
Information and Material Fact After The Financial
Statement Date | | |
| 95 | Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang
Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Rare and
Extraordinary Events | | |
| 95 | Informasi Transaksi Material yang Mengandung
Benturan Kepentingan dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transaction Containing
Conflict of Interest with Affiliated Parties | | |
| 95 | Informasi Transaksi Dengan Pihak Berelasi
Information On Transaction With Related Parties | | |
| 96 | Transaksi Derivatif dan Lindung Nilai
Derivative Transaction And Hedging | | |
| 96 | Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang
Berpengaruh Terhadap Perusahaan
Changes In Laws and Regulations That Have Significant
Impact On The Company's Performance | | |
| 96 | Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Pada
Tahun Buku 2017
Changes In Accounting Policy That were Implemented
In 2017 Fiscal Year | | |



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tren pertumbuhan kinerja IIF senantiasa meningkat dari tahun ke tahun yang juga turut ditopang oleh pendapatan berbasis biaya (*fee-based income*) dari segmen bisnis *Advisory* yang dimiliki IIF. Keseimbangan atas berbagai faktor tersebut juga datang karena IIF tidak hanya mengandalkan pendapatan bunga tetapi juga menciptakan *driver* pendapatan lainnya, sehingga menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

IIF's performance growth trend continues to increase over the years, which is also supported by fee-based income from IIF's advisory business segment. This achievement sets the tone for a balanced growth, supported by the Company's ability to create other revenue generating sources aside from interest income, which allows IIF to lay a strong foundation for sustainable growth in the years to come.

TINJAUAN UMUM

Dibandingkan dengan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 terealisasi sebesar 3,0%. Pertumbuhan tersebut bahkan dinyatakan sebagai laju pertumbuhan terkuat serta fase pemulihan yang penting dari tingkat terendah pasca krisis 2016 yang tumbuh hanya sebesar 2,4%. Penguatan ekonomi global di tahun 2017 dipengaruhi oleh menguatnya kondisi perdagangan internasional serta kondisi keuangan yang relatif akomodatif. Sedangkan untuk penguatan perdagangan internasional sendiri tidak terlepas dari faktor meningkatnya ekonomi negara-negara maju khususnya di kawasan Asia Pasifik sebagai kelebihan dari kenaikan permintaan dan harga komoditas. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh maksimalisasi peningkatan volume ekspor non-komoditas yang dimanfaatkan beberapa negara untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih baik. Selain pergerakan positif harga komoditas, pasar juga semakin bergerak maju dengan adanya kebijakan pemangkasan pajak di Amerika Serikat yang mampu mendorong kepercayaan terhadap perekonomian global yang berimplikasi pada tingginya transaksi dollar.

Sebagai salah satu negara berkembang yang menggantungkan neraca perdagangan pada komoditas dan migas, dampak atas pertumbuhan ekonomi global juga turut dirasakan

GENERAL OVERVIEW

Global economic growth in 2017 showed a positive trend compared to 2016. Based on data released by the World Bank, global economic growth this year was recorded at 3.0%, which is deemed as the strongest growth rate and marked an important recovery phase from the all-time low of 2.4% post-crisis 2016. The upturn of the global economy in 2017 was driven by the improving international trade conditions and relatively accommodative financial conditions. Likewise, the strengthening of international trade itself was inseparable from the improving economies of the developed countries, especially in the Asia Pacific region, as an excess of the increasing demand and commodity prices. This condition was also supported by the rising volume of non-commodity exports from which several countries were benefitted to create an even higher growth. In addition to the positive movement of commodity prices, the market was also improving with the tax cut policy in the United States which was able to encourage confidence in the global economy that resulted in intense transactions in dollar.

As one of the emerging markets that relies on the trade balance on commodities and oil and gas, the improving global economy also affected Indonesia throughout 2017. Based on

Indonesia sepanjang tahun 2017. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia perekonomian nasional di tahun ini mampu menjaga tren positif dengan realisasi pertumbuhan sebesar 5,1% meskipun angka tersebut masih di bawah rencana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017 terdorong oleh peningkatan investasi, melonjaknya ekspor dan konsumsi pemerintah yang lebih dari cukup untuk mengimbangi hambatan dari *destocking* (penurunan persediaan) yang signifikan.

Selain dorongan dari faktor komoditas, integrasi berkelanjutan atas kebijakan fiskal dan moneter turut memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017. Dari segi kebijakan fiskal, pada aspek anggaran Pemerintah Indonesia berupaya menerapkan kebijakan subsidi yang lebih baik serta fokus pada peningkatan kualitas belanja Negara untuk sasaran-sasaran yang lebih strategis. Sedangkan dari aspek insentif pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan konsumsi dan memperbaiki iklim investasi.

Untuk kebijakan moneter sendiri, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga melihat momentum kenaikan pertumbuhan global yang disebabkan oleh perbaikan harga komoditas sebagai isu strategis yang ikut mempengaruhi kebijakan moneter. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Dewan Gubernur, BI menetapkan untuk mempertahankan BI *7-day Reverse Repo Rate* tetap sebesar 4,25% dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,50% dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00%.

INFRASTRUKTUR UNTUK PEMBANGUNAN BANGSA

Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional dan peningkatan daya saing bangsa, pemerintah Indonesia dalam Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019 menyusun beberapa kebijakan strategis salah satunya adalah mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur nasional di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap dengan terealisasinya pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air akan berdampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terwujud sebesar 5,4% di tahun 2019. Ke depannya pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu mencapai angka 6% yang merupakan target awal dalam RPJMN 2015-2019.

data released by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, national economy this year was able to maintain its positive trend at 5.1% rate although the figure was still under the target set forth in the State Budget (APBN). Thus, national economic growth in 2017 was driven by increased investment, a surge in exports, and overconsumption of the government to offset obstacles arising from significant destocking.

Besides improvements from commodity sector, the ongoing integration of fiscal and monetary policies played an important role in fostering Indonesia's economic growth in 2017. In terms of fiscal policy, Indonesia's Government sought to improve its policy subsidy allocation and focused on improving the quality of state expenditure in sectors deemed as more strategic. In view of incentive aspect, the government strived to maintain consumption growth and improve the investment climate.

For its own monetary policy, Bank Indonesia as the central bank also observed that the momentum of rising global economy caused by commodity prices hike was a strategic issue affecting monetary policy. Based on the decision in the Board of Governors Meeting, BI decided to maintain the BI *7-day Reverse Repo* fixed rate at 4.25% with the *Deposit Facility* fixed rate at 3.50% and the *Lending Facility* fixed rate at 5.00%.

INFRASTRUCTURE FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATION

In order to increase national production capacity and competitiveness, the Indonesia's government in the 2015-2019 Medium Term Plan (RPJMN) has developed a number of strategic policies, one of which is to promote equitable distribution of national infrastructure development in all regions in Indonesia. The government hopes that the realization of infrastructure development across the country will result in the increasing growth level to 5.4% by 2019. In the near future, the government expects Indonesia's economic growth to reach 6% which is the initial target set out in the 2015-2019 RPJMN.

Untuk mendukung tujuan tersebut, hingga 2017 pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi yang ruang lingkupnya meliputi kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, dan meningkatkan produktivitas. Pemerintah Indonesia di tahun ini melalui PP No. 58 Tahun 2017 sebagai perubahan atas PP No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menetapkan sebanyak 248 proyek strategis nasional yang terdiri dari infrastruktur perhubungan, transportasi, perumahan, industri hulu dan hilir migas, energi, air minum, irigasi, infrastruktur perbatasan, telekomunikasi, IPTEK, Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, smelter, perikanan dan kelautan serta infrastruktur ketenagalistrikan.

SOLUSI ATAS TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Keinginan pemerintah dalam merealisasikan rencana pembangunan infrastruktur yang ada tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan ruang fiskal dalam postur APBN. Meskipun anggaran infrastruktur menjadi salah satu sasaran sektor teratas dan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari segi anggaran, keperluan atas seluruh proyek tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Untuk itu diperlukan keterlibatan pihak lain selain pemerintah dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang direncanakan salah satunya adalah dengan keikutsertaan pihak swasta.

Hingga 2017, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan swasta untuk ikut serta terlibat dan berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Salah satunya adalah PP No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur. Perbedaan pendekatan antara kedua pihak baik pemerintah maupun swasta dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur dapat dijumpai dengan baik melalui regulasi tersebut.

PENCAPAIAN KORPORASI

Di tahun 2017, Pemerintah masih terus berupaya merealisasikan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Maka tidak mustahil jika dari segi investasi yang dicatatkan, di tahun ini komposisinya masih didominasi oleh proyek yang berasal dari sektor publik dan masih nihil untuk sektor swasta melalui skema KPBU. Adapun komitmen yang berhasil disepakati di tahun 2017 terdiri dari:

To support these objectives, the government has issued 14 economic policy packages throughout 2017, covering speed of service, regulatory certainty, synchronization, ease of investment, and increased productivity. This year, through PP no. 58 of 2017 as an amendment to Government Regulation no. 3 of 2016 on the Acceleration of National Strategic Project Implementation, Indonesia's Government has established 248 national strategic projects consisting of transport infrastructure, transportation, housing, upstream and downstream infrastructure of oil and gas, energy, drinking water, irrigation, border infrastructure, telecommunication, science and technology, Special Economic Zone, Tourism, smelter, fishery and marine as well as electricity infrastructure.

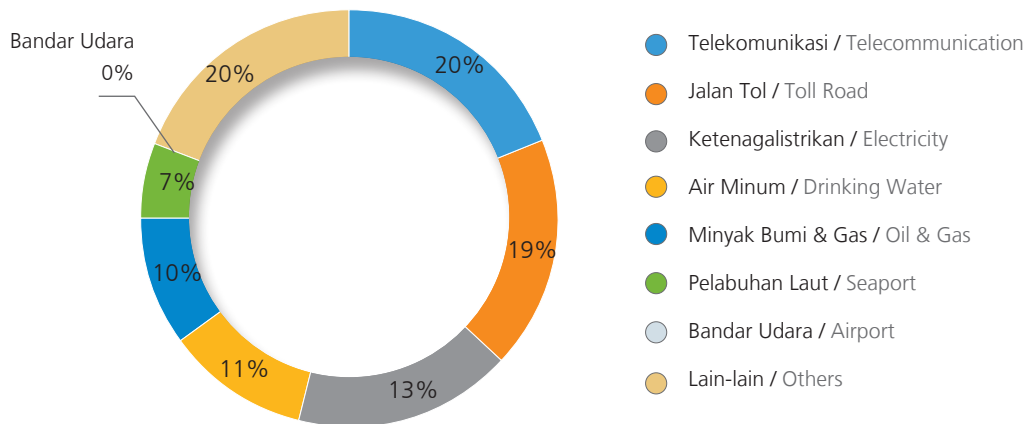
SOLUTION OF THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CHALLENGES

The government's vision in realizing the existing infrastructure development plan is certainly inseparable from various obstacles. One of them is the limited fiscal space in state budget structure. Although infrastructure sector remains in the top list budget priority of which amount continues to increase from year to year, the fund to support the projects should not be borne by the government alone. Therefore, the participation of other parties aside from the government, namely the private sector, is required to realize infrastructure development.

As of 2017, the government has issued a regulation that allows the private sector to participate and invest in government infrastructure projects. One of them is PP No. 38 of 2015 on Public-Private Partnership (PPP) on the provision of infrastructure, which help bridge different approach between the government and private sector in realizing infrastructure development.

CORPORATE ACHIEVEMENT

In 2017, the Government continued to realize the development of national strategic infrastructure projects. Thus, in terms of investment recorded, the project composition will be very likely to mainly consist of public sector projects with zero contribution from the private sector through PPP scheme. The commitment reaching financial close in 2017 was:



Dengan terealisasinya komitmen pembiayaan pada beberapa proyek yang ada menjadi salah satu bukti bahwa IIF telah berhasil melakukan perluasan jangkauan bisnis dengan menggandeng institusi perbankan lainnya di Indonesia dalam membuka akses investasi infrastruktur di seluruh penjuru negeri.

Pencapaian IIF sepanjang tahun 2017 merupakan salah satu pembuktian atas peningkatan laju kinerja usaha langkah dalam menggapai visi untuk mencapai keseimbangan dan keberlanjutan atas pertumbuhan Perusahaan kedepannya.

Tren pertumbuhan kinerja IIF senantiasa meningkat dari tahun ke tahun yang juga turut ditopang oleh pendapatan berbasis biaya (*fee-based income*) dari segmen bisnis *Advisory* yang dimiliki IIF. Keseimbangan atas berbagai faktor tersebut juga datang karena IIF tidak hanya mengandalkan pendapatan bunga tetapi juga menciptakan *driver* pendapatan lainnya, sehingga menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Keberlanjutan juga didorong oleh kemampuan IIF untuk secara berkesinambungan meningkatkan dan melakukan otomatisasi proses internalnya, yang telah dilakukan sejak awal tahun 2016, serta upaya terus-menerus guna meningkatkan sumber daya manusianya.

IIF telah bergerak cepat dan tepat untuk mencapai misinya sebagai pelopor pendanaan infrastruktur di Indonesia. Saat ini, pasar tidak hanya melihat IIF sebagai institusi pembiayaan infrastruktur semata namun juga sebagai *recognized expert* dalam memberikan konsultasi terkait perancangan skema pembiayaan yang dibutuhkan. Terkait hal tersebut, IIF senantiasa menghadirkan solusi dalam menjembatani keberagaman kepentingan yang ada melalui mekanisme dan struktur pembiayaan yang akurat.

The realization of financing commitments in several existing projects is one proof that IIF has successfully expanded its business by partnering with other banking institutions in Indonesia to open access to infrastructure investment across the country.

IIF's accomplishment throughout 2017 is one of the evidence of its improving business performance to pursue the vision of creating balanced and sustainable growth of the Company going forward.

IIF's performance growth trend continues to increase over the years, which is also supported by fee-based income from IIF's *Advisory* business segment. This achievement sets the tone for a balanced growth, supported by the Company's ability to create other revenue generating sources aside from interest income, which allows IIF to lay a strong foundation for sustainable growth in the years to come. In addition to the Company's efforts to increase the quality of its human resources, IIF's sustainable business growth will also be driven by the Company's capability to continuously improve and automate its business processes, which was initiated in the early 2016.

IIF is already well on track in accelerating its performance towards its vision as a pioneer in infrastructure financing in Indonesia. Aside from its exemplary reputation in the infrastructure development, IIF is also widely acknowledged as a recognized expert in providing valuable insights on financing scheme. IIF continues to provide financial solutions that cater to diverse business interests through its accurate financing mechanism and strategy.

DIREKTORAT INVESTASI

Dengan mengacu pada peran IIF sebagai lembaga pembiayaan dan investasi bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, IIF memiliki Direktorat Investasi yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengembangan bisnis dengan mendapatkan kesepakatan pembiayaan maupun investasi dari sisi kuantitas klien, volume komitmen pembiayaan hingga pemantauan jalannya proses bisnis.

Dukungan atas tugas-tugas tanggung jawab Direktorat Investasi diimplementasikan dengan ketercukupan sumber daya direktorat yang kini memiliki 27 orang profesional dengan latar belakang profesi yang relevan serta dibutuhkan dalam menghadapi dinamika usaha di masa mendatang seperti perbankan korporasi, investasi ekuitas, legal dan konsultan manajemen.

Struktur organisasi Direktorat Investasi saat ini terdiri dari 3 (tiga) departemen berdasarkan fungsi yaitu Departemen Pengembangan Bisnis, Departemen Pengawasan Proyek dan Departemen Transaksi Hukum.

Departemen Pengembangan Bisnis memiliki peran untuk mendapatkan kesepakatan pembiayaan dan investasi mulai dari perolehan klien sampai kesepakatan finansial serta memantau jalannya proyek-proyek hingga mencapai tahap *Commercial Operation Date* (COD).

Untuk tanggung jawab Departemen Pengawasan Proyek, tugas dan tanggung jawabnya yaitu memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh IIF memenuhi persyaratan yang telah disepakati, termasuk juga memantau tahap pelaksanaan dari proyek pasca COD.

Sedangkan Departemen Transaksi Hukum berperan dalam memberikan dukungan dalam hal legalitas dan hukum terhadap proyek-proyek yang didanai oleh IIF yang diawasi baik oleh Departemen Pengembangan Bisnis maupun Departemen Pengawasan Proyek.

Di tahun 2017, IIF berhasil memperoleh 14 kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp3.965 miliar, sehingga total *gross commitment* menjadi Rp14.485 miliar pada akhir tahun 2017. Adapun yang menjadi proyek unggulan di tahun ini adalah proyek pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang berlokasi di Jawa Barat.

INVESTMENT DIRECTORATE

Given IIF's role as the institution that provides financing and investment for infrastructure projects in Indonesia, IIF has already established an Investment Directorate that is in charge of business development through securing financing or investment deals by acquiring more clients, increasing total financing commitment volumes, and monitoring business practices.

IIF supports the duties and responsibilities of the Investment Directorate by ensuring the sufficient number of employees working in the directorate. Currently, there are 27 professionals having relevant professional backgrounds who are qualified to address the business dynamics of corporate banking, equity investment, legal, and management consulting.

According to its function, the Investment Directorate is divided into 3 (three) departments, namely Business Development Department, Project Supervision Department, and Legal Transaction Department.

The main responsibility of the Business Development Department is to secure financing and investment deals, starting from client acquisition until the financial deals are concluded, as well as to monitor the ongoing projects until they reach *Commercial Operation Date* (COD).

The main responsibility of the Project Supervision Department is to ensure that the projects that IIF finances are in compliance with all the agreed terms, which also includes monitoring the projects' progress post-COD.

The main responsibility of the Transaction Legal Department is to provide legal support to the projects financed by IIF and supervised by both the Business Development Department and the Project Supervision Department.

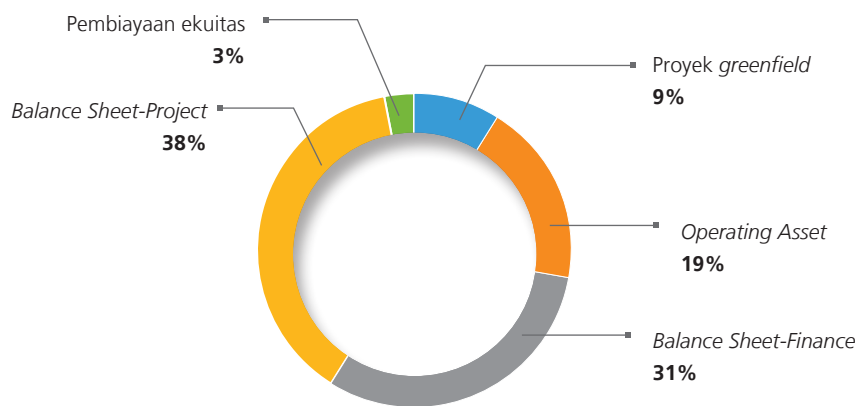
In 2017, IIF secured 14 new commitments with total financing contracts worth of Rp3,965 billion resulting in the total of the gross commitment of Rp14,485 billion by the end of the 2016. Among key projects this year is financing for geothermal power plant project located in West Java.

Pencapaian 2017

Dari segi tipe proyek, IIF senantiasa melakukan penguatan pada pasar pembiayaan pada perusahaan yang bergerak dalam sektor konstruksi. Di tahun 2017, portofolio proyek *greenfield* berkontribusi sebesar 9% dari komitmen portofolio proyek. Selanjutnya 31% berasal dari *Balance Sheet Financing*, 38% dari *Balance Sheet Project*, 19% dari pembiayaan aset yang beroperasi, dan 3% dari pembiayaan ekuitas. Perlu dicatat bahwa pembiayaan secara *balance sheet* diatas, juga digunakan untuk membangun aset-aset infrastruktur.

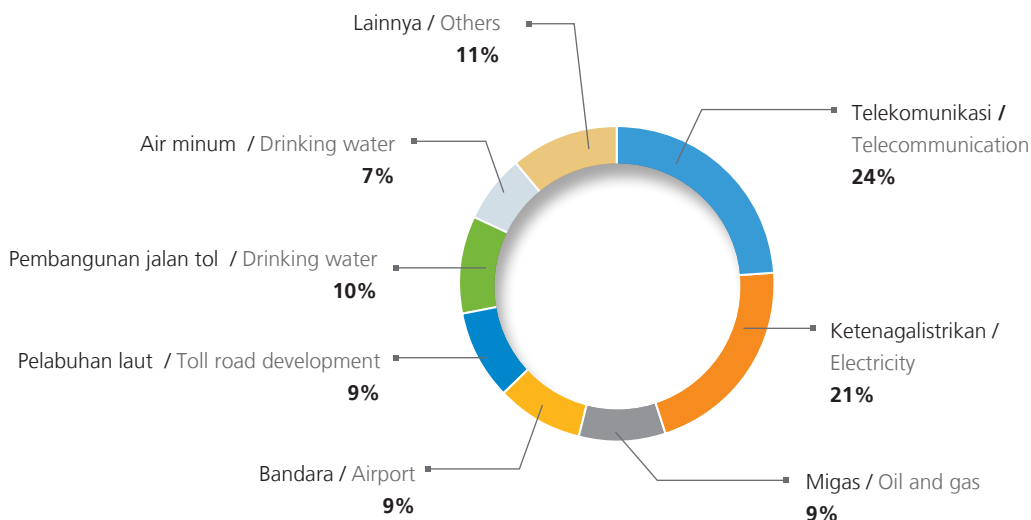
Achievements in 2017

In terms of project types, IIF continues to strengthen its presence in the financing of construction sector. In 2017, greenfield project portfolio contributed 9% of the project portfolio commitments. The remaining 31% came from Balance Sheet Financing, 38% from Balance Sheet Project, 19% from brownfield, and 3% from equity financing. Note that the balance sheet financing is also used to build infrastructure assets.



Jika dilihat berdasarkan sektor, portofolio pembiayaan terhadap proyek infrastruktur didominasi oleh telekomunikasi 24%, ketenagalistrikan 21%, Migas 9%, bandara dan pelabuhan laut masing-masing sebesar 9%, pembangunan jalan tol sebesar 10%, dan air minum 7%.

From sectoral point of view, infrastructure project financing portfolio was mostly dominated by telecommunication sector at 24%, electricity at 21%, oil and gas at 9%, airport and seaport at 9%, toll road development at 10%, and drinking water at 7%.



Rencana 2017

Terkait kegiatan investasi dan sindikasi, Perusahaan telah menetapkan 9 (sembilan) target pencapaian selama tahun 2017. Target tersebut adalah:

1. Secara selektif membangun aset pinjaman;
2. Menjaga kualitas portofolio aset;
3. Meningkatkan *fee-based income*;
4. Memperkuat keberadaan Perusahaan di pasar;
5. Fokus mendapatkan klien baru;
6. Kolaborasi;
7. Memperkaya pengalaman dan keahlian sumber daya manusia;
8. Meningkatkan efektivitas proses internal; dan
9. Meningkatkan efisiensi proses.

Perusahaan berupaya meraih target tersebut dalam rangka mengembangkan asetnya melalui produk-produk bernilai tambah secara terus menerus. IIF telah mengembangkan beberapa program inisiatif untuk mendukung pencapaian target ini, diantaranya meningkatkan jumlah komitmen dan aset, mendiversifikasi portofolio proyek dan produk, mengembangkan kemampuan anggota tim, memperkuat keberadaan IIF di pasar, fokus terhadap 2 hal, yaitu klien dan produk/pasar yang memiliki nilai lebih, memperkuat kolaborasi, melaksanakan kegiatan terkait SDM, menerapkan *time sheet management* dan proses bisnis lainnya, serta mengembangkan *client management system* dan *knowledge database system* untuk kontrak-kontrak yang diterima.

ADVISORY

Grup *Advisory* dibentuk sebagai divisi usaha untuk menyediakan asistensi dan konsultasi kepada klien-klien Pemerintah dan sektor swasta. Pada tahun-tahun sebelumnya, Group ini dijalankan oleh 1 (satu) orang EVP yang secara terpisah melayani klien-klien sektor publik dan swasta.

Dalam rangka memaksimalkan potensi *Advisory*, IIF di tahun ini melakukan pengembangan layanan dengan menghadirkan jasa *Merger & Acquisition* (M&A) selain jasa *Transaction Advisory* yang telah lebih dahulu hadir. M&A *Advisory* bertujuan untuk memberi layanan *financial advice* bagi perusahaan yang ingin melakukan akuisisi kepada perusahaan lain. Selain M&A, pengembangan jasa layanan lainnya seperti *Advisory* untuk penggalangan dana proyek dan jasa pendampingan perusahaan dalam melakukan penyusunan *corporate strategy/corporate finance*. Keseluruhan *Advisory* yang dimiliki IIF memiliki siklus proyek yang relatif singkat. Dengan kondisi

2017 Plan

In relation with investment and syndication activities, the Company has set 9 (nine) goals to be achieved throughout 2017. These goals are:

1. Build loan asset on selective basis;
2. Maintain portfolio asset quality;
3. Increase fee-based income;
4. Increase market profile;
5. Focused client acquisition;
6. Collaboration;
7. Develop experience and expertise of human resource;
8. Improve internal processes; and
9. Increase process efficiency.

The Company strives to achieve these objectives as part of its efforts to continue building its assets through value-added products. IIF has already developed several initiatives to support this goal accomplishment, which includes increasing total commitments and assets, diversifying project and product portfolio, developing team members' capabilities, enhancing IIF's market presence, focusing on value-added clients and value-added product/market, strengthening collaboration, conducting HR-related activities, implementing time sheet management and other supporting business processes, and developing client management system and knowledge database system for closed deals.

ADVISORY

The Advisory Group has been established as a business arm to provide assistance and advice to both Government and private sector clients. In the previous years, the Group was run by 1 (one) EVP separately catering to public and private sector clients.

In order to maximize the Advisory potential, this year IIF added another service to its business portfolio, namely Merger & Acquisition (M&A) services aside from the existing Transaction Advisory service. M&A *Advisory* aims to provide financial advice for companies who wish to conduct acquisition. Other than M&A, there is also an advisory service for project fundraising and corporate assistance service for corporate strategy/corporate finance development. The whole range of Advisory that IIF provides has a relatively short project cycle. As a result, there is a minimum fee required, thus affecting fee based income for the Company's revenue.

tersebut, tentunya akan mengurangi basis biaya yang diperlukan dan berpengaruh pada *fee based income* bagi pendapatan Perusahaan.

Pencapaian Tahun 2017

Selama tahun 2017, Grup *Advisory* berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp17.855 milyar. Pencapaian ini merupakan pendapatan yang tertinggi sejak pembentukan Grup *Advisory*. Selain itu, di tahun 2017 Grup *Advisory* memperoleh mandat baru sebagai penasehat persiapan Proyek Strategis Nasional, sebagai berikut:

- Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat.
- Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Proyek Jalan Tol Trans Sumatera dimana Grup *Advisory* bertindak sebagai Penasehat Keuangan juga telah memperoleh komitmen pembiayaan untuk Ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar pada tanggal 27 Desember 2017.

Rencana 2018

Untuk tahun 2018, IIF menargetkan untuk terus memperoleh mandat dalam hal membantu pembangunan Proyek Strategis Nasional, terlibat dalam transaksi KPBU, terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia bagian timur dan dalam menyusun program pembiayaan proyek yang inovatif dan transformasional.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

IIF memiliki tiga segmen usaha, yaitu produk investasi yang terdiri dari *fund based* dan *non-fund based*, produk *treasury* serta *Advisory*. Pada 2017, pendapatan dari divisi investasi berkontribusi sebesar 63,3% pada jumlah pendapatan Perusahaan. Sedangkan produk *treasury* dan *Advisory* memberikan kontribusi masing-masing sebesar 34,3% dan 2,4% pada jumlah pendapatan Perusahaan.

Achievements in 2017

Throughout 2017, Advisory Group managed to record income amounting to Rp17,855 billion, the all-time high income since its first establishment. In addition, in 2017, the Advisory Group obtained the following new mandate as a National Strategic Project preparation advisor:

- PPP project of Drinking Water Supply System of West Semarang.
- Port of Kuala Tanjung, North Sumatera, Project by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

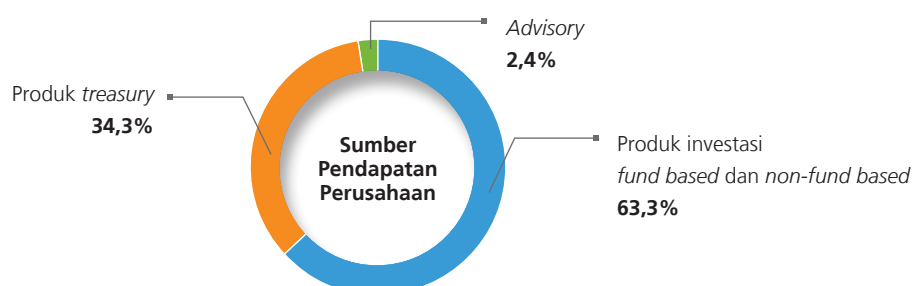
Trans Sumatera Toll Road project in which Advisory Group took action as a Financial Advisory has also obtained financing commitment for Bakauheni - Terbanggi Besar Toll Road on 27 December 2017.

Plan for 2018

For 2018, IIF targets to acquire new mandate to support National Strategic Project development and engages in PPP transaction, infrastructure project development in eastern Indonesia, and in the development of innovative and transformational project financing program.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

IIF's three business segments consist of investment products comprising fund based and non-fund based products, treasury products, and Advisory. In 2017, income from investment segment represented 63,3% of the Company's total consolidated income. While treasury product and Advisory respectively contributed 34,3% and 2,4% to the Company's total income.



Produk Investasi

- *Fund Based*

IIF menyediakan produk investasi dalam dua jenis, yaitu *Fund based* dan *Non-Fund Based*. Produk yang ditawarkan dalam jenis ini, antara lain utang senior, surat berharga, utang subordinasi/*mezzanine financing*, *financing*, *take-out financing* dan/atau *refinancing*.

Pada tahun 2017, IIF membukukan tambahan komitmen pembiayaan sebesar Rp3.965 miliar sehingga total komitmen bersih pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp9.298 miliar.

Dari total komitmen di atas, jumlah saldo pembiayaan yang telah disalurkan setelah dikurangi pembayaran adalah sebesar Rp6.502 miliar yang terdiri dari pembiayaan dalam bentuk pinjaman senior sebesar Rp 5.698 miliar, surat berharga sebesar Rp635 miliar dan sisanya dalam bentuk investasi pada ekuitas. Sehingga jumlah komitmen yang belum disalurkan oleh IIF pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp2.795 miliar.

Dengan pertumbuhan komitmen serta pembiayaan yang disalurkan, pendapatan *fund-based* yang dibukukan IIF pada tahun 2017 sebesar Rp452,0 miliar tumbuh sebesar 18,8% dibandingkan pendapatan *fund-based* tahun 2016 sebesar Rp380,6 miliar

- *Non-Fund Based*

Pendapatan yang berasal dari *non-fund based* pada tahun 2017 sebesar Rp23,1 miliar dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp51,4 miliar atau turun sebesar 55%. Penurunan ini sebagian besar berasal dari turunnya biaya jasa pembiayaan sindikasi yang pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar Rp 24,9 miliar dibandingkan dengan Rp Nihil pada tahun 2017.

Produk Treasury

Produk *treasury* dilakukan oleh IIF dalam rangka mengoptimalkan dana *idle* yang belum digunakan oleh Direktorat Investasi. Produk *treasury* terdiri dari deposito berjangka, giro, dan obligasi. Pada tahun 2017, produk *treasury* menghasilkan pendapatan sebesar Rp260,2 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 96% dibandingkan pendapatan tahun 2016 sebesar Rp133,0 miliar yang disebabkan oleh keuntungan dari penjualan efek-efek yang di-*net-off* dengan penurunan imbal balik dari produk-produk *treasury* di pasar.

Investment Product

- Fund Based

IIF provides two types of investment products, namely Fund Based product and Non-Fund Based product. The fund-based products include senior debt, securities, subordinated debt/*mezzanine financing*, *financing*, *take-out financing*, and/or *refinancing*.

In 2017, IIF recorded additional Rp3,965 billion for financing commitment. Thus total net commitment at the end of 2017 reached Rp9,298 billion.

Of the above total commitments, the full amount of financing disbursed after repayment amounted to Rp6,502 billion, consisting of senior loans amounting to Rp5,698 billion, securities of Rp635 billion, and the remaining amount is used for investment in equities. Thus, total commitments not yet disbursed by IIF at the end of 2017 reached Rp2,795 billion.

With the growing number of commitments and financing disbursed, the fund-based income for 2017 fiscal year amounted to Rp452.0 billion, significantly grew by 18.8% compared to 2016 fund-based income of Rp380.6 billion.

- Non-Fund Based

Non-fund based income in 2017 amounted to Rp23.1 billion relative to 2016 at Rp51.4 billion or grew by 55%. This decrease was mainly from the decrease of syndicated finance fee in 2016 that contributed Rp24.9 billion compared to Rp Nil in 2017.

Treasury Products

IIF provides treasury products to optimize idle fund that is not used by the Investment Directorate. Treasury product consists of time deposit, demand deposit, and bonds. In 2017, treasury products generated Rp260.2 billion of revenue or increased by 96% compared to that of 2016 at Rp133.0 billion. The decline was caused by the profit of securities sale that was net-off by the decrease of return from treasury products in the market.

Advisory

Jenis layanan *advisory* yang dimiliki IIF, antara lain *financial advisory* dan *transaction advisory*. *Advisory* di tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dengan mencatatkan perolehan sebesar Rp17,9 miliar dibandingkan pendapatan sebesar Rp7,4 miliar pada 2016.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan informasi dari laporan keuangan *audited* IIF yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Member of Ernst & Young) yang ditunjuk IIF. Laporan Keuangan IIF telah memperoleh pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Analisis terkait kinerja keuangan IIF juga mengacu pada kinerja keuangan di tahun-tahun sebelumnya sebagai data pembandingan sehingga analisis yang disampaikan lebih komprehensif.

Laporan Posisi Keuangan**ASET**

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Pada 2017, aset Perusahaan mengalami kenaikan 20% atau sebesar Rp2.181 miliar. Aset 2017 tercatat sebesar Rp12.972 miliar dari Rp10.791 miliar pada 2016. Faktor kenaikan aset IIF dipengaruhi oleh peningkatan jumlah Kas dan Setara Kas senilai Rp428 miliar, pembelian efek-efek sebesar Rp539 miliar, penyaluran pinjaman diberikan sebesar Rp1.037 miliar, dan pembelian aset tetap sebesar Rp280 miliar. Kenaikan aset tersebut sebagian besar berasal dari penarikan pinjaman diterima selama tahun 2017 sebesar Rp2.264 miliar.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2017	2016	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	3.966	3.538	428	12
Efek-efek / Securities	2.967	2.428	539	22
Investasi saham / Equity investments	-	114	(114)	(100)
Pinjaman diberikan / Loans	5.546	4.509	1.037	23
Piutang bunga / Accrued interest incomes	32	27	5	19
Beban dibayar dimuka / Prepaid expenses	6	6	-	-

Advisory

IIF's advisory comprise of financial and transaction advisory services. The Company recorded a significant increase of advisory income at Rp17.9 billion from that of Rp7.4 billion recorded in 2016.

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

The following financial performance analysis and description is made based on data from IIF's audited financial statements as of 31 December 2017 by Public Accountant Purwanto, Sungkoro & Surja (Member of Ernst & Young), as appointed by the Company. IIF's Financial Statements have obtained unqualified opinion in all material respects. The analysis of IIF's financial performance is also compared to the financial performance data of the previous year to produce a more comprehensive analysis.

Financial Position Statements**ASSETS**

Asset is a resource owned by the company as a result of past events and where economic benefit in the future is expected to be gained by the company.

In 2017, the Company's assets increased by 20% or Rp2,181 billion. Assets in 2017 were recorded at Rp12,972 billion from Rp10.791 billion in 2016. IIF's asset increase was influenced by the increase in Cash and Cash Equivalents amounting to Rp428 billion, the purchase of securities of Rp539 billion and loan disbursement of Rp1,037 billion, as well as purchase of property & equipment of Rp280 billion. The increase in asset mostly came from the withdrawal of loan throughout 2017 at the amount of Rp2,264 billion.

Uraian / Description	2017	2016	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes	11	13	(2)	(15)
Aset tetap / Property and Equipment	287	7	280	4.000
Tagihan derivatif / Derivative receivable	-	1	(1)	(100)
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets	61	22	39	177
Beban tangguhan / Deferred charges	43	45	(2)	(4)
Aset lain-lain / Other assets	53	81	(28)	(35)
Jumlah Aset / Total Assets	12.972	10.791	2.181	20

Liabilitas

Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan di masa datang pada pihak lain.

Pada 2017, liabilitas mengalami peningkatan 26% atau Rp2.247 miliar menjadi Rp10.747 miliar dibandingkan dengan 2016 sebesar Rp8.500 miliar. Peningkatan liabilitas ini sebagian besar disebabkan oleh pencairan pinjaman diterima selama tahun 2017 sebesar Rp2.264 miliar yang berasal dari pinjaman IFC sebesar USD150 juta dan dari pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp200 miliar.

Liabilities

Liability is a debt that must be paid or a service that must be performed to another party in the future.

In 2017, the Company's liabilities increased by 26% or Rp2.247 billion, from Rp8,500 billion in 2016 to Rp10,747 billion. The increase in the liabilities was primarily caused by fund borrowings disbursement of Rp2,264 billion throughout 2017 from IFC loan of USD150 million and Bank Mandiri loan of Rp200 billion.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2017	2016	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Utang lain-lain / Other payables	3	12	(9)	(75)
Utang pajak / Taxes payable	5	7	(2)	(29)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain / Accrued expenses and other liabilities	27	33	(6)	(18)
Liabilitas imbalan kerja / Employee benefits obligation	18	12	6	50
Liabilitas derivatif / Derivative liabilities	4	-	4	100
Surat utang yang diterbitkan / Debt Securities Issued	1.522	1.520	2	0
Pendapatan diterima dimuka / Unearned revenue	-	7	(7)	(100)
Pinjaman diterima / Fund Borrowing	6.545	4.281	2.264	53
Pinjaman subordinasi / Subordinated Loans	2.623	2.628	(5)	0
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	10.747	8.500	2.247	26

EKUITAS

Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan yang merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva dikurangi kewajiban). Ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan. Pada 2017, jumlah ekuitas IIF tercatat sebesar Rp2.225 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3% atau sebesar Rp66 miliar dibandingkan pada 2016 sebesar Rp2.291 miliar. Hal ini disebabkan oleh saldo rugi bersih yang dialami Perusahaan di tahun 2017 senilai Rp81,6 miliar yang sebagian dikompensasi dengan kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp37 miliar. Selain itu, pada tahun 2017 Perusahaan membagikan dividen sebesar Rp20 miliar yang berasal dari laba bersih tahun 2016 kepada pemegang saham.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2017	2016	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Modal Saham / Share Capital	2.000	2.000	-	-
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	30	30	-	-
Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income	21	(16)	37	(231)
Saldo Laba / Retained Earnings	174	277	(103)	(37)
Jumlah Ekuitas / Total Equity	2.225	2.291	(66)	(3)

Kolektibilitas Pinjaman Diberikan

Per 31 Desember 2017, jumlah pinjaman diberikan yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp508 miliar dari total *gross* pinjaman diberikan Rp5.699 miliar.

Laporan Laba Rugi

Pendapatan Usaha

IIF mencatatkan pendapatan usaha pada 2017 sebesar Rp645 miliar, naik sebesar 19% atau sebesar Rp101 miliar dibandingkan dengan 2016 sebesar Rp545 miliar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga sebesar Rp129 miliar, keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek sebesar Rp86 miliar, kenaikan pendapatan *Advisory* sebesar Rp10 miliar, kenaikan pendapatan lainnya sebesar Rp4 miliar dan keuntungan selisih kurs sebesar Rp5 miliar. Kenaikan pendapatan-pendapatan tersebut dikompensasikan dengan kenaikan kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar investasi saham sebesar Rp88 miliar, penurunan

EQUITY

Equity is owner's rights on the company's assets that are composed of (total assets deducted by liabilities). Equity itself consists of owner's paid up capital and the remaining retained earnings. In 2017, IIF's total equity was recorded at Rp2.225 billion, which decreased by 3% or Rp66 billion compared to 2016 at Rp2.291 billion. This was caused by net loss balance in 2017 at the value of Rp81.6 billion which was partly compensated by the increase in other comprehensive income of Rp37 billion. In addition, in 2017, the Company distributed Rp20 billion of dividend from net profit of 2016 to the shareholders.

Loan Collectibility

As of 31 December 2017, total impaired loans are Rp508 billion from total gross loan of Rp5,699 billion.

Income Statements

Revenue

IIF recorded revenue of Rp645 billion in 2017, which increased by 19% or Rp101 billion compared to Rp545 billion in 2016. This was attributable to the increase in interest income of Rp129 billion, profit realized from sale of securities of Rp86 billion, increase in *Advisory* income of Rp10 billion, increase in other income of Rp4 billion, and profit on foreign exchange of Rp5 billion. The increase from these income was compensated by the increase in unrealized loss from changes in fair value of equity investment of Rp88 billion, the decrease in provision and commission income of Rp28 billion, the decrease in realized gain from derivative transactions of Rp12 billion, and

pendapatan provisi dan komisi sebesar Rp28 miliar, penurunan keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif sebesar Rp12 miliar, dan penurunan keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif sebesar Rp5 miliar.

the decrease in unrealized gain from changes in fair value of derivative transactions of Rp5 billion.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2017	2016	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Pendapatan bunga / Interest income	624,28	495,07	129	26
Pendapatan provisi dan komisi / Provision and commission income	23,08	51,41	(28)	(55)
Keuntungan dari penjualan efek-efek / Gain on sale of securities	88,96	2,61	86	3.308
Pendapatan jasa <i>advisory</i> / Advisory income	17,86	7,38	10	142
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif / Realized gain from derivative transactions	3,47	15,41	(12)	(77)
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs / Gain/(loss) from foreign exchange	0,62	(3,93)	5	(116)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi saham / Unrealised loss from changes in fair value of equity investments	(115,14)	(26,69)	(88)	331
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif / (Loss)/profit not yet realized from changes in fair value of derivative transactions	(4,47)	0,58	(5)	(871)
Pendapatan lainnya / Other income	5,98	1,71	4	250
Jumlah Pendapatan / Total Revenue	644,64	543,55	101	19

Biaya Operasional

Pada 2017, biaya operasional mengalami peningkatan menjadi Rp739,09 miliar, naik 82% atau sebesar Rp333 miliar dibandingkan biaya operasional pada 2016 sebesar Rp406,44 miliar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban bunga sebesar Rp248 miliar, kenaikan beban cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp58 miliar dan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp27 miliar.

Operational Cost

In 2017, operational cost increased to Rp739.09 billion, grew by 82% or Rp333 billion compared to that of 2016 at Rp406.44 billion. This was caused by the increase in interest expense of Rp248 billion, increase in allowance for impairment losses of Rp58 billion, and increase in general and administrative expenses of Rp27 billion.

Beban Umum dan Administrasi

Jumlah beban umum dan administrasi pada 2017 meningkat sebesar 22% atau sebesar Rp27 miliar menjadi Rp150,04 miliar dibandingkan pada 2016 sebesar Rp122,87 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban gaji dan tunjangan sebesar Rp3,53 miliar, dan peningkatan pembayaran jasa profesional sebesar Rp5,37 miliar dan biaya akomodasi dan transportasi sebesar Rp1,45

General and Administrative Expenses

Total general and administrative expenses in 2017 increased by 22% or Rp27 billion to Rp150.04 billion compared to 2016 recorded at Rp122.87 billion. The increase was due to the increase in salaries and benefits expenses of Rp3.53 billion, and the increase in professional fee payment of Rp5.37 billion, as well as accommodation and transportation expenses of Rp1.45 billion to support the Company's business activities

miliar untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan selama tahun 2017. Hasil dari audit pajak untuk tahun 2012-2013 adalah Perusahaan harus membayar Rp2,69 miliar pada 2017, yang disusul dengan dilakukannya *self-assessment* untuk tahun 2014-2016 dengan hasil bahwa karena Perusahaan tidak dapat cukup mengkompensasi pajak PPN masukan dengan PPN keluar, maka Perusahamencatat sejumlah uang sebesar Rp11 miliar sebagai beban pada tahun 2017.

Beban Bunga

Beban bunga mengalami peningkatan sebesar Rp248 miliar, naik 99% atau sebesar Rp498,88 miliar dibandingkan dengan 2016 yang tercatat sebesar Rp251,02 miliar. Peningkatan beban bunga ini seiring dengan pencairan pinjaman diterima selama tahun 2017 sebesar Rp2.264 miliar yang berasal dari pinjaman IFC sebesar USD150 juta dan dari pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp200 miliar.

Kerugian Penurunan Nilai

Penyisihan kerugian penurunan nilai mengalami peningkatan sebesar Rp58 miliar, naik 177% menjadi Rp90,17 miliar dibandingkan dengan 2016 sebesar Rp32,55 miliar. Kenaikan ini sebagian merupakan pencadangan kerugian penurunan nilai dari pinjaman diberikan yang bermasalah. Selain itu, kenaikan ini juga seiring dengan kenaikan saldo pinjaman diberikan selama tahun 2017.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2017	2016	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Beban umum dan administrasi / General and administrative	(150,04)	(122,87)	(27)	22
Beban bunga / Interest expense	(498,88)	(251,02)	(248)	99
Beban cadangan kerugian penurunan nilai / Provision for impairment losses	(90,17)	(32,55)	(58)	177
Jumlah Beban / Total Expenses	(739,09)	(406,44)	(333)	82

Rugi Bersih

Pada 2017, IIF mencatat rugi bersih sebesar Rp81,62 miliar dibandingkan dengan laba bersih pada 2016 yang tercatat sebesar Rp101,79 miliar. Kerugian bersih ini sebagian besar disebabkan oleh pembukuan kerugian yang belum direalisasi

throughout 2017. As a result of a tax audit for the years 2012-2013, in 2017 the Company paid Rp2.69 billion which was followed by a self-assessment for the years 2014-2016 with the result that since the Company cannot adequately compensate the input Value Added Tax (VAT) with the output VAT an amount of Rp11 billion has been recorded as expenses for the year 2017.

Interest Expenses

Interest expenses increased by Rp248 billion, which grew by 99% or Rp498.88 billion compared to Rp251.02 billion in 2016. The increase in this interest expenses was in line with fund borrowing disbursement during 2017 of Rp2,264 billion that came from IFC loan of USD150 million and from Bank Mandiri loan of Rp200 billion.

Impairment Losses

Allowance for impairment losses increased by Rp58 billion, which increased by 177% to Rp90.17 billion compared to Rp32.55 billion in 2016. This increase partly consisted of impairment losses from non-performing loan. In addition, this increase was also in line with the increase in loans disbursed throughout 2017.

Net Loss

In comparison to 2016 where IIF achieved a net profit of Rp101.79 billion in 2017, IIF recorded a net loss of Rp81.62 billion, The net loss was mainly due to an unrealized loss from the changes of the fair value of one equity investment in the

dari penurunan nilai wajar investasi saham sebesar Rp115,14 miliar serta pencadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman diberikan sebesar Rp90,71 miliar di tahun 2017.

Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada 2017, arus kas dari aktivitas operasi sebesar minus Rp1.114 miliar yang dibandingkan sebesar minus Rp1.112 miliar pada 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran pinjaman diberikan kepada nasabah dari Rp2.094 miliar di tahun 2016 menjadi sebesar Rp2.991 miliar di tahun 2017 namun diiringi juga oleh peningkatan penerimaan pembayaran pinjaman diberikan dari Rp846 miliar di tahun 2016 menjadi Rp1.850 miliar di tahun 2017.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi tercatat sebesar minus Rp694 miliar pada tahun 2017 dibandingkan sebesar minus Rp1.619 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas jual beli efek-efek di mana terdapat peningkatan penerimaan dari penjualan efek-efek dari sebelumnya Rp636 miliar di tahun 2016 menjadi Rp2.795 miliar di tahun 2017 yang diiringi juga dengan peningkatan pembelian efek-efek dari sebesar Rp2.244 miliar di tahun 2016 menjadi Rp3.203 miliar di tahun 2017. Selain itu, Perusahaan juga melakukan perolehan aset tetap sebesar Rp283 miliar di tahun 2017 dibandingkan sebesar Rp1 miliar di tahun 2016 terutama berkaitan dengan pembelian gedung kantor baru.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada 2017, arus kas untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp2.156 miliar, turun 58% atau Rp2.998 miliar dibandingkan dengan 2016 sebesar Rp5.154 miliar. Penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh tidak terdapatnya penerimaan surat utang yang diterbitkan di tahun 2016 sebesar Rp1.500 miliar dan penurunan penerimaan pinjaman diterima untuk IFC sebesar USD100 juta dan untuk Bank Mandiri sebesar Rp800 miliar.

amount of Rp115.14 billion as well as to the provision for impairment losses on loan disbursements in the amount of Rp90.71 billion in 2017.

Cash Flow Statements

Cash Flow from Operating Activities

In 2017, cash flow from operating activities was minus Rp1,114 billion compared to minus Rp1,112 billion in 2016. This was primarily caused by the increase in loans granted to customers from Rp2,094 billion in 2016 to Rp2,991 billion in 2017, which was followed by the increase in repayment of loans of Rp846 billion in 2016 to Rp1,850 billion in 2017.

Cash Flow from Investing Activities

Cash flow from investing activities was recorded at minus Rp694 billion in 2017 relative to minus Rp1,619 billion in the previous year. This decrease was due to the increase in income from securities sale from Rp636 billion in 2016 to Rp 2,795 billion in 2017, which was followed by the increase in purchase of securities of Rp2,244 billion in 2016 to Rp3,203 billion in 2017. In addition, the Company also acquired property and equipment of Rp283 billion in 2017 compared to Rp1 billion in 2016, especially which related to the purchase of new office building.

Cash Flow from Financing Activities

In 2017, cash flow from financing activities amounted to Rp2,156 billion, which decreased by 58% or Rp2,998 billion compared to Rp5,154 billion in 2016. The decrease in cash flows from financing activities was because there was no income from debt securities issued in 2016 worth Rp1,500 billion and a decrease in proceeds from fund borrowing for loan of USD 100 million and Rp800 billion for Bank Mandiri loan.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2017	2016	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flows from Operating Activities	(1.114)	(1.112)	(2)	0
Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flows from Investing Activities	(694)	(1.619)	925	(57)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flows from Financing Activities	2.156	5.154	(2.998)	(58)
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas / Net Increase in Cash and Cash Equivalents	348	2.423	(2.075)	(86)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas / Impact of changes in foreign currencies exchange rate on cash and cash equivalents	80	90	(10)	(11)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	3.538	1.025	2.513	245
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at End of Year	3.966	3.538	428	12

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Sepanjang 2017, tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang telah di audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang 2017, Perusahaan tidak mencatatkan informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pada 2017, Perusahaan tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

INFORMASI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit Perusahaan tahun 2017.

INFORMATION AND MATERIAL FACT AFTER THE FINANCIAL STATEMENT DATE

Throughout 2017, no material information and facts occurred after the date of the financial statements other than those disclosed in the audited financial statements for the year ended 31 December 2017.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING RARE AND EXTRAORDINARY EVENTS

In 2017, the Company did not record any financial information containing extraordinary and rare event which may affect the Company's performance.

MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

In 2017, the Company did not conduct any material transactions involving conflict of interest.

INFORMATION ON TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The information of this matter can be seen in the Audited Financial Statement of the Company for the year 2016.

TRANSAKSI DERIVATIF DAN LINDUNG NILAI

Perusahaan melakukan transaksi SWAP dan *forward* selama 2017 untuk melindungi Perusahaan dari dampak fluktuasi nilai tukar mata uang.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Sepanjang 2017, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perusahaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PADA TAHUN BUKU 2017

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas penerapan standar akuntansi baru selama tahun 2017.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pada dasarnya dividen yang diberikan oleh Perusahaan dilakukan dengan memperhitungkan:

1. Laba bersih setelah pajak yang diperoleh di tahun buku yang bersangkutan
2. Besaran yang perlu disisihkan untuk dana cadangan sesuai dengan amanat Undang-undang PT no. 40 tahun 2007 pasal 71 ayat 2
3. Tingkat dividen yang layak untuk pemegang saham
4. Prospek usaha Perusahaan dan konsistensi besaran dividen per lembar saham setiap tahunnya
5. Pemupukan modal Perusahaan guna meningkatkan ketahanan Perusahaan terhadap kualitas aset Perusahaan serta guna meningkatkan daya saing Perusahaan

INDUSTRI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DAN PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Sebagai negara berkembang yang juga merupakan negara kepulauan, Indonesia memahami pentingnya pembangunan infrastruktur dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Pesan ini telah didengungkan secara konsisten oleh Pemerintah.

Pada tahun 2017, total alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia yang akan dibiayai melalui APBN mencapai Rp410,7 triliun atau meningkat sebesar 18,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp386,9 triliun. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan anggaran pembiayaan infrastruktur melalui APBN dari tahun 2005 hingga tahun 2017:

DERIVATIVE TRANSACTION AND HEDGING

The Company conducted SWAP and forward transaction during 2017 to protect the Company from impact of fluctuating currency.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

Throughout 2017, there were no changes in regulations that have significant impacts on the Company's performance.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY THAT WERE IMPLEMENTED IN 2017 FISCAL YEAR

There were no significant impacts on the implementation of new accounting standards during 2017.

DIVIDEND POLICY

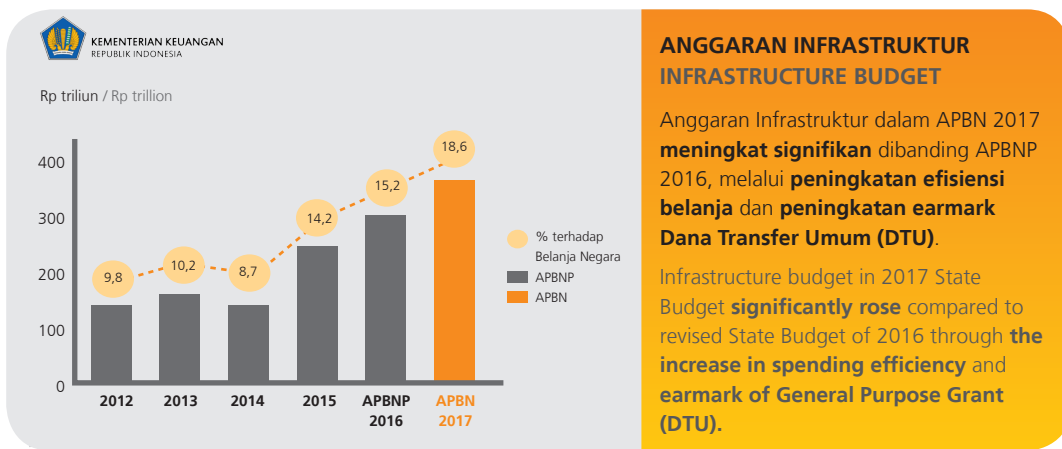
The distribution of dividend by the Company take into account:

1. Net profit after tax obtained in the related fiscal year.
2. Allowance to be determined for reserve fund to conform to Indonesian Company Law no. 40 year 2007 article 71 paragraph 2
3. Sufficient dividend for shareholders.
4. The Company's business outlook and consistency of dividend per share every year.
5. The Company's capital formation to enhance its asset quality and improve competitiveness.

INFRASTRUCTURE INDUSTRY IN INDONESIA AND THE COMPANY'S BUSINESS OUTLOOK

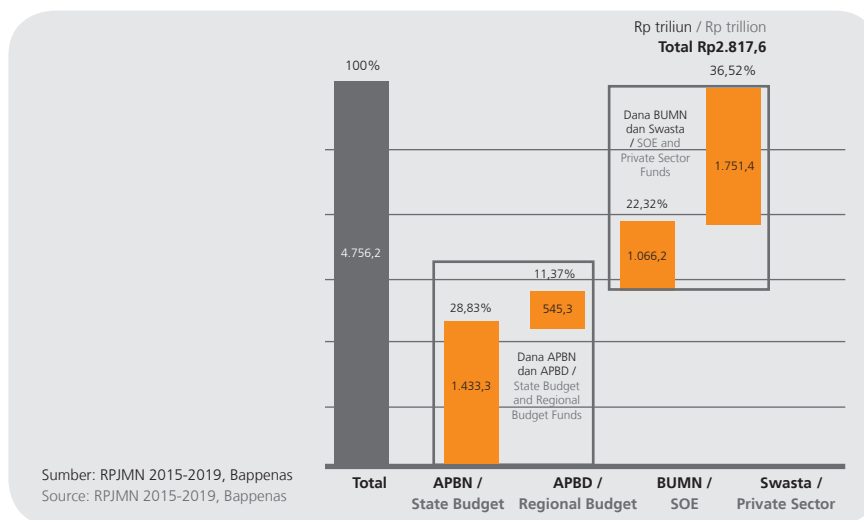
As a developing and an archipelagic country, Indonesia is aware of the importance of infrastructure development, thus putting it as its main priority. This message has been consistently resounded by the Government.

In 2017, the budget allocation for financing Indonesia's infrastructure reached Rp410.7 trillion in the State Budget or increased by 18.6% compared to Rp386.9 trillion in the previous year. This chart below shows the development of infrastructure financing budget through State Budget from 2005 to 2017:



Grafik berikut menunjukkan estimasi dari rincian dana infrastruktur yang dibutuhkan untuk periode 2015-2019 sebagaimana dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019:

This chart shows the estimated amount of required infrastructure fund for the period of 2015-2019 as released by the Ministry of National Development Planning and RPJMN (National Mid-Term Development Plan) for 2015-2019:



Grafik di atas menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp4.796 triliun untuk periode 2015-2019, di mana hanya sebesar Rp1.978 triliun atau 41% dari total kebutuhan tersebut dapat dibiayai dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, bahkan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi pemerintah untuk infrastruktur sebagaimana tertuang dalam revisi APBN-P tahun 2015 meningkat menjadi Rp290,3 triliun dari sebelumnya Rp177,9 triliun pada tahun 2014, atau meningkat 63%. Namun angka ini masih dianggap belum memadai karena masih berkisar 2,75% dari PDB Indonesia, yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

The above chart shows that Indonesia requires an infrastructure fund of Rp4,796 trillion for the period of 2015-2019, or 41% of the total amount can be covered by the central and local government budget, also accounting the initiatives taken by the Government to increase the allocation for infrastructure development. The Government's allocation for infrastructure as stated in the revised APBN-P of 2015 increased to Rp290.3 trillion from Rp177.9 trillion in 2014 or grew by 63%. However, this figure is still deemed not sufficient, for it is only around 2.75% of Indonesia's GDP, which was relatively small compared to other developing nations.

Pemerintah Indonesia saat ini mendorong serta memimpin upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan mendukung program-program kesejahteraan sosial agar dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah berhasil dicapai hingga saat ini. Dalam melaksanakan hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menarik sektor swasta ke dalam bidang infrastruktur melalui bermacam peraturan, termasuk regulasi tentang KPBU, regulasi tentang pembebasan lahan, dukungan pemerintah, skema insentif pajak dan mempersingkat seluruh proses perizinan melalui *one-stop-process*.

Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong BUMN untuk berperan lebih aktif dalam membangun infrastruktur. Meskipun langkah-langkah ini sangat penting, namun sepertinya masih belum cukup untuk menutupi kesenjangan pembiayaan infrastruktur karena pembiayaan yang mudah diakses dan tersedia di pasar untuk proyek-proyek *greenfield* umumnya merupakan pembiayaan jangka pendek dari bank yang sumber dananya adalah dana deposito. Untuk itu, tetap diperlukan katalis sebagai ujung tombak dalam penyediaan pembiayaan proyek yang mampu menyediakan pembiayaan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Tantangan terasa semakin berat apabila juga dilihat dari sisi lainnya, di mana pasokan proyek-proyek infrastruktur yang layak dan siap dibiayai oleh sektor swasta masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dengan masih sangat terbatasnya jumlah proyek yang siap dan telah berhasil ditenderkan dalam skema KPBU, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015. Saat ini, pasar infrastruktur didominasi oleh *Independent Power Producer* (IPP), telekomunikasi dan jalan tol proyek, dan infrastruktur yang dikelola oleh BUMN seperti bandara, pelabuhan laut dan kereta api. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk membuka lebih banyak sektor infrastruktur bagi sektor swasta. Dengan demikian Perusahaan berharap bahwa ke depannya akan terdapat lebih banyak lagi proyek yang siap untuk didanai oleh sektor swasta, baik melalui penyertaan modal maupun melalui pembiayaan.

Dengan latar belakang tersebut Perusahaan hadir di sektor ini dan memberikan kontribusi tidak hanya dalam hal mengisi kesenjangan pendanaan dengan dana jangka panjang dan struktur pembiayaan proyek yang *state-of-the-art*, tetapi juga dalam membantu sektor publik dalam menata kebijakan KPBU yang kondusif dan mempersiapkan proyek KPBU yang

Indonesia's government is currently encouraging and leading the infrastructure development acceleration as well as supporting social welfare programs to maintain or even increase economic growth thus far. In connection with this effort, the Government has taken various initiatives to attract private sectors to participate in the infrastructure project through the enforcement of various regulations on PPP, land clearing, Government support, tax incentive schemes, as well as to streamline permit procedures through one-step process.

At the same time, the Government also encouraged many SOEs to participate more actively in the infrastructure development. Despite the significant result of this approach, it seems that the implementation of this measure still cannot sufficiently overcome infrastructure financing disparity. This is because most accessible and available financing schemes in the market for greenfield projects use a short-term bank loan whose source of funds comes from fund owners. Therefore, infrastructure development still requires a catalyst that can provide long-term financing schemes.

Another main challenge is the limited number of adequate infrastructure projects which is commercially viable, well-prepared, and ready to be financed by the private sectors. This is proven from the limited number of infrastructure projects that is ready and successfully tendered using PPP scheme as regulated in the Presidential Regulation No.38/2015. Currently, the infrastructure market is dominated by the Independent Power Producer (IPP), telecommunication and toll road projects, in addition to infrastructure managed by the SOEs, such as airports, seaports, and railroads. Therefore, Indonesia has a big potential to open up more infrastructure project financing opportunities for the private sectors. The Company expects that in the near future, there will be more projects that are ready to be financed by the private sector, be it through capital investment or financing.

Given such background, the Company emerges in the infrastructure industry to contribute to help minimize financing disparity with its long-term financing scheme offering and state-of-the-art project financing while continuously assisting public sector in managing an effective and favorable PPP project and preparing a bankable PPP project that has a competitive

bertujuan menjadikan proyek *bankable* dengan harga yang kompetitif. Dengan cara ini, Perusahaan tetap berkomitmen untuk selalu menjunjung visinya menjadi menjadi pelopor katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Perusahaan senantiasa akan mempertahankan kapasitas modalnya secara kompetitif sebagai upaya untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur dan tetap terbuka untuk setiap bentuk kerja sama dengan lembaga keuangan lain, baik itu lokal ataupun asing, untuk membantu Indonesia membangun pondasi perekonomian yang lebih baik ke depannya dan untuk mengisi kesenjangan pembiayaan.

ASPEK PEMASARAN

Perusahaan memiliki misi sebagai katalisator dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan di Indonesia maupun asing dan para investor untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan dan investasi dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Oleh sebab itu, strategi pemasaran Perusahaan bukanlah untuk bersaing dengan para kreditur atau investor lainnya, melainkan dengan menjalin sinergi yang baik. Hal ini juga dikarenakan sektor infrastruktur selalu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga membutuhkan sinergi yang tepat antara lembaga pembiayaan baik domestik maupun internasional.

Perusahaan selalu berusaha mengembangkan aset portfolio pembiayaannya dengan memberikan pendanaan kepada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Untuk mencari proyek-proyek yang layak dibiayai, Perusahaan menggunakan jaringan-jaringan sebagai berikut:

- Penetrasi kepada pelaku infrastruktur, dimana Perusahaan mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang layak untuk didukung dengan cara membangun jaringan dengan para pelaku di industri infrastruktur;
- Jaringan perbankan lokal maupun asing, dimana Perusahaan bekerja sama dengan bank-bank komersial maupun kreditur-kreditur non-bank untuk melakukan peninjauan pembiayaan kepada proyek-proyek infrastruktur yang layak dibiayai; dan
- Agen pembangunan, dimana Perusahaan melakukan dialog secara aktif dengan para agen pembangunan (termasuk dengan para pemegang saham Perusahaan) untuk mengetahui perkembangan proyek-proyek infrastruktur yang diperkirakan akan mulai dibangun.

price. By doing so, the Company remains committed to always strive towards its vision of becoming the pioneer catalyst of Indonesia's infrastructure development financing. The Company continues to maintain its capital structure to remain competitive as part of its efforts to provide infrastructure financing while keeping open to every partnership with other financial institutions, both local and foreign, in order to help Indonesia build a stronger foundation for its economic growth going forward and to close the financing gap.

MARKETING ASPECTS

The Company has a mission to become a catalyst of infrastructure development financing in Indonesia by building cooperation with local financing institutions and investors to participate in the financing and investment of infrastructure developments in the country. Therefore, the Company's marketing strategy is not geared towards outperforming other creditors or investors, but building good synergy with them. We do this because we are aware that the infrastructure sector always requires large funding, thus it is important to develop an appropriate synergy between financing institutions, be it domestic or international.

The Company always strives to expand its financing portfolio asset by providing funds to commercially viable infrastructure projects. In order to seek such projects, the Company utilizes the following networks:

- Penetration to infrastructure players, in which the Company identifies commercially viable infrastructure projects to be financed by building networks with the infrastructure business community;
- Local or foreign banking network, in which the Company cooperates with commercial banks or non-bank creditors to identify financing potential from commercially viable infrastructure projects; and
- Agent of development, in which the Company makes active dialogue with the agents of development (including the Company's shareholders) to know the progress of infrastructure projects that are predicted to start the kick off.

Sejalan dengan peran utama Perusahaan sebagai katalisator bagi sektor pembiayaan infrastruktur, Perusahaan tidak didesain untuk mendominasi pasar pembiayaan proyek infrastruktur. Perusahaan dirancang untuk menjadi pendorong bagi bank-bank komersial atau lembaga pembiayaan lainnya untuk turut serta dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, dengan memberikan solusi-solusi inovatif yang dapat membuat pembiayaan proyek tersebut menjadi menarik bagi para kreditur dan/atau investor lain, untuk bersama dengan Perusahaan mendanai proyek tersebut.

Perusahaan menyadari bahwa setiap proyek infrastruktur memiliki karakteristik yang unik, tergantung pada banyak faktor seperti kebijakan Pemerintah, situasi ekonomi dan politik, lokasi, skala teknologi yang digunakan, skema pembayaran dari pengguna dan lain sebagainya. Hal ini berpengaruh terhadap aspek keuangan proyek tersebut dan pada akhirnya akan mempengaruhi jenis fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan, termasuk skema pembiayaannya.

Dalam memberikan pembiayaan proyek, Perusahaan mengedepankan uji tuntas yang menyeluruh untuk dapat menawarkan struktur pembiayaan yang dapat diterima dan sesuai dengan proyeksi keuangan dari proyek tersebut. Struktur pembiayaan tersebut juga dipadankan dengan kemampuan dan/atau kondisi keuangan dari pemilik proyek, untuk menghasilkan struktur pembiayaan yang dapat diterima oleh semua *stakeholders* di dalam proyek tersebut. Dengan menawarkan struktur pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dari proyek yang dibiayai, Perusahaan berharap dapat mempercepat dimulainya pembangunan proyek infrastruktur tersebut.

Sebagai nilai tambah, Perusahaan dapat memberikan solusi dengan menawarkan produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini tentunya memberikan kemampuan bagi Perusahaan untuk memasuki ceruk pasar yang khas, yang menjadi dasar dari strategi pemasaran Perusahaan. Selain upaya pemasaran dengan memberikan jasa yang *customized* sebagai fokus upaya pemasaran, Perusahaan juga membangun brand awareness pengenalan terhadap visi dan misi Perusahaan, serta kemampuan Perusahaan dalam mendorong pembiayaan proyek infrastruktur. Di antara upaya-upaya tersebut, Perusahaan mengikuti pameran atau

In line with the Company's main role as a catalyst for infrastructure financing sector, the Company does not aim to dominate the infrastructure project financing market. The Company is designed to serve as a stimulant for commercial banks or other financing institutions to take part in the infrastructure project financing by providing innovative solutions that can attract other creditors and/or investors to finance the project along with the Company.

The Company is aware that every infrastructure project is unique and depends on many factors, such as the Government's policy, economic and political situations, location, scale, technology used, payment scheme from user, and other factors. This will impact project financial aspects, which will ultimately influence types of facilities required, including the financing scheme.

In providing project financing, the Company puts forward due diligence before offering financing structure that is reasonable and suitable with the financial projection of the project. The financing structure is also adjusted with financial capacity and/or condition of the project owner to produce proper financing structure that can satisfy the diverse interests of all stakeholders in the project. By offering a financing scheme that is adjustable to the characteristics of the financed project, the Company expects to expedite the infrastructure project development process.

As an added value, the Company may provide solution by offering financing products tailored to the financing situation which enables the Company to penetrate into unique market share. In addition to delivering customized service as its marketing focus, the Company also builds brand awareness to introduce the Company's vision and mission and promote its capability in encouraging infrastructure project financing, among others, by attending international-scale exhibition and conferences, being the keynote speaker in infrastructure seminars, be it in the national and/or global level, and penetrating into relevant industrial associations.

konferensi infrastruktur berskala internasional, menjadi pembicara di seminar-seminar infrastruktur, baik dalam skala nasional maupun dunia dan memasuki asosiasi-asosiasi industri yang relevan.

Di samping mengembangkan nama dan jaringan di pasar domestik, Perusahaan juga mengembangkan dialog dengan pemain-pemain infrastruktur skala internasional dan kreditur-kreditur internasional. Hal ini dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman dan juga mencari perkembangan terbaru pada industri infrastruktur di negara-negara lain. Selain itu, dialog yang rutin juga diharapkan dapat menarik minat pihak swasta asing dan lembaga pembiayaan asing untuk ikut berperan serta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Selain membina hubungan dengan sektor swasta dan BUMN, Perusahaan juga melakukan dialog secara reguler dengan sisi pemerintahan, seperti kementerian terkait, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menjaga hubungan baik, Perusahaan dapat melakukan dialog dengan pihak pemerintah apabila memiliki masukan-masukan untuk membangun industri infrastruktur. Selain itu, hubungan yang baik dengan pemerintah juga memberikan nilai tambah bagi Perusahaan untuk mengetahui perkembangan terkini dari sisi regulator, maupun kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Pada akhirnya, mengingat pelanggan Perusahaan adalah korporat, maka strategi pemasaran Perusahaan bertumpu pada kinerja yang baik, solusi yang tepat dan bermanfaat, jaringan kerjasama yang luas, dan pengakuan pasar terhadap kemampuan Perusahaan dalam memberikan solusi tersebut.

STRATEGI PERUSAHAAN

Strategi Perusahaan dalam mengembangkan usahanya bertumpu kepada keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perusahaan.

Keunggulan-keunggulan kompetitif tersebut, yang timbul karena sifat Perusahaan yang unik, antara lain adalah kemampuan untuk memberikan pembiayaan dalam jangka panjang, kemampuan untuk memberikan pembiayaan yang lebih junior dari pinjaman bank, kemampuan pembiayaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berkat dukungan pemegang saham internasional, proses kerja dan standar

Other than enhancing reputation and networks in domestic market, the Company also intensively communicates with international infrastructure communities and creditors to share knowledge and insights as well as keep up to date with the latest development of the infrastructure industry in other countries. In addition, the routine dialogue is also expected to attract foreign private sectors and financing institutions to take part in Indonesia's infrastructure project developments.

Aside from developing relationship with private sectors and SOEs, the Company also regularly makes dialogue with the government, such as related ministry, the Capital Investment Coordination Board (BKPM) and the Financial Services Authority (OJK). By maintaining good relationship, the Company is able to discuss with the government to share its insights in building infrastructure industry. In addition, good relationship with the government also provides added value for the Company to understand the latest regulatory update and the overall economic conditions.

At the end, considering that the Company's clients are mostly corporate customers, the Company's marketing strategy relies on good performance, accurate and beneficial solution, extensive cooperation network, and its reputation as the recognized expert in providing such solutions.

COMPANY 'S STRATEGY

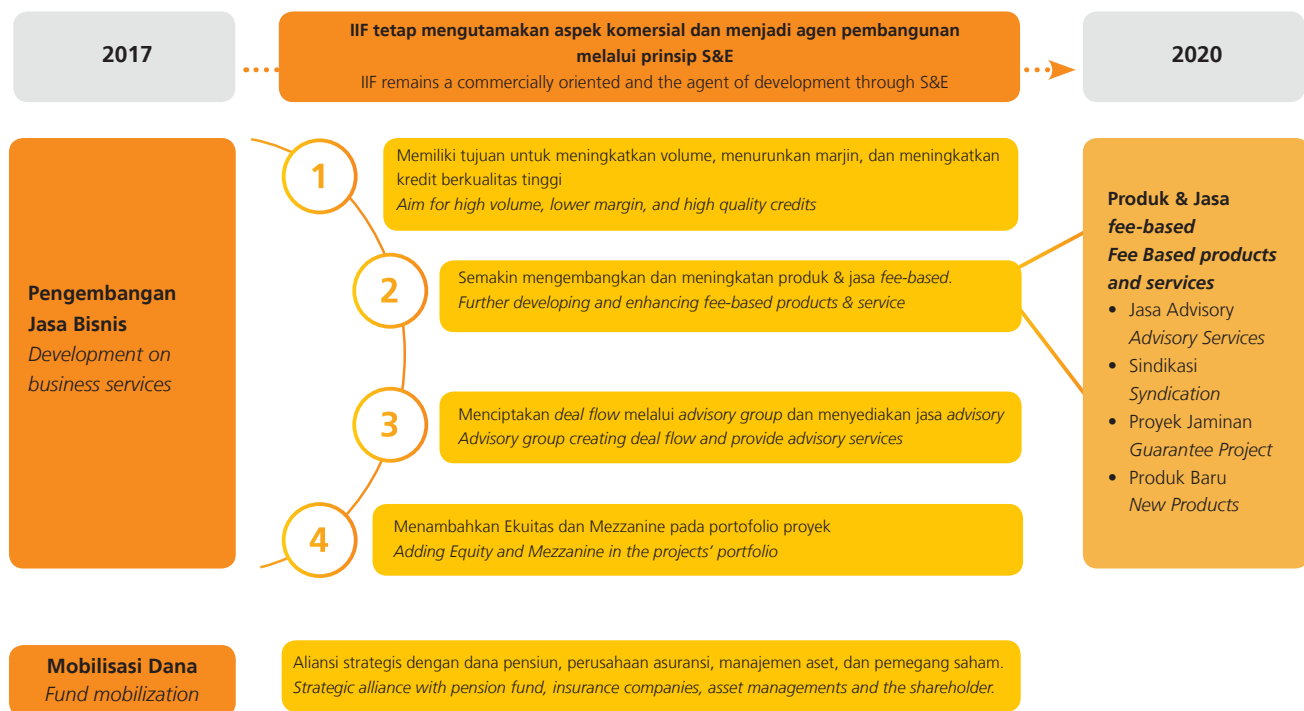
The Company's strategy in developing its business relies on the Company's competitive advantage.

These competitive advantage, which arise from the Company's unique nature of business is its ability to provide long-term financing, more junior loans than bank loans' financing capability in the USD currency due to the support from international shareholders, international standard work process and social and environmental management, and the Company's capability to provide Advisory to the party in need.

pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang berskala internasional dan kemampuan Perusahaan memberikan *Advisory* bagi pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan keunggulan kompetitif tersebut, maka strategi Perusahaan, yang telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan pada 28 September 2016 meliputi 5 hal pokok, yang dinamakan "*IIF's 5 point strategy for growth*", seperti pada bagan berikut:

Based on the above competitive advantage, the shareholders of the Company have approved the Company's strategy on September 28, 2016, which consists of 5 main strategies known as "*IIF's 5 point strategy for growth*", among others:



Pelaksanaan strategi ini sekaligus menunjukkan komitmen Perusahaan untuk memberi nilai lebih pada kegiatan usahanya dan memperkuat pondasi untuk terus menjaga keseimbangan kinerjanya dan pertumbuhan berkelanjutan.

The implementation of this strategy at the same time underlines the Company's commitment to giving added value in its business activities while strengthening the Company's foundation to further maintain its balanced performance and sustainable growth.

06

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

- 105 Organ Utama GCG
GCG Primary Organs
 - 105 Dasar Hukum dan Prinsip Penerapan GCG
Legal Basis and Principles of GCG Implementation
 - 108 Struktur Tata Kelola
Governance Structure
 - 109 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
 - 111 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
 - 116 Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees under Board of Commissioners
 - 116 Komite Audit
Audit Committee
 - 122 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
 - 125 Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris
Risk Oversight Committee of The Board of Commissioners
 - 128 Komite Investasi-Dewan Komisaris
Board of Commissioners – Investment Committee
 - 130 Direksi
Board of Directors
 - 136 Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi
Affiliation Between Board of Commissioners and Board of Directors
 - 136 Dewan Komisaris dan Direksi Sebagai Pembicara Pada Beberapa *Event* Di Tahun 2017
Board of Commissioners and Board of Directors As Keynote Speakers In Several Events In 2017
 - 138 Komite di Bawah Direksi
Committees under The Board of Directors
 - 138 Komite Investasi-Direksi (BOD-IC)
Board of Directors – Investment Committee
 - 139 Komite Aset dan Liabilitas (BOD-ALCO)
Assets and Liabilities Committee
 - 141 Komite Manajemen Risiko-Direksi
Risk Management Committee of The Board of Directors
 - 144 Komite Advisory
Advisory Committee
 - 146 Komite Sumber Daya Manusia
HR Committee
 - 146 Komite Pengarah TI
IT Steering Committee
 - 150 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
 - 152 Audit Internal
Internal Audit
 - 156 Auditor Eksternal
External Auditor
 - 157 Kode Etik dan Budaya Perusahaan
Code of Conduct and Corporate Culture
 - 161 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy
 - 161 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System
 - 163 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
 - 164 Perkara Penting 2017
Legal Cases in 2017
 - 164 Sanksi Administratif
Administrative Sanction
 - 164 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan
Employee Stock Option Plan
 - 164 Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
System and Procedure of Goods and Services Procurement
 - 166 Akses Informasi Perusahaan
Access To Company Information
- 

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

IIF sebagai warga korporasi yang baik akan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten sehingga berimplikasi positif bagi Perusahaan demi memberikan nilai lebih. Nilai lebih tersebut diciptakan melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya Perusahaan; *Collaboration, Excellence and Commitment to Infrastructure Business.*

As a good corporate citizen, IIF consistently implements GCG principles in order to have a positive impact on the Company's ability to provide added value. Such values are created by showing conduct that reflects the Company's culture; *Collaboration, Excellence and Commitment to Infrastructure Business.*

Sebagai sebuah entitas usaha, IIF senantiasa mengedepankan pengelolaan usaha yang profesional dan terpercaya. Untuk itu, pemenuhan atas prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas bisnis menjadi sebuah kewajiban. Pemenuhan atas prinsip yang terkandung dalam GCG berperan dalam membentuk tatanan awal pengelolaan Perusahaan untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan lingkup kegiatan usaha melalui penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan sehingga menjadi sebuah *best practice*.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) memiliki 5 (lima) prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Keseluruhan prinsip tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan yang tidak hanya mengedepankan kepentingan Perusahaan namun juga seluruh pemangku kepentingan seperti pemegang saham, konsumen, regulator bahkan masyarakat umum.

Dalam Laporan Tahunan ini, Perusahaan akan menyampaikan bagaimana pengelolaan Perusahaan dilakukan dengan baik dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan tidak hanya sekedar pemenuhan atas kewajiban terkait pengelolaan namun harus dapat menjadi sebuah budaya sebagaimana tujuan dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik itu sendiri.

As a business entity, IIF always puts forward professional and reliable business management. Therefore, the Company is obliged to comply with Good Corporate Governance (GCG) principles in every business activity. Fulfillment of the principles contained in GCG is important in establishing the foundation of the Company's management to be further developed by making necessary adjustments in accordance with the scope of business activities, so later it becomes best practice.

Good Corporate Governance (GCG) consists of 5 (five) principles: transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. The entire principle is implemented to create sustainable business activities that not only prioritize the interests of the Company but also all stakeholders such as shareholders, consumers, regulators and even the general public.

In this Annual Report, the Company will elaborate how the Company manages its business properly and prioritizes prudential principles. By implementing Good Corporate Governance it also conducts not only as the fulfillment of management-related obligations, but also as a culture to reflect the spirit and goal of GCG itself.

ORGAN UTAMA GCG

Organ utama IIF terdiri atas:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

DASAR HUKUM DAN PRINSIP PENERAPAN GCG

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Keputusan Menteri

- Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT Indonesia Infrastructure Finance.

Peraturan Bapepam-LK atau Otoritas Jasa Keuangan

- POJK no. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- POJK no. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
- POJK no. 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; 111 PT Indonesia Infrastructure Finance Annual Report 2016
- POJK no. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

GCG PRIMARY ORGANS

IIF's primary organs consist of:

- General Meeting of Shareholders
- Board of Commissioners
- Board of Directors

LEGAL BASIS AND PRINCIPLES OF GCG IMPLEMENTATION

Legal Basis

Laws of the Republic of Indonesia

- Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Information Disclosure;
- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Ministerial Regulation

- Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 100/PMK.010/2009 on Infrastructure Financing Company.

Ministerial Decision

- Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 on Provision of Business License of Infrastructure Financing Company to PT Indonesia Infrastructure Finance.

Regulations of Bapepam-LK or Financial Services Authority

- POJK No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies;
- Decision of Chairman of Bapepam and LK No. Kep-413/BL/2009 dated November 25, 2009, Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 on Material Transaction and Changes in Main Business Activity;
- Decision of Chairman of Bapepam and LK No. Kep-412/BL/2009 dated November 25, 2009, Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest in Certain Transaction;
- POJK no. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines on the Drawing Up of Internal Audit Unit Charter;
- POJK no. 33/POJK/04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;
- POJK no. 55/POJK.04/2015 on the the Establishment and Guidelines on the Performance of Audit Committee's Work;

- Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-40/PM/2003 Peraturan Bapepam Nomor: VII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003, Peraturan Nomor: X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam Nomor: VII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- POJK no. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK no. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Publik atau Perusahaan Publik;
- POJK no. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- POJK no. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK no. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- SEOJK no. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- SEOJK no. 11/SEOJK.04/2014 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pengumuman kepada Masyarakat oleh Pelaku Pasar Modal yang batas waktunya Jatuh pada Hari Libur;
- SEOJK no. 06/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Presiden no. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- Peraturan Ketua Bapepam LK no. PER-03/BL/2010 tentang Bentuk, Susunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- POJK no. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan non Bank.
- SEOJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
- Decision of Chairman of Bapepam No. Kep-40/PM/2003, Bapepam Regulation No: VII.G.11 on Responsibilities of Board of Directors on Financial Statements;
- Decision of Chairman of Bapepam No. Kep-36/PM/2003 dated September 30, 2003, Regulation No. X.K.2 on the Obligation to Submit Periodical Financial Statements;
- Decision of Chairman of Bapepam No. Kep-554/BL/2010 dated December 30, 2010 on Amendment to Decision of Chairman of Bapepam No. Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000 on Amendment to Bapepam Regulation No. VII.G.7 on Guidelines on the Presentation of Financial Statements;
- POJK no. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information on Material Fact by Issuers or Public Companies;
- POJK no. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
- POJK no. 29/POJK.05/2014 on Implementation of Financing Business;
- POJK no. 8/POJK.04/2014 on Website of Issuers or Public Companies;
- POJK no. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
- SEOJK no. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Annual Report of Issuers or Public Companies;
- SEOJK no. 11/SEOJK.04/2014 on Obligation to Submit Report to the Financial Services Authority and Announcement to the Public by Capital Market Community of which deadline Falls on Holiday;
- SEOJK no. 06/SEOJK.04/2014 on Procedure to Electronically Submit Report by Issuers or Public Companies;
- Presidential Regulation no. 9 of 2009 on Financing Institutions;
- Regulation of Bapepam LK Chairman no. PER-03/BL/2010 on Form, Composition, and Submission of Quarterly Financial Statements and Report of Business Activities per Semester of Infrastructure Financing Company;
- POJK no. 3/POJK.05/2013 on Monthly Report of non Bank Financial Service Institutions.
- SEOJK Number 15/SEOJK.05/2006 concerning Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Multifinance Companies

Prinsip Penerapan GCG

IIF sebagai warga korporasi yang baik akan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten sehingga berimplikasi positif bagi Perusahaan demi memberikan nilai lebih. Nilai lebih tersebut diciptakan melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya Perusahaan; *Collaboration, Excellence and Commitment to Infrastructure Business*.

Implementasi dan praktik tata kelola di IIF berdasarkan prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut:

1. Transparansi

IIF memberikan informasi secara transparan kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan terkait kinerja dan kegiatan usaha Perusahaan. IIF menerapkan keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban di Perusahaan sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat *job descriptions* yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, pelaporan dan hasil kinerja yang diraih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tanggung Jawab

Kesesuaian rencana, strategi dan hasil yang dicapai IIF berada dalam garis kebijakan manajemen dan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaporan terkait kegiatan usaha Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini senantiasa dilakukan guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan memberi dampak positif bagi citra Perusahaan.

4. Independensi

Pengelolaan Perusahaan dilakukan secara mandiri, pengurus Perusahaan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional Perusahaan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola Perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan Perusahaan.

GCG Implementation Principles

As a good corporate citizen, IIF consistently implements GCG principles in order to have a positive impact on the Company's ability to provide added value. Such values are created by showing conduct that reflects the Company's culture; *Collaboration, Excellence and Commitment to Infrastructure Business*.

Governance practice and implementation in IIF are based on GCG principles as follows:

1. Transparency

IIF transparently provides information related to the Company's business performance and activities to the shareholders and all stakeholders. IIF exercise a transparent information system in its decision-making process and discloses information deemed significant and relevant to the Company's activities.

2. Accountability

The clarity of function, structure, system and responsibility in the Company in order to effectively and efficiently manage its business. The Management sets out clear job descriptions for all employees and affirms the basic functions of each division. Thus, the reporting process and performance result can be made accountable.

3. Responsibility

The conformity of plans, strategies and results attained by IIF is always set within the Management's policy and implement based on the Company's Articles of Association by taking into the prevailing laws and regulations to further ensure the accountability of its report. This principle is constantly upheld in order to provide added value to the shareholders and create a positive image for the Company.

4. Independency

The Company is managed independently in which the management has their own duties and responsibilities and carries them out without any pressure from outside parties that is not in accordance with the Company's operations systems. This principle implicitly states that the Company's management must always acknowledge the rights of stakeholders as declared in the laws and Company regulations.

5. Kewajaran

Kesetaraan dan perlakuan adil dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap seluruh pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IIF senantiasa membuat sistem yang solid untuk melaksanakan dan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas seperti yang diharapkan. IIF menjalankan kinerja secara *fair* serta menaati seluruh peraturan yang ada guna melindungi pemangku kepentingan dalam keberlangsungan bisnis Perusahaan. IIF berkomitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai secara adil serta bebas dari prasangka yang dapat muncul karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

STRUKTUR TATA KELOLA

Dalam membangun struktur tata kelola, IIF memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha berdasarkan standar etika bisnis serta memastikan mekanisme *checks and balances* dapat bekerja secara efektif. Struktur tata kelola di lingkungan Perusahaan meliputi struktur organ dan kebijakan Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta organ-organ pendukung lainnya seperti Sekretaris Perusahaan, Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, serta ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

- Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan menurut Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi saran kepada Direksi.
- Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip

5. Fairness

Equality and fair treatment to meet the rights and obligations to all stakeholders that arise from agreements and prevailing laws and regulations. IIF always ensures a solid system to conduct and create quality products and services to meet clients' expectations. The Company gives fair treatment and complies with all applicable regulations to protect stakeholders within its responsibility to sustain its business. IIF commits to give fair treatment to all employees without prejudice to their ethnicity, religion, origin, gender, or other matters that are not relevant to their performance.

GOVERNANCE STRUCTURE

In developing its governance structure, IIF pays attention to the mapping of functions or business activities that are based on business ethics, and ensures that the checks-and-balances mechanism works effectively. The governance structure within the Company's environment covers its organisational structure and policies, namely General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and other supporting organs such as Corporate Secretary, Internal Control, Risk Management and compliance with prevailing regulations. Pursuant to Law No. 40 of 2007, Chapter I regarding General Provisions Article 1, Company Organs consist of General Meeting of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners.

- General Meeting of Shareholders ("GMS") is an organ of the Company with authorities that are not given to the Board of Directors or Board of Commissioners within a limit that is decided by the Laws and/or Articles of Association.
- Board of Commissioners is an organ of the Company with a duty to generally/ specifically supervise the Company according to the Articles of Association and provides advice to the Board of Directors.
- Board of Directors is an organ of the Company that has an authority and is fully responsible for the Company's management. This is done for the sake of the Company in line with its aims and purposes, both inside and outside the court, according to the Articles of Association.
- The Company's organs implement their functions pursuant to the laws and regulations, Articles of Association of the Company and other provisions on the principle that each

bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan. RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Dalam menjalankan tugas pengurusan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perusahaan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ tertinggi GCG yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan. Kewenangan RUPS antara lain:

- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menyetujui laporan keuangan Perusahaan;
- Menentukan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB"). Pada 2017, pemegang saham IIF telah mengadakan RUPS Tahunan yang berlangsung pada 23 Maret 2017 bertempat di Kantor Pusat IIF, Energy Building Lantai 30, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta 12190 dan dihadiri oleh 100% saham.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan tentang Perusahaan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan melalui RUPS. Berdasarkan kewenangan RUPS yang memiliki peran dalam menyetujui laporan tanggung jawab pengelolaan maupun pengambilan keputusan terkait hasil rencana-rencana Perusahaan, maka Pemegang Saham memiliki kewajiban untuk menghadiri RUPS dan turut serta berpartisipasi menggunakan hak suaranya.

organ is independent in carrying out their duties, functions and responsibilities for the interests of the Company. The GMS, Board of Commissioners and Board of Directors respect each other's duties, responsibilities and authority, pursuant to the laws and regulations and Articles of Association.

- In conducting their supervisory duty, the Board of Commissioners may establish committees composing of one or more members of the Board of Commissioners. The committees report directly to the Board of Commissioners.
- In conducting their management duty, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary and Internal Audit Unit, as well as other units that carry out the management function of the Company.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is the highest organ of GCG whose authority is regulated by the laws and Company's Articles of Association. GMS authority are, among others:

- To appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- To evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- To approve the Company's financial statements;
- To determine the remuneration amount for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

GMS consists of Annual GMS ("AGMS") and Extraordinary GMS ("EGMS"). In 2017, IIF convened an Annual GMS on 23 March 2017 at IIF's head office located at the Energy Building on 30th Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta 12190, which was attended by shareholders representing 100% of shares.

Rights and Responsibilities of Shareholders in GMS

As stated in Article 75 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Shareholders have the right to obtain information about the Company from the Board of Commissioners and Board of Directors at the GMS. Based on its authority, GMS shall approval for the report on the responsibility of the management as well as decisions related to the Company's plans. Moreover, Shareholders also have the obligation to attend the GMS and to participate in the voting process.

Agenda dan Hasil RUPS 2017

Berikut adalah agenda pembahasan RUPS 2017 beserta hasil keputusan yang disepakati:

2017 AGMS Agenda and Resolutions

The following are the agenda and resolutions of the 2017 GMS:

Agenda / Agenda	Hasil RUPS	AGMS Resolutions
Agenda 1	a. Menyetujui Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. b. Menyetujui Laporan Tahunan 2016 Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 66 UUP dan Pasal 17 Anggaran Dasar.	a. Resolved to approve the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2016. b. Resolved to approve the 2016 Annual Report that the Board of Directors have prepared according to the provisions of Article 66 of the Indonesian Company Law and Article 17 of the Article of Association.
Agenda 2	Menyetujui alokasi sebesar 20% dari NPAT 2016 untuk keperluan pembayaran dividen Perusahaan, dan sebesar 15% dari NPAT 2016 sebagai dana cadangan, serta sisa NPAT 2016 untuk laba ditahan.	Resolved to approve the allocation of 20% of 2016 NPAT for the Company's dividend payment and to allocate 15% of 2016 NPAT for the Company's reserves fund, and to allocate the remaining of 2016 NPAT for retained earnings.
Agenda 3	a. Menyetujui pelepasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat dari tugas pengawasannya untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut sepenuhnya tercermin dalam Laporan Tahunan. b. Menyetujui pelepasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang saat ini menjabat dari tugas manajerial untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut sepenuhnya tercermin dalam Laporan Tahunan.	a. Resolved to approve the release and discharged of the current members of the BoC from their supervisory responsibilities for the Financial Year ended on the 31 December 2016 to the extent that all the actions of the BoC are fully reflected to the Annual Report. b. Resolve to approve the release and the discharged of the current members of the BoD from their managerial responsibility for the Financial Year ended on the 31 December 2016 to the extent that all the actions of the BoD are fully reflected to the Annual Report.
Agenda 4	a. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Independen Perusahaan karena habisnya masa jabatan beliau sesuai dengan Pasal 13 ayat (5.b) Anggaran Dasar Perusahaan untuk periode jabatan selama 3 tahun hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020. b. Menyetujui rekomendasi dan pengangkatan kembali Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja sebagai Direktur dan CIO Perusahaan karena habisnya masa jabatan beliau sesuai dengan Pasal 10 ayat (2.b) Anggaran Dasar Perusahaan untuk periode jabatan selama 3 tahun hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020.	a. Resolved to approve on the re-appointment of Mr. Edwin Gerungan as the Independent Commissioner of the Company due to the expiry of this term of service pursuant to the Article 13 paragraph (5.b) of the Articles of Association of the Company for a further period of 3 years until the closing of 2020 Annual General Meeting of Shareholders. b. Resolve to approve the recommendation and re-appointment of Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja as the Director and CIO of the Company due to the expiry of his term of service pursuant to Article 10 paragraph (2.b) of the AoA of the Company for a further period of 3 years until the closing of 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

Agenda / Agenda	Hasil RUPS	AGMS Resolutions
Agenda 5	Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Robert Olivier Dolk sebagai Komisaris Perusahaan karena habisnya masa jabatan beliau sesuai dengan Pasal 13 ayat (5.b) Anggaran Dasar Perusahaan untuk periode jabatan selama 1 tahun hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018.	Resolve to approve on the re-appointment of Mr. Robert Olivier Dolk as the Commissioner of the Company representing ADB due to the expiry of his term of service pursuant to Article 13 paragraph (5.b) of the AoA of the Company for a further period of 1 year until the closing of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders.
Agenda 6	Menyetujui penetapan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2017 serta paket remunerasi atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Utama Perusahaan.	Resolve to approve the determination of the remuneration for the BoD and the BoC of the Company for the financial year of 2017 the compensation package to the remuneration of the BoD and BoC presented by the President Director of the Company
Agenda 7	Memutuskan dan menyetujui pengangkatan Akuntan Publik Purwanto, Sunkoro, & Surja (anggota Ernst & Young) sebagai Auditor Independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta memberi wewenang kepada Komite Audit dan Direksi untuk menentukan biaya jasa profesional bagi Auditor Independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.	Resolve and approve the appointment of KAP Purwanto, Sunkoro, & Surja (member Ernst & Young) as the Company's Independent Auditor for the financial year ending on the 31 December 2017 and to authorize the Audit Committee and the BoD to determine the professional fee that will be awarded to the Company's Independent Auditor for the financial year ending on the 31 December 2017, based on the prevailing market conditions.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi kebijakan dan pengurusan perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi. Peran ini juga mencakup pengawasan pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, peraturan di dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan hukum serta regulasi yang berlaku sesuai dengan kepentingan Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris di IIF, antara lain meliputi:

- Melaksanakan peran pengawasan dan penasihat dalam mengelola organisasi dan bisnis operasi untuk kepentingan pemegang saham, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perusahaan;
- Mengawasi kebijakan Direksi, termasuk pencapaian atas tujuan Perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is a Company governance organ that has a responsibility to supervise the policy as well as the management of the Company that fall under the Board of Directors' duties, and provide advice as well as recommendation to the Board of Directors. The Board of Commissioners also has a duty to monitor the implementation of the Company Business Plan and Budget, regulations in the Articles of Association, GMS resolutions, and the applicable laws and regulations in line with the Company's interests.

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

The main duties of IIF's Board of Commissioners are, among others:

- Conducting supervisory and advisory functions in managing the organization, business and operations for the interests of shareholders, in line with the Company's vision, mission and goals;
- Supervising Board of Directors' policies, including the achievement of the Company's targets and compliance with the prevailing laws and regulations;

- Mengevaluasi dan memberikan nasihat secara berkala atas pelaksanaan dari manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta memberikan persetujuan atas perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif mengenai sistem tersebut;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan bisnis yang terkait dengannya, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.
- Periodically evaluating and providing advice regarding risk management implementation and internal control system, and giving approval for the required changes or corrective actions that must be taken regarding the systems;
- Performing duties for the sake of the Company and related business, by taking into account the needs and interests of all stakeholders.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara otonom guna menghindari benturan kepentingan atau intervensi. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan satu sama lainnya atau dengan anggota Direksi IIF hingga derajat ketiga kekerabatan, baik secara vertikal maupun horizontal atau karena perkawinan.

Piagam Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris IIF memiliki piagam kerja (*charter*) yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya serta memberikan informasi terkait tata hubungan dengan organ-organ terkait di Perusahaan.

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 23 Maret 2017 terdiri dari:

Independency of Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out its role and duties independently to avoid any conflict of interest or intervention from other parties. Moreover, each member of the Board of Commissioners has no relation up to the third degree, both vertically and horizontally, or relationship arising from marriage with each other or with the Board of Directors.

Board of Commissioners Charter

IIF's Board of Commissioners has a charter that serve as a reference for the Board of Commissioners to conduct their duties and as a source of information regarding the relationship with other related organs in the Company.

Composition of the Company's Board of Commissioners

The following is the composition of the Company's Board of Commissioners based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders held on 23 March 2017 which consists of:

Nama / Name	Jabatan / Position	Keputusan Pengangkatan / Appointment Basis	Periode jabatan / Term of office
M. Chatib Basri	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner	Akta no. 52 tanggal 24 Maret 2016 / Deed no. 52 dated 24 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Edwin Gerungan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta no. 12 tanggal 23 Maret 2017 / Deed no. 12 dated 23 March 2017	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta no. 6 tanggal 9 Juni 2016 / Deed no. 6 dated 9 June 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Marwanto Harjowiryo	Komisaris / Commissioner	Akta no. 52 tanggal 24 Maret 2016 / Deed no. 52 dated 24 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date

Nama / Name	Jabatan / Position	Keputusan Pengangkatan / Appointment Basis	Periode jabatan / Term of office
Robert Pakpahan	Komisaris / Commissioner	Akta no. 6 tanggal 9 Juni 2016 / Deed no. 06 dated 9 June 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Robert O. Dolk	Komisaris / Commissioner	Akta no. 12 tanggal 23 Maret 2017 / Deed no. 12 dated 23 March 2017	Penutupan RUPST tahun 2018 / The closing of the 2018 AGMS
Hans-Juergen Hertel	Komisaris / Commissioner	Akta no. 6 tanggal 9 Juni 2016 / Deed no. 06 dated 9 June 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Rajeev V. Kannan	Komisaris / Commissioner	Akta no. 6 tanggal 9 Juni 2016 / Deed no. 06 dated 9 June 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Richard Ranken	Komisaris / Commissioner	Akta no. 1 tanggal 2 Maret 2016 / Deed no. 1 dated 2 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date

Pada tahun 2017 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris yang disahkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 9 Agustus 2017. Melalui keputusan tersebut, Bapak Marwanto Harjowiryo secara hormat dinyatakan tidak lagi menjadi anggota Dewan Komisaris perusahaan dan di bebaskan dari segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Dalam keputusan yang sama, perusahaan juga mengangkat Bapak Bhimantara Widyajala sebagai anggota Dewan Komisaris. Sehingga susunan Dewan Komisaris menjadi:

In 2017, the composition of Board of Commissioners changed with the ratification of Meeting Resolution No. 07 dated 9 August 2017. Through this resolution, Mister Marwanto Harjowiryo is honorably dismissed as a member of Board of Commissioners and fully released from its duties and responsibilities. Based on the same decision, the company also appointed Mr. Bhimantara Widyajala as a member of Board of Commissioners. Thus the composition of Board of Commissioners is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Keputusan Pengangkatan / Appointment Basis	Periode jabatan / Term of office
M. Chatib Basri	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner	Akta no. 52 tanggal 24 Maret 2016 / Deed no. 52 dated 24 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Edwin Gerungan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta no. 12 tanggal 23 Maret 2017 / Deed no. 12 dated 23 March 2017	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta no. 6 tanggal 9 Juni 2016 / Deed no. 6 dated 9 June 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Bhimantara Widyajala	Komisaris / Commissioner	Akta No. 7 tanggal 9 Agustus 2017 / Deed no. 7 dated 9 August 2017	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Robert Pakpahan	Komisaris / Commissioner	Akta no. 6 tanggal 9 Juni 2016 / Deed no. 06 dated 9 June 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date

Nama / Name	Jabatan / Position	Keputusan Pengangkatan / Appointment Basis	Periode jabatan / Term of office
Robert O. Dolk	Komisaris / Commissioner	Akta no. 12 tanggal 23 Maret 2017 / Deed no. 12 dated 23 March 2017	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Hans-Juergen Hertel	Komisaris / Commissioner	Akta no. 6 tanggal 9 Juni 2016 / Deed no. 06 dated 9 June 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Rajeev V. Kannan	Komisaris / Commissioner	Akta no. 6 tanggal 9 Juni 2016 / Deed no. 06 dated 9 June 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Richard Ranken	Komisaris / Commissioner	Akta no. 1 tanggal 2 Maret 2016 / Deed no. 1 dated 2 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date

Kebijakan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat

Terkait pelaksanaan kegiatan rapat Dewan Komisaris, IIF mengacu pada kebijakan Perusahaan :

1. Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga terhadap Perjanjian Pemegang Saham pasal III tentang Dewan Komisaris.
2. Akta Nomor: 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123 pasal 15 tentang Rapat Dewan Komisaris.

Kegiatan Dewan Komisaris 2017

Sepanjang 2017, Dewan Komisaris IIF telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. 4 kali rapat Dewan Komisaris di kantor Perusahaan;
2. 3 kali *teleconference*;
3. 2 hari kunjungan kerja terhadap proyek portofolio Perusahaan.

Policies and Attendance Rate of Board of Commissioners in Meetings

IIF holds Board of Commissioners meetings in accordance with the following policy of the Company:

1. Third Amendment and Restatement Agreement to Shareholders Agreement article III – Board of Commissioners.
2. Deed Number: 34 dated 15 January 2010, made before Aulia Taufani, S.H., as a substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree Number: AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 dated 28 April 2010 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 11 March 2011, Supplement No. 5123 article 15 on Board of Commissioners Meeting.

Activities of Board of Commissioners in 2017

During 2017, the Board of Commissioners has carried out the following activities:

1. 4 times Board of Commissioners meetings at the Company's office;
2. 3 times teleconference meetings;
3. 2-day site visits to the Company's portfolio project.

Tingkat Kehadiran

Selama tahun buku 2017, Perusahaan melaksanakan 7 kali rapat internal Dewan Komisaris dengan frekuensi kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Attendance Rate

Throughout fiscal year of 2017, the Company has conducted 7 Board of Commissioners internal meetings. The attendance rate of each member is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Meeting / Total Meeting	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	% Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
M. Chatib Basri	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner	7	7	100%
Edwin Gerungan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	7	7	100%
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen / Independent Commissioner	7	4	57,1%
Bhimantara Widyajala**	Komisaris / Commissioner	7	4	57,1%
Marwanto Harjowiryo*	Komisaris / Commissioner	7	2	28,5%
Robert Pakpahan	Komisaris / Commissioner	7	6	85,7%
Richard Ranken	Komisaris / Commissioner	7	7	100%
Robert O. Dolk	Komisaris / Commissioner	7	7	100%
Hans-Juergen Hertel	Komisaris / Commissioner	7	7	100%
Rajeev V. Kannan	Komisaris / Commissioner	7	7	100%

* Berakhir sejak 28 Juli 2017.

** Efektif 28 Juli 2017.

* Term of service ended of July 28, 2017.

** Effective as of July 28, 2017.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau risiko, serta Komite Investasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik terutama dalam mendukung tugas-tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris.

Performance Evaluation of Committee under Board of Commissioners

The Board of Commissioners considers that Committees under the Board of Commissioners, including the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Oversight Committee, and the Investment Committee, have performed their duties and responsibilities properly, particularly in supporting the performance of supervisory duties of the Board of Commissioners.

Sosialisasi Komisaris Baru

Dalam hal terdapat Komisaris baru dan/atau perubahan komposisi Dewan Komisaris, IIF memiliki sosialisasi berupa pemaparan mengenai ruang lingkup Perusahaan secara menyeluruh serta informasi terkait jabatan yang akan diemban. Pada 2017, sosialisasi dilakukan kepada Bapak Bhimantara Widyadjala yang efektif menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 28 Juli 2017 berdasarkan akta no.07 tanggal 9 Agustus 2017.

Induction Session of New Commissioners

In the event that there is a new Commissioner and/or the composition of the Board of Commissioners changes, IIF will hold an induction session in the form of job expose which will cover the Company's overall scope of business as well as any information relevant to the position to be held. In 2017, Mr. Bhimantara Widyadjala participated in induction session as he is the newly-elect Commissioner of the Company starting from July 28, 2017 based on notarial deed no 07 dated August 9, 2017.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur tentang pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris IIF. Ketentuan mengenai pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Adapun besaran remunerasi Dewan Komisaris dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit Perusahaan tahun 2017.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukung fungsi pengawasan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian internal, kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, dan auditor internal maupun eksternal. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS. Dalam pembentukannya, IIF telah mengacu pada Peraturan OJK No.55/2015.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit mengacu pada piagam (*charter*) yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, struktur, dan kualifikasi tanggung jawab, pertemuan, pelaporan, dan masa jabatan. Piagam Komite Audit memuat:

Tanggung Jawab Komite Audit

1. Menelaah laporan yang mengidentifikasi isu-isu pengendalian yang signifikan yang membutuhkan perhatian atau subjek koreksi serta merangkum tindakan-tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut;
2. Menelaah cara dan kerangka kerja manajemen dalam memastikan dan memantau kecukupan dari sifat, tingkat, dan internal sistem yang efektif, termasuk pengendalian sistem akuntansi, dan secara internal mengelola sistem pengendalian secara efektif termasuk tinjauan tahunan dari kecukupan pengawasan pengendalian dan proses eskalasi atas suatu permasalahan;
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan Perusahaan untuk melakukan keterbukaan dalam Laporan Tahunan terhadap pengawasan internal, maka komite harus menelaah pernyataan-pernyataan tersebut sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;

Remuneration Policy of Board of Commissioners

The Company has a policy on the provision of remuneration to IIF's Board of Commissioners. The provisions of the remuneration for the Board of Commissioners are discussed and decided in the Annual General Meeting of Shareholders. The amount of remuneration of the Board of Commissioners can be seen in the 2017 Audited Financial Statements of the Company.

COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is established by the Board of Commissioners to support the supervisory function, primarily in dealing with internal controls, accounting policy, financial reporting and the internal and external auditors. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and are reported to the GMS. IIF established its Audit Committee based on OJK Regulation No. 55/2015.

Audit Committee Charter

In conducting its duties, the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter that governs matters related to authority, structure, qualifications and responsibilities, meetings, reporting and term of office. The Audit Committee Charter covers:

Responsibilities of Audit Committee

1. To review reports to identify significant controlling issues requiring attention or correction and summarizing actions taken to solve the problems;
2. To review methods and framework of the management in ensuring and monitoring the adequacy of nature, level, and effectiveness of internal control systems, including accounting system controls, and internally managing an effective controlling system, including annual review on the adequacy of controlling supervision and escalation process of a problem;
3. As the Company is required to transparently disclose information in its Annual Report regarding internal supervision by laws and regulations, the committee must evaluate the statements before submitting it to the Board of Commissioners for approval;

4. Meminta keterangan dari Presiden Direktur dan Direktur Keuangan terkait kekurangan yang signifikan dalam sistem pengendalian internal yang dapat mempengaruhi Perusahaan dan identifikasi atas setiap potensi penipuan;
5. Menelaah laporan dari auditor internal dan eksternal dan memantau status remediasi yang diperlukan;
6. Menelaah masalah-masalah yang dibahas dan memutuskan apakah ada kebutuhan untuk mengeskalisasi masalah kepada Dewan Komisaris atau memberitahukan kepada regulator;
7. Secara khusus, komite bertanggung jawab atas perbaikan transparansi dan kualitas laporan keuangan, melalui tugas-tugas berikut:
 - a. Memastikan adanya kajian yang layak pada laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan;
 - b. Mendiskusikan dengan auditor setiap aspek penilaian yang signifikan dan/atau kebijakan akuntansi dalam penyediaan informasi dalam akun-akun;
 - c. Memastikan bahwa laporan keuangan telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan terkait;
 - d. Memastikan semua laporan yang dikirimkan ke regulator dan lembaga terkait lainnya telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
8. Dalam kaitannya dengan Internal Auditor, komite akan melakukan tugas-tugas berikut:
 - a. Mengevaluasi Piagam Internal Audit yang akan disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - b. Mengevaluasi rencana audit tahunan internal auditor sebagai masukan bagi Dewan Komisaris;
 - c. Memastikan tidak ada pembatasan yang dibuat oleh manajemen terhadap proses audit yang dilakukan oleh Internal Auditor;
 - d. Mengevaluasi efektivitas fungsi internal audit;
 - e. Memastikan bahwa setiap temuan yang signifikan dari proses internal audit telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
 - f. Memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Internal Auditor telah ditindaklanjuti oleh Manajemen;
 - g. Menugaskan Internal Auditor untuk melakukan audit khusus apabila terdapat adanya indikasi penipuan atau penyimpangan manajemen; dan
 - h. Mengevaluasi penunjukan dan penggantian dari ketua Internal Auditor dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
4. To request for feedback from the President Director and Chief Financial Officer for any significant weakness in the internal control system that may affect the Company and for any identified fraud potential;
5. To review reports for internal and external auditors and monitor the remedial status required;
6. To review issues discussed and deciding whether there is a need to escalate the problems to the Board of Commissioners or to notify the regulator;
7. The committee is specifically responsible for improving the transparency and quality of financial statements through the following duties:
 - a. To ensure proper review of the financial statements issued by the Company;
 - b. To discuss every significant assessment aspect and/or accounting policy in the provision of information on the financial accounts with the auditor;
 - c. To ensure that the financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and related regulations;
 - d. To ensure that all reports sent to the regulator and other related institutions have been submitted accurately and punctually.
8. In connection with the Internal Auditor, the committee will conduct the following duties:
 - a. To evaluate Internal Audit Charter to be approved by the Board of Commissioners;
 - b. To evaluate the annual audit plan of the internal auditor as a feedback for the Board of Commissioners;
 - c. To ensure there is no limitation made by the management on the audit process conducted by the Internal Auditor;
 - d. To evaluate the effectiveness of the internal audit function;
 - e. To ensure that every significant finding obtained from the internal audit process is immediately reported and discussed;
 - f. To ensure that the recommendations given by the Internal Auditor have been followed-up by the management;
 - g. To assign the internal auditor to conduct a special audit in the event of fraud indication or deviation by the management; and
 - h. To evaluate the appointment and replacement of the Head of Internal Auditor and submitting the recommendation to the Board of Commissioners.

9. Dalam kaitannya dengan Akuntan Publik, komite akan melakukan tugas-tugas berikut:
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dalam pemilihan akuntan publik untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - Menelaah independensi dan obyektivitas akuntan publik;
 - Menelaah cakupan audit untuk memastikan bahwa seluruh risiko signifikan telah dipertimbangkan
 - Memastikan bahwa temuan akuntan publik telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
 - Memastikan bahwa manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh akuntan publik;
 - Mengamati konsistensi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap standar auditing yang berlaku
 - Menelaah kinerja akuntan publik di untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali atau mengganti akuntan publik.
10. Dalam kaitannya dengan Kepatuhan, Komite akan melakukan tugas-tugas berikut:
- Menelaah efektivitas kepatuhan sistem pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - Menelaah informasi dari manajemen, auditor dan konsultan eksternal lainnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan;
 - Menelaah temuan audit dari lembaga berwenang dan efektivitas atas tanggapan dan tindak lanjut manajemen.

Komposisi Komite Audit

Komite Audit Perusahaan dibentuk berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perusahaan ref. No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 tanggal 21 April 2016. Perusahaan telah membentuk Piagam Komite Audit yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2016.

Susunan Komite Audit periode 1 Januari 2017 – 6 Desember 2017, adalah sebagai berikut

Nama / Name	Posisi / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Zulkifli Zaini	Ketua / Chairman	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Edwin Gerungan	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
M. Chatib Basri	Anggota / Member	Presiden Komisaris- Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner
Agus Kretarto	Anggota / Member	Anggota Komite Audit/ Member of Audit Committee

9. In connection with the Public Accountant, the committee will conduct the following duties:
- To give recommendation to the Board of Commissioners in the appointment of public accountant to be approved at the Annual General Meeting of Shareholders;
 - To review the independency and objectivity of the public accountant;
 - To review the audit scope to ensure that all significant risks have been considered;
 - To ensure that the findings of the public accountant have been immediately reported and discussed;
 - To ensure that the management has followed up the recommendations given by the public accountant;
 - To observe the consistency of the audit performance conducted by the Public Accountant based on the applicable audit standards.
 - To review the performance of the public accountant as a basis for recommendation of reappointment/ replacement of the public accountant to the Board of Commissioners.
10. In connection with Compliance, the Committee will conduct the following duties:
- To review the effectiveness of supervisory systems in the preparation of financial statements;
 - To review information from the management, auditor, and other external consultants relating to compliance issues;
 - To review audit findings from the authorized institutions and effectiveness of the feedback and follow-up from the management.

Composition of Audit Committee

The Company's Audit Committee is based on Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners ref. No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 dated 21 April 2016. The Company has established the Audit Committee Charter as stipulated on 21 April 2016.

Audit Committee composition period 1 January 2017 – 6 December 2017 is as follows:

Terkait dengan surat pengunduran diri Bapak Zulkifli tanggal 10 November 2017, berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris pada tanggal 6 Desember 2017, Dewan Komisaris telah memutuskan untuk menunjuk Bapak Edwin Gerungan untuk menjadi Ketua Komite Audit Perusahaan menggantikan Bapak Zulkifli Zaini.

In connection with the resignation letter of Mr. Zulkifli dated 10 November 2017, based on Board of Commissioners meeting resolution on 6 December 2017, the Board of Commissioners has decided to appoint Mr. Edwin Gerungan to become the Company's Head of Audit Committee to replace Mr. Zulkifli Zaini.

Susunan Komite Audit periode 7 Desember 2017 - sekarang, adalah sebagai berikut:

The Audit Committee composition period 7 December 2017 until present is as follows:

Nama / Name	Posisi / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Edwin Gerungan	Ketua / Chairman	Komisaris Independen / Independent Commissioner
M. Chatib Basri	Anggota / Member	Presiden Komisaris- Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner
Agus Kretarto	Anggota / Member	Anggota Komite Audit/ Member of Audit Committee

Profil Komite Audit

Zulkifli Zaini

* Profil sudah ditampilkan dalam pembahasan profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Edwin Gerungan

* Profil sudah ditampilkan dalam pembahasan profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

M. Chatib Basri

* Profil sudah ditampilkan dalam pembahasan profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Agus Kretarto

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Agus Kretarto memperoleh gelar Master of Management untuk Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia. Beliau juga telah mengikuti berbagai kursus dan seminar baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang audit, akuntansi, perbankan, pasar modal, manajemen risiko, peraturan ekonomi infrastruktur dan Kerjasama Publik-Swasta. Beliau memulai karirnya sebagai auditor di Departemen Keuangan (1981-1983) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (1987-1992). Beliau pernah bekerja di Bank Rama dari tahun 1993-2000 dengan posisi sebagai Kepala Internal Audit, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Sekretaris Perusahaan, dan Koordinator merger untuk Keuangan, Pajak & Accounting. Pada tahun 2001, beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Mustika Ratu, kemudian sebagai Direktur Kepatuhan Bank

Audit Committee Profile

Zulkifli Zaini

*His profile has been presented in the section of Board of Commissioners and Board of Directors profiles.

Edwin Gerungan

*His profile has been presented in the section of Board of Commissioners and Board of Directors profiles.

M. Chatib Basri

*His profile has been presented in the section of Board of Commissioners and Board of Directors profiles.

Agus Kretarto

An Indonesian citizen of 58 years old. Agus Kretarto earned a Master of Management degree majoring Accounting from the University of Indonesia. He has attended various courses and seminars at home and abroad in auditing, accounting, banking, capital markets, risk management, economic regulation of infrastructure and Public-Private Partnerships. He began his career as an auditor at the Ministry of Finance (1981-1983) and Financial and Development Supervisory Board (1987-1992). He worked at Bank Rama from 1993 to 2000 holding several positions: Head of Internal Audit, Head of Planning and Development Division, Corporate Secretary, and Merger Coordinator for Finance, Tax & Accounting. In 2001, he served as Corporate Secretary of Mustika Ratu, then as Compliance Director of Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Member of the Audit Committee of Bank Internasional

Harmoni Internasional (2002-2003), Anggota Komite Audit Bank Internasional Indonesia (2003-2008), dan Anggota Dewan Eksekutif Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jakarta (2005-2012).

Indonesia (2003-2008), and Member of the Executive Board of Jakarta Water Supply Regulatory Body (2005-2012).

Kegiatan Komite Audit di Tahun 2017

Audit Committee Activities in 2017

Kegiatan Internal

Adapun kegiatan internal yang dilaksanakan oleh Komite Audit Perusahaan sepanjang 2017 meliputi:

1. Mengadakan pertemuan rutin dengan Internal Auditor untuk membahas sistem pengendalian internal, hasil temuan dari Audit yang telah dilaksanakan dan kemajuan status tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
2. Melakukan review dan memberikan saran pada Laporan Keuangan Triwulan-an sebelum dipresentasikan ke para pemegang saham.
3. Melakukan review terhadap kinerja, independensi dan objektivitas dari akuntan publik untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali atau mengganti akuntan publik tersebut.
4. Meninjau dan memberikan saran atas kerangka manajemen kepatuhan.
5. Melakukan tinjauan dan memberikan komentar atas hasil dari keterlibatan Audit Internal.

Internal Activities

The following are internal activities conducted by the Audit Committee in 2017:

1. Conducted regular meetings with Internal Auditors to discuss internal control systems, audit findings that have been implemented and progress of follow-up status of recommendations provided by the auditor.
2. Reviewed and advised on the Quarterly Financial Statements before being presented to shareholders.
3. Reviewed the performance, independency and objectivity of the public accountant to be recommended to the Board of Commissioners to re-appoint or replace the public accountant concerned.
4. Reviewed and advised on the compliance with management framework.
5. Conducted reviews and provided comments on the results of Internal Audit's engagement.

Jadwal Rapat Komite Audit / Audit Committee Meeting Schedule	Agenda Meeting / Meeting Agenda	Anggota Komite Audit yang hadir / Audit Committee member present
27 Januari 2017 27 January 2017	Ikhtisar Laporan Keuangan Diaudit – 31 December 2016 / Highlight of Audited Financial Statements – December 31, 2016	Zulkifli Zaini, Edwin Gerungan, Agus Kretarto
28 Februari 2017 28 February 2017	Pengangkatan Auditor Independen untuk Audit Keuangan tahun 2017 / The Appointment of Independent Auditor for 2017 Financial Audit	Zulkifli Zaini, M. Chatib Basri, Edwin Gerungan, Agus Kretarto
7 Agustus 2017 7 August 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ikhtisar Laporan Keuangan – 30 Juni 2017 / Highlight of Financial Statements – June 30, 2017 • Kick-off Audit Keuangan tahun 2017 / Kick-off Financial Audit 2017 • Laporan Internal Audit – Sistem Management S&E / Internal Audit Report – S & E Management System 	Zulkifli Zaini, M. Chatib Basri, Edwin Gerungan, Agus Kretarto
24 Oktober 2017 24 October 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ikhtisar Laporan Keuangan – 20 September 2017 / Highlight of Financial Statements – September 30, 2017 • Kegiatan Internal Audit / Internal Audit Activity 	Zulkifli Zaini, M. Chatib Basri, Agus Kretarto
7 Desember 2017 7 December 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Keuangan 2017 - Laporan Progress / 2017 Financial Audit – Progress Update • Hasil Audit Pajak / Tax Audit Result 	Edwin Gerungan, M. Chatib Basri, Agus Kretarto

Kegiatan Eksternal

Sedangkan untuk kegiatan eksternal Perusahaan yang dilaksanakan sepanjang 2017 yaitu mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal sebelum dan sesudah pelaksanaan audit laporan keuangan Perusahaan.

External Activities

Meanwhile, the external activities conducted by the Audit Committee in 2017 are among others External Auditor meeting before and after the Company's financial statements audit.

Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang 2017, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Attendance Rate

Throughout the year, the Audit Committee has held 5 meetings with the following attendance rate:

Komite Audit periode 1 Januari 2017 – 6 Desember 2017

The Audit Committee Members period 1 January 2017 – 6 December 2017

No.	Anggota Komite Audit / Audit Committee Members	Kehadiran / Attendance	% Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
1	Zulkifli Zaini	4	100%
2	Edwin Gerungan	3	75%
3	M. Chatib Basri	3	75%
4	Agus Kretarto	4	100%

Komite Audit periode 7 Desember 2017 – Sekarang

The Audit Committee Members period 7 December 2017 - present

No.	Anggota Komite Audit / Audit Committee Members	Kehadiran / Attendance	% Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
1	Edwin Gerungan	1	100%
2	M. Chatib Basri	1	100%
3	Agus Kretarto	1	100%

Sepanjang tahun 2017

Throughout 2017

No.	Anggota Komite Audit / AC Members	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Kehadiran / Attendance	% Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
1	Zulkifli Zaini	4	4	100%
2	Edwin Gerungan	5	4	80%
3	M. Chatib Basri	5	4	80%
4	Agus Kretarto	5	5	100%

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite Audit

Atas tugas-tugasnya dalam membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian, pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi dan audit, Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang 2017 Komite Audit telah menjalankan tugas tersebut secara baik dan profesional dan telah dijalankan dengan mengacu pada tata aturan yang berlaku.

Assessment of the Board of Commissioners on the Audit Committee's Performance

With regard to the Audit Committee's duties in supporting the performance of supervisory role of the Board of Commissioners related to control, financial reporting, audit and accounting policies, the Board of Commissioners views that the Audit Committee has carried out its duties properly and professionally and according to the rules.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi terkait remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Independen serta menetapkan kebijakan remunerasi yang umum berlaku bagi seluruh karyawan Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Terkait Fungsi Nominasi

- Menganalisa, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur penentuan dan pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komite ini memiliki tugas untuk menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- Merekomendasikan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam hal pemilihan, penunjukan, dan pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan pemegang saham, terutama apabila diperlukan perubahan Dewan Komisaris dikarenakan perubahan kepemilikan saham IIF.
- Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur pemilihan pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang diserahkan oleh Direksi setiap tiga bulan sekali atau pada saat terjadi perubahan.
- Merekomendasikan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Merekomendasikan calon yang akan diangkat sebagai anggota independen dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Terkait fungsi Kompensasi/Remunerasi, NRC bertugas untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan IIF yang berlaku saat ini. Selain itu, NRC juga bertugas untuk mengevaluasi KPI untuk Direksi yang bersifat *ex-ante* (dalam rencana bisnis tahunan IIF) dan *ex-post* (setelah tutup tahun IIF).

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) was established to provide recommendations on remuneration for the Board of Directors and Independent Board of Commissioners, as well as to determine general remuneration policies for the Company's employees.

Duties and Responsibilities Under Nomination function

- To analyze, formulate, and give recommendations to the Board of Commissioners concerning the systems and procedures of determination and selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors. This Committee is also responsible for creating performance evaluation systems for the Board of Commissioners and Board of Directors.
- To recommend candidates for Commissioners and/or Directors to the Board of Commissioners and recommending actions on nomination, appointment, and dismissal of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners in accordance with provisions of the Shareholders' Agreement, in particular when a change in the Board of Commissioners is required due to a change in the shareholding pattern of IIF.
- To analyze the criteria and procedures for the selection of officers at one level below the Board of Directors, analyzing their data, and monitoring its implementation in order to create a report that shall be submitted to the Board of Directors every three months or whenever change occurs.
- To recommend the number of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- To recommend to the Board of Commissioners the candidates that shall be appointed as independent members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.

Under the Compensation/Remuneration function, NRC is obliged to evaluate the prevailing remuneration policies for the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of IIF. In addition, the Committee shall evaluate the KPI for the Board of Directors that is in nature (in IIF's annual business plans) and *ex-post* in nature (after the closing of each financial year of IIF).

Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris hal-hal berikut ini:

- Kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kebijakan remunerasi yang berlaku untuk pejabat eksekutif dan seluruh karyawan IIF.
- Menyiapkan aturan mengenai remunerasi yang lebih spesifik jika terdapat hal-hal yang tidak tercantum dalam kebijakan remunerasi yang telah disepakati.
- Merekomendasikan program pensiun bagi seluruh karyawan IIF apabila ditetapkan dan merekomendasikan sistem kompensasi dan manfaat serta mekanisme penyesuaian gaji.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen SDM yang berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan/risiko hukum IIF.

Kewenangan

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, NRC memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memiliki akses yang memungkinkannya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam lingkup tanggung jawabnya dari Direksi, pejabat, karyawan, serta pihak eksternal/profesional untuk menghindari keraguan, ketika pihak eksternal/profesional diperlukan, maka Komite NRC mesti berkonsultasi dan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum menunjuk pihak eksternal/profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya.
2. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, Ketua Komite NRC dapat mengundang Direksi, pejabat eksekutif, karyawan, atau auditor independen IIF untuk menghadiri rapat Komite.
3. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Komite ini berkoordinasi dengan Presiden Direktur (CEO).

Susunan NRC

Susunan anggota NRC periode Januari 2017 - Juli 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
M. Chatib Basri	Ketua / Chairman	Presiden Komisaris – Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner
Rajeev V. Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Marwanto Hardjowiryono	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

To recommend the following to the Board of Commissioners:

- Remuneration policies for the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Overall remuneration policies applicable to the executive officers and employees of IIF.
- To prepare remuneration policies that are more specific to accommodate matters that are not specified in the agreed remuneration policies.
- To recommend the pension plan for IIF employees, if any, and recommending the system for compensation and other benefits as well as the mechanism for salary adjustment.
- To evaluate and provide recommendation to the Board of Commissioners on employment policies and other functions in HR management that may have a significant impact on financial/legal risks to IIF.

Authority

In performing its responsibilities, the NRC has the following authority:

1. To have access to obtain all required information within its responsibilities from the Board of Directors, executive officers, employees, and from external/professional parties; for the avoidance of doubt; when the presence of external/professional parties is requested, the NRC must seek consultation with and request approval of IIF's Board of Commissioners prior to appointing external/professional resources to assist the Board in implementing its duties.
2. Under acknowledgment of the Board of Commissioners, the Head of the NRC Committee may invite the Board of Directors, executive officers, employees or the independent auditor of IIF to attend the Committee's meeting.
3. To implement the above authority, the Committee coordinates with the President Director (CEO).

Composition of NRC

The composition of NRC members period January 2017 - July 2017 is as follows:

Susunan anggota NRC periode Juli 2017 - Desember 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of NRC members period July 2017 - December 2017 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
M. Chatib Basri	Ketua / Chairman	Presiden Komisaris – Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner
Robert Pakpahan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev V. Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

Kegiatan pada tahun 2017

Sepanjang 2017, NRC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2017, 22 Maret 2017, 7 Agustus 2017, 25 Oktober 2017, 17 Desember 2017.

Activities in 2017

Throughout the year, the NRC held 5 (five) meetings on 20 February 2017, 22 March 2017, 7 August 2017, 25 October 2017, 17 December 2017.

Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang 2017, NRC telah mengadakan rapat sebanyak 5 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Attendance Rate

Throughout the year, the NRC has held 5 meetings with the following attendance rate:

No.	Nama / Name	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Kehadiran / Attendance	% Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
1	M. Chatib Basri	5	5	100%
2	Marwanto Harjowiryo	3	2	67%
3	Rajeev V. Kannan	5	5	100%
4	Richard Ranken	5	5	100%
5	Robert Pakpahan	2	1	50%

Agenda yang dibahas dalam rapat NRC terdiri dari:

- Kajian tahunan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penilaian atas *Soft KPI* (Kualitatif) Rencana Insentif Jangka Panjang Direksi tahun 2015-2016.
- Pembayaran Rencana Insentif Jangka Panjang 2015-2016.
- Penjelasan informasi terkini mengenai analisis kondisi SDM dan usulan rekomendasi.
- Berakhirnya masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penjelasan informasi terkini tentang pengunduran diri dan rekrutmen CRO.
- Penjelasan informasi terkini mengenai pengunduran diri dan perekrutan Komisaris Independen.

The agenda discussed in the NRC consists of the following:

- Annual review of BoC and BoD Remuneration
- Assessment on BoD Soft (Qualitative) KPI LTIP 2015-2016
- 2015-2016 LTIP Payment.
- Updates on Human on the condition analysis of the Company Human Resources and proposed recommendation.
- Expiry terms of service of several BoC and BoD members.
- Update on CRO resignation and recruitment.
- Update on Independent Commissioners resignation and recruitment.

Keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi 2017

Berikut merupakan keputusan NRC sepanjang 2017:

- Penyesuaian remunerasi tahunan BoC dan BoD
- Pencapaian KPI LTIP BoD 2015 dan 2016
- *Pool of 2015 LTIP and 2016 LTIP*
- Program Retensi
- Nominasi Bapak Wito Tantra sebagai CRO
- Nominasi Bapak Rinaldi Firmansyah sebagai Komisaris Independen

KOMITE PEMANTAU RISIKO DEWAN KOMISARIS

Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris (ROC) memiliki tanggung jawab utama memberikan dukungan atas pengembangan dan pengawasan program manajemen risiko IIF, atas pengenalan terhadap kecukupan pengendalian risiko atas aset dan kewajiban Perusahaan, serta atas penyediaan rekomendasi tentang mitigasi risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab ROC terkait pengaturan manajemen risiko antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko sosial & lingkungan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris. Secara rutin mengevaluasi dan menganalisa kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait perbaikan yang diperlukan dalam penyempurnaan fungsi manajemen risiko;
2. Mengusulkan perubahan yang dirasa perlu terkait kebijakan manajemen risiko agar sesuai dengan perubahan lingkungan usaha yang terjadi;
3. Menentukan peran dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Direksi;
4. Memberikan masukan dan tanggapan terhadap isu-isu yang diangkat oleh Komite Manajemen Risiko Direksi;
5. Meninjau laporan pengelolaan risiko triwulanan yang disajikan oleh Tim Manajemen Risiko IIF sebelum diajukan ke pemegang saham;
6. Memberikan saran dan/atau rekomendasi (apabila ada) ke Tim Manajemen Risiko IIF untuk disertakan dalam laporan pengelolaan risiko triwulanan berikutnya;

Nomination and Remuneration Committee Resolution of 2017

The following are the resolutions decided by the NRC throughout 2017:

- BoC and BoD annual adjustment
- BoD KPI LTIP achievement for the year of 2015 and 2016
- Pool of 2015 LTIP and 2016 LTIP
- Retention program
- Agreed to nominate Mr. Wito Tantra as IIF's CRO
- Agreed to nominate Mr. Rinaldi Firmansyah as IIF's Independent Commissioner

RISK OVERSIGHT COMMITTEE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Risk Oversight Committee (ROC) of the Board of Commissioners is primarily responsible for supporting the development and oversight of IIF's risk management program, the introduction of adequate risk controls for the Company's assets and liabilities, and the provision of recommendations on risk mitigations.

Duties and Responsibilities

The ROC's duties and responsibilities related to the risk management arrangements are, among others:

1. To evaluate the risk management policy for credit, market, operational and social & environmental risks to be approved by the Board of Commissioners. Regularly, the ROC evaluates and analyzes the adequacy of risk management policies as well as giving opinions in the form of suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners concerning the necessary improvement to boost the risk management function;
2. To propose necessary modifications to the abovementioned risk management policies to suit the changing business environment;
3. To define the roles and responsibilities of the Risk Management Committee of the Board of Directors;
4. To provide input and opinion on the issues raised by the Risk Management Committee of the Board of Directors;
5. To review the quarterly risk management report prepared by IIF's Risk Management Team prior to submission to IIF's Shareholders;
6. To provide suggestions and/or recommendations (if any) to IIF's Risk Management Team to be incorporated in the subsequent quarterly risk management report;

7. Meninjau kerangka parameter atau register manajemen risiko dan memberikan persetujuan untuk setiap perubahan yang diusulkan terhadap parameter atau register tersebut; dan
8. Memberikan informasi tentang hal-hal lain yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris dalam pelaksanaan usaha Perusahaan.

7. To review the framework of risk management parameters or registers and give approval for any proposed changes to such parameters or registers; and
8. To provide information on any other matter deemed fit by the Board of Commissioners in the normal course of business.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris

Susunan anggota ROC periode 1 Januari 2017 – 8 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Edwin Gerungan	Ketua / Chairman	Komisaris / Commissioner
Robert Pakpahan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Olivier Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

Composition of Members of the Risk Oversight Committee of the Board of Commissioners

The composition of ROC members period 1 January 2017 – 8 August 2017 is as follows:

Susunan anggota ROC periode 8 Agustus 2017 – 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of ROC members period 8 August 2017 – 31 December 2017 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Edwin Gerungan	Ketua / Chairman	Komisaris / Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Olivier Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

Kegiatan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris

ROC mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam satu triwulan. Pada tahun 2017, ROC mengadakan 4 (empat) kali pertemuan, dengan rincian sebagai berikut:

Risk Oversight Committee Activities of Board of Commissioners

ROC hold quarterly meetings. In 2017, ROC held 4 (four) meetings with the following details:

Jadwal ROC Meeting / ROC Meeting Schedule	Agenda Meeting / Meeting Agenda	Anggota ROC yang hadir / ROC Member present
21 Maret 2017 / 21 March 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat ROC sebelumnya / Summary and follow up from previous ROC meeting 2. Parameter Risiko per tanggal 31 Desember 2016 / Risk Parameters as of 31 December 2016 3. Tinjauan ulang batasan Investasi berdasarkan Peringkat Risiko / Review on Investment Limit based on Risk Rating 4. Usulan untuk memperbaharui Kerangka Kerja Parameter Risiko / Proposal to update Risk Parameters Framework 	Edwin Gerungan, Hans-Juergen Hertel, Robert Olivier Dolk

Jadwal ROC Meeting / ROC Meeting Schedule	Agenda Meeting / Meeting Agenda	Anggota ROC yang hadir / ROC Member present
7 Agustus 2017 / 7 August 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat ROC sebelumnya / Summary and follow up from previous ROC meeting 2. Parameter Risiko per tanggal 30 Juni 2017 / Risk Parameters as of 30 June 2017 3. Usulan <i>Compliance Self-Assessment Checklist</i> / Proposal for Compliance Self-Assessment Checklist 4. Laporan Progress Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2017 / Report on Progress of Risk Management Initiatives for 2017 	Edwin Gerungan, Robert Pakpahan, Hans-Juergen Hertel, Robert Olivier Dolk
24 Oktober 2017 / 24 October 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat ROC sebelumnya / Summary and follow up from previous ROC meeting 2. Parameter Risiko per tanggal 30 September 2017 / Risk Parameters as of 30 September 2017 3. Usulan <i>Compliance Self-Assessment Checklist</i> / Proposal for Compliance Checklist 4. Usulan Pedoman Alokasi Sektor yang baru / Proposal for New Sector Allocation Guideline 5. Laporan Progress Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2017 / Report on Progress of Risk Management Initiatives for 2017 	Edwin Gerungan, Bhimantara Widyajala, Hans-Juergen Hertel, Robert Olivier Dolk
6 Desember 2017 / 6 December 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat ROC sebelumnya / Summary and follow up from previous ROC meeting 2. Penjelasan informasi terkini mengenai Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2017 / Update on Risk Management Initiative for 2017 3. Penjelasan informasi terkini mengenai Hal-hal Terkait risiko (PDN) / Update on Risk Related Issue (NDP) 	Edwin Gerungan, Bhimantara Widyajala, Hans-Juergen Hertel, Robert Olivier Dolk

Tingkat kehadiran dari masing-masing anggota:

Selama tahun buku 2017, ROC mengadakan 4 kali rapat dengan rincian kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Attendance rate of each member:

Throughout 2017, the ROC has held 4 meetings. The following is attendance rate of each Committee member:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Kehadiran / Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
Edwin Gerungan	4	4	100%
Robert Pakpahan	2	1	50%
Bhimantara Widyajala	2	2	100%
Hans-Juergen Hertel	4	4	100%
Robert O. Dolk	4	4	100%

KOMITE INVESTASI-DEWAN KOMISARIS

Komite Investasi – Dewan Komisaris (BOC-IC) dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan proposal investasi dan portofolio IIF. Komite Investasi – Dewan Komisaris Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perusahaan ref. No.001/IIF/BoC-RES/III/2013 tanggal 27 Maret 2013. Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Investasi – Dewan Komisaris tanggal 13 Juni 2012.

Piagam BOC-IC

BOC-IC memiliki piagam yang mengatur hal-hal terkait kewenangan, struktur, dan kualifikasi, tanggung jawab, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama BOC-IC IIF, antara lain adalah:

1. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi mengenai pemberian kredit/investasi untuk persetujuan final dari BOC
2. Mengevaluasi dan memberikan laporan kajian kinerja atas portofolio investasi Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi berupa pinjaman, ekuitas, dan treasury;
3. Mengkaji kebijakan kredit dan investasi Perusahaan dan memberikan masukan terhadap perumusan/revisinya;
4. Melakukan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi Perusahaan atau kebijakan atau hal-hal lain, yang dari waktu ke waktu ditugaskan oleh BOC kepada Komite.

Susunan BOC-IC

Susunan anggota BOC-IC periode 1 Januari 2017 - 28 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
M. Chatib Basri	Ketua / Chairman	Presiden Komisaris – Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner
Edwin Gerungan	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Zulkifli Zaini	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Marwanto Harjowiryo	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert O. Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev V. Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

BOARD OF COMMISSIONERS – INVESTMENT COMMITTEE

The Board of Commissioners – Investment Committee (BOC-IC) was established to carry out supervisory and consultation functions, and particularly to focus on investment proposals and IIF's business portfolio. The BOC-IC of the Company was set up based on the Circular Decision of the Company's Board of Commissioners ref. No. 001/IIF/BOC-RES/III/2013 dated 27 March 2013. The Company established the Board of Commissioners – Investment Committee Charter on 13 June 2012.

Charter of BOC-IC

The BOC-IC has a charter that regulates all matters pertaining to authority, structure and qualification, responsibilities, meetings, reporting, discretion and so on.

Duties and Responsibilities

The main duties of IIF's BOC-IC are as follows:

1. To provide opinions and/or recommendations in respect of provision of credit/investment for Board of Commissioners' final approval.
2. To evaluate and provide evaluation reports pertaining to the Company's investment portfolio performance, including but not limited to loans, equity and treasury investments;
3. To review the Company's credit and investment policies and provide input for necessary formulation and revision;
4. To perform additional responsibilities relating to the Company's investment activities, policies or other matters that are mandated to the Committee by the Board of Commissioners.

Composition of BOC-IC

The composition of BOC-IC members period 1 January 2017 – 28 July 2017 is as follows:

Susunan anggota BOC-IC periode 28 Juli 2017 - 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of BOC-IC members period 28 July 2017 – 31 December 2017 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
M. Chatib Basri	Ketua / Chairman	Presiden Komisaris – Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner
Edwin Gerungan	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Zulkifli Zaini	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Bimantara Widyajala	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert O. Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev V. Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

Tugas dan Kegiatan Komite Investasi 2017

Sepanjang 2017, Komite Investasi Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatannya yaitu:

- Melaksanakan 4 kali rapat BoC-IC yang dihadiri oleh anggota BoC dan Direksi
- Melaksanakan 6 kali rapat teleconference
- Melaksanakan 3 kali kunjungan kerja terhadap proyek yang telah dibiayai

Duties and Activities of 2017 Investment Committee

Throughout 2017, the Investment Committee of the Board of Commissioners has conducted several duties and activities:

- Conducted 4 (four) meetings of BoC-IC attended by members of BoC and BoD.
- Conducted 6 (six) meetings of teleconference meetings.
- Conducted 3 (three) site visits to project site for project to be financed.

Tingkat Kehadiran

Sepanjang 2017, Komite Investasi Dewan Komisaris telah menyelenggarakan sebanyak 10 rapat. Berikut adalah tingkat kehadiran Ketua dan anggota Komite dalam rapat.

Meeting Attendance Rate

Throughout 2017, the Investment Committee of Board of Commissioners has conducted 10 meetings. The following is the attendance record of the Head and members of Investment Committee.

Nama / Name	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Kehadiran / Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
M. Chatib Basri	10	10	100%
Edwin Gerungan	10	6	60%
Zulkifli Zaini	10	7	70%
Robert Pakpahan	10	3	30%
Marwanto Harjowiryo	4	4	100%
Hans-Juergen Hertel	10	8	80%
Robert O. Dolk	10	9	90%
Rajeev V. Kannan	10	7	70%
Richard Ranken	10	10	100%
Bimantara Widyajala	6	5	83%

DIREKSI

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugasnya mencapai tujuan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal apapun, dan memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengikat Perusahaan dan untuk melakukan setiap tindakan yang terkait dengan urusan pengelolaan Perusahaan yang baik atau kepemilikan dan pelepasan properti perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Direksi IIF adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Umum

Direksi IIF secara kolektif maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, pemantauan, dan memimpin Perusahaan serta memelihara dan mengelola asset IIF sesuai dengan kepentingan IIF.

Spesifik

Tanggung Jawab terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan:

1. Para anggota Direksi wajib setia dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Setiap anggota Direksi secara individual bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya;
3. Para anggota Direksi wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan proses kepatuhan dan memastikan bahwa semua kewajiban telah dipenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar dan RUPS Tahunan, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab terkait dengan hubungan antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

1. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan atas keputusan yang dibuat dalam RUPS, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar;
2. Direksi bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada Komisaris dan Pemegang Saham; mengatur komunikasi dengan Pemegang Saham, Komisaris, dan lainnya pihak yang berkepentingan, termasuk tugas dan tanggung jawab Direksi dan setiap anggota Direksi;

BOARD OF DIRECTORS

As stipulated in the Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible for the management of the Company in order to achieve its goals. In conducting its duties, the Board of Directors shall always represent the Company, both inside and outside the court, and have the power and authority to bind the Company, and perform actions related to the proper management of the Company or related to asset ownership or asset disposal of the Company. Duties and responsibilities of IIF's Board of Directors are as follows:

Duties and Responsibilities of Board of Directors

General

Collectively or individually, the Board of Directors of IIF is responsible for coordinating, monitoring and leading the Company, as well as maintaining and managing its assets according to the Company's interests.

Specific

Responsibilities related to compliance with laws and regulations:

1. Members of the Board of Directors must be loyal to the Company and be responsible for performing their duties in accordance with the prevailing regulations;
2. Individually, each member of Board of Directors shall be held responsible for their own mistakes or negligence in carrying out their duties;
3. Members of the Board of Directors are responsible for enforcing compliance in the Company and ensuring that all obligations have been fulfilled pursuant to the Articles of Association and Annual GMS based on the prevailing regulations.

Responsibilities related to the Relationship between Commissioners and Shareholders

1. The Board of Directors is responsible for ensuring the implementation of GMS' resolutions, Board of Commissioners' advice and provisions in the Articles of Association;
2. The Board of Directors is responsible for providing information to the Board of Commissioners and Shareholders and managing communications with the Shareholders, Board of Commissioners and other stakeholders, including information on the duties and responsibilities of each Director;

3. Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dan memberikan tanggapan atas saran dari Komisaris dan Pemegang Saham;
 4. Direksi bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta laporan lainnya sesuai dengan permintaan Pemegang Saham;
 5. Direksi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih Pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah dan yang mewakili setidaknya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah saham yang diterbitkan;
 6. Direksi bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham di tangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik dalam IIF maupun di perusahaan lainnya;
 7. Direksi bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris atas pemberian kredit di atas jumlah yang telah ditentukan;
 8. Direksi harus menetapkan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya perusahaan IIF;
 9. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kegiatan operasional IIF agar sejalan dengan bisnis dan tujuan Perusahaan;
 10. Direksi bertanggung jawab untuk membuat rencana kerja, anggaran tahunan, dan rencana lainnya yang terkait dengan bisnis IIF;
 11. Direksi bertanggung jawab untuk menentukan remunerasi untuk manajemen senior dan karyawan kunci, dan menjaga konsistensi remunerasi ini agar sesuai dengan budaya, tujuan, strategi, serta tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar IIF dan lingkungan usaha;
 12. Direksi bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemilik kepentingan dari IIF.
3. The Board of Directors is responsible to the Shareholders and gives feedback to the advice from the Board of Commissioners and Shareholders;
 4. The Board of Directors is responsible for preparing periodical reports in a timely manner and in accordance with the applicable regulations, as well as other reports as required by the Shareholders;
 5. The Board of Directors is obliged to convene an annual general meeting of shareholders based on the written request from one or more shareholders with valid voting rights and who represents at the very least 1/10 (onetenths) of issued shares;
 6. The Board of Directors is obliged to prepare and maintain a Shareholders Register and Special List containing share ownership of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their families, both in IIF and other companies;
 7. The Board of Directors is responsible to consult with the Board of Commissioners regarding approval for loans above the maximum limit;
 8. The Board of Directors must determine the vision, mission, values and corporate culture of IIF;
 9. The Board of Directors is responsible for maintaining the operations of IIF so as to be in line with its business lines and goals;
 10. The Board of Directors is responsible for preparing work plan, annual budget plan and other plans relevant to IIF's business;
 11. The Board of Directors is responsible for determining the remuneration amount given to the senior management and executive officers, and keeping the remuneration consistent with the Company's culture, goals strategies and responsibilities as stated in the prevailing regulations, IIF's Articles of Association and in line with the business environment;
 12. The Board of Directors is responsible for keeping all interests of IIF's stakeholders in balance.

Tanggung Jawab terkait Pelaporan Keuangan

1. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga pembukuan dan administrasi IIF sesuai dengan praktik-praktik yang berlaku;
2. Direksi bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem akuntansi yang sesuai Standar Akuntansi Indonesia dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pencatatan, pengarsipan, monitoring dan pengelolaan;

Responsibilities related to Financial Reporting

1. The Board of Directors is responsible for IIF's bookkeeping and its administration in line with the applicable practices;
2. The Board of Directors is responsible for developing an accounting system that is in accordance with the Indonesian Accounting Standards and internal control principles, particularly regarding administration, archiving, monitoring and management activities;

3. Direksi bertanggung jawab untuk mempersiapkan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan, dan akuntansi untuk laporan tersebut di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

Tanggung jawab terkait dengan Manajemen Risiko dan Pengendalian

Direksi bertanggung jawab untuk menjaga proses manajemen risiko, sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki proses yang tepat dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko;
2. Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dieksekusi dalam pemantauan dan pelaporan risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan;
3. Memantau dan mengevaluasi keberadaan proses manajemen dalam menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, pelaporan keuangan dan kepatuhan;
4. Memastikan keberadaan atas sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan:
 - Keandalan dan integritas dari informasi;
 - Kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, rencana prosedur, dan peraturan;
 - Pemeliharaan aset Perusahaan;
 - Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien;
 - Pencapaian atas tujuan dan sasaran operasional yang telah ditentukan.
5. Melaksanakan evaluasi tahunan dalam rangka menyusun pernyataan kepada publik mengenai pengendalian internal Perusahaan untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari pengendalian internal yang dimiliki telah dipertimbangkan untuk dievaluasi sampai dengan tanggal persetujuan laporan tahunan.
6. Direksi bertanggung jawab menciptakan struktur organisasi, tugas, dan struktur tanggung jawab yang jelas, termasuk penunjukan manajemen.
7. Direksi bertanggung jawab untuk memanfaatkan secara efektif hasil audit baik dari auditor internal maupun eksternal.

3. The Board of Directors is responsible for preparing the Annual Report, including Financial Statements and accounting procedure for the reports, for the Annual General Meeting of Shareholders.

Responsibilities related to Risk Management and Control

The Board of Directors is responsible for maintaining the risk management process, namely:

1. To ensure that the Company has a proper and systematic process to identify, measure and control risks;
2. To ensure that the proper system and processes have been well executed in monitoring and reporting the main risk faced by the Company;
3. To monitor and evaluate the management process and assessing the adequacy of risk management and internal control systems, financial reporting and compliance procedures;
4. To ensure the availability of an effective control system to ensure:
 - The information reliability and integrity;
 - The compliance with prevailing policies, procedures, plans and regulations;
 - The Company's asset maintenance;
 - The economic and efficient use of resources;
 - The achievement of operational goals that have been set.
5. To conduct annual evaluation to prepare a report to the public on the Company's internal controls in order to ensure that all essential aspects of internal controls have been considered and assessed up to the date of annual report approval.
6. The Board of Directors is responsible for building a clear organization structure, duties and responsibilities, including the appointment of management.
7. The Board of Directors is obliged to effectively utilize the audit results from both internal and external auditors for the sake of the Company.

Setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab fungsional untuk menjalankan bisnis IIF sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Presiden Direktur

1. Merumuskan dan melaksanakan visi, strategi, rencana tahunan, tujuan, dan anggaran IIF dan memastikan keselarasan dan dukungan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham, memberikan arah kepada IIF, Direksi dan Departemen untuk mencapai keberhasilan dalam tumbuh kembangnya perusahaan menjadi perusahaan yang menguntungkan dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Membangun, menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan secara efektif struktur dan kerangka kerja tata kelola perusahaan, yang mencakup kebijakan, prosedur dan prinsip-prinsip pemisahan wewenang dan tanggung jawab (*Chinese Wall*) untuk memastikan pelaksanaan strategi dan rencana tahunan perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman peraturan yang berlaku berjalan secara efektif dan efisien;
3. Mengembangkan dan mengelola bisnis dan hubungan dengan para pemilik kepentingan lainnya, bertindak sebagai perwakilan resmi dari IIF bagi para pemilik kepentingan lainnya dan media, dan membangun merek dagang IIF dalam rangka untuk membentuk posisi yang menguntungkan baik secara politis dan peraturan, serta kondisi bisnis dan citra publik yang baik sebagai prasyarat untuk keberhasilan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
4. Memastikan pengaruh kebijakan dan peraturan atas *landscape* infrastruktur, penasehat proyek strategis dan mengatur pendanaan atas nama klien, atas dasar produk *fee based* dan *Advisory*, dalam rangka menciptakan dan menumbuh kembangkan portofolio proyek-proyek infrastruktur untuk IIF yang menguntungkan dan berkelanjutan;
5. Memastikan pengembangan penawaran produk baru yang lebih baik, yang cocok untuk kondisi di Indonesia, menjamin akses ke pendanaan (jangka panjang), dan menawarkan dana dan produk berbasis non-dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang potensial, dengan mempertimbangkan perspektif investor, dalam rangka meningkatkan investasi PPP di infrastruktur Indonesia yang menguntungkan dan berkelanjutan;
6. Memastikan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi dan kebijakan untuk berbagai jenis risiko, serta budaya sadar risiko di seluruh perusahaan dan

Each member of the Board of Directors has functional responsibilities to manage IIF's business as listed below:

President Director

1. To establish and execute IIF's vision, strategies, annual plans, goals and budgets, while ensuring alignment with and support from the Board of Commissioners and the Shareholders, and to provide direction to the Company, the Board of Directors and all departments in order to sustain short and long-term profitability;
2. To effectively establish, determine, implement and coordinate the Company's governance structure and framework, covering policies, procedures, and principles of segregation between authority and responsibility (*Chinese Walls*) to ensure an effective and efficient implementation of Company's strategies and annual plans, as well as compliance with policies and prevailing regulations;
3. To develop and manage the Company's business and relationship with other stakeholders and to act as the official representative of IIF for other stakeholders and media while building IIF's brand and public image in order to establish a beneficial position either political-wise and regulation-wise, as well as good business conditions and image as a requirement to the success of infrastructure financing company;
4. To ensure IIF's creditworthy project portfolio grows sustainably within the parameters set by the regulatory landscape and policies in addition to managing fee-based products and advisory and funding arrangements on behalf of IIF's clients;
5. To ensure the development of a better product that is suitable for Indonesia's financing market, to ensure access to long-term funds, and to provide fund and non-fund-based products for creditworthy infrastructure projects by considering investors' perspectives in order to enhance participation in Indonesia's PPP market in a profitable and sustainable manner;
6. To ensure an integrated risk management framework and policies for various risk types, as well as a risk awareness culture throughout the organization by taking into

memperhitungkan parameter risiko dalam semua keputusan bisnis, untuk menjaga portofolio infrastruktur proyek dan investasi yang sehat dalam parameter risiko dan anggaran;

7. Memastikan perencanaan dan siklus pengendalian, integritas dalam administrasi dan pembukuan, operasi dan perencanaan pajak yang efektif dan efisien, serta Laporan Keuangan interim dan tahunan, dalam rangka memimpin perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya secara efektif dan efisien dan memberikan wawasan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pemilik kepentingan lainnya atas posisi keuangan dan kinerja IIF;
8. Memastikan integritas, efektivitas, dan efisiensi dari unit-unit yang berfungsi sebagai pendukung seperti bagian Hukum, Asuransi, IT Audit, SDM, Komunikasi dan Pengadaan, sehingga tujuan bisnis IIF baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien;
9. Mengembangkan dan menerapkan kegiatan monitoring dan pelaporan infrastruktur IIF serta pengawasan, pelaporan dan menawarkan nasihat tentang kegiatan IIF dan portofolio, dalam rangka untuk memperoleh informasi yang benar untuk melakukan tindakan yang tepat dan memberikan informasi kepada Dewan Komisaris, namun tetap mematuhi kewajiban pelaporan yang diatur dalam peraturan perusahaan;
10. Mengembangkan dan memimpin tim yang efektif, memastikan struktur organisasi, tata kelola dan proses IIF yang baik (termasuk di dalamnya adanya pemisahan wewenang yang tegas antara Penasehat dan Investasi), dan mengembangkan, menjaga budaya, serta nilai-nilai inti IIF sehingga rencana strategis dan tujuan IIF dapat tercapai.

Piagam Kerja Direksi

Direksi IIF memiliki piagam kerja (*charter*) yang memuat tentang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta aturan pola hubungan manajerial antara organ-organ terkait dalam membantu Direksi menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.

account risk parameters in making business decisions, in order to have a healthy portfolio of infrastructure projects and investments using the agreed risk parameters;

7. To ensure an adequate planning and control cycle and maintain the integrity of administration and accounts, treasury operations and tax planning that is effective and efficient, as well as preparing necessary interim and statutory financial statements in order to lead the organization in a financially effective and efficient manner that will provide the Board of Directors, Board of Commissioners and stakeholders with insights into the Company's financial position and performance;
8. To ensure that the Company's short and long-term business objectives are achieved in an effective and efficient manner through the supporting functions such as Legal, Insurance, IT, Audit, HR, Communications and Procurement;
9. To develop and implement the Company's monitoring and reporting systems to give assistance to the management in carrying out business activities and portfolio management, and to secure access to information in order to take calculated action while remaining compliant with reporting requirements; and;
10. To develop and lead an effective team, ensure a well-structured organization, governance and processes (including any Chinese Walls required between Advisory and Investment), and develop and promote the right culture and core values to execute strategic plans and reach the Company's objectives.

Board of Directors Charter

IIF's Board of Directors has a charter that contains the scope of duties and responsibilities as well as managerial relationship among the related organs to support the Board of Directors in performing operational activities of the Company.

Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang 2017, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 34 kali dengan rincian sebagai berikut:

Meeting Attendance Rate

During 2017, the Board of Directors held 34 meetings with the following details:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Kehadiran / Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
Arisudono Soerono	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO	34	34	100%
Indrawati Darmawan	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO	34	34	100%
Harold Tjiptadjaja	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO	34	34	100%
Hilda Savitri	Direktur Pelaksana & CIO*** / Managing Director & CIO***	26	26	100%
	Direktur Pelaksana & CRO**** / Managing Director & CRO****	8	8	100%
Wito Krisnahadi	Direktur Pelaksana* & CRO** / Managing Director* & CRO**	26	24	92,3%
Irman Boyle	Executive Vice President	34	31	91,2%

Catatan:

- * Berakhir masa jabatan sampai dengan 31 Oktober 2017
- ** Berakhir masa jabatan sampai dengan 8 Agustus 2017
- *** Berakhir masa jabatan sampai dengan 8 Agustus 2017
- **** Mulai menjabat tanggal 8 Agustus 2017

Notes:

- * Terms of service ended as of 31 October 2017.
- ** Terms of service ended as of 8 August 2017
- *** Terms of service ended as of 8 August 2017
- **** Began serving as of 8 August 2017

Program Pelatihan dan Pengembangan Direksi

Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Direksi dalam menghadapi dinamika dan perkembangan dunia usaha, Perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan fasilitas berupa pelatihan dan kegiatan program perkembangan Direksi.

Board of Directors Training and Development Program

To improve the capacity and capability of the Board of Directors in dealing with the dynamics and development of the business environment, the Company has established a policy to provide facilities in the form of training and development programs for the Board of Directors.

Sepanjang 2017, perusahaan telah mengeluarkan dana dalam rangka pelatihan dan pengembangan Direksi sebesar Rp45.051.785.

Throughout 2017, the company incurred Rp45,051,785 for training and development program of the Board of Directors.

Perubahan Susunan Direksi

Bapak Wito Krisnahadi mengajukan pengunduran diri selaku Direktur Pelaksana & CRO efektif terhitung sejak 31 Oktober 2017, di gantikan sementara oleh Ibu Hilda Savitri sebagai Interim CRO.

Change of Composition of Board of Directors

The Company approved the resignation of Mr. Wito Krisnahadi as the Managing Director & CRO effective from 31 October 2017. Thus, the position has been replaced by Ms. Hilda Savitri as Interim CRO.

Kebijakan Remunerasi Direksi

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur tentang pemberian remunerasi kepada Direksi IIF. Ketentuan mengenai pemberian remunerasi dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Adapun besaran

Remuneration Policy for Board of Directors

The Company has already established a remuneration policy for IIF's Board of Commissioners and Board of Directors, the provision of which are discussed and determined at the Annual General Meeting of Shareholders. The amount

remunerasi Direksi dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit Perusahaan tahun 2017.

of remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the Audited Financial Statements of the Company in 2017.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tabel berikut memuat informasi yang menjelaskan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dengan Pemegang Saham Perusahaan:

Nama / Name	Perusahaan / Company	SMI	ADM	IFC	DEG	SMBC
M. Chatib Basri	PK/KI	-	-	-	-	-
Edwin Gerungan	KI	-	-	-	-	-
Zulkifli Zaini	KI	-	-	-	-	-
Bhimantara Widyajala	K	-	-	-	-	-
Robert Pakpahan	K	-	-	-	-	-
Robert O. Dolk	K	-	-	-	-	-
Hans-Juergen Hertel	K	-	-	-	-	-
Rajeev V. Kannan	K	-	-	-	-	-
Richard Ranken	K	-	-	-	-	-
Arisudono Soerono	PD	-	-	-	-	-
Indrawati Darmawan	D	-	-	-	-	-
Harold Tjiptadjaja	D	-	-	-	-	-
Hilda Savitri	D	-	-	-	-	-
Wito Krisnahadi	D	-	-	-	-	-

AFFILIATION BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The following table describes information on the affiliation among the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders of the Company:

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SEBAGAI PEMBICARA PADA BEBERAPA EVENT DI TAHUN 2017

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS AS KEYNOTE SPEAKERS IN SEVERAL EVENTS IN 2017

Nama / Name	Tanggal / Date	Agenda
Arisudono Soerono	16 Maret 2017 / 16 March 2017	Narasumber: Seminar Media Asuransi "Obligasi Infrastruktur"- Peluang Investasi / Keynote Speaker : Insurance Media Seminar of "Obligasi Infrastruktur"- Investment Opportunities
	4 April 2017 / 4 April 2017	<i>Indonesia Investment Forum - Euromoney Conference</i>
	19 April 2017 / 19 April 2017	Workshop bersama Kementrian Keuangan / Workshop with the Ministry of Finance
	17 Mei 2017 / 17 May 2017	<i>"Indonesia Infrastructure Finance Roundtable"</i>
	18 Juli 2017 / 18 July 2017	<i>3rd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference</i>
	24 Oktober 2017 / 24 October 2017	<i>Speaker at AVJC Conference</i>
	29 November 2017 / 29 November 2017	Undangan DJPPR "Narasumber dalam Seminar hari oelang ke-71" / DJPPR Invitation "Keynote Speaker in the Seminar of the 71st hari oelang
	29 November 2017 / 29 November 2017	<i>Moderator in Parallel Session Indonesia PPP Day 2017</i>

Nama / Name	Tanggal / Date	Agenda
Indrawati	18 Mei 2017 / 18 May 2017	<i>3rd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference</i>
Darmawan	23 Mei 2017 / 23 May 2017	<i>Speaker at Investment Forum on ASEAN Bond & Treasury Market</i>
	21 September 2017 / 21 September 2017	<i>Euromoney Speaking: Global Borrowers & Asia Investors Forum</i>
Harold Tjiptadjaja	22 Februari 2017 / 22 Februari 2017	<i>Workshop Industry Updates 1st Quarter</i>
	7 Maret 2017 / 7 March 2017	<i>Panel Discussion Nortonrose Fullbright:Future Ready: Sustainable Cities, Indonesia, 7 March 2017</i>
	9 Maret 2017 / 9 March 2017	<i>The Great Finance Debate</i>
	17 Maret 2017 / 17 March 2017	<i>Risk Map 2017 Panel Discussion</i>
	11 April 2017 / 11 April 2017	<i>Panelist at Roundtable Workshop: Ministry of Finance - the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)</i>
	27 April 2017 / 27 April 2017	<i>Asian Venture Capital Journal's 6th Annual Indonesia Forum - Mandarin Oriental Jakarta</i>
	17 Mei 2017 / 17 May 2017	<i>3rd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference - Grand Hyatt Jakarta</i>
	18 Mei 2017 / 18 May 2017	<i>Panel Discussion - Project Bonds Conference - Mandarin Hotel</i>
	25 Juli 2017 / 25 July 2017	<i>Indonesia Infrastructure Finance Forum</i>
	24 Agustus 2017 / 24 August 2017	<i>Panel Discussion: Developments in Infrastructure Financing in Indonesia</i>
	30 Agustus 2017 / 30 August 2017	<i>Seminar on Infrastructure Investment in Indonesia</i>
	12 Oktober 2017 / 12 October 2017	<i>Panel Discussion: World Bank Group Private Solutions: Mobilizing Capital through Co-financing & Guarantees</i>
	29 November 2017 / 29 November 2017	<i>Sharing Session: Financing for Power Plant Development in Indonesia</i>
	21 Desember 2017 / 21 December 2017	<i>UBS Expert Panel Indonesia Infrastructure - Funding the Gap</i>
Hilda Savitri	28 Februari 2017 / 28 February 2017	<i>Financing Panel - Renewable Power Projects in Indonesia & SE Asia</i>
	2 Maret 2017 / 2 March 2017	<i>Solar Future Indonesia Conference</i>
	17 Mei 2017 / 17 May 2017	<i>3rd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference</i>
	5 Juni 2017 / 5 June 2017	<i>Panelis Buka Diskusi & Buka Puasa bersama Asosiasi Produsen Listrik / Panelist of Discussion & Mass Break-fasting with the Electricity Producer Association</i>
	16 Agustus 2017 / 16 August 2017	<i>Invitation as Speaker: Maybank Sharing Session</i>
Irman Boyle	24 Januari 2017 / 24 January 2017	<i>Guest Speaker at PT. Adhimix Precast Indonesia</i>
	3 April 2017 / 3 April 2017	<i>FGD Revisi PP Jalan Tol untuk Penugasan HK pada Pengelolaan Jalan Tol / FGD of Revision of Toll Road Government Regulation for Assignment of HK in Toll Road Management</i>
	16 Mei 2017 / 16 May 2017	<i>Australia Awards Indonesia Workshop re: 'PPPs in Indonesia: the Legislative, Regulatory and Policy Framework'</i>
	26 Mei 2017 / 26 May 2017	<i>FGD on HK Bonds Issuance</i>
	14 September 2017 / 14 September 2017	<i>The 6th Indo EBTKE ConEx 2017 & Bali Clean Energy Forum 2017</i>
	5 Oktober 2017 / 5 October 2017	<i>GTR Indonesia trade and investment event</i>
	18 Oktober 2017 / 18 October 2017	<i>Business Matching - Nusantara Expo & Forum</i>
	9 November 2017 / 9 November 2017	<i>"Transport Infrastructure and Integration Conference Conference" by Marcus Events</i>

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE INVESTASI-DIREKSI (BOD-IC)

Komite Investasi-Direksi (BOD-IC) memiliki tanggung jawab untuk mengkaji, mempertimbangkan, dan membuat keputusan mengenai semua proposal investasi untuk Perusahaan yang direkomendasikan kepada Komite Investasi Dewan Komisaris (BOC-IC).

Pedoman Kerja BOD-IC

BOD-IC memiliki piagam (charter) yang mengatur hal-hal terkait peran dan tanggung jawab, kewenangan, struktur dan kualifikasi, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain sebagainya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama BOD-IC Perusahaan meliputi:

1. Mengkaji, menyetujui dan merekomendasikan proposal investasi untuk ditinjau lebih lanjut dan disetujui oleh BODIC;
2. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada BOC-IC untuk tujuan pengkajian proyek oleh BODIC;
3. Berkoordinasi dengan Komite Aset dan kewajiban dari BOD (ALCO) untuk memastikan kecukupan pendanaan untuk kredit/investasi yang diusulkan dan bahwa dana tersebut sesuai dengan kredit tertentu yang ditetapkan oleh ALCO;
4. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan kredit dan investasi Perusahaan dari waktu ke waktu jika dianggap diperlukan;
5. Meninjau dan memantau implementasi atas semua investasi ekuitas dan semua pinjaman setidaknya setahun sekali, dan meningkatkan frekuensi peninjauan jika dianggap perlu dan menyediakan laporan mengenai tinjauan dan pemantauan kepada BOC-IC.

Susunan BOD-IC

Susunan BOD-IC untuk tahun buku 2017, terdiri dari:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Harold J.D. Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Wito Krisnahadi*	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CRO / Managing Director & CRO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Interim CRO / Managing Director & Interim CRO

* Berakhir masa jabatan efektif tanggal 31 Oktober 2017

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS – INVESTMENT COMMITTEE

The Board of Directors – Investment Committee (BOD-IC) was established to review, consider, and decide all recommended investment proposals to be further submitted to the BOC-IC for assessment.

Charter of Board of Directors – Investment Committee

The BOD-IC has a charter that regulates all matters concerning its role and responsibilities, authority, structure and qualification, meetings, reporting, discretion, etc.

Duties and Responsibilities

The main duties of BOD-IC are as follows:

1. To review, approve and recommend investment proposals to be submitted to the BOC-IC for further review and approval;
2. To provide information, assistance and/or clarification that can provide further insights to the BOC-IC in reviewing proposed projects;
3. To coordinate with the Assets & Liabilities Committee of the Board of Directors (ALCO) to ensure funding adequacy for proposed credits/investments based on ALCO's credit limitation;
4. To periodically review and adjust credit and investment policies at any given time if necessary;
5. To review and monitor the implementation of all investments and loans at least once per year, and to increase the frequency of such reviews when required, as well as to submit the report on reviewing and monitoring activities to the BOC-IC.

Compositon of BOD-IC Committee

Composition of the BOD-IC 2017 fiscal year is as follows:

* Terms of service ended on 31 October 2017

Kegiatan BOD-IC 2017

Kegiatan Komite Investasi Direksi sepanjang 2017, meliputi rapat-rapat yang membahas mengenai perkembangan kegiatan investasi Perusahaan beserta permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun agenda pembahasan dalam rapat Komite Investasi Direksi sepanjang 2017 meliputi:

Melaksanakan 52 kali rapat BoD-IC dengan pembahasan sebagai berikut:

1. 14 Project Appraisal Memorandum
2. 24 Project Information Document
3. 68 Credit Memorandum
4. 17 Memorandum
5. 1 BoD-IC Charter Revision

Tingkat Kehadiran Rapat

Berikut adalah tingkat kehadiran Ketua dan anggota Komite dalam rapat.

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Presentase / Percentage
Arisudono Soerono	52	52	100%
Indrawati Darmawan	52	48	92%
Harold J.D. Tjiptadjaja	52	49	94%
Wito Krisnahadi*	38	38	100%
Hilda Savitri	52	50	96%

* Berakhir masa jabatan efektif tanggal 31 Oktober 2017

BOD-IC Activities in 2017

Board of Directors – Investment Committee activities during 2017 includes meetings discussing the development of investment activities of the Company and its existing issues. Agenda of Board of Directors – Investment Committee's meeting throughout 2017 includes:

Conducted 52 BOD-IC meetings to discuss the following:

1. 14 Project Appraisal Memorandum
2. 24 Project Information Document
3. 68 Credit Memorandum
4. 17 Memorandum
5. 1 BoD-IC Charter Revision

Meeting Attendance Rate

The following is the attendance record of the Head of Investment Committee and other members of Committee.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (BOD-ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dibentuk oleh Direksi Perusahaan untuk memantau secara aktif pengelolaan sumber dana Perusahaan, termasuk pengelolaan risiko-risiko terkait seperti risiko likuiditas, risiko solvabilitas dan risiko pasar. ALCO memiliki piagam (*charter*) yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan komposisi komite, serta prosedur terkait seperti rapat, pelaporan, dan kerahasiaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab ALCO dalam kerangka desain manajemen risiko adalah:

1. Merumuskan strategi dan rencana tindakan dalam kaitannya dengan risiko pasar dan likuiditas;
2. Menyediakan rekomendasi perubahan kebijakan, jika diperlukan, dan menyarankan hal ini kepada BOC untuk mendapatkan persetujuan;

ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE

The Assets and Liabilities Committee (ALCO) was established by the Company's Board of Directors to actively monitor the Company's fund source management, including risk management related to liquidity, solvability, and market risks. ALCO has a charter that regulates matters related to the responsibilities and composition of committee, as well as procedure related to meeting, reporting, and confidentiality.

Duties and Responsibilities

Within the risk management framework, ALCO's duties are as follows:

1. To formulate the strategy and action plan in respect of market and liquidity risks;
2. To provide recommendations on changes of policy, if required, and to provide recommendations to the Board of Commissioners for approval;

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dijalankan sesuai dengan kebijakan Perusahaan; 4. Mengelola likuiditas, menetapkan suku bunga, menetapkan, menentukan, dan memantau pelaksanaan kebijakan untuk mismatch dan posisi devisa neto, serta mengelola dan menentukan struktur neraca keuangan dan modal IIF; 5. Mengelola investasi untuk dana surplus; 6. Mengelola risiko pasar yang dilakukan dalam trading book; 7. Mendesain dan merevisi struktur limit sesuai dengan <i>risk appetite</i> IIF dengan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dari BOD (atau jika limit tersebut harus disetujui oleh BOC, kemudian memberikan rekomendasi dan justifikasi untuk persetujuan lebih lanjut dari BOC), dan memantau kepatuhan terhadap struktur limit. 8. Menyetujui penggunaan metodologi untuk pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, dan menetapkan kerangka kerja untuk validasi berkala atas model risiko pasar dan likuiditas; 9. Menentukan (atau memperkirakan) risiko pasar dan likuiditas yang melekat dalam semua aktivitas Perusahaan dan menyediakan input strategis kepada BOC dengan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dari BOD; 10. Mengkaji proyeksi kas dan menentukan kelebihan yang dapat diinvestasikan, jika ada. | <ol style="list-style-type: none"> 3. To ensure that the management of assets and liabilities is executed within the Company's policies; 4. To manage IIF's liquidity, to set interest rates, and to decide, determine and monitor application of the policies for mismatch and net open position, as well as to manage and determine IIF's financial and capital balance structures; 5. To manage investment of surplus funds; 6. To manage the market risk carried in the trading book; 7. To design and revise limit structures in line with IIF's risk appetite in coordination with the Risk Management Committee of the BOD (or if such limit shall be approved by the BOC, then to provide recommendation and justification for further approval of the BOC), and to monitor the compliance with the limit structure; 8. To approve the methodology for management of market and liquidity risks, and to establish the framework for periodical validations of the market and liquidity risk models; 9. To define (or estimate) the market and liquidity risks inherent in all activities of the Company and to provide strategic input to the BOC in coordination with the Risk Management Committee of BOD; and 10. To review the cash forecasts and to determine the investible surplus, if any. |
|---|--|

Susunan Komite ALCO 2017

Susunan anggota ALCO periode 1 Januari 2017 – 8 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota (sebagai penyelenggara/ <i>convenor</i>) / Member (as the convenor)	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CRO / Managing Director & CRO

2017 ALCO Committee Composition

Composition of ALCO members for the period of 1 January 2017 – 8 August 2017 is as follows:

Susunan anggota ALCO periode 8 Agustus 2017 – 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Composition of ALCO members for the period of 8 August 2017 – 31 December 2017 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota (sebagai penyelenggara/ <i>convenor</i>) / Member (as the convenor)	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Interim CRO / Managing Director & Interim CRO

Tingkat Kehadiran Rapat

Anggota ALCO melaksanakan pertemuan secara berkala yang diadakan setiap bulannya. Sepanjang 2017, ALCO telah mengadakan 12 kali pertemuan. Berikut merupakan susunan anggota ALCO, jumlah rapat beserta tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat-rapat yang diadakan.

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Presentase / Percentage
Arisudono Soerono	12	12	100%
Harold Tjiptadaja	12	12	100%
Hilda Savitri	12	12	100%
Indrawati Darmawan	12	12	100%
Wito Krisnahadi*	7	7	100%

* Berakhir masa jabatan efektif pada tanggal 31 Oktober 2017

Meeting Attendance Rate

ALCO members hold a meeting on a monthly basis. In 2017, the ALCO held 12 meetings. The following table describes the composition of ALCO, number of meetings and attendance rate of each Committee's member in the meetings.

* Term of office effectively ends on 31 October 2017

KOMITE MANAJEMEN RISIKO-DIREKSI

Komite Manajemen Risiko Direksi (RMC) memiliki tanggung jawab utama untuk secara aktif memantau pengelolaan risiko kegiatan usaha IIF serta memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan dan strategi manajemen risiko IIF.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab RMC terkait pengaturan manajemen risiko adalah:

1. Memberikan perumusan strategi kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk pengaturan batas kerangka dan perumusan rencana kontingensi untuk kondisi yang tidak diharapkan;
2. Mengawasi evaluasi dan pengelolaan komposisi risiko secara keseluruhan dalam portofolio IIF, meminimalkan risiko yang berpotensi muncul di tiap-tiap proyek serta tingkat portofolio, mengembangkan budaya manajemen risiko di semua tingkatan, serta memastikan bahwa Departemen Manajemen Risiko melaksanakan tugasnya secara independen;
3. Menyelidiki, menganalisa, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan isu-isu yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal;
4. Mengevaluasi proposal yang diajukan untuk kegiatankegiatan dan produk-produk baru dan menilai keinginan dan kemampuan IIF dalam melakukan kegiatan

RISK MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is mainly responsible for actively monitoring risk management of IIF's business activities as well as providing recommendations in formulating the Company's risk management policies and strategies.

Duties and Responsibilities

Pertaining to the risk management arrangements in the Company, the duties of RMC are as follows:

1. To provide strategic formulation of risk management policies and framework, including the setting of framework limits and the formulation of contingency plans for adverse conditions;
2. To oversee the evaluation and management of the overall risk composition in IIF's portfolio, minimize potential risks at the project as well as the portfolio level, develop a risk management culture at all levels, and ensure that the Risk Management Department is able to perform independently;
3. To investigate, analyze, and take necessary action in respect of issues related to business decisions that deviate from normal procedures;
4. To evaluate proposals related to new activities and products, measure the desirability and capacity of IIF in undertaking the new activities and products through a risk

- baru dan produk baru tersebut dari perspektif risiko, serta mengevaluasi usulan perubahan terkait kebijakan dan prosedur;
5. Memantau kecukupan modal IIF terhadap risiko yang telah diidentifikasi sesuai dengan perundangan yang berlaku dan toleransi risiko Perusahaan;
 6. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, merumuskan amandemen yang diperlukan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada, menilai kecukupan pengendalian intern serta meninjau laporan MIS yang disajikan secara rutin;
 7. Melakukan tinjauan secara berkala untuk mengevaluasi kelayakan metodologi penilaian risiko;
 8. Meninjau dan menyetujui laporan Manajemen Risiko Triwulanan yang disajikan oleh Departemen Manajemen Risiko; dan
 9. Meninjau dan mengusulkan perubahan, bilamana diperlukan, untuk setiap parameter risiko atau indicator kepada Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.

perspective, and evaluate proposals for associated changes in policies and procedures;

5. To monitor the adequacy of IIF's capital against identified risks in accordance with the prevailing regulations and the Company's risk tolerance;
6. To evaluate the effectiveness of the risk management policies and procedures, formulate the necessary amendment to the existing risk management policies and procedures, evaluate the adequacy of internal controls and review regular MIS reports;
7. To conduct regular review to evaluate the appropriateness of the risk assessment methodologies;
8. To review and agree on the Quarterly Risk Management report produced by the Risk Management Department; and
9. To review and propose any changes, if required, on any risk parameters or indicators to the Risk Oversight Committee of the Board of Commissioners for further approval by the Board of Commissioners.

Komposisi RMC

Susunan anggota RMC periode 1 Januari 2017 – 31 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CRO / Managing Director & CRO

RMC Composition

RMC member composition for the period of 1 January 2017 – 31 October 2017 is as follows:

Susunan anggota RMC periode 31 Oktober 2017 – 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

RMC member composition for the period of 31 October 2017 – 31 December 2017 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Interim CRO / Managing Director & Interim CRO
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO

Tingkat Kehadiran Rapat

RMC mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam satu triwulan. Pada tahun 2017, RMC mengadakan 4 (empat) kali pertemuan, dengan rincian sebagai berikut:

Meeting Attendance Rate

RMC members are obliged to hold a meeting at least once every three months. In 2017, RMC convened 4 meetings with the following details:

Jadwal RMC Meeting / RMC Meeting Schedule	Agenda Meeting / Meeting Agenda	Anggota RMC yang hadir / RMC Committee present
13 Maret 2017 / 13 March 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat RMC dan ROC sebelumnya / Summary and follow up from previous RMC and ROC meetings 2. Parameter risiko per tanggal 31 Desember 2016 / Risk Parameters as of 31 December 2016 3. Tinjauan atas Batasan Investasi berdasarkan Peringkat Risiko / Review on Investment Limit based on Risk Rating 	Arisudono Soerono, Harold Tjiptadjaja, Hilda Savitri, Wito Krisnahadi, Indrawati Darmawan
1 Agustus 2017 / 1 August 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat RMC dan ROC sebelumnya / Summary and follow up from previous RMC and ROC meetings 2. Parameter risiko per tanggal 30 Juni 2017 / Risk Parameters as of 30 June 2017 3. <i>Compliance Self-Assessment Checklist</i> 4. Laporan Progress Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2017 / Progress of Risk Management Initiatives for 2017 	Arisudono Soerono, Hilda Savitri, Indrawati Darmawan, Wito Krisnahadi
18 Oktober 2017 / 18 October 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat RMC dan ROC sebelumnya / Summary and follow up from previous RMC and ROC meetings 2. Parameter Risiko per tanggal 30 September 2017 / Risk Parameters as of 30 September 2017 3. Usulan <i>Compliance Self-Assessment Checklist</i> / Proposal for Compliance Self-Assessment Checklist 4. Usulan Pedoman Alokasi Sektor yang Baru / Proposal for New Sector Allocation Sector 5. Laporan Progress Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2017 / Progress of Risk Management Initiatives for 2017 	Arisudono Soerono, Harold Tjiptadjaja, Hilda Savitri, Indrawati Darmawan
28 November 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat RMC dan ROC sebelumnya / Summary and follow up from previous RMC and ROC meetings 2. Tinjauan & Rekomendasi Sistem Pemeringkat Risiko IIF / Review & Recommendation on IIF's Risk Rating System 3. Laporan Progress Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2017 / Progress of Risk Management Initiatives for 2017 	Arisudono Soerono, Harold Tjiptadjaja, Hilda Savitri, Indrawati Darmawan

Tingkat kehadiran dari masing-masing anggota:

Attendance rate of each member:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
Arisudono Soerono	4	4	100%
Harold Tjiptadjaja	4	3	75%
Hilda Savitri	4	4	100%
Indrawati Darmawan	4	4	100%
Wito Krisnahadi*	2	2	100%

* Berakhir masa jabatan pada 31 Oktober 2017

* Term of office ends on 31 October 2017

KOMITE ADVISORY

Komite *Advisory* memiliki tanggung jawab utama untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi manajerialnya, yaitu secara khusus untuk melakukan review, menimbang dan mengambil keputusan terkait dengan seluruh proyek *advisory* Perusahaan, di antaranya memutuskan apakah akan menerima suatu mandat dan memutuskan proyek sektor swasta atau publik.

Tugas dan tanggung jawab Komite *Advisory* antara lain adalah:

1. Melakukan review, merekomendasikan dan/atau menyetujui Dokumen Proyek *Advisory* atau dokumen serupa, yang menyediakan cakupan dan struktur awal terkait dengan proyek *advisory* Perusahaan. Dokumen Proyek *Advisory* harus dibuat secara detail atau relevan dengan mempertimbangkan informasi yang ada pada saat tersebut dan harus mempertimbangkan, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: manfaat pelaksanaan proyek, implikasi terhadap sumber daya Perusahaan (waktu pengerjaan, biaya/budget, potensi pendapatan dan lainnya), potensi benturan kepentingan dan permasalahan KYC;
2. Menerima update secara periodik terkait dengan proyekproyek *advisory* (baik proyek yang sedang berjalan maupun proyek pipeline) dari *Executive Vice President advisory group*;
3. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada Dewan Komisaris, apabila diperlukan, untuk melakukan review fungsi *advisory* Perusahaan;
4. Melakukan review dan menyesuaikan kebijakan dan/atau prosedur *advisory* Perusahaan dari waktu ke waktu sebagaimana dianggap perlu oleh Komite *Advisory*; dan
5. Melakukan review dan memantau implementasi proyekproyek *advisory* Perusahaan paling sedikit setiap tahun dan meningkatkan frekuensi review apabila dianggap perlu serta menyediakan laporan hasil review dan pemantauan kepada Dewan Komisaris, apabila diperlukan.

Komite *Advisory* Direksi dibentuk berdasarkan Piagam Komite *Advisory* Direksi tanggal 5 Desember 2014.

ADVISORY COMMITTEE

Advisory Committee has main responsibility to assist the Board of Directors in running its managerial function, which is to specifically review, consider, and make decisions related to all advisory projects of the Company, among others, to decide whether the Company will accept a mandate and decide to have whether private or public projects.

Duties and responsibilities of Advisory Committee are among others:

1. Reviewing, recommending, and/or approving Advisory Project Document or similar documents, which provides the scope and the initial structure related to the Company's advisory project. The Advisory Project document must be prepared in detail or should be relevant with the up-to-date information available at that time, but not limited to the following matters: the benefit of project implementation, implication on the Company's resources (time of execution, budget, potential revenue, and others), potential conflict of interests and KYC issues;
2. Periodically receiving updates related to advisory projects (either ongoing projects or pipeline projects) from the Executive Vice President of group advisory;
3. Providing information, assistance, and/or making clarification to the Board of Commissioners, if necessary, to review the Company's advisory function;
4. Reviewing and adjusting advisory policy and/or procedure of the Company from time to time as deemed necessary by the Advisory Committee; and
5. Reviewing and monitoring the implementation of the Company's advisory projects at least every year and increasing review frequency if necessary, as well as providing report of review results and monitoring to the Board of Commissioners, if necessary.

Advisory committee of the Board of Directors is established based on Advisory Committee Charter of the Board of Directors on 5 December 2014.

Susunan Anggota Komite Advisory

Susunan anggota Komite *Advisory* periode 1 Januari 2017 - 15 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director and CIO
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CRO / Managing Director & CRO

Membership of Advisory Committee

Advisory Committee member composition period 1 Januari -15 Agustus 2017 is as follows:

Susunan anggota Komite *Advisory* periode 15 Agustus 2017 - 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Interim CRO / Managing Director & Interim CRO

Advisory Committee member composition period 15 August 2017 - 31 December 2017 is as follows:

Frekuensi Pertemuan Komite Advisory 2017

Sepanjang 2017, Komite *Advisory* melaksanakan 9 kali rapat dengan frekuensi kehadiran masing-masing anggota yaitu:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Presentase / Percentage
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	9	8	89%
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	9	9	100%
Wito Krisnahadi*	Anggota / Member	5	4	80%
Hilda Savitri	Anggota / Member	6	6	100%

* Berakhir masa jabatan pada 31 Oktober 2017

Meeting Frequency of Advisory Committee in 2017

Throughout 2017, the Advisory Committee conducted 9 (nine) meetings with the attendance rate of each member as follows:

* Term of office ends on 31 October 2017

Agenda Rapat Komite Advisory 2017

Materi agenda yang dibahas dalam rapat Komite *Advisory* sepanjang 2017 antara lain:

Tanggal / Date	Agenda
16 Maret 2017 / 16 March 2017	PAD - GMF Corporate Valuation
17 Maret 2017 / 17 March 2017	PAD - GMF Corporate Valuation
12 April 2017 / 12 April 2017	PAD - Advisory for SPAM Lampung
22 Juni 2017 / 22 June 2017	PAD - Advisory for PLTU Sumut-2
5 September 2017 / 5 September 2017	PAD - Advisory for Kuala Tanjung Project
17 November 2017 / 17 November 2017	PAD - Advisory for West Semarang Water Supply PPP
23 November 2017 / 23 November 2017	Revise Fee Proposal - Advisory for West Semarang Water Supply PPP
14 Desember 2017 / 14 December 2017	Update Fee Proposal - Advisory for Kuala Tanjung Project
22 Desember 2017 / 14 December 2017	PAD - Moya New Advisory Projects

Meeting Agenda of Advisory Committee in 2017

Agenda discussed in the Advisory Committee's meeting throughout 2017 is as follows:

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan yang baru, Perusahaan telah membentuk Komite Sumber Daya Manusia yang tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Kepegawaian dan Pengembangan.
Memutuskan dan menyetujui seleksi, penempatan dan pemberhentian pegawai senior Perusahaan (tingkat Assistant Vice President ke atas) sesuai dengan kriteria subyektif dan obyektif yang dapat diterima. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik untuk menunjang pertumbuhan Perusahaan dan menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi serta memastikan bahwa kinerja Perusahaan tidak terganggu oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja buruk;
2. Manajemen Kinerja.
Membuat tujuan-tujuan perusahaan dan karyawan untuk karyawan dengan tingkat *Executive Vice President* dan staf serta menyesuaikan hasilnya di dalam Perusahaan.
3. Kompensasi dan Manfaat.
Menetapkan kebijakan remunerasi untuk karyawan dengan tingkat Executive Vice President dan staff, menyetarakan remunerasi dengan kinerja yang diukur dengan tolak ukur industri sejenis, pencapaian indikator kinerja yang penting, nilai tambah ekonomis dan faktor-faktor lainnya.
4. Menetapkan kebijakan, strategi dan keputusan terkait dengan sumber daya manusia yang bersifat umum yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan.

Dalam rangka untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Sumber Daya Manusia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memiliki akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawabnya dari Direksi, eksekutif, karyawan dan pihak-pihak eksternal kapanpun diperlukan; dan
- b) Memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi, mengundang dan mengikutsertakan karyawan atau konsultan internal atau independen Perusahaan untuk menghadiri rapat komite.

Piagam Komite SDM

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk berdasarkan Piagam Komite Sumber Daya Manusia tanggal 14 Desember 2015.

HR COMMITTEE

In accordance with the Company's new organizational structure, the Company has established HR Committee whose duties and responsibilities include:

1. Employment and Development.
To decide and approve selection, placement, and termination of the Company's senior employees (Assistant Vice President level and above) according to the acceptable subjective and objective criteria. This authority aims to ensure effective human resources planning to support the Company's growth and face challenges that might happen and ensure that the Company's performance is not significantly affected by poor performance of its human resources;
2. Performance Management.
Determine objectives of the company and employees at the level of Executive Vice President, as well as staff, and review its goal achievements.
3. Compensation and Benefit.
Determine remuneration policy for the employees at the Executive Vice President and staff level, adjust the remuneration to the benchmarked performance prevailed in the similar industry, accomplishment of key performance indicators, economic added values and other factors.
4. Determine general policy, strategy, and decision related to general human resources that are pivotal to the Company's overall performance.

In order to fulfill such duties and responsibilities, the Human Resources Committee is authorized to:

- a) Access any information required according to its duties from the Board of Directors, executives, employees, and external parties wherever needed; and
- b) Have the authority to select, invite, and involve the employees or internal or independent consultant of the Company to attend committee meeting.

HR Committee Charter

Human Resources Committee is established based on Human Resources Committee Charter dated 14 December 2015.

Susunan Komite SDM

Susunan anggota Komite SDM periode 1 Januari 2017 - 31 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CRO / Managing Director & CRO

HR Committee Composition

HR Committee member composition period 1 January 2017 - 31 October 2017 is as follows:

Susunan anggota Komite SDM periode 31 Oktober 2017 - 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Interim CRO / Managing Director & Interim CRO

HR Committee member composition period 31 October 2017 - 31 December 2017 is as follows:

Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang 2017, Komite SDM melaksanakan 5 kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Presentase / Percentage
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	5	5	100%
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	5	5	100%
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	5	5	100%
Hilda Savitri	Anggota / Member	5	5	100%
Wito Krisnahadi*	Anggota / Member	5	4	80%

* Berakhir masa jabatan pada 31 Oktober 2017

Meeting Attendance Rate

Throughout 2017, HR Committee has held 5 meetings with the following attendance rate:

* Term of office ends on 31 October 2017

KOMITE PENGARAH TI

Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC) Perusahaan memiliki peran dalam melaksanakan pengembangan terkait kapasitas dan kapabilitas sistem teknologi informasi dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun yang menjadi rincian tugas ITSC adalah:

1. Memprioritaskan inisiatif dan menyelaraskan IT dengan strategi bisnis melakukan pengawasan terhadap strategi, proyek, dan keputusan arsitektur teknologi yang terkait dengan teknologi informasi;
2. Memprioritaskan inisiatif investasi di bidang IT dan memberikan persetujuan akhir dan rekomendasi tentang berlanjut tidaknya usulan proyek TI;

IT STEERING COMMITTEE

The Company's IT Steering Committee (ITSC) was established to develop the capability of information technology system to support the Company's business activities.

Duties and Responsibilities

Duties of ITSC are as follows:

1. To prioritize initiatives and align the Company's IT with business strategy, and oversee major information technology related strategies, projects and technology architecture decisions;
2. To prioritize IT investment initiatives and deliver final approvals and recommendations on the follow-up of proposed IT projects;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelaraskan bisnis strategis dengan investasi TI melalui perencanaan TI Strategis; 4. Meninjau dan memantau proyek-proyek utama di bidang TI dari perspektif lintas fungsional; 5. Mencapai keseimbangan antara kendala yang dihadapi di bidang TI dengan prioritas bisnis; 6. Mempromosikan Lintas Synergy Fungsional; 7. Memberikan informasi terkait TI kepada Direksi dan Dewan Manajemen (Perusahaan Manajemen); 8. Memastikan terjadinya komunikasi yang terbuka antara departemen TI dan unit fungsional lainnya Perusahaan sebagai upaya mempromosikan perencanaan secara bersama; 9. Menyelesaikan konflik terkait sumber daya dengan melakukan pengawasan terhadap manfaat yang terealisasi; 10. Memantau apakah inisiatif TI secara efektif mendukung tujuan bisnis dan strategi Perusahaan; 11. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Risiko TI; 12. Memberikan kepemimpinan Manajemen Risiko TI dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Memahami dan mengidentifikasi risiko TI, dan mengupayakan pengelolaan yang efektif atas risiko tersebut. • Mengelola eksposur dan ambang batas risiko TI. 13. Menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas risiko. 14. Memastikan terjadinya komunikasi yang terbuka antara departemen TI dengan unit-unit fungsional lain sebagai upaya mempromosikan manajemen risiko secara bersama. | <ol style="list-style-type: none"> 3. To align strategic business with IT investments through IT Strategic Planning; 4. To review and monitor major IT projects from a cross-functional perspective; 5. To find balance between IT constraints and business priorities; 6. To promote Cross Functional Synergy; 7. To inform the Board of Directors and Board of Management (The Company Management) on IT related matters; 8. To ensure open communication between the IT department and the other functional units of The Company in order to promote collaborative planning; 9. To resolve conflict related to resources by overseeing the benefits that have been realized; 10. To monitor whether IT initiatives effectively support the Company's business objectives and strategies; 11. To oversee IT Risk Management; 12. To provide risk management leadership for IT by: <ul style="list-style-type: none"> • Understanding and identifying IT risks and making efforts to manage the risks effectively. • Managing IT risk exposure and thresholds. 13. To resolve resource allocation issues based on risk prioritization. 14. To ensure open communication between the IT department and other functional units to promote a collaborative risk management. |
|--|--|

Komposisi ITSC

Susunan anggota ITSC periode 1 Januari 2017 - 28 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CRO / Managing Director & CRO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO

ITSC Composition

ITSC member composition period 1 January 2017 - 28 August 2017 is as follows:

Susunan anggota ITSC periode 28 Agustus 2017 - 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

ITSC member composition period 28 August 2017 - 31 October 2017 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position at the Company
Arisudono Soerono	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Interim CRO / Managing Director & Interim CRO

Kegiatan ITSC 2017

Sepanjang 2017, ITSC mengadakan agenda kegiatan terkait tugas dan tanggung jawabnya yaitu:

ITSC Activities in 2017

Throughout 2017, activities conducted by ITSC pertaining to its duties and responsibilities are as follows:

Tanggal / Date	Agenda	Peserta / Participants	Kebijakan / Keputusan Komite / Policy / Decisions of Committee
23 Februari 2017 23 February 2017	Rencana TI 2017 / IT Plan for 2017	Arisudono Soerono Indrawati Darmawan Wito Krisnahadi	Persetujuan atas rencana kerja TI untuk tahun 2017 / Approval for IT work plan for 2017
02 Mei 2017 02 May 2017	1. Rencana (Budget) TI 2017 / IT Plan for 2017 (Budget) 2. Update mengenai Kemajuan Proyek TI / IT Project Progress Update	Indrawati Darmawan Wito Krishnahadi	Persetujuan atas penggunaan budget TI untuk melaksanakan rencana kerja tahun 2017 / Approval for the appropriation of IT budget to perform 2017 work plan
28 Agustus 2017 28 August 2017	1. Update Kemajuan Kegiatan TI 2017 / 2017 IT Initiatives Progress Update 2. Item-Item Audit / Audit Items 3. Strategi IT 2018 / 2018 IT Strategy	Arisudono Soerono Indrawati Darmawan Wito Krisnahadi Hilda Savitri	Arahan terkait TI Resourcing Strategy / Direction on IT Resourcing Strategy.
14 September 2017	1. Kegiatan Baru TI di 2018 / IT New Initiatives for 2018 2. Rencana Strategis TI 2018 / IT Strategic Plan for 2018 3. Budget TI 2018 / IT Budget for 2018 4. Rencana Resourcing IT 2018 / IT Resourcing Plan for 2018	Arisudono Soerono Indrawati Darmawan Hilda Savitri	1. Persetujuan atas inisiatif TI untuk tahun 2018 / Approval for IT initiatives for 2018 2. Persetujuan atas budget TI untuk tahun 2018 / Approval for IT budget for 2018 3. Persetujuan atas <i>IT Resourcing Plan</i> untuk tahun 2018 / Approval for IT Resourcing Plan for 2018 4. Arahan dan keputusan terkait fokus TI di 2018 (Office Relocation) / Direction and decisions on IT focus in 2018 (Office Relocation)
13 Desember 2017 13 December 2017	1. Rencana Strategis TI 2018 / IT Strategic Plan for 2018 2. Budget TI 2018 / IT Budget for 2018 3. Strategi Relokasi Data Center / Data Center Relocation Strategy	Arisudono Soerono Indrawati Darmawan Hilda Savitri	Persetujuan atas strategy relokasi Data Center / Approval for Data Center relocation strategy

Tingkat Kehadiran Rapat**Meeting Attendance Rate**

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	% Kehadiran / Attendance
Arisudono Soerono	5	4	80%
Indrawati Darmawan	5	5	100%
Wito Krisnahadi*	5	3	60%
Hilda Savitri	5	3	60%

* Berakhir masa jabatan pada 31 Oktober 2017

* Term of office ends on 31 October 2017

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja yang bertugas melakukan fungsi kesekretariatan dan kehumasan Perusahaan. Sekretaris Perusahaan juga dituntut untuk *update* terhadap berbagai aturan yang berlaku dalam dunia usaha untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak terkait di internal agar dapat diimplementasikan dengan baik. Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan IIF meliputi:

1. Memastikan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik;
2. Mengelola hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
3. Melakukan fungsi legal dan konsultan legal terutama menyangkut hal-hal yang terkait dengan permasalahan Perusahaan;
4. Memastikan ketersediaan laporan-laporan, antara lain Laporan Manajemen Risiko, Laporan Kinerja Sosial dan Lingkungan dan Laporan Uji Tuntas, sesuai dengan Pedoman Operasional Perusahaan, Kesepakatan Pemegang Saham dan/atau hukum dan regulasi yang berlaku.

Profil Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014, Direksi Perusahaan telah menunjuk dan mengangkat Nastantio W. Hadi sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana termaktub dalam Surat No. S.2016.153/IV/IIF tanggal 7 April 2016.

CORPORATE SECRETARY

Duties and Responsibilities

Corporate Secretary is a work unit whose responsibility covers the secretarial and public relations functions of the Company. The Corporate Secretary is obliged to keep abreast of the most up-to-date business regulations which need to be disclosed to all related internal parties so as to be implemented properly in the Company. The duties and responsibilities of IIF's Corporate Secretary are:

1. To ensure compliance with GCG principles;
2. To professionally manage the relationship with the Shareholders and other Stakeholders;
3. To perform the legal function and act as a legal consultant particularly on matters related to the Company;
4. To ensure the availability of reports pertaining to Risk Management, Social and Environmental Performance and Due Diligence, in line with IIF's Operating Manual, Shareholders' Agreements, and/or applicable laws and regulations.

Profile of the Corporate Secretary

To comply with the provisions of OJK Regulation No. 35/2014, the Company's Board of Directors has appointed Nastantio W. Hadi as the Company's Corporate Secretary effective from 29 December 2011 as stated in the Letter No. S.2016.153/IV/IIF dated 7 April 2016.

	<p>Nstantio W. Hadi Sekretaris Perusahaan</p> <p>Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Hukum di bidang Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta (1993) dan gelar Lex Legibus Master (LL.M.) di bidang International Business Law dari Washington College of Law - the American University, Washington DC, Amerika Serikat (1996). Sebelum bergabung dengan Perusahaan, Beliau pernah bekerja pada firma hokum Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993-1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996-2000) dan Pradjoto & Associates (2000-2005). Setelah berkarir di firma hukum, Beliau mengepalai divisi hukum dari suatu perusahaan penyedia jasa logistik.</p>	<p>Nstantio W. Hadi Corporate Secretary</p> <p>Nstantio W. Hadi is an Indonesian citizen. He received his Bachelor of Law in Civil Law from the Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta (1993) and his Lex Legibus Master (LL.M.) in International Business Law from Washington College of Law - the American University, Washington DC in the United States (1996). Prior to joining the Company, he worked at the law firms of Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993-1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996-2000) and Pradjoto & Associates (2000-2005). After developing his career at these law firms, he supervised the legal department of a logistics services company.</p>
---	--	--

Kegiatan Sekretaris Perusahaan tahun 2017

Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance/GCG*, Sekretaris Perusahaan melakukan pencatatan dan pendokumentasian atas setiap kebijakan dan risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebagai pejabat penghubung dengan pihak eksternal, Sekretaris Perusahaan membantu dan mendampingi Direksi pada setiap pelaksanaan kegiatan Perusahaan. Sekretaris Perusahaan juga membantu merumuskan pesan yang akan disampaikan oleh Direksi baik kepada internal maupun eksternal Perusahaan.

Kegiatan yang dilakukan adalah:

1. *Signing ceremony* atas berbagai macam proyek infrastruktur baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun institusi pemerintahan.
2. Penyelenggaraan RUPS dan RUPSLB.
3. Kegiatan internal perusahaan: *BoC meeting* yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, *townhall*, *outing*, *employee gathering*, dsb.
4. Kegiatan promosi seperti pameran di Euromoney Conference dan PPP Day Conference.
5. Menjadi *team in-house legal advisor* untuk *project funding* World Bank sebesar USD 200 Juta & JICA sebesar JYP 8 billion.
6. Melakukan update informasi untuk *shareholders* melalui website, *company profile*, dan *marketing kits* lainnya.
7. Mengadakan *press conference* sebanyak 2 kali:
 - Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan
 - JICA Loan Agreement
8. Memberikan sponsor untuk kegiatan "Explore to Conserve" prakarsa Mapala UI untuk melindungi terumbu karang di Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah selama 21 Oktober - 4 November 2017.
9. Memberikan Donasi untuk Panti Asuhan di Jl Kebalen Senopati, Jakarta dan Yayasan Sayap Ibu Bintaro, Jl Raya Graha Bintaro, Bintaro - Tangerang Selatan.
10. Menyediakan dana untuk penelitian di bidang infrastruktur berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan dasar yang dikembangkan oleh mahasiswa dan/atau dosen di perguruan tinggi negeri. Program ini telah dimulai pada tahun 2017 dan akan selesai pada tahun 2018.

Corporate Secretary Activities in 2017

The Corporate Secretary's activities during 2017 were conducted in accordance with its functions, duties, and responsibilities. In relation to the compliance with the applicable regulations, especially the good corporate governance/GCG principles, the Corporate Secretary records and documents every policy and minutes of the Board of Directors and the Board of Commissioners meetings.

As a liaison to the external parties, the Corporate Secretary helps and assists the Board of Directors in the implementation of the Company's activities. The Corporate Secretary also helps to formulate messages to be delivered by the Board of Directors to both internal and external parties.

Activities conducted include:

1. Signing ceremony of various infrastructure projects that include both public and private sectors.
2. The implementation of AGMS and EGMS.
3. The company's internal activities: BoC meeting held every three months, townhall, outing, employee gathering, etc.
4. Promotional events such as exhibition in Euromoney Conference and PPP Day Conference.
5. Served as in-house legal advisor team for World Bank funding project worth USD 200 Million & JICA at the amount of JYP 8 billion.
6. Update information for Shareholders through website, company profile, and other marketing kits.
7. Held 2 press conferences for the following:
 - Drinking Water Supply System Umbulan project
 - JICA Loan Agreement
8. Sponsoring the Mapala UI "Explore to Conserve" to protect the coral reef in Teluk Tomini in Kabupaten Parigi Moutong, Central Sulawesi Tengah during the time span of 21 October - 4 November 2017.
9. Providing donation for the Orphanage, Jl Kebalen Senopati, Jakarta, and Donation for Sayap Ibu Bintaro, Jl Raya Graha Bintaro, Bintaro - Tangerang Selatan.
10. Providing funding for research in the field of infrastructure based on technology and basic science developed by college students and/or lecturers of those in state universities. This program has started in 2017 and will be concluded in 2018.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan 2017

Sepanjang 2017, Departemen Sekretaris Perusahaan IIF melaksanakan pelatihan yaitu:

Topik Pelatihan / Training Subject	Judul Pelatihan / Training Title	Penyelenggara / Organizer
<i>3rd Annual Indonesia Infrastructure Finance Euromoney Conference</i>	EURO MONEY	Euromoney
<i>Behavior Interview Workshop</i>	Interview	DDI- Vera Simanjuntak
APLMA	APLMA	HHP
<i>Communication & Presentation Skill Training</i>	Communication	Transformation Institute

Trainings of 2017 Corporate Secretary

Throughout 2017, IIF's Corporate Secretary Department has participated in the following:

AUDIT INTERNAL

Satuan Internal Audit adalah unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, melalui Komite Audit. Sebagai layanan kepada Manajemen, Audit Internal bertindak sebagai pemberi penilaian independen, yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan dan kualitas kinerja. Fungsi penjamin pengendalian ini secara sistematis mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan manajemen risiko, proses pengendalian dan tata kelola, yang memungkinkan Manajemen menjadi lebih efektif dalam mencapai target usaha dan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Pemegang Saham Perusahaan.

Piagam Kerja Audit Internal

Internal Audit Charter adalah sebuah dokumen formal tertulis yang menjabarkan tujuan, wewenang dan tanggung jawab Audit Internal. Charter ini menetapkan posisi Audit Internal di dalam organisasi, memberi wewenang untuk mendapatkan berbagai catatan, memasuki berbagai bangunan fisik yang relevan dengan kinerja; dan menguraikan lingkup kerja. Audit Internal IIF Charter telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur tanggal 28 November 2012.

Struktur dan Kedudukan Audit Internal

Satuan Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan wajib menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit. Kepala Internal Audit juga bertanggung jawab untuk pengembangan, review dan modifikasi kebijakan audit, prosedur untuk pelaksanaan audit. Setiap pengangkatan,

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Unit is an independent unit that reports directly to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee. Internal Audit acts independently in performing an appraisal function by examining and evaluating the Company's internal control systems and performance quality to ensure adequacy and effectiveness. This controlling assurance function systematically evaluates and improves the effectiveness of risk management and control and governance processes, allowing the management to conduct business more effectively, attain corporate objectives and fulfill their obligations to the Shareholders.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter is an official written document with a defined purpose, authority and responsibility of the Internal Audit function. The charter affirms the Internal Audit position within the organization, authorizes access to enter premises as needed to perform its duties, and defines the scope of internal audit work. The Company's Internal Audit Charter was signed by the President Commissioner and President Director on 28 November 2012.

Structure and Position of Internal Audit

Internal Audit is chaired by the Head of Internal Audit, who is appointed and dismissed by the President Director upon approval of the Board of Commissioners. The Head of Internal Audit reports directly to the President Director and is obliged to submit the internal audit report to the President Director and the Board of Commissioners through the Head of the Audit Committee. The Head of Internal Audit is also responsible for developing, reviewing, and modifying audit policies, procedures, and performance. Every appointment,

penggantian, dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal harus dilaporkan segera ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggung Jawab Audit Internal

Tanggung jawab Internal Audit, sebagaimana diatur dalam Piagam Internal Audit, yaitu:

- Mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksibel yang menggunakan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko atau masalah kontrol yang diidentifikasi oleh manajemen, dan menyampaikan rencana itu kepada Komite Audit untuk ditelaah dan disetujui serta diperbaharui secara periodik.
- Melaksanakan rencana kerja audit tahunan yang disetujui, termasuk didalamnya tugas-tugas khusus atau proyek yang diminta langsung oleh manajemen dan komite Audit;
- Menilai efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan dan hukum terkait;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan status penyelesaian atas tindak lanjut yang direkomendasikan;
- Audit dan menginformasikan secara berkesinambungan kepada Komite Audit mengenai tren dan praktek terbaik yang biasa dilakukan dalam internal audit;
- Membantu dalam penyelidikan kasus yang signifikan yang diduga merupakan kegiatan penipuan dalam organisasi dan memberitahukan hasil dari penyelidikan tersebut kepada Komite Audit dan Manajemen;
- Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan eksternal auditor dan regulator, untuk tujuan menyediakan cakupan audit yang optimal untuk organisasi dengan biaya keseluruhan yang wajar.

Kriteria Internal Auditor

Internal Auditor harus memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan di bawah ini:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif

replacement, and termination of the Head of the Internal Audit Unit must be immediately reported to the Financial Services Authority.

Responsibilities of Internal Audit

As stipulated in the Charter, the responsibilities of Internal Audit are as follows:

- To develop adaptable annual audit plan using appropriate risk-based methodology, which covers any risk or control issues identified by the management, and submit the plan to the Audit Committee for further review and approval as well as periodical renewal;
- To perform the approved annual audit plan including any other task or project upon request by the management and Audit Committee;
- To evaluate the efficiency and effectiveness of the activities of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, etc.;
- To perform an audit on the Company's compliance with prevailing rules and regulations;
- To monitor, analyze and report follow-up actions based on recommendations made;
- Working with the Audit Committee and keeping them informed of emerging trends and best practices in the area of internal auditing;
- To provide assistance in investigations when fraudulent activities are suspected to have occurred within the Company and submitting the investigation results to the management and the Audit Committee;
- To consider and determine the scope of audit work to be performed by the external auditors and regulators in order to give optimal auditing coverage at a reasonable cost.

Internal Auditor Criteria

The Internal Auditor must possess the required qualifications, as follows:

- To have integrity and performing their duties professionally, independently, honestly, and objectively;
- To have knowledge of and expertise in technical audit activities and other disciplines relevant to their job area.
- To have the capacity to effectively interact and communicate, both orally and in writing;

- Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal
- Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan
- Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- Bersikap objektif dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan penilaian yang obyektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- To comply with professional standards issued by the association of Internal Audit;
- To maintain the confidentiality of information and/or corporate data related to the implementation of Internal Audit's duties and responsibilities, except if required to be disclosed by the laws and regulations or court decision;
- To understand good corporate governance principles and risk management;
- To be objective in implementing duties and producing an objective evaluation based on the actual conditions.

Pofil Ketua Audit Internal

Head of Internal Audit Unit Profile

Yudi Adrial

Ketua Audit Internal

Yudi Adrial meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia. Yudi memiliki pengalaman 14 tahun di Konsultan Manajemen dan Lembaga Keuangan. Pengalaman auditnya meliputi pengalaman 6 tahun sebagai seorang konsultan di Ernst & Young, dan sebagai Kepala Unit Kepatuhan di PT. NISP Sekuritas selama 2 tahun. Beliau juga memegang sertifikat CIA yang dikeluarkan oleh Institut of Internal Audit.

Yudi Adrial

Head of Internal Audit Unit

Yudi Adrial received his Bachelor's degree from the University of Indonesia. Yudi has garnered 14 years of experience in Management and Financial Institution Consulting. His audit experience includes working as a consultant in Ernst & Young for 6 years and as Head of the Compliance Unit at PT. NISP Sekuritas for 2 years. He also holds a CIA certificate issued by the Institute of Internal Auditors.



Kualifikasi dan Sertifikasi Audit Internal

Auditor Internal IIF memiliki latar belakang serta kualifikasi profesi yang relevan terkait dengan tugas-tugasnya di Perusahaan. IIF juga senantiasa memfasilitasi Auditor Internalnya dalam meningkatkan kemampuan dengan mengikutsertakan pada beragam sertifikasi profesi di bidang audit internal.

Qualification and Certification of Internal Auditors

IIF's Internal Auditors come from a background and have professional qualifications relevant to their duties in the Company. IIF continuously facilitates its Internal Auditors to improve their capabilities by sending them to attend various certification programs in the internal audit field.

Berikut merupakan daftar Auditor Internal IIF dan informasi mengenai kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki.

The following table lists the Company's Internal Auditors including their qualifications and certifications.

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Sertifikasi dan Pelatihan yang Diikuti / Certification and Trainings Attended	Penyelenggara / Organizer	Keterangan / Remarks
1	Yudi Adrial	Kepala Internal Audit / Head of Internal Audit	<i>Certified Assessor</i>	Institute of Internal Auditor (IIA)	Sertifikasi
			<i>Certified Internal Auditor</i>	Institute of Internal Auditor	
			<i>Sarbanes Oxley Act 404 Training</i>	Ernst & Young	Training
			<i>Governing Risk Through Uncertain Time Seminar</i>	Center for Risk Management Studies (CRMS) Indonesia	
			<i>Forensic Auditing Training</i>	Zenith	
			<i>Know Your Customers & Anti Money Laundering Training</i>	IIF	
			<i>Leadership Greatness</i>	Dunamis	
			<i>Anticorruption Seminar for Private Sector</i>	Asian Development Bank (ADB)	
			<i>Results based Monitoring and Evaluation Workshop</i>	World Bank (WB)	
2	Rama Aditia	Staf Internal Audit / Internal Audit staff	<i>Insurance for Project Financing</i>	Jardine Lloyd Thompson	Training
			<i>Beginning Audit</i>	Lembaga Pengembangan Audit Internal	
			<i>Document Management and Workflow Collaboration</i>	PT OTI Transformasi Lintas International	
			<i>Procurement Management</i>	PT Surabaya Teknik Cipta Konsultan	
			<i>Know Your Customers & Anti Money Laundering Training</i>	IIF	
			<i>Effective Procurement Management</i>	Trimitra Consultant	
			<i>Insurance for Company Liabilities</i>	AON	
			<i>Cashflow and Treasury Management</i>	Johnson Indonesia	
			<i>Financial Modelling</i>	Essence Consultant	
			<i>Social and Environment</i>	ERM	
3	Rima Haryati	Staf Internal Audit / Internal Audit staff	<i>Tax and PSAK Update</i>	Grant Thornton Indonesia	Training
			<i>International Standard on Auditing (ISA)</i>	Grant Thornton Indonesia	
			<i>Insurance for Project Financing</i>	Jardine Lloyd Thompson	
			<i>Comply your Financial Statement with asset and liability Accounting (Based on PSAK 70)</i>	PT Equine Global	

Kegiatan Audit Internal 2017

Unit Internal Audit telah melakukan tugas pemeriksaan dan kegiatan konsultasi, sebagai berikut:

1. Melakukan audit atas area-area sebagai berikut:
 - Social and Environmental Management System
 - Credit Risk Management
 - Market Risk and Operational Risk Management
2. Secara berkala dan dalam batas tertentu melakukan tinjauan atas laporan keuangan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Melakukan review atas pembaharuan *standard operating procedures* (SOP) Perusahaan untuk memastikan kesesuaian alur proses dan aktivitas kerja dimasing-masing unit kerja, serta menilai kecukupan atas desain pengendalian internal perusahaan.
4. Melakukan pendampingan untuk pihak-pihak eksternal, yakni:
 - Pendampingan untuk Penugasan Audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja.

AUDITOR EKSTERNAL

Laporan Keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwanto, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young).

Mekanisme Penunjukan dan Jasa yang Diberikan

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2017 telah disetujui oleh RUPST tanggal 23 Maret 2017. Kantor Akuntan Publik ini dipilih oleh Dewan Komisaris, sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik, yang didasarkan pada rekomendasi dari Komite Audit.

Pada tahun 2017, Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young) telah memberikan jasa tidak hanya jasa audit atas laporan Keuangan, tetapi juga telah memberikan jasa review atas laporan Kinerja IIF.

Informasi Auditor Eksternal

Informasi mengenai akuntan publik dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- 2014 : Deloitte - Osman Bing Satrio & Eny
- 2015 : Ernst & Young - Purwanto, Sungkoro & Surja
- 2016 : Ernst & Young - Purwanto, Sungkoro & Surja
- 2017 : Ernst & Young - Purwanto, Sungkoro & Surja

Internal Audit Activities in 2017

The Internal Audit Unit has carried out audit and consulting activities as follows:

1. To perform audit on the following areas:
 - Social and Environmental Management System
 - Credit Risk Management
 - Market Risk and Operational Risk Management
2. To review financial statements to ensure compliance with the applicable regulations on a periodic basis and within a certain period of time.
3. To review the renewal of standard operating procedures (SOP) of the Company to ensure the conformity of process flow and work activity at each working unit as well as evaluating the adequacy of the company's internal control design.
4. To provide assistance to external parties, namely:
 - To assist for Assignment of Financial Statements Auditing conducted by Public Accountant Purwanto, Sungkoro & Surja.

EXTERNAL AUDITOR

The 2017 Financial Statements of PT Indonesia Infrastructure Finance were audited by the Public Accounting Firm of Purwanto, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young).

Appointment Mechanism and Services Rendered

The appointment of the Public Accounting Firm was approved by the Annual GMS on 23 March 2017. This Public Accountant is selected by the Board of Commissioners, as mandated by the Shareholders to appoint the Public Accountant, based on the recommendation from the Audit Committee.

In 2017, the Public Accounting Firm of Purwanto, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young) has provided not only financial statements auditing services but also the Company's performance report review services.

Information on External Auditor

The following table describes information on the Company's public accountant in the last 4 (four) years.

- 2014 : Deloitte - Osman Bing Satrio & Eny
- 2015 : Ernst & Young - Purwanto, Sungkoro & Surja
- 2016 : Ernst & Young - Purwanto, Sungkoro & Surja
- 2017 : Ernst & Young - Purwanto, Sungkoro & Surja

KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN

IIF telah merumuskan Kode Etik Perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip tentang nilai-nilai kemanusiaan, seperti sikap saling menghargai, kejujuran, dan integritas. Kode Etik ini mendorong pelaksanaan aktivitas usaha secara legal dan beretika, perlindungan dan pengawalan terhadap aset dan reputasi IIF, serta sikap hormat terhadap sesama dan masyarakat luas pada umumnya. Kode Etik ini merupakan rangkuman dari nilai-nilai, visi, norma, bahasa dan sistem kerja IIF untuk diterapkan oleh segenap karyawan dan para pemangku kepentingan dalam berinteraksi satu sama lain.

Budaya kepatuhan dan integritas mengalir dari atas, yang secara implisit mengatakan bahwa manajemen harus menekankan pentingnya perilaku beretika dan kepatuhan serta mendukung semua itu melalui kepemimpinan dan pelatihan. IIF wajib melakukan usahanya secara legal dan beretika di semua aspek operasinya.

Isi Kode Etik

Ruang lingkup kode etik yang dimiliki IIF mengatur berbagai hal terkait tata cara kerja, pola hubungan di internal maupun eksternal serta komitmen perusahaan terkait masalah lingkungan dan kesehatan.

- **Melakukan Usaha dengan Taat Hukum dan Beretika**
Kebijakan Etika Bisnis IIF memberikan panduan untuk melakukan kegiatan usaha sehari-hari. Pernyataan yang paling penting menuntut bahwa semua kegiatan usaha harus dipandu oleh nilai-nilai mendasar IIF, yakni integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, yang mencakup integritas, kewajaran, hormat, dan memberi perhatian pada orang lain, dan pertanggungjawaban pribadi. Semua ini merupakan panduan untuk membuat keputusan beretika sehari-hari, dan untuk mematuhi etika personal, seperti penerimaan hadiah, pengungkapan kekayaan pribadi, sikap politik dan donasi, serta kepatuhan terhadap panduan Anti-Korupsi dan Pencegahan Penipuan.
- **Kebijakan Informasi, Pengendalian Internal dan Pelaporan Keuangan**
Kebijakan untuk perlindungan dan pengawalan aset dan reputasi IIF berlandaskan pada kebijakan konflik kepentingan, kebijakan sumber daya elektronik,

CODE OF CONDUCT AND CORPORATE CULTURE

IIF has formulated a Code of Conduct as a form of compliance with laws and regulations and in adherence to human principles and values that comprise mutual respect, honesty, and integrity. This code of conduct encourages ethical and legal business operations, protection of assets and reputation, as well as respects for others, co-workers, clients, and the community at large. The code is a summary of IIF's values, vision, norms, language and work systems that form IIF's corporate culture to be upheld by all employees and stakeholders whenever they interact with one another.

Compliance and integrity culture starts from top management and reaches down to lower layers, implicitly reinforcing the management's emphasis on the importance of ethical conduct and compliance. The Company also supports this implementation through leadership by example and training. IIF is obliged to conduct its business activities legally and ethically in all aspects of its operations.

Contents of Code of Conduct

The Company's Code of Conduct governs several matters related to work procedure, internal and external relationships and commitment of the Company pertaining to environmental and health issues.

- **Doing Business Legally and Ethically**
IIF's Business Conduct Policies provide guidance for carrying out day-to-day business activities. IIF's fundamental values guide routine business operations with uncompromising integrity and honesty, which include fairness, concern and respect for others as well as personal accountability. These guidelines serve all personnel during daily business decisions and govern other aspects such as gratification issue, disclosure of personal wealth, political affiliation and donations, as well as anti-corruption and fraud prevention guidelines.
- **Information, Internal Control and Financial Reporting Policies**
The policy for protection and safeguard of IIF's assets and reputation is based on its policies regarding conflict of interest, electronic resources, data protection and security,

perlindungan data dan kebijakan keamanan, perdagangan efek dan informasi inside trader dan pengendalian internal, pelaporan keuangan serta retensi dokumen dan auditing.

- **Benturan Kepentingan**

Segegap karyawan IIF dan orang yang bertindak atas nama IIF harus bebas dari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh buruk pada keputusan mereka, obyektivitas, atau kesetiaan mereka pada Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dan pelaksanaan tugas dari IIF.

- **Kebijakan Sumber Daya Elektronik**

Merupakan kebijakan IIF bahwa semua sumber daya elektronik digunakan hanya dengan cara yang tidak melanggar hukum dalam Kebijakan Perilaku Usaha IIF. Semua karyawan IIF harus melindungi sumber daya elektronik IIF dari penggunaan tanpa izin dan dari ancaman keamanan.

- **Keamanan Informasi dan Kebijakan Kerahasiaan**

Segegap karyawan IIF dan orang yang bertindak atas nama IIF bertanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia dari IIF terhadap pengungkapan tanpa izin, entah pengungkapan tersebut bersifat internal atau eksternal, sengaja atau kebetulan. IIF juga menghormati kerahasiaan dan sensitivitas informasi yang bukan milik IIF. Merupakan kebijakan IIF untuk hanya menggunakan sarana yang legal dan beretika untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar dengan tujuan memahami secara lebih baik tentang pasar, pelanggan dan pesaing. IIF tidak mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa pemberian ijin secara eksplisit oleh pihak tersebut.

- **Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen dan Kebijakan Audit**

Manajemen IIF bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan keuangan tahunan dan triwulanan yang lengkap dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia yang diterima luas dan IFRS dan demi mempertahankan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dan pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar, hukum, dan regulasi terkait akuntansi.

securities trading and insider information, and internal controls, financial reporting, as well as document retention and auditing.

- **Conflict of Interest**

All of the Company's employees as well as parties acting on behalf of IIF must be free from conflicts of interest that may influence unfavorable judgment, objectivity, or loyalty to IIF when they carry out business activities and perform their tasks.

- **Electronic Resource Policy**

Operation of Electronic Resources must adhere to IIF's Business Conduct Policies. All personnel must protect the Company's electronic resources against unauthorized use and security threats.

- **Information Security and Confidentiality Policy**

All IIF's employees and other parties acting on behalf of IIF are responsible for protecting IIF's confidential information against unauthorized disclosure, whether internal or external, deliberate or accidental. IIF also respects the confidentiality and sensitivity of information to which IIF has no rights to use. IIF has a policy to collect and use business and market information legally and ethically in order to better understand markets, customers and competitors. Moreover, IIF shall refrain from collecting or using another party's confidential information without permission.

- **Internal Controls, Financial Reporting, Document Retention and Auditing Policy**

IIF's management is responsible for the preparation of complete and accurate annual and quarterly financial statements in accordance with the generally accepted accounting principles in Indonesia and IFRS, and for maintaining appropriate accounting and financial reporting principles and policies as well as internal controls designed to ensure compliance with the relevant accounting standards, laws and regulations.

IIF mematuhi kebijakan dari semua pihak yang bertanggung jawab untuk ketepatan, kelengkapan dan ketepatan waktu terkait informasi keuangan yang aktual dan bersifat prediksi dan atas kepatuhan terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pengendalian, dan prosedur pengungkapan, retensi dokumen dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui kegiatan auditor internal dan auditor independen, dan melalui mekanisme pemantauan internal.

Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan *advisory* dan yang melakukan transaksi pendanaan.

- **Menghormati Individu dan Masyarakat**

Sikap hormat kita kepada individu dan masyarakat merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Delapan Prinsip, yang membedakan IIF dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia. IIF juga berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan talenta terbaik dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memberikan *reward* yang layak kepada para karyawan dan perwakilannya. Ini semua diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan berikut:

- a. **Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan**

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, dan semua karyawan bertanggung jawab mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku terkait Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan dan menaatinya. Manajemen IIF bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.

- b. **Kebijakan Mengenai Pelecehan**

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas dan pelecehan berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal usul negara, agama, seks, orientasi seksual atau identitas gender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan pelecehan dan perilaku tak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.

IIF adheres to the policy of all concerned parties responsible for the accuracy, thoroughness and timeliness of the Company's actual and forecast financial information, and for compliance with internal controls over financial reporting, disclosure controls and procedures, document retention and auditing policies. IIF ensures compliance with these policies through the role of the independent internal and external auditors and through internal monitoring mechanisms.

Information security shall also include protection of the proprietary information received from various divisions. There is also a possibility of conflict of interest between two divisions that have different tasks: for instance, when providing advisory services to as well as funding a project.

- **Respect for Individuals and Communities**

Our respect for others and the environment is a part of the Eight Principles the Company has adopted, which set IIF apart from other financial institutions in Indonesia. IIF also aims to attract and retain its best talent through a strong commitment to creating a safe and healthy working environment and to generously providing rewards for its employees and representatives. This is manifested in the following policies:

- a. **Environment, Health and Safety**

IIF is committed to creating a healthy and safe work environment for all employees; thus, employees are responsible for attaining knowledge regarding applicable laws and regulations related to the Environmental, Health and Safety issues and adhere to them. The management addresses this issue by sending employees to the relevant laws and policies trainings.

- b. **Harassment Policy**

IIF is committed to creating a work environment that is free from any form of inappropriate behaviors and harassment based on age, disability, marital status, race, color, national/regional origins, religion, sex, sexual orientation, or gender identity. Any form of harassment and inappropriate behavior will not be tolerated.

- **Kebijakan Privasi**

IIF memberikan nilai signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha, dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka dengan IIF. Oleh karena itu, IIF mematuhi kebijakan tentang kepatuhan sepenuhnya pada semua hukum terkait privasi dan perlindungan data.

- **Prilaku dengan Mitra Usaha dan Pihak Ketiga**

IIF mematuhi semua hukum terkait anti-suap yang berlaku dan secara akurat membukukan semua transaksi dalam pembukuannya. Penyuaapan menunjuk pada tindakan menawarkan, memberi ijin atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga, pemberian kontrak, pemberian ijin operasi, persetujuan atas penggunaan/registrasi produk, vonis pengadilan yang menguntungkan, atau penyelesaian sengketa perpajakan.

IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan kepatuhan yang ketat pada hukum dan regulasi nasional, negara, provinsi, dan lokal yang berlaku dan pada semua persyaratan kontrak.

Pengungkapan Pemberlakuan dan Penyebarluasan Kode Etik

Semua karyawan dan Direksi serta Dewan Komisaris, setelah bergabung dengan IIF harus membaca Kode Etik IIF dan menandatangani pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami isinya. Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik atau yang terbukti bersalah telah melakukan tindakan kriminal akan menerima tindakan disiplin internal, sampai pada dan mencakup tindakan pemberhentian sebagai karyawan. Selain kebijakan IIF dan Kode Etik, semua pihak yang berkepentingan di IIF harus mematuhi baik regulasi maupun semangat hukum di Indonesia atau hukum di Negara lain tempat mereka beroperasi.

- **Privacy Policy**

IIF adheres to the policy of full compliance with all applicable privacy and data protection laws. IIF assigns significant importance to earning and retaining the trust of stakeholders, employees, clients, business partners and other parties who share personal information with IIF.

- **Conduct with Business Partners and Third Parties**

IIF complies with all applicable anti-gratification laws and accurately and diligently records all transactions. Bribery/ Gratification refers to the action of offering, authorizing, or providing items of value to Government Officers, directly or indirectly, with an intention of obtaining and retaining business or gaining improper advantages, i.e. price increase approvals, awarding of contracts, grant of operating permits, product use/registration approvals, favorable court decisions, and tax dispute settlements.

IIF abides by all government contracts it has entered into and keeps its subcontracts with business partners compliant with all applicable national, state, provincial, and district laws and regulations and all contract requirements.

Disclosure, Enforcement, Dissemination of Code of Conduct

All employees of IIF, including the Board of Directors and Board of Commissioners, have to understand the code of conduct and sign a statement declaring that they have read and understood the contents of the code of conduct. Any employees violating the Code of Conduct or having been found guilty of a criminal act shall receive internal disciplinary action including termination of work contract. Other than IIF's policies and Code of Conduct, all personnel must also adhere to the prevailing laws and regulations in Indonesia, or other countries in which they operate.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Agar kode etik Perusahaan dijalankan dan ditegakkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap karyawan, IIF memberlakukan sanksi atas tindakan pelanggaran kode etik. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada karyawan yang melanggar berupa peringatan lisan dan tertulis sampai dengan penghentian hubungan kerja.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dalam menjalankan bisnisnya, IIF senantiasa menegakkan prinsip anti korupsi yang harus di jalankan oleh setiap karyawannya. IIF telah menerapkan *Anti-Corruptions Guidelines* dari World Bank. IIF juga memiliki kebijakan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan praktik korupsi serta ketentuan mengenai sanksi yang diberikan jika terdapat karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut. Aturan pencegahan dan informasi mengenai sanksi yang diberikan tertuang dalam beberapa pasal dalam kode etik Perusahaan yaitu:

- Pasal 30 tentang Kode Etik dan Pedoman Pencegahan Kecurangan dan Anti Korupsi
Setiap Karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan dan Pedoman Pencegahan Kecurangan dan Anti Korupsi yang merupakan bagian dari Peraturan Perusahaan ini sebagaimana terlampir.
- Pasal 31 tentang Pengawasan
 1. Manajemen atau Atasan Langsung berhak mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada Karyawan yang melanggar Peraturan Perusahaan ini.
 2. Setiap Atasan Langsung bertanggung jawab dan wajib memberi teladan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perusahaan ini, serta memastikan terselenggaranya tata tertib dan disiplin Karyawan yang berada di bawah tanggung jawab pengawasannya.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Guna menjamin terciptanya kegiatan operasional yang bertanggung jawab serta upaya bersama dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan internal Perusahaan, IIF dengan sengaja membentuk mekanisme pengawasan yang melibatkan seluruh karyawan melalui whistleblowing system. Mekanisme ini ditujukan guna melakukan investigasi serta mendekteksi sedini mungkin

Enforcement and Sanction on the Violation of Code of Conduct

IIF established a punishment mechanism for its employees having been proven to violate the Company's Code of Conduct in order to ensure that it is implemented and enforced thoroughly. The sanctions are verbal and written warnings until the termination of the employment.

ANTI-CORRUPTION GUIDELINES

In conducting its business, IIF always uphold the anti-corruption principles that has been executed by all of the employees. IIF has implemented the Anti-Corruptions Guidelines of the World Bank. IIF has also put in place a policy related to the prevention of corrupt practices as well as provisions on sanctions to be imposed for the violating employees. Provisions on the graft prevention and information on the sanctions given are set forth in numeruous articles in the Company's code of conduct, namely:

- Article 30 on Code of Conduct and Guidelines on Fraud Prevention and Anti Corruption
Every employee is obliged to comply with and perform all provisions stipulated in the Company's Code of Conduct and Guidelines on Fraud Prevential and Anti Corruption which are an inseparable part of this Company Regulation as attached.
- Article 31 on Supervision
 1. Management and Immediate Supervisor is entitled to take actions and give sanctions to the Employees who violate this Company Regulation.
 2. Every Immediate Supervisor is obliged to and responsible for being an exemplary leader that complies with this Company Regulation and ensuring that the Employees under his/her supervision obey the regulation and act with discipline.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

In order to ensure responsible operational activities and as part of our collective efforts to prevent any kind of violations in the Company's internal environment, IIF has a strong focus on establishing a supervising mechanism that engages all employees through the whistleblowing system. This mechanism aims to investigate and provide early detection of violations that occurred beyond the ongoing supervisory

pelanggaran-pelanggaran yang sedang berlangsung di luar proses pengawasan yang dilakukan oleh unit khusus di Perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk menggerakkan aktivitas pengawasan serta menciptakan proteksi berlapis dalam menunjang kinerja organ-organ yang berwenang.

Aturan mengenai *whistleblowing system* telah disetujui oleh manajemen yang diwakili oleh Presiden Direktur dan disahkan oleh pihak yang mewakili pemerintah setempat dan tertuang dalam buku pedoman operasional Perusahaan.

Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Pengaduan

Dalam mekanisme ini, IIF berupaya sedini mungkin melakukan pendeteksian pelanggaran yang berasal dari laporan karyawan baik rekan kerja, atasan maupun bawahan pihak pelapor. Pelapor dapat menyampaikan pengaduannya kepada gugus tugas whistleblowing yang berasal dari Direksi, komite maupun Departemen SDM agar prosesnya segera ditindaklanjuti. Dari laporan yang masuk, Unit yang diberi tugas untuk menampung pengaduan melakukan pengumpulan buktibukti serta melakukan koordinasi secara efektif dengan organorgan pengawas terkait.

Setelah ditindaklanjuti dan dilakukan koordinasi secara intensif dengan organ-organ yang berwenang, investigasi atas pengaduan yang masuk segera dilakukan proses peyidikan dengan melihat sejauh mana pelanggaran dilakukan serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ada. Jika pelanggaran yang dilaporkan masuk dalam pelanggaran kode etik namun tidak terkait masalah pidana maupun perdata maka penyelesaiannya dilakukan secara internal dengan memberikan sanksi-sanksi yang berlaku. Jika pelanggaran yang dilaporkan terkait masalah pidana maupun perdata maka penyelesaian dilakukan oleh pihak yang berwajib dan skala sanksi yang diberikan oleh internal Perusahaan menyesuaikan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Perlindungan bagi Pelapor

IIF memiliki kebijakan untuk merahasiakan identitas pelapor sampai proses laporan ditindaklanjuti dan diselesaikan. Pembukaan identitas pelapor dilakukan jika laporan tersebut masuk ke dalam ranah hukum dan proses penyelidikannya dilakukan oleh instansi hukum yang berwenang. Meski demikian, perusahaan akan mengajukan kepada instansi terkait untuk memberi perlindungan bagi pelapor.

activities conducted by the special unit in the Company. This aims to make supervisory activities more dynamic and create a multi-layered protection defense to support the authorized organs' performance.

The regulation on the whistleblowing system has been approved by the management that is represented by the President Director and has been ratified by the authorized representative of the local government and stated in the Company's operational manual.

How to Submit Reports and Complaint Handling

Through this mechanism, IIF strives for early detection of violations that are reported by the employees, either by the working partner, immediate supervisor, or the subordinate of the reported party. The whistleblower may submit his/her complaint to the whistleblowing unit officer coming from the Board of Directors, committees or HR Department, so that the complaint can be immediately followed up. Based on the incoming reports, the Unit responsible for collecting the complaints must gather the evidence relating to it and effectively coordinate with related supervisory organs.

After the follow-up procedure and intensive coordination with the supervisory organs, the Company will investigate the incoming reports by observing how far the violation has occurred while verifying the presented evidence. In case the reported complaint is categorized as a violation of the code of conduct and not related to either civil or criminal actions, then the violation will be settled internally by giving the applicable sanctions. In the event that the reported complaint relates to either civil or criminal action, then the violation will be settled by the competent authorities, and the scale of sanctions imposed by the Company's internal management will conform to the penalty given by the authorities.

Protection to the Whistleblower

IIF has established a policy to protect the identity of the whistleblower up until the reporting process is followed up and completed. The disclosure of the whistleblower's identity is made if the report is categorized as an unlawful action, thus the investigation will be performed by the competent authorities. Nevertheless, the company will propose protection for the whistleblower to the related institutions.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Seperti yang telah disebutkan, pihak yang diberi kewenangan dalam melakukan pengelolaan pengaduan berasal dari Direksi, Komite-Komite, maupun Departemen SDM. Tim tersebut bersifat gugus tugas dan berlaku sementara sampai dengan penanganan diselesaikan.

Laporan Pengaduan dan Tindak Lanjut Sepanjang 2017

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, tidak terdapat pengaduan serta tindak lanjut atas pengaduan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif membantu Perusahaan dalam menjaga asset, menjamin tersedianya informasi dan laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

PT IIF telah membangun proses, struktur dan sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian yang memadai bahwa:

- (i) Operasional Perusahaan telah dilakukan dengan efektif dan efisien;
- (ii) Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi; dan
- (iii) Sistem pelaporan keuangan dapat diandalkan.

Sistem pengendalian internal Perusahaan dibangun dengan mengaplikasikan kerangka pengendalian internal dengan elemen-elemen utamanya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan.

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan pemutakhiran kebijakan pengendalian internal di lingkungan Perusahaan, dan bersama dengan unit Internal Audit memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, secara keseluruhan sistem pengendalian internal Perusahaan telah berjalan dengan efektif dan memadai.

Parties Managing the Complaints

As mentioned earlier, the parties granted the authority to manage complaints are members of Board of Directors, Committees, or HR Department. This team is an internal unit and will handle the task temporarily until the problem is resolved.

Report on Complaints and Follow-Up throughout 2017

Within the last 2 (two) years, there were no complaints nor follow up for the complaints filed since the previous years.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The implementation of Internal Control System has effectively helped the Company maintain assets, ensure the availability of accurate information and reports, improve the Company's compliance with the applicable laws and regulations, and mitigate loss risk, deviation, and violation of prudence principles.

PT IIF has built the processes, structure, and internal control systems that provide the proper assurance that:

- (i) The Company's Operations have been conducted effectively and efficiently;
- (ii) The laws and regulations in force have been obeyed; and
- (iii) The Financial reporting system is reliable.

The Company's internal control system is built by applying the internal control framework along with its key elements, namely controlling environment, risk assessment, controlling activities, information and communications, and monitoring activities.

The Board of Directors is responsible for developing and updating the internal control policy in the Company's environment and together with the Internal Audit unit, the Board of Directors monitors and oversees the implementation of the policies. Based on the monitoring and supervision results, the overall internal control system has been performed effectively and appropriately.

PERKARA PENTING 2017

Sepanjang 2017 Perusahaan tidak terlibat dalam perkara penting.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang 2017, tidak ada administratif yang diterima IIF antara lain.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN

Hingga 31 Desember 2017, IIF belum melakukan pencatatan saham di bursa dan belum memiliki kebijakan mengenai alokasi saham yang diperuntukan bagi karyawan maupun manajemen IIF.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

IIF memiliki 4 (empat) aspek utama yang menjadi pedoman Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Keempat pedoman tersebut meliputi:

1. Prinsip pengadaan barang dan jasa
2. *High Level Process*
3. Metodologi
4. Sistem

Sebagai acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik staf perusahaan secara umum maupun pada bagian pengadaan senantiasa mengikuti prinsip-prinsip yang meliputi:

Transparansi

Prinsip fundamental yang perlu dijunjung tinggi adalah prinsip transparansi dalam proses pengadaan. Prinsip ini meliputi penerapan proses pengadaan yang terperinci dan tersedianya sistem yang memastikan bahwa Perusahaan mampu menyediakan beberapa pilihan operator/supplier yang kompeten dengan harga yang bersaing dalam menawarkan jasa.

Efektivitas

Proses pengadaan yang efektif harus dapat memberikan jaminan atas kualitas barang/ jasa yang dibutuhkan serta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.

LEGAL CASES IN 2017

During the 2017, IIF was not involved in any legal cases.

ADMINISTRATIVE SANCTION

No administrative sanctions were received by the Company during 2017.

EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

As of 31 December 2017, IIF has neither listed its shares on a stock exchange nor established a policy on share allocation for employees or management.

SYSTEM AND PROCEDURE OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

IIF has 4 (four) main aspects that become the Company's guideline in implementing goods and services procurement activities. These four guidelines include:

1. Goods and service procurement principles.
2. High level of process
3. Methodology
4. Systems

Both the Company's employees in general and the procurement staff continue to comply with the following principles, covering:

Transparency

The fundamental principle that must be strongly upheld is the transparency principle in the procurement process. This principle covers the implementation of a detailed procurement procedure and the availability of systems that ensure that the Company is able to provide lists of competent operators/suppliers at a competitive price.

Effectiveness

Effective procurement process must be able to guarantee the quality of goods/services needed and the requirements needed.

Efisiensi

Efisiensi waktu dan biaya mencakup biaya produk dan jasa, pemasangan, pengiriman, biaya perawatan purna jual dan lain sebagainya.

Value for Money

Barang atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan operasional, aspek kualitas dan taksiran proyek sepanjang hal tersebut sepadan dengan harga dan kualitas.

Hal yang harus diperhatikan terkait kegiatan pengadaan di Perusahaan adalah memastikan setiap pengajuan disetujui dan diketahui oleh pihak yang berwenang serta anggarannya telah disetujui oleh pihak pengguna anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa meliputi:

1. Kepala Operasional dan TI melakukan penelaahan pengajuan pembelian dari pihak user yang meliputi tipe pengadaan, metode pemilihan dan penyeleksian oleh user, dan memastikan pengajuan telah disetujui kepala departemen dari user atau pihak yang berada pada level-C dari departemen yang bersangkutan.
2. Staf pengadaan akan memulai proses pengadaan berdasarkan metode yang disepakati.
3. Setelah merampungkan proses pemilihan vendor, staf pengadaan akan memilih tingkat yang paling tinggi dalam harga yang disetujui (delegasi kewenangan).
4. Petugas pengadaan akan mengumpulkan surat persetujuan dari DoA dan pemilik anggaran.
5. Setelah mendapatkan persetujuan, petugas pengadaan akan melakukan finalisasi untuk mengeluarkan surat penunjukan atau penolakan kepada vendor.
6. Kepala Operasional dan IT akan menandatangani dan mengirimkan surat penunjukan maupun penolakan dan permintaan kerja.
7. Petugas pengadaan akan melakukan finalisasi surat yang dibutuhkan untuk diberikan kepada vendor.

Proses pengadaan yang dilakukan oleh di Perusahaan menggunakan metodologi:

1. Pengadaan langsung
2. Usulan harga
3. Tender terbatas
4. Kontrak langsung

Efficiency

Time and cost efficiency includes fees of products and services, installation, delivery, post-sales maintenance, and so on.

Value for Money

Goods and services required by the Company must suit the operational needs, quality aspect, and project estimate so long as those matters are worth the price and quality.

One thing the Company should pay attention to regarding the procurement process is the need to ensure that every proposal is approved and known by the authorized party and that the budget is approved by the budget user. The goods and service procurement process includes:

1. Head of Operations and IT reviews the procurement proposal from users, which includes procurement type, methods of selection of users, and ensures the proposal has been approved by heads of department of the user or parties under the level-C of the concerned department.
2. Procurement staff will commence the procurement process based on the agreed method.
3. After completing the vendor selection process, the procurement staff will choose the select vendor within the approved price range that is deemed to have the highest quality (authority delegation).
4. The procurement staff will collect approval letter from DoA and budget owner.
5. Upon approval, the procurement staff will finalize the process to issue appointment or rejection letter to vendors.
6. Head of Operations and IT will sign and send appointment or rejection letter and purchase order.
7. The procurement staff will finalize the process to issue the required letter to be given to the vendor.

Procurement process conducted in the Company applies the following methodologies:

1. Direct procurement
2. Price proposal
3. Limited tender
4. Direct contracting

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

IIF memiliki beragam media informasi yang dapat diakses secara luas bagi masyarakat yaitu:

1. Profil Perusahaan dan Laporan Tahunan

Profil Perusahaan dan Laporan Tahunan IIF memuat beragam informasi tidak hanya terkait keuangan Perusahaan namun juga informasi-informasi terkait lainnya seperti profil perusahaan yang meliputi kilas perusahaan, informasi produk dan jasa, event perusahaan, komposisi pemegang saham dan manajemen perusahaan. Sedangkan dalam laporan tahunan tersedia informasi tidak hanya profil IIF melainkan laporan terkait implementasi GCG IIF dan laporan kegiatan tanggung jawab sosial.

2. Sponsor

- Platinum Sponsor for the 3rd Annual Indonesia Infrastructure Conference di Jakarta pada 17-18 Mei 2017
- Sponsor for the Mapala UI Marine Exploration Parigi Moutong Archipelago "Explore to conserve" yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2017 – 4 November 2017
- Sponsor charity golf yang diselenggarakan oleh Yayasan IKAFF UNAND Entrepreneur Golf Tournament
- Sponsorship for buku Indonesia Industry Updates 2017

3. Website

Informasi Perusahaan juga dapat diperoleh secara online dan mobile yaitu dengan mengakses alamat website www.iif.co.id.

ACCESS TO COMPANY INFORMATION

IIF has several information media that are accessible to the public, namely:

1. Company Profile and Annual Report

IIF's Profile and Annual Report consists of various information related to not only the Company's financial condition but also its profile covering highlights, information on products and services, events, shareholding composition and management composition. Furthermore, the annual report provides not only IIF's profile but also reports on GCG implementation and CSR activities carried out by the Company.

2. Sponsorship

- Platinum Sponsor for the 3rd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference in Jakarta on 17-18 May 2017
- Sponsor for the Mapala UI Marine Exploration Parigi Moutong Archipelago "Explore to conserve" held on 21 October 2017 – 4 November 2017.
- Sponsor for charity golf held by IKAFF Foundation of UNAND Entrepreneur Golf Tournament
- Sponsorship Indonesia Industry Updates 2017 book

3. Website

Information on the Company can also be found online and through smartphone by accessing IIF's official website at www.iif.co.id.

07

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

- 168 Pemenuhan Standar Keberlanjutan bagi Proyek Infrastruktur
Fulfillment of Sustainability Standards for Infrastructure Projects
- 169 Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup
Social Responsibility to the Environment
- 172 Tanggung Jawab Sosial Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Social Responsibility in Manpower and Occupational Health and Safety
- 175 Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat
Social Responsibility in Social Community Development
- 175 Tanggung Jawab Sosial Terhadap Konsumen
Social Responsibility to Consumers
- 176 Explore to Conserve The Biodiversity at Parigi Moutong – Sulawesi Tengah, Teluk Tomini



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Pembangunan proyek infrastruktur harus tetap seimbang dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Tujuan dari terpenuhinya aspek keberlanjutan pada proyek infrastruktur adalah untuk tetap menjaga fungsi infrastruktur sebagai solusi agar tidak menimbulkan dampak lainnya di kemudian hari.

The development of infrastructure projects must remain balanced in consideration with the environmental and social aspects. The objective of fulfilling the sustainability aspect of the infrastructure project is to maintain the infrastructure function as a solution so that it causes no other impacts in the future.

Di era modern saat ini, orientasi perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial sebagai tolak ukur keberhasilan bisnisnya. Kini, banyak perusahaan juga melihat sisi sosial sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan perusahaan. Perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan seluruh pemangku kebijakan.

Sebagai sarana publik yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur pun harus mengedepankan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan secara baik. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tetap pada koridornya dalam memberikan solusi dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

PEMENUHAN STANDAR KEBERLANJUTAN BAGI PROYEK INFRASTRUKTUR

Penyediaan infrastruktur pada dasarnya memiliki arti penting dalam aspek sosial kemasyarakatan di suatu negara. Ketersediaan infrastruktur, selain berperan dalam mendorong perekonomian masyarakat sehingga berdaya saing, juga berperan dalam membangun kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, pembangunan infrastruktur juga harus berjalan secara merata dan menjangkau ke seluruh lini sektor, baik dalam bentuk fisik maupun teknis.

Dalam proses penyediaannya, pembangunan infrastruktur sudah harus mulai memenuhi aspek keberlanjutan sejak pertama kali proyeknya dicanangkan. Pembangunan proyek infrastruktur harus tetap seimbang dengan tetap

In this modern era, corporate orientation focuses not merely on achieving financial benefits as the benchmark for business success. Today, many companies also see the social aspect as one of the factors that can support their success. Companies are competing to give positive contribution to improving the quality of life of the community and all stakeholders.

As a public facility which engages in infrastructure development, the parties involved in the process of infrastructure development need to prioritize the social and environmental principles that must be taken into account properly. This approach is important to ensure that the development agenda remains on track and functions as a solution to current challenges, instead of triggering another problem in the future.

FULFILLMENT OF SUSTAINABILITY STANDARDS FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS

In essence, the provision of infrastructure provision has a significant meaning in regard to the social aspect of a country. Aside from its role to encourage the competitiveness of public economy, the availability of infrastructure serves to build better life quality of a community. To that end, infrastructure development must also run equally and is targeted to all lines of sector, both in physical and technical forms.

In the process of supply, infrastructure development needs to meet the aspect of sustainability ever since the project was first announced. The development of infrastructure projects must remain balanced in consideration with the

memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat. Tujuan dari terpenuhinya aspek keberlanjutan pada proyek infrastruktur adalah untuk tetap menjaga fungsi infrastruktur sebagai solusi agar tidak menimbulkan dampak lainnya di kemudian hari.

IIF senantiasa tetap pada komitmennya sebagai salah satu lembaga pembiayaan infrastruktur di Indonesia yang memiliki serta mengedepankan peran signifikan dalam mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang bersandar pada terpenuhinya prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang diimplementasikan dalam setiap prosedur bisnisnya. Tidak hanya sampai di sana, terkait aktivitas bisnis yang dilakukan IIF juga berkomitmen dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memuat triple bottom line dimensi pembangunan berkelanjutan usaha yaitu *people*, *planet* dan *profit*.

Internalisasi komitmen IIF dalam penciptaan proyek infrastruktur yang berkelanjutan tidak dilakukan dalam program terpisah, melainkan terintegrasi dalam proses bisnis yang dilakukan melalui mekanisme pembiayaan sesuai peran IIF. Perusahaan memiliki mekanisme *Social & Environment* (S&E) yang dijadikan standar dalam merealisasikan suatu proses investasi infrastruktur maupun memberikan pendampingan pada proyek-proyek yang berada di luar pembiayaan IIF untuk memenuhi standar S&E yang ada. Selain itu, jika terdapat proyek yang memiliki spesifikasi S&E khusus dan ditangani pembiayaannya oleh IIF, maka IIF akan melibatkan pihak eksternal agar aspek S&E secara total dapat terpenuhi.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Dasar Kebijakan

Untuk menangani tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan hidup, Perusahaan membentuk Unit Sosial dan Lingkungan (S&E) yang berperan dalam melakukan penilaian kepatutan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan memenuhi 8 (delapan) Prinsip Sosial dan Lingkungan yang ada.

Delapan prinsip-prinsip tersebut mencakup Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS); Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja; Pencegahan Polusi, Pengurangan dan Perubahan Iklim; Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan/

environmental and social aspects. The objective of fulfilling the sustainability aspect of the infrastructure project is to maintain the infrastructure function as a solution so that it causes no other impacts in the future.

IIF continues to uphold its commitment as one of the infrastructure financing companies in the country that play and uphold a significant role to support infrastructure development that is based on the abovementioned social and environmental principles, which are consistently implemented in each business procedure. Furthermore, IIF is also committed to carrying out business activities in accordance with the sustainable development principles consisting of the 3 (three) major dimensions, namely people, planet and profit.

Internalization of IIF's commitment to creating sustainable infrastructure projects is not realized in separate programs but is integrated in business process conducted through financing mechanism that is in line with IIF's role. The Company has established a Social & Environment (S&E) mechanism that becomes the standard in realizing an infrastructure investment project as well as in developing projects outside of IIF's financing scheme in order to meet the existing S&E standards. Moreover, if there is a project requiring certain S&E specifications whose financing is managed by IIF, the Company shall involve external parties so that the overall S&E aspect can be met.

SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

Basis of Policy

To perform the social responsibility of the Company to the environment, IIF establishes a Social and Environmental Unit (S&E Unit) that functions to assess the feasibility of financing facility provision for infrastructure projects based on the 8 (eight) Social and Environmental Principles.

Those eight principles cover Social and Environmental Assessment and Management System (SEMS); Labor and Working Condition; Pollution Prevention and Abatement and Climate Change, Community Health, Safety and Security /



Keselamatan Bendungan; Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela; Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan; Masyarakat Adat; dan Properti dan Warisan Budaya.

Selain itu, Perusahaan juga memiliki kebijakan internal yang tercantum dalam Operation Manual Batch 2 bab 3 mengenai IIF: Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF).

- **Penggunaan Material dan Energi Yang Ramah Lingkungan dan Dapat Didaur Ulang**

Beberapa proyek yang kami kembangkan antara lain membangun Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan, yang mampu mengurangi tingkat polusi udara dan kerusakan alam akibat penggunaan energi fosil.

- **Sistem Pengolahan Limbah Perusahaan**

Perusahaan berusaha untuk menghindari munculnya limbah bahan berbahaya & beracun dan tidak berbahaya yang dihasilkan dari segala proyek. Jika limbah tidak dapat dihindari, Perusahaan akan menggunakan kembali limbah dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Jika limbah tidak dapat digunakan kembali, Perusahaan akan menghancurkan, bahkan membuangnya dengan cara yang sesuai dengan prosedur pengolahan limbah ramah lingkungan.

- **Mekanisme Pengaduan**

Perusahaan akan mengungkapkan rencana proyek kepada masyarakat terdampak. Selain itu, Perusahaan juga akan memberikan laporan berkala yang menggambarkan kemajuan dalam pelaksanaan rencana proyek, yang mencakup risiko atau dampak buruk yang mungkin akan dialami masyarakat. Perusahaan akan menerima segala pengaduan/keluhan masyarakat, lalu membuat laporan yang digunakan sebagai tanggapan atas keluhan tersebut. Laporan tersebut akan dibuat dalam format yang dapat diakses oleh masyarakat terdampak.

Dam Safety; Land Acquisition and Involuntary Resettlement, Biodiversity Conservation and Natural Resources Management; Indigenous People; and Cultural Property and Heritage.

In addition, the Company has established internal policies that are contained in the Operational Manual Batch 2, chapter 3 regarding IIF: Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF).

- **Use of Green and Recyclable Material and Energy**

Some of the projects developed by the Company are the construction of Renewable Energy Power Plant which is able to minimize air pollution level and natural damage due to fossil fuel use.

- **Company Waste Management System**

The Company strives to avoid either dangerous and toxic waste or non-dangerous waste generated from any project. If waste cannot be avoided, the Company shall reuse the waste in the safest way that takes into account human's health and environment. If waste cannot be reused, the Company shall destroy and eliminate it in a manner that is in accordance with the green waste disposal and management procedures.

- **Complaint Mechanism**

The Company shall disclose project plan to the community affected by the project. In addition, the Company shall deliver periodical report describing project plan which encompasses the potential risks or negative impact that could occur in the community. The Company shall accept all complaints from the public and prepare the report accordingly to be used to respond the complaints. Such report shall be prepared in a format accessible to the affected community.

Kegiatan CSR di Bidang Lingkungan dan Sosial Kemasyarakatan

Di luar pelaksanaan standar S&E dalam proses bisnis IIF, Perusahaan juga melakukan beberapa kegiatan tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

Sepanjang tahun 2017, IIF telah memberikan bantuan untuk kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan "Explore to Conserve" prakarsa Mapala UI untuk melindungi terumbu karang di Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah selama 21 Oktober - 4 November 2017.

Selain menerapkan kegiatan di bidang lingkungan, IIF melaksanakan berbagai kegiatan filantropi dalam bentuk donasi dan program untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 adalah:

1. Donasi untuk Panti Asuhan, Jl Kebalen Senopati, Jakarta. Sumbangan tersebut diberikan pada hari Jumat, 9 Juni 2017
2. Donasi untuk Sayap Ibu Bintaro, Jl Raya Graha Bintaro No. 33B Pondok Kacang Barat, Bintaro - Tangerang Selatan. Donasi tersebut diberikan pada hari Jumat, 16 Juni 2017.

Selain itu IIF berencana menyediakan dana untuk penelitian di bidang infrastruktur berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan dasar yang dikembangkan oleh mahasiswa dan/atau dosen di perguruan tinggi negeri. Program ini telah dimulai pada tahun 2017 dan akan selesai pada tahun 2018.

CSR Activities in Environmental and Social Community Field

Other than the implementation of S&E standards in IIF's business process, the Company carried out CSR activities to the environment and social community fields.

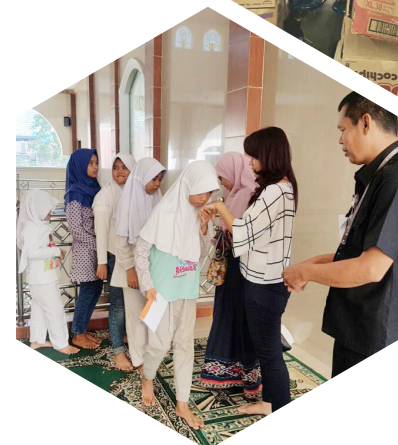
During the 2017, the Company provided donation for the following activities:

1. Sponsoring the Mapala UI "Explore to Conserve" to protect the coral reef in Teluk Tomini in Kabupaten Parigi Moutong, Central Sulawesi Tengah during the time span of 21 October – 4 November 2017.

In addition to implementing environmental fields, IIF carries out various philanthropic activities in the form of donations and programs for those in need. The activities in 2017 were:

1. Donation for the Orphanage, Jl Kebalen Senopati, Jakarta. The donation was given on Friday, 9 June 2017
2. Donation for Sayap Ibu Bintaro, Jl Raya Graha Bintaro No. 33B Pondok Kacang Barat, Bintaro – Tangerang Selatan. The donation was given on Friday, 16 June 2017.

In addition, IIF intends to provide funding for research in the field of infrastructure based on technology and basic science developed by college students and/or lecturers of those in state universities. This program has started in 2017 and will be concluded in 2018.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Dasar Kebijakan

Perusahaan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta melakukan pembinaan bagi karyawan sehingga mereka terdorong untuk bekerja secara maksimal. Perusahaan juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kemampuan para tenaga kerja.

Perusahaan senantiasa mematuhi seluruh aturan terkait ketenagakerjaan dengan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab Perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Untuk itu, Perusahaan melalui jajaran pengambil keputusan menetapkan kebijakan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, yang diatur dalam Peraturan Perusahaan No. 259/11.25.0/31.74/-1.837/2015, yang disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berlaku dari 2015 hingga 2017.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perusahaan tidak akan membuat keputusan perekrutan karyawan berdasarkan karakter pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan fungsinya dalam pekerjaan. Perusahaan akan membina hubungan pekerjaan berdasarkan prinsip kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil. Perusahaan juga tidak akan mendiskriminasi hal-hal terkait hubungan pekerjaan, termasuk proses perekrutan dan penandatanganan kontrak kerja, kompensasi (termasuk upah dan tunjangan), kondisi kerja dan kontrak kerja, akses terhadap pelatihan, promosi, pemberhentian kerja atau pensiun, dan tindakan disiplin lainnya. Perusahaan juga akan melakukan upaya untuk mencegah adanya pelecehan, intimidasi, dan/atau eksploitasi, terutama terhadap pekerja wanita dan anak-anak. Prinsip-prinsip ini juga berlaku bagi para pekerja migran.

Perusahaan juga telah menetapkan kebijakan yang mengatur kesetaraan gender yang sudah disetujui dengan Keputusan manajemen No.SK.2017.004//IIF-HR&GA.

SOCIAL RESPONSIBILITY IN MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Basis of Policy

The Company strives to create safe, healthy and environmentally-friendly work atmosphere, and carries out employee development to encourage them to work optimally. The Company also pays great care to the improvement of capabilities and skills of its employees.

IIF strives to always adhere to all regulations related to manpower by fulfilling the rights of its employees. Hence, through its management, the Company establishes policies that regulate various issues in manpower and occupational health and safety fields that are stipulated in the Company Regulation that is approved by the Head of One-Stop Integrated Service Office of South Jakarta No. 259/11.25.0/31.74/-1.837/2015, valid from 2015 – 2017.

Gender Equality and Work Opportunity

The Company shall not make decisions regarding employee recruitment based on personal characters that have no relation with their duties and functions. The Company will develop work relationship based on the principles of equal opportunity and fair treatment. In addition, the Company shall not discriminate any employee on matters related to work, including recruitment process and work contract signing, compensation (including wage and allowance), work condition, access to training activities, promotions, work termination or retirement, and other disciplinary actions. The Company shall perform every effort to prevent harassment, intimidation and/or exploitation, especially towards female workers and children. The abovementioned principles shall also apply for migrant workers.

The Company has established a policy in regard to gender equality that has been approved through Management Decision No. SK.2017.004//IIF-HR&GA.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan, baik di lokasi proyek maupun di kantor pusat. Bagi Perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang mendalam guna menjaga eksistensi bisnis Perusahaan.

Mayoritas tenaga kerja IIF melakukan pekerjaan di dalam ruangan, sehingga Perusahaan menyediakan sarana dan keselamatan kerja sesuai dengan prosedur keselamatan yang disediakan pihak pengelola bangunan lokasi kantor pusat IIF atau operator proyek pada saat karyawan kami melakukan kegiatan kunjungan lapangan.

Seluruh karyawan juga telah mengikuti kegiatan tanggap bencana yang dilaksanakan secara berkala oleh pihak pengelola gedung, meliputi beberapa simulasi dengan skenario yang berbeda. Hal ini berguna untuk meningkatkan kewaspadaan pegawai jika sewaktu-waktu berada dalam kondisi bahaya saat bekerja. Untuk sarana penunjang, area kantor IIF dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang meliputi alat pemadam kebakaran yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan mudah dijangkau, alat pendeteksi asap serta tangga darurat untuk jalur evakuasi darurat.

Tingkat Perpindahan Karyawan (*Turnover*)

Tingkat *turnover* yang tinggi tentunya akan menyulitkan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja secara cepat dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Tentunya, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi tingginya tingkat *turnover* karyawan di suatu Perusahaan, diantaranya beban kerja yang cukup tinggi sehingga membutuhkan tenaga kerja yang andal dan berpengalaman, terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar di tempat lain, interaksi sosial yang buruk di tempat kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu, Perusahaan berusaha sebaik mungkin dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat *turnover* karyawan. Perusahaan dibantu oleh departemen SDM berusaha untuk menekan tingginya angka *turnover* karyawan dengan menyusun program-program yang tepat dan efektif.

Di tahun 2017, tingkat *turnover* karyawan Perusahaan adalah 3%.

Occupational Safety Facilities

Occupational Health and Safety is the most significant factor in supporting the success of Company's business activities, either in project areas or in Head Office. For IIF, occupational health and safety plays an essential role to maintain its business existence.

The majority of IIF's manpower work inside a building, hence, the Company provides occupational safety facilities that are in accordance with the safety procedures set by the building management where IIF's head office is located, or by the project operator when a site visit takes place.

IIF's employees have also periodically participated in disaster response activities prepared by the building management where they will be drilled in various disaster response simulations of diverse scenarios. They will benefit from this activity, as it can improve their preparedness in anticipating emergencies during work hours. In terms of infrastructure, the IIF office area is equipped with several fire extinguishers placed in strategic and easily accessible locations, smoke detectors, as well as emergency stairs for evacuation needs.

Employee Turnover

A high turnover rate may complicate the Company's efforts to conduct its business optimally. Among the factors that may cause such hindrance is the limited number of workers to complete urgent tasks. There are several factors contributing to the high turnover rate of a company, among others, a high workload that requires experienced and reliable workers, better work opportunities at other companies, negative social interaction in the workplace and so on. To that end, IIF considers thoroughly all factors that influence a high turnover rate. Supported by its HR department, IIF strives to manage this issue by properly developing many effective programs for its human resources.

In 2017, the Company's turnover rate of key personnel reached 3%.

Remunerasi

Dalam menentukan besaran remunerasi karyawan, Perusahaan berpedoman pada peraturan tentang pemberian upah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang serta penyesuaian nominal yang berlaku pada bidang usaha tertentu. Hal tersebut diperlukan agar remunerasi karyawan menjadi lebih kompetitif. Perusahaan berusaha memberikan manfaat untuk memberikan kesejahteraan bagi segenap karyawannya. Selain gaji pokok, tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi, Perusahaan juga memberikan fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan lainnya, antara lain:

1. BPJS Ketenagakerjaan;
2. BPJS Kesehatan;
3. Tunjangan Hari Raya yang diberikan setahun sekali;
4. Penggantian biaya rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya; dan
5. Tunjangan keanggotaan olahraga.

Pengembangan Karyawan

Kesempatan pengembangan karier bagi para karyawan untuk menunjang karier mereka telah menjadi fenomena umum dalam dunia ketenagakerjaan. Selain sebagai kebutuhan bagi para karyawan, jenjang karier juga dapat memberi manfaat bagi Perusahaan dalam hal pengaturan hierarki organisasi kerja agar lebih efektif dan efisien, serta bagian dari upaya strategis untuk mengatur sistem regenerasi tenaga kerja Perusahaan. Sehingga, Perusahaan sangat mendukung upaya pengembangan karier dan potensi tenaga kerjanya demi kesuksesan perusahaan dan karyawan itu sendiri.

Dalam proses pengembangan karier karyawan, Perusahaan senantiasa berpedoman pada syarat dasar dan hasil evaluasi atas *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah dicapai. Dari hasil tersebut, Perusahaan akan melakukan serangkaian proses lanjutan sampai ke tahap final, hingga pada akhirnya karyawan tersebut dapat menduduki jabatan yang diinginkan.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perusahaan menyediakan sarana pengaduan bagi para tenaga kerja terkait dengan masalah-masalah ketenagakerjaan yang mereka hadapi. Sarana tersebut meliputi sistem penilaian *Performance Appraisal*, di mana di dalamnya termasuk *direct coaching*, mekanisme *whistleblower* yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. Selain itu, setiap 4 (empat) bulan sekali,

Remuneration

In determining the amount of remuneration for its employees, the Company refers to the prevailing regulations on remuneration issued by the authorities and adjusts it to the amount that is generally applicable within certain business field. This aims to make employee remuneration more competitive. Moreover, the Company provides various benefits that may enhance its employees' wellbeing. Aside from basic salary, communication and transportation facilities, the Company also provides other facilities and benefits, among others:

1. BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Program);
2. BPJS Kesehatan (Healthcare Social Security Program);
3. Annual Religious Holiday Allowance (THR);
4. Reimbursement for outpatient and inpatient medication for employees and their family member; and
5. Sport membership allowance.

Employee Development

Opportunities to be promoted to support employee's career are general phenomena in manpower sector. In addition to fulfilling the employee's needs, career development allows the Company to manage an even more effective and efficient work organization hierarchy and is part of the Company's strategic plan to prepare succession programs. Therefore, IIF continuously improves its focus on its career development policy and employee's potentials for the sake of Company's and its employee's success in the future.

IIF always takes into account the employees' fulfillment of basic requirements and their Key Performance Indicator (KPI) evaluation in preparing the employees' career path. Based on the results of these two parameters, the Company will perform a series of follow-up activities up until the final stage of the promotion process. The outcome is the fulfillment of the vacant position by the promoted employee.

Complaints Mechanism on Manpower Issues

IIF has provided a complaints channel for manpower issues which cover the Performance Appraisal system, including direct coaching, and whistleblower mechanism that has been set out in the Company's Regulation. In addition, once every 4 (four) months, the management holds a meeting with the employees to discuss a top-down strategy development or

manajemen mengadakan pertemuan dengan karyawan, dan akan membahas strategi atau solusi dari masalah-masalah tersebut secara *top-down*.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perusahaan tidak bisa mengabaikan kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan lokasi bisnis kami. Perusahaan berusaha untuk memberikan tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya infrastruktur. Untuk mewujudkannya, Perusahaan kerap mengadakan seminar yang mengundang karyawan kami sebagai pembicaranya, yang telah menjadi salah satu agenda tahunan dari program CSR. Perusahaan berharap, dari agenda ini, masyarakat sekitar bisa mendapatkan lebih banyak manfaat terutama di daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki sumber daya yang memadai.

Sebagai contoh, pada saat pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan, Perusahaan bekerja sama dengan salah satu kliennya, yakni PT Lintas Marga Sedaya untuk melakukan program sosial bagi masyarakat sekitar melalui budi daya bisnis jamur dan bambu, keterampilan wirausaha, dan keterampilan bisnis seperti koperasi, kelontong, dan peternakan kambing.

Disamping itu, Perusahaan juga kerap menyalurkan donasi kepada masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar wilayah proyek.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KONSUMEN

Sebagai perusahaan yang mencegah terjadinya kesenjangan dalam peranan institusi bagi pengembangan infrastruktur, Perusahaan menyediakan berbagai informasi mengenai produk dan layanan yang berkaitan dengan pembangunan proyek infrastruktur, yang bisa diakses di www.iif.co.id

Selain itu, Perusahaan senantiasa meninjau dan menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) dengan penerapan sistem baru bersama pelanggan internal. Perusahaan juga telah melakukan sosialisasi proaktif mengenai prosedur operasional dalam rangka memperbaiki proses yang tepat, memperbaiki manajemen risiko operasional dan memperkecil biaya.

solutions for certain issues faced by the Company.

SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

The Company is committed to take into account the welfare of community surrounding its business location. In this regard, IIF carries out social responsibility activities aiming to educate the public on infrastructure importance. To realize it, the Company holds seminars by presenting its key personnel as the keynote speakers, an annual agenda item of IIF's CSR programs. Through such program, the Company expects that the public will be able to gain more benefits, especially in the areas with high potential of development and adequate resources.

For example, during the construction project of Cikopo-Palimanan Toll Road in which the Company cooperated with PT Lintas Marga Sedaya, the Company organized a social program for the nearby community in form of provision of education activity on mushroom and bamboo cultivation process as well as entrepreneurial and business skills, such as establishment of cooperatives, grocery stores and goat farms.

In addition, the Company often distributes donation to underprivileged communities living nearby the project area.

SOCIAL RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

As a company that commits to preventing social gap in institutional roles for infrastructure development, IIF provides information on its products and services that are related to infrastructure project development. Such information can be accessed on IIF's website at www.iif.co.id

The Company has also reviewed and determined Service Level Agreements through the application of new systems with internal customers. The Company has conducted a proactive socialization of the operations procedures to internal customers to improve correct processes for better results, better operational risk management and lower costs.

EXPLORE TO CONSERVE THE BIODIVERSITY AT PARIGI MOUTONG – SULAWESI TENGAH, TELUK TOMINI

Perusahaan bekerja sama dengan Mahasiswa Pecinta Alam - Universitas Indonesia melakukan eksplorasi bawah laut sekaligus kampanye perlindungan terumbu karang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Teluk Tomini merupakan salah satu lokasi terumbu karang terbaik di Indonesia. Lokasi ini dikenal sebagai bagian dari *heart of coral triangle*. Biodiversitas yang dimiliki Teluk Tomini membuatnya dikenal sebagai “surga yang tenggelam”. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran penduduk setempat akan potensi alam yang seharusnya dilestarikan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan penelitian untuk mengetahui potensi dan cara pengembangan yang tepat untuk Kabupaten Parigi Moutong yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi:

1. Pendidikan dan Pengajaran

- Kampanye Wisata Laut Berbasis Ekowisata
- Kampanye Pelestarian Ekosistem Terumbu Karang dan Biota Laut

2. Penelitian dan Pengembangan

- Memetakan Penyebaran Ekosistem Terumbu Karang di Teluk Tomini
- Pengecekan Kondisi Ekosistem Terumbu Karang dengan *Reef Check Protocol*

3. Pengabdian Masyarakat

- Mengkaji Kesiapan Parigi Moutong dan Masyarakat Sekitar akan Sustainable Tourism
- Mempromosikan Wisata Bawah Laut Teluk Tomini untuk Kesejahteraan Masyarakat

The Company cooperated with Mahasiswa Pecinta Alam - Universitas Indonesia to conduct seabed exploration as well as campaign on coral protection in Parigi Moutong, Central Sulawesi. Tomini Bay is one of the best coral reef locations in Indonesia and is recognized as part of the heart of coral triangle. Biodiversity in Tomini Bay is even known as “the sunken paradise”. This activity is expected to be able to nurture the awareness of the locals on the potentials of their surrounding nature that must be preserved.

This activity aims to conduct research to understand the potentials and the proper development method to be implemented in Parigi Moutong Regency that is based on *Tri Dharma Perguruan Tinggi* (Three Pillars of Higher Education):

1. Education and Learning

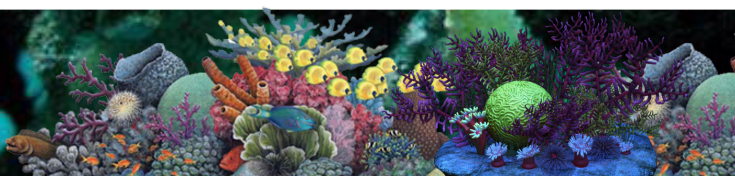
- Campaign on Marine Tourism on the basis of Eco-Tourism
- Campaign on Coral Reef Ecosystem and Marine Biodiversity Conservation

2. Research and Innovation

- Mapping the Distribution of Coral Reef Ecosystem in Tomini Bay
- Examination of Coral Reef Ecosystem Condition using Reef Check Protocol

3. Community Service

- Reviewing the Preradness of Parigi Moutong and Surrounding Community on Sustainable Tourism
- Promoting Seabed Tourism of Tomini Bay for Community Welfare



KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

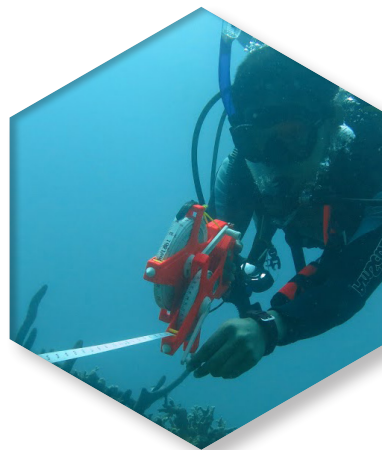
1. Reef Check
2. Eksplorasi Titik Penyelaman
3. Pemetaan Terumbu Karang dan Fasilitas Pendukung Pariwisata
4. Edukasi tentang "Pelestarian Eksosistem Terumbu Karang dan Peduli Sampah Plastik" ke 2 (dua) Sekolah Dasar di Kabupaten Parigi Moutong
5. Focus Group Discussion bersama nelayan di Pantai Duo, Sausu

Hasil dari eksplorasi ini telah kami muat di laman perusahaan kami : www.iif.co.id

ACTIVITIES

1. Reef Check
2. Exploration of Diving Spots
3. Mapping of Coral Reefs and Tourism Supporting Facilities
4. Education on "The Conservation of Coral Reef Ecosystem and Awareness of Plastic Waste" in 2 (two) Primary Schools in Parigi Moutong Regency
5. Focus Group Discussion with fishermen at Duo Beach, Sausu

The results of this exploration have been uploaded to the Company's website at www.iif.co.id.



Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2018

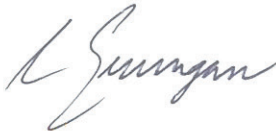
Dewan Komisaris Board of Commissioners



M. Chatib Basri

Presiden Komisaris/Komisaris Independen

President Commissioner/Independent Commissioner



Edwin Gerungan

Komisaris Independen

Independent Commissioner



Zulkifli Zaini

Komisaris Independen

Independent Commissioner



Robert Pakpahan

Komisaris

Commissioner



Richard Ranken

Komisaris

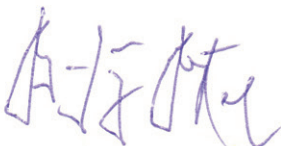
Commissioner



Robert Olivier Dolk

Komisaris

Commissioner



Hans-Juergen Hertel

Komisaris

Commissioner



Rajeew Kannan

Komisaris

Commissioner



Bhimantara Widyajala

Komisaris

Commissioner

Statement of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the 2017 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance

We, the undersigned testify that all information disclosed, in the 2017 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance, is presented in its entirety.

We are fully responsible for the contents of this Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, March 2018

Direksi Board of Directors



Arisudono Soerono

Presiden Direktur & Chief Executive Officer

President Director & Chief Executive Officer



Indrawati Darmawan

Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer

Managing Director & Chief Financial Officer



Harold Tjiptadaja

Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer

Managing Director & Chief Investment Officer



Hilda Savitri

Direktur Pelaksana

Chief Investment Officer*

Interim Chief Risk Officer**

Managing Director

Chief Investment Officer*

Interim Chief Risk Officer**



Wito Krisnahadi

Direktur Pelaksana***

Chief Risk Officer****

Managing Director***

Chief Risk Officer****

* Berakhir masa jabatan per tanggal 8 Agustus 2017 / Term of service ended as of 8 August 2017

** Mulai menjabat per tanggal 8 Agustus 2017 / Begin serving as of 8 August 2017

*** Berakhir masa jabatan per tanggal 31 Oktober 2017 / Term of service ended on 31 October 2017

**** Berakhir masa jabatan per tanggal 8 Agustus 2017 / Term of service ended on 8 August 2017

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

LAPORAN
KEUANGAN
FINANCIAL REPORTS

PT Indonesia Infrastructure Finance

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

Financial statements

***As of December 31, 2017 and for the year then ended
with independent auditors' report***

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statement of Directors</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	3	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	5-104	<i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Kami yang bertandatangan di bawah ini/*We, the undersigned:*

Nama/*Name* : Arisudono Soerono
 Alamat kantor/*Office address* : Energy Building Lantai 30 SCBD Lot 11A
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
 Alamat rumah/*Domicile address* : Jl. Bunga Kamboja No.1 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
 Nomor telepon/*Phone numbers* : +62 21 2991 5060
 Jabatan/*Title* : Presiden Direktur/*President Director*

Nama/*Name* : Indrawati Darmawan
 Alamat kantor/*Office address* : Energy Building Lantai 30 SCBD Lot 11A
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
 Alamat rumah/*Domicile address* : Jl. Mangga Besar XI/14 Taman Sari, Jakarta Pusat
 Nomor telepon/*Phone numbers* : +62 21 2991 5060
 Jabatan/*Title* : Direktur Keuangan/*Chief Financial Officer*

menyatakan bahwa/*declare that:*

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkapkan secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i> 2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> 3. a. <i>All information in the financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;</i> b. <i>The financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;</i> 4. <i>We are responsible for the internal control systems of the Company.</i> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 15 Februari 2018/*February 15, 2018*

 Arisudono Soerono Presiden Direktur/ <i>President Director</i>		 Indrawati Darmawan Direktur Keuangan/ <i>Chief Financial Officer</i>
---	---	--

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-5681/PSS/2018

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-5681/PSS/2018

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors PT Indonesia Infrastructure Finance

We have audited the accompanying financial statements of PT Indonesia Infrastructure Finance, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-5681/PSS/2018 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-5681/PSS/2018 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Indonesia Infrastructure Finance as of December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwanto, Sungkoro & Surja



Yasir

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703/Public Accountant Registration No. AP.0703

15 Februari 2018/February 15, 2018

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2017	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2016	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	3.965.964	3e,3i,5,29	3.538.279	Cash and cash equivalents
Efek-efek	2.967.385	3e,6,29	2.428.246	Securities
Investasi saham	-	3e,8	114.106	Equity investments
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp144.887 tahun 2017 dan Rp60.732 tahun 2016	5.545.960	3e,9,29	4.508.869	Loans - net of allowance for impairment losses of Rp144,887 in 2017 and Rp60,732 in 2016
Piutang bunga	32.319	10,29	26.890	Accrued interest income
Beban dibayar dimuka	6.080	3j,11	5.912	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	11.113	3q,27	12.827	Prepaid taxes
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp13.018 tahun 2017 dan Rp9.274 tahun 2016	286.987	3k,12	6.927	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp13,018 in 2017 and Rp9,274 in 2016
Tagihan derivatif	-	3e,3s,7	578	Derivative receivable
Aset pajak tangguhan	61.313	3q,27	22.349	Deferred tax assets
Beban tangguhan	42.476	3l,13,29	45.039	Deferred charges
Aset lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp6.717 tahun 2017	52.808	3m,14,29	80.739	Other assets - net of allowance for impairment loss of Rp6,717 in 2017
TOTAL ASET	12.972.405		10.790.761	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang lain-lain	2.663	3f,15,29	11.737	Other payables
Utang pajak	4.879	3q,27	7.013	Taxes payable
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	27.488	3f,16,29	33.480	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas imbalan kerja	18.459	3r,28	11.449	Employee benefits obligation
Surat utang yang diterbitkan	1.521.722	3f,17,29	1.519.933	Debt securities issued
Pendapatan diterima dimuka	406	18	7.028	Unearned revenue
Pinjaman diterima	6.544.571	3f,19,29	4.281.483	Fund borrowing
Liabilitas derivatif	4.474	3e,3s,7	-	Derivative liabilities
Pinjaman subordinasi	2.622.652	3f,20,29	2.628.137	Subordinated loans
Total Liabilitas	10.747.314		8.500.260	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				Capital stock - par value of Rp1,000,000 per share
Modal dasar 2.000.000 saham				Authorized 2,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000 saham	2.000.000	21	2.000.000	Subscribed and paid up 2,000,000 shares
Tambahan modal disetor	29.800	22	29.800	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain-neto setelah pajak	21.283	3e,6	(16.683)	Other comprehensive income - net of tax
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	26.465	22	11.196	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	147.543		266.188	Unappropriated
Total Ekuitas	2.225.091		2.290.501	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.972.405		10.790.761	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2017	Catatan/ Notes	2016	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan bunga	624.280	3e,3p,23,29	495.073	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	23.084	3p,24,29	51.409	Provision and commission income
Keuntungan dari penjualan efek-efek	88.963	3e,3p,29	2.614	Gain on sale of securities
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	17.855	3p,29	7.381	Advisory income
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	3.474	3e,3s	15.410	Realized gain from derivative transactions
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs	617	3c	(3.934)	Gain/(loss) from foreign exchange
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi saham	(115.142)	3e,3h,8	(26.688)	Unrealized loss from changes in fair value of equity investments
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	(4.474)	3e,3s	578	Unrealized (loss)/gain from changes in fair value of derivative transaction
Pendapatan lainnya	5.982	3p	1.704	Other income
Total Pendapatan	644.639		543.547	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Beban bunga	(498.877)	3p,26,29	(251.018)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(150.046)	3o,3p,25	(122.871)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(90.168)	3e,9,14	(32.554)	Provision for impairment losses
Total Beban	(739.091)		(406.443)	Total Expenses
(RUGI)/LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	(94.452)		137.104	(LOSS)/INCOME BEFORE TAX EXPENSE
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK	12.830	3q,27	(35.311)	TAX BENEFIT/(EXPENSE)
(RUGI)/LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	(81.622)		101.793	NET (LOSS)/INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	44.154	3e,3h,6	(25.129)	Increase/(decrease) in fair value of available-for-sale securities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(6.188)	3q,27,6	6.282	Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Kerugian aktuarial	(1.860)	3r,28	(692)	Actuarial loss
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	465	3q,27	173	Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss
Total penghasilan komprehensif lain	36.571		(19.366)	Total other comprehensive income
TOTAL (KERUGIAN)/ PENGHASILAN KOMPREHENSIF	(45.051)		82.427	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME
(RUGI)/LABA PER SAHAM				(LOSS)/EARNINGS PER SHARE
Dasar (dalam ribuan Rupiah)	(41)	35	51	Basic (in thousands of Rupiah)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2017

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings *) Ditetapkan Belum ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Total ekuitas/ Total equity	Balance as of January 1, 2016
Saldo 1 Januari 2016	2.000.000	29.800	-	2.164	2.208.074	Balance as of January 1, 2016
Cadangan umum	-	-	11.196	-	-	General reserve
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	101.793	Net income for the year
Kerugian aktuarial	-	-	-	-	(519)	Actuarial loss
Penurunan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	-	-	-	(18.847)	(18.847)	Decrease in fair value of available-for-sale securities
Saldo 31 Desember 2016	2.000.000	29.800	11.196	(16.683)	2.290.501	Balance as of December 31, 2016
Cadangan umum	-	-	15.269	-	-	General reserve
Pembayaran dividen	-	-	-	-	(20.359)	Dividend payment
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	-	(81.622)	Net loss for the year
Kerugian aktuarial	-	-	-	-	(1.395)	Actuarial loss
Kenaikan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	-	-	-	37.966	37.966	Increase in fair value of available-for-sale securities
Saldo 31 Desember 2017	2.000.000	29.800	26.465	21.283	2.225.091	Balance as of December 31, 2017

*) Saldo laba termasuk (kerugian)/keuntungan aktuarial - neto setelah pajak

*) Retained earnings include actuarial (loss)/gain - net of tax

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
		2017	Catatan/ Notes	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan bunga		633.385		489.289
Penerimaan pendapatan provisi dan komisi		47.891		13.069
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan		(120.080)		(97.918)
Pembayaran beban bunga		(453.845)		(214.836)
Pembayaran biaya pinjaman diterima		(49.510)		(44.617)
Penerimaan pendapatan <i>advisory</i>		15.963		8.119
Pembayaran pajak final dan pajak badan		(46.978)		(17.846)
Penerimaan kas dari aktivitas operasi - neto		26.826		135.260
Pinjaman diberikan kepada nasabah		(2.991.494)		(2.093.717)
Penerimaan pembayaran pinjaman diberikan		1.850.797		846.538
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi		(1.113.871)		(1.111.919)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek dan perolehan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(3.203.419)		(2.244.441)
Penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		2.795.075		635.621
Perolehan aset tetap		(283.700)		(1.133)
Perolehan perangkat lunak		(2.321)		(8.973)
Penjualan aset tetap		-		4
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		(694.365)		(1.618.922)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman diterima		2.205.500		3.686.100
Penerimaan surat utang yang diterbitkan		-	17	1.500.000
Pembayaran biaya surat utang yang diterbitkan		-		(6.308)
Pembayaran dividen		(20.359)	22	-
Pembayaran pinjaman subordinasi		(28.774)		(26.094)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		2.156.367		5.153.698
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		348.131		2.422.857
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas		79.554	3c	89.678
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		3.538.279	3i	1.025.744
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		3.965.964	3i	3.538.279
				NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
				<i>Impact of changes in foreign currencies exchange rate on cash and cash equivalents</i>
				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD
				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

PT Indonesia Infrastructure Finance ("Perusahaan") didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 5 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan atas pasal 12, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15, terutama mengenai perubahan susunan dewan komisaris dan ketentuan mengenai pengajuan anggota direksi dan dewan komisaris. Laporan atas perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0055850 tanggal 9 Juni 2016.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berikut ini:

- a. memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine financing*, *bridge financing*, *take-out financing* dan/atau pembiayaan kembali;
- b. memberikan jaminan dalam bentuk, antara lain, pemenuhan liabilitas keuangan, *credit enhancement* dan/atau *performance bonds*;
- c. penyertaan modal;
- d. memberikan jasa dalam mencari pasar *swap* yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- e. memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan, antara lain, penilaian risiko, analisa kelayakan, struktur proyek, model pembiayaan, dan/atau pembangunan proyek; dan

1. GENERAL

PT Indonesia Infrastructure Finance (the "Company") was established under the laws of the Republic of Indonesia through Deed of Establishment No. 34 dated January 15, 2010, drawn up before Aulia Taufani, S.H., as substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-21503. AH.01.01. Year 2010 dated April 28, 2010 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplementary No. 5123. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently with Deed No. 5 of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., dated June 9, 2016, notary in Jakarta, mainly concerning on change in composition of the Board of Commissioners and provision regarding proposal of member of the Boards of Directors and Commissioners. Report of such changes had been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the letter No. AHU-AH.01.03-0055850 dated June 9, 2016.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objective of its activities is to engage in financing infrastructure projects in Indonesia.

The Company may perform the following activities to achieve its objectives:

- a. *provide loans in the form of, among others, senior debts, subordinated debts/mezzanine financing, bridge financing, take-out financing and/or refinancing;*
- b. *provide guarantees in the form of, among others, fulfilment of financial liabilities, credit enhancement, and/or performance bonds;*
- c. *equity investment;*
- d. *provide services involving search for swap market related to infrastructure financing companies;*
- e. *provide consultation services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing scheme, and/or project development; and*

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

- f. melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diizinkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Energi lantai 30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, Indonesia.

Personil manajemen kunci mencakup Dewan Komisaris dan Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017
Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	M. Chatib Basri
Komisaris Independen	Edwin Gerungan Zulkifli Zaini
Komisaris	Richard Lyon Ranken Robert Olivier Dolk Hans Juergen Hertel Bhimantara Widyajala Rajeev Kannan Robert Pakpahan
Direksi	
Presiden Direktur	Arisudono Soerono
Direktur	Harold J.D. Tjiptadjaja Hilda Savitri Indrawati Darmawan

Berdasarkan Akta Penetapan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 8 Januari 2016 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Ibu Hilda Savitri diangkat menjadi Direktur Perusahaan dan berlaku efektif sejak tanggal 11 Januari 2016. Pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0017672 tanggal 5 Februari 2016.

1. GENERAL (continued)

- f. Other financing activities related to infrastructure projects as permitted by the Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 regarding Infrastructure Finance Company.

The Company has obtained its business license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated August 6, 2010.

The Company's head office is located at Energy Building, 30th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, Indonesia.

Key management personnel consists of the Boards of Commissioners and Directors.

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2016	
		Board of Commissioners
	M. Chatib Basri	President Commissioner
	Edwin Gerungan	Independent Commissioner
	Zulkifli Zaini	
	Richard Lyon Ranken	Commissioners
	Robert Olivier Dolk	
	Hans Juergen Hertel	
	Marwanto Harjowiryo	
	Rajeev Kannan	
	Robert Pakpahan	
		Board of Directors
	Arisudono Soerono	President Director
	Harold J.D. Tjiptadjaja	Directors
	Hilda Savitri	
	Wito Krisnahadi	
	Indrawati Darmawan	

Based on Decree No. 6 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 8, 2016, of Utiek R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Ms. Hilda Savitri was appointed as Director of the Company effective since January 11, 2016. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0017672 dated February 5, 2016.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH-01.03-0028188 tanggal 2 Maret 2016, para pemegang saham Perusahaan telah setuju untuk menerima pengunduran diri Bapak Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan yang berlaku sejak tanggal 21 Januari 2016 dan mengangkat Bapak Richard Lyon Ranken sebagai Komisaris Perusahaan yang berlaku efektif sejak 2 Maret 2016.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 24 Maret 2016, Bapak Arisudono Soerono diangkat sebagai Presiden Direktur menggantikan Bapak Sukatmo Padmosukarso. Selain itu, Bapak Robert Pakpahan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris menggantikan Bapak Eko Putro Adijayanto. Pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0034789 tanggal 24 Maret 2016.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH-01.03-0055874 tanggal 9 Juni 2016 serta telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. S.311/V/IIIF/2016 tanggal 17 Juni 2016, para pemegang saham Perusahaan telah setuju untuk mengangkat Bapak Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen Perusahaan dan Ibu Indrawati Darmawan sebagai Direktur Keuangan Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 1 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated March 2, 2016 of Utiek R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, which was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0028188 dated March 2, 2016, the shareholders of the Company agreed to accept the resignation of Mr. Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum as Commissioner of the Company effective from January 21, 2016 and appoint Mr. Richard Lyon Ranken as the Commissioner of the Company effective as of March 2, 2016.

Based on Annual General Meeting of Shareholders on March 24, 2016, Mr. Arisudono Soerono was appointed as President Director replacing Mr. Sukatmo Padmosukarso. Beside that, Mr. /Robert Pakpahan was appointed as a member of Board of Commissioners replacing Mr. Eko Putro Adijayanto. The change of the Company's Boards of Commissioners and Directors was acknowledged by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0034789 dated March 24, 2016.

Based on Decree No. 6 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 9, 2016 of Utiek R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, which was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0055874 dated June 9, 2016, and was disclosed to Financial Services Authority through letter No. S.311/V/IIIF/2016 dated June 17, 2016, the shareholders of the Company agreed to appoint Mr. Zulkifli Zaini as the Independent Commissioner of the Company and Ms. Indrawati Darmawan as Finance Director of the Company.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak Bhimantara Widjajala diangkat menjadi Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Marwanto Harjowiryo berlaku efektif sejak tanggal 28 Juli 2017. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0160647 tanggal 9 Agustus 2017.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perusahaan, Bapak Wito Krisnahadi mengundurkan diri sebagai Direktur Perusahaan yang secara efektif berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2017, sesuai dengan surat pengunduran diri Bapak Wito Krisnahadi yang disampaikan kepada Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2017.

Pada tanggal 10 November 2017, Perusahaan menerima surat pengunduran diri dari Bapak Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Januari 2018.

Susunan anggota Komite Investasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berasal dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite Audit Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Ketua Anggota	Edwin Gerungan *) M. Chatib Basri	Zulkifli Zaini M. Chatib Basri Edwin Gerungan	Chairman Members
Anggota independen	Agus Kretarto	Agus Kretarto	Independent member

*) Efektif sejak Desember 2017, Bapak Edwin Gerungan diangkat menjadi Ketua Komite Audit menggantikan Bapak Zulkifli Zaini.

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 7 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 9, 2017, of Utiek R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. Bhimantara Widjajala was appointed as the Commissioners of the Company replacing Mr. Marwanto Harjowiryo, effective since July 28, 2017. This change of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0160647 dated August 9, 2017.

Based on Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Associations, Mr. Wito Krisnahadi has effectively resigned as the Director of the Company starting October 31, 2017, in accordance with his resignation letter submitted to the Company dated August 31, 2017.

On November 10, 2017, the Company received a resignation letter from Mr. Zulkifli Zaini as the Independent Commissioner of the Company in accordance with Article 13 paragraph (8) of the Company's Articles of Associations which became effective on January 10, 2018.

The members of the Company's Investment Committee as of December 31, 2017 and 2016 comprised of all members of the Boards of Commissioners and Directors.

The members of the Company's Audit Committee as of December 31, 2017 and 2016 were as follows:

*) Effective December 2017, Mr. Edwin Gerungan was appointed as chairman of Audit Committee replaced Mr Zulkifli Zaini.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017
Komite Pemantau Risiko	
Ketua	Edwin Gerungan
Anggota	Bhimantara Widyajala *) Robert Olivier Dolk Hans Juergen Hertel
Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua	M. Chatib Basri
Anggota	Richard Lyon Ranken Robert Pakpahan **) Rajeev Kannan

*) Efektif sejak 9 Agustus 2017, Bapak Bhimantara Widyajala menggantikan Bapak Robert Pakpahan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

**) Efektif sejak 9 Agustus 2017, Bapak Robert Pakpahan menggantikan Bapak Marwanto Harjowiryono sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sekretaris perusahaan Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Nastantio W. Hadi.

Berdasarkan surat Perusahaan No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepala divisi audit internal Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Yudi Adrial.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 81 orang dan 79 orang (tidak diaudit).

Penawaran umum obligasi

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-336/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 19 Juli 2016, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (continued)

The Company's Risk Oversight Committee and Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2016	
		Risk Oversight Committee
	Edwin Gerungan	Chairman
	Robert Pakpahan	Members
	Robert Olivier Dolk	
	Hans Juergen Hertel	
		Nomination and Remuneration Committee
	M. Chatib Basri	Chairman
	Richard Lyon Ranken	Members
	Marwanto Harjowiryono	
	Rajeev Kannan	

*) Effective August 9, 2017, Mr. Bhimantara Widyajala replaced Mr. Robert Pakpahan as a member of Risk Oversight Committee.

**) Effective August 9, 2017, Mr. Robert Pakpahan has replaced Mr. Marwanto Harjowiryono as a member of Nomination and Remuneration Committee.

The corporate secretary of the Company as of December 31, 2017 and 2016 is Nastantio W. Hadi.

Based on the Company's letter No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 dated March 30, 2012, the head of internal audit division of the Company as of December 31, 2017 and 2016 is Yudi Adrial.

As of December 31, 2017 and 2016, the Company had 81 and 79 employees, respectively (unaudited).

Bonds public offering

On June 29, 2016, the Company obtained the effectivity statement from Financial Services Authority through its letter No. S-336/D.04/2016 to conduct a public offering on Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 to public with a nominal amount of Rp1,500,000.

On July 19, 2016, the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

a. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Efektif 1 Januari 2017, Perusahaan telah menerapkan beberapa standar dan interpretasi baru dan revisi yang relevan untuk Perusahaan, sebagai berikut:

- Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan;
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim;
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja;
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan.

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas penerapan standar dan interpretasi baru dan revisi tersebut.

b. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

a. Changes in accounting policies and disclosure

Effective on January 1, 2017, the Company has applied new and revised standards and interpretation which are relevant to the Company, as follows:

- Amendments to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure Initiative;
- SFAS No. 3 (2016 Improvement): Interim Financial Statements;
- SFAS No. 24 (2016 Improvement): Employee Benefits;
- SFAS No. 58 (2016 Improvement): Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- SFAS No. 60 (2016 Improvement): Financial Instruments: Disclosures;
- Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) No. 32: Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards.

There was no significant impact on the adoption of these new and revised standards and interpretation.

b. Accounting standards issued but not yet effective

The standards and interpretations that are issued by the Board of Financial Accounting Standards, but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**b. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2018:**

- Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan;
- Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi;
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK No. 53: Pembayaran Berbasis Saham: Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham.

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2019:**

- ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka.

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2020:**

- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9;
- PSAK No. 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)**

**b. Accounting standards issued but not yet
effective (continued)**

Effective on or after January 1, 2018:

- Amendments to SFAS No. 2: Statement of Cash Flows regarding the Disclosures Initiatives;
- Amendments to SFAS No. 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses;
- SFAS No. 15 (2017 Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures;
- Amendments to SFAS No. 53: Share-based Payment: Classification and Measurement of Share-Based Payment Transaction.

Effective on or after January 1, 2019:

- IFAS No. 33: Foreign Currency Transaction and Advance Consideration.

Effective on or after January 1, 2020:

- SFAS No. 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9;
- SFAS No. 73: Leases, adopted from IFRS 16.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia ("BI") yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing yang dijabarkan kembali dengan nilai tukar pada saat tanggal awal transaksi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kurs konversi 1 Dolar Amerika Serikat yang digunakan Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp13.548 dan Rp13.436.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kurs konversi 1 Euro Eropa yang digunakan Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp16.174 dan Rp14.162.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Financial Statements Presentation

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statement of cash flows is prepared using the direct method which classified cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Foreign Currency Transactions and Translation

The books of accounts of the Company are maintained in Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the Company operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia ("BI") at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to the profit and loss account. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates at the dates of the initial transaction.

The conversion rate per 1 United States Dollar used by the Company as of December 31, 2017 and 2016 are Rp13,548 and Rp13,436, respectively.

The conversion rate per 1 European Euro used by the Company as of December 31, 2017 and 2016 are Rp16,174 and Rp14,162, respectively.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - v. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vi. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a company of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - v. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vi. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

e. Aset Keuangan

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh konversi pasar yang berlaku. Aset keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Tersedia untuk dijual

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang bukan merupakan kontrak jaminan keuangan atau ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets

Financial assets (other than investment in sukuk)

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market convention. All financial assets are initially measured at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets classified as at fair value through profit or loss.

The Company's financial assets are classified into the following:

- Fair value through profit or loss (FVTPL)
- Loans and receivables
- Held-to-maturity
- Available-for-sale

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The management determines the classification of the financial assets at the time of the initial recognition.

Fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held-for-trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held-for-trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- Perusahaan merupakan organisasi yang bidang usahanya bergerak dalam investasi aset keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan menyeluruh dalam bentuk bunga atau dividen atau perubahan dalam nilai wajarnya. Dengan kondisi ini, perusahaan dapat menetapkan investasi tersebut dalam kategori FVTPL, dengan syarat tidak memiliki hak pengendali di investasi tersebut; atau
- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"), misalnya direksi; atau
- jika merupakan kontrak *hybrid* yang terdapat satu atau lebih derivatif melekat.

Aset keuangan yang termasuk dalam kategori ini pada saat awal pengakuan dan selanjutnya dicatat pada nilai wajar; biaya transaksi diakui langsung pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar dan penjualan dari aset keuangan ini diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan masing-masing dilaporkan sebagai "Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar" dan "Keuntungan/(kerugian) dari penjualan efek-efek". Pendapatan bunga yang berasal dari instrumen keuangan yang diklasifikasi dalam FVTPL diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Pendapatan bunga".

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Fair value through profit or loss (FVTPL)
(continued)

A financial asset, other than a financial asset held-for-trading, may be designated as FVTPL upon initial recognition if:

- The company is an entity whose business is investing in financial assets with a view to profiting from the total return in the form of interest or dividends and changes in fair value. In this condition, such company may designate such investment at FVTPL, provided it does not hold a controlling interest; or
- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in SFAS No. 7, "Related Party Disclosures"), for example the entity's board of directors; or
- If it is a hybrid contract containing one or more embedded derivative.

Financial assets included in this category are recognized initially and subsequently at fair value; transaction costs are taken directly to profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are included directly in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reported as "Unrealized gains/(losses) from changes in fair value" and "Gain/(loss) from sale of securities", respectively. Interest income on financial instruments classified at FVTPL is recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang dari nasabah dan piutang dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan piutang".

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan dikurangi dengan *upfront fee* dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Pendapatan bunga".

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- aset keuangan yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Loans and receivables

Loans and receivables from customers and receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "Loans and receivables".

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs (if any) minus upfront fee and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Held-to-maturity

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- *those that the group of financial assets upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss;*
- *those that the group of financial assets are designated as available-for-sale; and*
- *those that meet the definition of loans and receivables.*

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Pendapatan bunga dari aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Pendapatan bunga".

Tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang tidak ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar dimana nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain kecuali untuk penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs untuk instrumen utang yang diakui pada laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, laba rugi selisih kurs diakui sebagai bagian dari ekuitas, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain, diakui pada laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Pendapatan bunga". Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laba rugi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Held-to-maturity (continued)

Held-to-maturity financial assets are initially recognized at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method less impairment. Interest income on held-to-maturity financial assets is recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Available-for-sale

Available-for-sale are financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to the needs for liquidity or changes in interest rates or, exchange rates or those that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity financial assets or financial assets at fair value through profit or loss.

Available-for-sale financial assets are initially recognized at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with changes in fair value recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses for debt instrument which are recognized in profit or loss. For equity instrument, foreign exchange gain or loss is recognized as part of equity, until the financial asset is derecognized. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative unrealized gain or loss arising from the changes in fair value previously recognized in other comprehensive income is recognized in profit and loss.

Interest income is calculated using the effective interest method and recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available-for-sale are recognized in profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak meminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat penundaan dalam pelaksanaan konstruksi proyek yang dapat membuat penundaan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga pada saat debitur beroperasi secara komersial; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak meminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and commissions paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Revenue is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired at each reporting date. Financial assets are impaired and impairment losses are incurred only where there is objective evidence, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the investment that can be reliably estimated.

For financial assets, the objective evidence of impairment may include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in principal or interest payments; or
- delays in the project construction which could further delay the principal and/or interest payments when the debtor has commercially operated the project; or
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial restructuring.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Cadangan kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai di masa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi. Jika pinjaman diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik yang jumlahnya signifikan maupun tidak signifikan, maka aset keuangan tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan penurunan nilai kelompok aset keuangan tersebut dilakukan secara kolektif.

Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Untuk investasi ekuitas tersedia untuk dijual (AFS) yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Individual impairment calculation

The amount of the loss is measured as the difference between the financial asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future impairment losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the allowance for impairment losses account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial asset has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

If the Company assesses that there is no objective evidence of impairment for financial asset assessed individually, both for significant and insignificant amount, the financial asset is included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and is collectively assessed for impairment.

Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

For listed and unlisted equity investments classified as available-for-sale (AFS), a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Perhitungan penurunan nilai secara individu
(lanjutan)

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Untuk kelompok aset keuangan tertentu yang memiliki karakteristik yang sama, akan dilakukan penurunan nilai secara kolektif. Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau pihak ketiga untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Perusahaan mengelompokkan produk pembiayaan berdasarkan karakteristik risiko kredit yaitu (i) *Corporate Finance* dan (ii) *Project Finance*. *Corporate Finance* adalah pembiayaan yang diberikan kepada debitur dimana pembayaran atas pembiayaan tersebut bersumber dari operasi perusahaan secara keseluruhan maupun dari sumber lain. Sedangkan *Project Finance* adalah pembiayaan yang diberikan dengan tujuan spesifik kepada proyek tertentu dimana pembayaran hanya tergantung pada pendapatan yang berasal dari proyek tersebut jika sudah beroperasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Individual impairment calculation (continued)

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the profit or loss, the impairment loss is reversed through the profit or loss.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Collective impairment calculation

For certain categories of financial assets which have similar characteristics, the assets are assessed for impairment on a collective basis. The financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering credit segmentation and past-due status. Those characteristics are relevant to the estimated future cash flows for such group of assets which indicate the debtor or counterparty ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

The Company classifies its financing product based on the credit risk characteristic i.e. (i) *Corporate Finance* and (ii) *Project Finance*. *Corporate Finance* is a financing provided to a debtor whose source of payment will be from the operation of the company or other sources. *Project Finance* is a financing provided to a debtor for a specific project wherein the source of payment will solely depend on the revenue generated from the project when it commences its commercial operation.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif
(lanjutan)

Dalam menghitung penurunan nilai untuk pinjaman diberikan yang diklasifikasikan sebagai *Corporate Finance*, Perusahaan menggunakan data *Probability of Default (PD)* dan *Loss Given Default (LGD)* berdasarkan studi yang dilakukan oleh Standard & Poor's (S&P), yang disesuaikan dengan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini.

Sedangkan untuk pinjaman diberikan yang diklasifikasi sebagai *Project Finance*, Perusahaan menetapkan tingkat penyisihan penurunan nilai sebesar (a) 2% dari nilai kredit jika debitur masih dalam penyelesaian konstruksi proyek dan belum beroperasi secara komersial dan menghasilkan arus kas yang berasal dari pendapatan operasi dan (b) 1% dari nilai kredit jika konstruksi proyek telah selesai dan proyek sudah beroperasi serta menghasilkan arus kas yang berasal dari pendapatan operasi.

Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika dilakukan dalam situasi yang langka dan jika memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan terdapat intensi dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan untuk masa yang akan datang yang dapat diperkirakan atau sampai jatuh tempo.

Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo yang tidak memenuhi kriteria tertentu, maka seluruh aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasi menjadi aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, Perusahaan tidak diperkenankan mengklasifikasi aset keuangan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo selama dua tahun berikutnya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Collective impairment calculation (continued)

In calculating impairment of loans classified under Corporate Finance, the Company uses the Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) as provided from a study by Standard & Poor's (S&P), adjusted with current observable data to reflect the current condition.

For Project Finance loans, the Company uses an impairment rate of (a) 2% from total outstanding loan if the project construction is still in progress and the debtor has not yet commercially operated and generated cash flows from operation and (b) 1% from total outstanding loan if the construction has been completed, the project has entered into operational phase and has generated cash flows from operation.

Reclassification of financial instruments

The Company shall not reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss classification while it is held or issued. Financial assets at fair value through profit or loss could be reclassified as loans and receivables if it occurs in a rare circumstance and if they could fulfill the requirements as loans and receivables and there is intention and ability to hold until the foreseeable future or maturity date.

If there is a sale or reclassification of held-to-maturity financial asset for more than an insignificant amount before maturity, the entire held-to-maturity financial assets will have to be reclassified as available-for-sale financial assets. Subsequently, the Company shall not classify financial asset as held-to-maturity during the following two years.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas (penghasilan komprehensif lain) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dihentikan pengakuannya dan diakui pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo aset tersebut.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang beragunan sebesar pinjaman yang diterima.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Reclassification of financial instruments
(continued)

Reclassification of held-to-maturity financial asset to available-for-sale is recorded at fair value. The unrealized gain or loss is recognized in equity (other comprehensive income) until the financial assets are derecognized, at which time the cumulative gain or loss previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

Reclassification of available-for-sale financial asset to held-to-maturity is recorded at carrying amount. Unrealized gain or loss should be amortized using the effective interest rate method up to maturity date of such asset.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Aset keuangan (investasi pada sukuk)

Perusahaan menerapkan PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk". PSAK No. 110 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

Pengakuan dan pengukuran

Sebelum pengakuan awal, Perusahaan menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Perusahaan. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari:

- Diukur pada biaya perolehan

Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

- Nilai wajar melalui laba rugi

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan, namun harga perolehan tersebut tidak termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Financial assets (investment in sukuk)

The Company has applied SFAS No. 110 (Revised 2015), "Accounting for Sukuk". SFAS No. 110 establishes the recognition, measurement, presentation, and disclosures of sukuk ijarah and sukuk mudharabah transactions.

Recognition and measurement

Before the initial recognition, the Company determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Company's investment. The classification of investment in sukuk comprises of:

- Acquisition cost

If the investment is held within a business entity that aims to acquire assets in order to collect contractual cash flows and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the result.

At the initial measurement, the investment is recorded at acquisition cost which includes the transaction cost. After the initial recognition, the investment in sukuk is measured at amortized cost. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight-line method during the period of the sukuk instrument.

- Fair value through profit or loss

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which does not include transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at-fair-value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in profit or loss.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada hirarki sebagai berikut:

- i. harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- ii. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam huruf (i)

Untuk investasi pada sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Reklasifikasi

Perusahaan tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terdapat perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Perusahaan. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan (*ujrah*) dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Perusahaan menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (investment in sukuk)
(continued)**

Recognition and measurement (continued)

- Fair value through other comprehensive income

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which includes transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at-fair-value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in other comprehensive income. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight-line method during the period of the sukuk instrument and recognized in profit or loss.

Fair value on investment is determined according to following hierarchy:

- i. quoted price (excluding any adjustment) in active market, or*
- ii. other input other than quoted price included in (i)*

For investment in sukuk classified as at acquisition cost and at fair value through other comprehensive income, if there is an indication of impairment, the Company measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than recorded amount, the Company recognize the impairment losses. Recoverable amount represents the amount which will be recoverable from the principal repayment regardless of its present value.

Reclassification

*The Company cannot change investment classification unless there is a change in the business model purpose. Business model that is intended to collect contractual cash flow is based on the investment purpose set by the Company. The underlying contractual cash flow is the cash flow from revenue sharing and principal of sukuk mudharabah or benefit cash flow (*ujrah*) from sukuk *ijarah*. After initial recognition, if the actual differs from the investment purpose initially set by the Company, then the Company reconsiders the consequences of the revised investment purpose.*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan neto setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam FVTPL, jika liabilitas keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini pada saat awal pengakuan dan selanjutnya dicatat pada nilai wajar; biaya transaksi diakui langsung pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan ini diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (investment in sukuk)
(continued)

Presentation

Investment income and amortization expense are presented in net amount in the profit or loss.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities.

Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liabilities is either held-for-trading or it is designated as at FVTPL.

Financial liabilities included in this category are recognized initially and subsequently at fair value; transaction costs are taken directly to profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value of these financial liabilities are included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reported as "Unrealized gains/(losses) from changes in fair value".

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(lanjutan)**

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

g. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan neto dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Perusahaan atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

h. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif, seperti efek-efek, ditentukan berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan dari sumber-sumber yang terpercaya seperti kuotasi harga pasar dari *Bloomberg*, *Reuters* atau dari broker. Investasi pada unit reksadana dicatat pada nilai pasar, sesuai dengan nilai bersih dari aset reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**f. Financial Liabilities and Equity Instruments
(continued)**

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged or cancelled or expired.

g. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right of offset must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

h. Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded in active markets, such as securities, is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date from credible sources such as quoted market prices from *Bloomberg*, *Reuters* or broker's quoted price. Investments in mutual fund units are stated at market value, in accordance with the net value of assets of the mutual funds at the statement of financial position date.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan dianggap menggunakan nilai kuotasi pasar aktif jika harga kuotasi tersedia dan secara reguler tersedia di bursa, dealer, broker dan harga tersebut mencerminkan harga aktual dan terbentuk melalui transaksi pasar secara reguler berdasarkan "arm's length basis". Jika kriteria di atas tidak tercapai, pasar dianggap tidak aktif. Indikasi dari pasar tidak aktif adalah ketika terdapat selisih penawaran dan permintaan yang besar atau terjadi kenaikan signifikan dari selisih penawaran dan permintaan atau hanya terdapat sejumlah kecil transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi harga pasar, estimasi yang rasional dari nilai wajar ditentukan dengan menggunakan referensi harga pasar sekarang dari instrumen lain yang memiliki karakteristik yang sama secara substansial atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas dari aset bersih yang mendasari instrumen keuangan tersebut. Perusahaan menggunakan jasa penilai independen dalam mengestimasi nilai wajar dari investasi efek-efek saham dimana harga pasar tidak tersedia. Penilaian berkala oleh jasa penilai independen dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Determination of fair value (continued)

A financial instrument is regarded as quoted in an active market, if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments. The Company uses an independent valuer in the estimation of fair value of its investment in equity securities when the market price is not available. A regular valuation by the independent valuer is done at least once a year.

i. Cash and Cash Equivalents

For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

k. Property and Equipment - Direct Acquisition

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Aset Tetap - Pemilikan Langsung (lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Komputer	4
Peralatan kantor	4
Kendaraan	4
Perabotan dan peralatan	4

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Akumulasi biaya konstruksi serta pemasangan peralatan kantor dan komputer, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak dipergunakan lagi atau dijual), biaya perolehan beserta akumulasi penyusutan yang terkait dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

Pada tanggal pelaporan, metode amortisasi, taksiran masa manfaat dan nilai residual ditelaah ulang dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**k. Property and Equipment - Direct Acquisition
(continued)**

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or are recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized.

Depreciation of property and equipment is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives as follows:

Computer
Office equipment
Vehicles
Office furniture and fixtures

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

The accumulated costs of the construction of and the installation of office equipment and computers are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to property and equipment accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date. Maintenance and repair cost are charged as an expense when incurred.

When assets are derecognized (retired or otherwise disposed of), their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized as profit or loss for the year.

At the reporting period, amortization methods, estimated useful lives and residual values are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Beban Tangguhan

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang terjadi berkaitan dengan proses pemberian persetujuan kredit kepada debitur atau perolehan pinjaman yang diterima Perusahaan. Biaya transaksi akan disajikan secara neto dalam akun "Pinjaman diberikan" jika telah dicairkan kepada debitur atau akun "Pinjaman diterima" jika telah dicairkan oleh Perusahaan.

m. Aset Lain-lain

Aset lain-lain termasuk aset tidak berwujud yang dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tidak berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tersebut yaitu antara 4 - 5 tahun.

Pada tanggal pelaporan, metode amortisasi, taksiran masa manfaat dan nilai residual ditelaah ulang dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Deferred Charges

Deferred charges represent transaction costs incurred in relation to the process of loan approval to the debtors or borrowing obtained by the Company. The transaction costs will be presented net in "Loans" account when the loan is disbursed to the debtors or in "Fund borrowing" account when the borrowing is drawn by the Company.

m. Other Assets

Other assets include intangible assets that are stated at cost less accumulated amortization and impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Amortization of intangible assets is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets which range between 4 - 5 years.

At the reporting period, amortization methods, estimated useful lives and residual values are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

n. Impairment of Non-Financial Assets

At reporting date, the Company reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
(lanjutan)**

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

o. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara *substantial* seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba rugi. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan metode garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Impairment of Non-Financial Assets
(continued)**

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the profit or loss.

o. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the statement of financial position as a finance lease obligation.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to profit or loss. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic method is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line method, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui berdasarkan basis akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Perhitungan dengan metode suku bunga efektif memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya transaksi yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan pemberian pinjaman diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian seperti pendapatan jasa *mandatory lead arranger*, sindikasi, perencanaan model pembiayaan, dan pendapatan komitmen atas fasilitas yang belum dicairkan.

Jasa *advisory* diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian.

Keuntungan/(kerugian) dari portofolio efek-efek meliputi keuntungan/(kerugian) yang timbul dari penjualan efek-efek dan keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek.

Beban diakui pada saat terjadinya.

q. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Recognition of Revenues and Expenses

Interest income and interest expense are recognized on accrual basis using the effective interest rate method. The calculation using the effective interest rate method takes into account all contractual terms of the financial instruments and includes any transaction costs that are directly attributable to the instruments and are an integral part of the effective interest rate.

Provision and commission income related to the loan disbursement is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts such as income from mandatory lead arranger services, syndication, structuring of financing scheme fees, and commitment fee income from undrawn facilities.

Advisory service is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts.

Gains/(losses) on securities consist of gains/(losses) on securities sold and unrealized gains/(losses) from changes in the fair value of securities.

Expenses are recognized when incurred.

q. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year, computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited immediately in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan bersih di laporan posisi keuangan.

r. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja karyawan jangka pendek

Imbalan kerja karyawan jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Liabilitas pensiun

Perusahaan membukukan imbalan pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-Undang Ketenagakerjaan") yang pada dasarnya merupakan program imbalan pasti. Untuk usia pensiun normal, Perusahaan menghitung imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *projected unit credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same tax authority on either the same taxable entity or different taxable entities.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position.

r. Employment Benefits Obligation

Short-term employment benefits

Short-term employee benefits are recognized when they become due to the employees.

Pension obligation

The Company provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law") which in substance represent a defined benefit plan. For normal pension scheme, the Company calculates the employee benefits under the Labor Law.

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the projected unit credit method.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income, consists of:

- i. *Actuarial gain and losses;*
- ii. *Return on program asset, not consist of amount included in liabilities (asset) net interest;*
- iii. *Every changes in asset ceiling, not consist of amount included in liabilities (asset) net interest.*

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income will not be reclassified to profit or loss in the next periods.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

r. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui pada laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- Tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan
- Tanggal pada saat Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Imbalan jangka panjang lainnya

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode *projected unit credit* dengan metode yang disederhanakan dimana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Total nilai neto dari biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

s. Instrumen keuangan derivatif

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- i. Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik ekonomi dan risiko kontrak utama.
- ii. Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif, dan
- iii. Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (dalam hal ini derivatif melekat di dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak dipisahkan).

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs *Reuters* pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga opsi atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Employment Benefits Obligation
(continued)

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:

- *The date of the plan amendment or curtailment; and*
- *The date that the Company recognizes related restructuring costs*

Other long-term employee benefits

The cost of providing other long-term employee benefits is determined using the projected unit credit method using simplified method of not recognizing remeasurements in other comprehensive income. The net total of service cost, net interest on the net defined benefit liability (asset) and remeasurements of the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss for the year.

s. Derivative financial instruments

Gain or loss on a derivative contract not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized in the current year profit or loss.

Embedded derivatives are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met:

- i. *The economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to those of the host contract.*
- ii. *A separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative, and*
- iii. *The hybrid (combined) instrument is not measured at fair value through profit or loss (i.e. a derivative that is embedded in a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss is not separated).*

All derivatives instruments (including foreign exchange transactions for financing and trading) are recognized in the statements of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statements of financial position date, discounted cash flows, option pricing models or broker quoted price on other instruments with similar characteristics.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

t. Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk *item* yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk.

Perusahaan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

u. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan mengasumsikan konversi instrumen berpotensi saham yang bersifat dilutif.

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Operating segment

An operating segment is a component of the entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the entity's components, whose operating results are reviewed regularly by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the chief operating decision maker include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

The Company manages its business activities and identifies its segments reported based on product categories.

The Company determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

u. Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the year adjusted for the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES**

In the application of the Company's accounting policies, which is described in Note 3, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Utama dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan utama, selain dari estimasi, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan FVTPL

Manajemen telah menelaah aset keuangan Perusahaan yang dimiliki hingga jatuh tempo karena persyaratan pemeliharaan modal dan likuiditas dan telah mengkonfirmasi intensi positif Perusahaan dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo.

Manajemen juga telah mereviu klasifikasi investasi FVTPL Perusahaan dan mengkonfirmasi bahwa klasifikasi telah konsisten dengan PSAK.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari entitas adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban.

Manajemen telah mereviu dan mengkonfirmasi bahwa mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan dijelaskan di bawah ini:

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES (continued)

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period where the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations that the directors have made in the process of applying the Company's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Held-to-maturity and FVTPL financial assets

Management has reviewed the Company's held-to-maturity financial assets in the light of its future reserve and liquidity requirements and has confirmed the Company's positive intention and ability to hold those assets to maturity.

Management has also reviewed the classification of the Company's FVTPL investment and confirmed that the classification is consistent with SFAS.

Determination of functional currency

The functional currency of the entity is the currency of the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and cost.

Management has reviewed and confirmed that the Company's functional currency is Rupiah.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period are discussed below:

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)**

Pajak tangguhan

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen memperkirakan bahwa rugi fiskal tersebut akan dapat dikompensasi terhadap laba fiskal untuk lima tahun mendatang sejak terjadinya. Dalam menyusun perkiraan tersebut, manajemen membuat pertimbangan sebagai asumsi yang diperlukan untuk mengestimasi laba kena pajak masa depan yang diharapkan akan dihasilkan dari operasi Perusahaan. Perubahan signifikan terhadap asumsi dapat secara material mempengaruhi nilai aset pajak tangguhan.

Perhitungan akumulasi rugi fiskal dan aset pajak tangguhan disajikan pada Catatan 27.

**Nilai wajar investasi saham dicatat sebagai
FVTPL**

Dalam menentukan nilai wajar atas investasi saham yang dicatat sebagai FVTPL dimana tidak terdapat harga pasar yang bisa diobservasi, Perusahaan menggunakan jasa penilai independen dalam perhitungan nilai wajar tersebut. Nilai wajar yang dihasilkan mungkin memiliki tingkat obyektivitas yang lebih rendah dan membutuhkan tingkat pertimbangan yang bervariasi tergantung pada akurasi dari laporan keuangan, ketidakpastian faktor pasar, asumsi harga dan risiko-risiko lainnya yang dapat mempengaruhi nilai investasi tersebut.

Investasi saham yang dicatat sebagai FVTPL dan nilai wajarnya disajikan pada Catatan 8.

Rugi penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menilai penurunan nilai aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi. Suatu aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif bahwa sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut terjadi peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas aset keuangan. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan membayar piutang.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Deferred taxes

The Company recognizes deferred tax assets on its accumulated fiscal losses and deductible temporary differences. Management estimates the fiscal loss which can be compensated against the taxable income for the next five years. In preparing the forecast management makes judgement as to the assumptions needed to estimate the future taxable income expected to be generated from the Company's operations. Any significant changes in the assumptions may materially affect the amount of deferred tax assets.

Calculation of accumulated fiscal losses and deferred tax assets is disclosed in Note 27.

**Fair value of equity investments designated as
FVTPL**

In determining the fair value for equity investments designated as FVTPL when there is no observable market price, the Company uses an independent valuer to calculate its fair value. The fair value may be less objective and requires varying degrees of judgement depending on accuracy of financial statements, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific investment.

The equity investments designated as FVTPL and its fair value are disclosed in Note 8.

Impairment loss on financial assets

The Company assesses its financial assets at each reporting date. In determining whether the impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgement as to whether there is objective evidence that a loss event has occurred. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial assets have been affected. The evidence includes observable data which indicates that an adverse event has occurred in the payment status of borrowers or in the national or local economic conditions that correlate with the default in payment of receivables.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)

Rugi penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perusahaan melakukan penilaian terhadap penurunan nilai berdasarkan estimasi terbaik pada tanggal pelaporan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan dan mungkin akan berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan. Nilai tercatat aset keuangan Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 14.

Instrumen keuangan derivatif

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- i. Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik ekonomi dan risiko kontrak utama,
- ii. Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif, dan
- iii. Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (dalam hal ini derivatif melekat didalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat ekonomis setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan periode dimana aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Taksiran masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah dan periode pencatatan biaya yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat ekonomis setiap aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)

Impairment loss on financial assets (continued)

The Company performs assessment of the impairment amounts based on the best estimation at the reporting date. Estimating the amount and timing of future recovery requires a lot of considerations and the actual amount may differ from the estimates and as a result, actual loss which occurs may be different from the amount recognized in the financial statements. The carrying amount of the Company's financial assets are disclosed in Notes 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 14.

Derivative financial instruments

Embedded derivatives are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met:

- i. The economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to those of the host contract,
- ii. A separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative, and
- iii. The hybrid (combined) instrument is not measured at fair value through profit or loss (i.e. a derivative that is embedded in a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss is not separated).

Estimated useful lives of property and equipment

The useful life of each item of the Company's property and equipment, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying amounts of property and equipment are disclosed in Note 12.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 28).

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, future salary increase rate, mortality rate, resignation rates and others (Note 28).

5. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Kas	15	9	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.893	13.528	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	229	228	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	150	345	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	111	23.123	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	5	-	PT Bank Mandiri Taspen
Pihak ketiga			Third parties
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	195.899	92.859	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.905	2.973	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.856	2.902	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	858	11.213	PT Bank Permata Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	416	1.590	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	337	913	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank UOB Indonesia	130	129	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	101	-	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	7	8	PT Bank ANZ Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia	128	541	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Indonesia Branch
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	59.479	22.025	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.860	1.643	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	39.189	646.305	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	11.977	11.823	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	9.991	5.164	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Indonesia	6.183	5.548	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Permata Tbk	5.392	8.401	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	4.960	-	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	3.516	825	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk	2.320	7.683	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.082	1.905	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	562	240	PT Bank DBS Indonesia
	390.556	861.914	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Deposito berjangka			<i>Time deposits</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	100.000	-	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	1.010.000	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	100.000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2.500	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	100.000	211.000	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	-	27.000	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	25.000	<i>PT Bank QNB Indonesia Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	11.000	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
Dolar Amerika Serikat			<i>United States Dollar</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	677.400	161.232	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	406.440	268.720	<i>PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	537.440	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	636.756	-	<i>PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	541.920	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank UOB Indonesia	487.728	-	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
PT Bank ICBC Indonesia	149.028	-	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	135.480	-	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	322.464	<i>PT Bank QNB Indonesia Tbk</i>
Euro Eropa			<i>European Euro</i>
Pihak berelasi			<i>Related party</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	340.641	-	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
	3.575.393	2.676.356	
	3.965.964	3.538.279	
Tingkat bunga giro per tahun:			<i>Interest rate per annum of current accounts:</i>
Rupiah	4,00 - 5,00%	4,00%	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	0,25 - 1,00%	0,6%	<i>United States Dollar</i>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun:			<i>Interest rate per annum of time deposits:</i>
Rupiah	6,25%	5,50 - 8,00%	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	1,55 - 1,80%	0,50 - 1,50%	<i>United States Dollar</i>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,
tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang
dibatasi penggunaannya oleh Perusahaan.

As of December 31, 2017 and 2016, there are no
cash and cash equivalents that are restricted for use
by the Company.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK - EFEK

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Tersedia untuk dijual*):		
Rupiah		
Obligasi - Pihak berelasi	508.352	-
Obligasi - Pihak ketiga	246.484	-
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi - Pihak berelasi	2.077.741	1.422.239
Obligasi - Pihak ketiga	-	484.242
Euro Eropa		
Obligasi - Pihak berelasi	-	71.211
Diukur pada biaya perolehan:		
Rupiah		
Sukuk - Pihak ketiga	-	250.000
Dimiliki hingga jatuh tempo:		
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi - Pihak ketiga	134.808	200.554
	2.967.385	2.428.246

6. SECURITIES

	31 Desember/ December 31, 2016
Available-for-sale*):	
Rupiah	
Bonds - Related party	
Bonds - Third party	
United States Dollar	
Bonds - Related parties	
Bonds - Third parties	
European Euro	
Bonds - Related party	
Acquisition cost:	
Rupiah	
Sukuk - Third party	
Held-to-maturity:	
United States Dollar	
Bonds - Third parties	

*) Termasuk obligasi sukuk yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK No. 110 (Revisi 2015).

*) Including sukuk bonds classified as fair value through other comprehensive income based on SFAS No. 110 (Revised 2015).

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The details of securities as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

31 Desember/December 31, 2017						
	Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah						
Sukuk						
Pihak ketiga/Third party						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 seri D	idAAA****)	28 Des./ Dec. 28, 2017	28 Des./ Dec. 28, 2022	PT XL Axiata Tbk	248.100	246.484
Rupiah						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Senior Unsecured notes	Baa3****)	11 Des./ Dec. 11, 2017	11 Des./ Dec. 11, 2020	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	250.000	252.535
PT Marga Lingkar Jakarta Senior Unsecured notes	idAAA****)	8 Nov./ Nov. 8, 2017	11 Agt./ Aug. 11, 2029	PT Marga Lingkar Jakarta	250.000	255.817
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI0320	BBB****)	29 Okt./ Oct. 29, 2015	13 Mar./ Mar. 13, 2020	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	193.942	196.471
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI0321	BBB****)	29 Jun./ Jun. 29, 2016	5 Mei/May 5, 2021	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	316.451	317.876
Majapahit Holding BV/PLN Senior unsecured notes	BBB****)	1 Mar./Mar. 1, 2016	7 Agt./Aug. 7, 2019	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	126.478	127.651

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai
berikut: (lanjutan)

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2017
and 2016 are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2017						
Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount	
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)/ United States Dollar (continued)						
Obligasi (lanjutan)/Bonds (continued)						
Pihak berelasi/Related parties						
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI21	BBB***)	29 Mar./ Mar. 29, 2016	29 Mar./ Mar. 29, 2021	Perusahaan Penerbit SBSN	144.547	144.766
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	BBB***)	29 Mar./ Mar. 29, 2017	29 Mar./ Mar. 29, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	372.880	378.217
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	BBB***)	20 Jul./Jul. 20, 2016	25 Apr./ Apr. 25, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	258.918	257.884
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	BBB***)	8 Des./Dec. 8, 2016	8 Jan./Jan. 8, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	102.565	104.487
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	BBB***)	26 Jul./Jul. 26, 2017	21 Nov./ Nov. 21, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	20.557	20.552
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Bond RI023	BBB***)	26 Jul./Jul. 26, 2017	15 Apr./ Apr. 15, 2023	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	13.658	13.685
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Bond RI028	BBB***)	11 Des./Dec. 11, 2017	11 Jan./ Jan. 11, 2028	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	229.344	229.711
PT Pertamina Bond022						
	BBB***)	15 Jul./Jul. 15, 2016	3 Mei/May 3, 2022	PT Pertamina (Persero)	28.549	28.809
PT Pertamina Bond021						
	BBB-***)	15 Jul./Jul. 15, 2016	23 Mei/ May 23, 2021	PT Pertamina (Persero)	129.779	130.657
PT Pertamina Bond023						
	BBB***)	30 Jul./Jul. 30, 2016	20 Mei/ May 20, 2023	PT Pertamina (Persero)	126.774	126.975
Pihak ketiga/Third party						
Pratama Agung Senior Unsecured Notes						
	BB-/AA-*)	11 Mei/May 11, 2015	24 Feb./ Feb. 24, 2020	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	134.808	134.808
				2.947.350	2.967.385	

31 Desember/December 31, 2016						
Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount	
Rupiah						
Obligasi/Bonds						
Pihak ketiga/Third party						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D						
	idAAA*)	2 Des./ Dec. 2, 2015	2 Des./ Dec. 2, 2022	PT XL Axiata Tbk	250.000	250.000
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI0320						
	BBB-***)	29 Okt./ Oct. 29, 2015	13 Mar./ Mar. 13, 2020	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	181.386	198.227
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI0321						
	BBB-***)	29 Jun./ Jun. 29, 2016	5 Mei/May 5, 2021	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	188.104	199.647
Majapahit Holding BV/PLN Senior unsecured notes						
	BBB-***)	1 Mar./Mar. 1, 2016	7 Agt./Aug. 7, 2019	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	116.893	131.625
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI0124						
	BBB-***)	15 Jan./ Jan. 15, 2014	15 Jan./ Jan. 15, 2024	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	67.180	73.985

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2017 and 2016 are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2016						
Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount	
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)/ United States Dollar (continued)						
Obligasi (lanjutan)/Bonds (continued)						
States Dollar						
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI21	BBB-***)	29 Mar./ Mar. 29, 2016	29 Mar./ Mar. 29, 2021	Perusahaan Penerbit SBSN	73.898	73.532
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI26	BBB-***)	29 Mar./ Mar. 29, 2016	29 Mar./ Mar. 29, 2026	Perusahaan Penerbit SBSN	53.744	54.016
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	BBB-***)	20 Jul./Jul. 20, 2016	25 Apr./ Apr. 25, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	147.796	148.540
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	BBB-***)	8 Des./Dec. 8, 2016	8 Jan./Jan. 8, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	94.052	94.603
Indonesian Government						
Senior Unsecured USD denominated Bond RI027	BBB-***)	8 Des./Dec. 8, 2016	8 Jan./Jan. 8, 2027	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	577.748	579.689
PT Pertamina Bond022						
	BBB-***)	15 Jul./Jul. 15, 2016	3 Mei/May 3, 2022	PT Pertamina (Persero)	26.872	27.679
PT Pertamina Bond021						
	BBB-***)	15 Jul./Jul. 15, 2016	May 23, 2021	PT Pertamina (Persero)	120.924	126.830
PT Pertamina Bond023						
	BBB-***)	30 Jul./Jul. 30, 2016	May 20, 2023	PT Pertamina (Persero)	120.924	120.164
Pihak ketiga/Third parties						
Pratama Agung Senior						
Unsecured Notes	BB-/AA-*)	11 Mei/ May 11, 2015	24 Feb./ Feb. 24, 2020	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	134.360	133.374
TBG Global PTE LTD Senior						
Unsecured Notes	BB/AA*)	3 Apr./Apr. 3, 2013	3 Apr./Apr. 3, 2018	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	67.180	67.180
Listrindo Capital						
B.V Bond	Ba2/AA**)	13 Sep./ Sep. 13, 2016	14 Sep./ Sep. 14, 2026	PT Cikarang Listrindo Tbk	80.616	77.944
Euro/Euro						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related party						
Indonesia Government Senior						
Unsecured EUR denominated Bond RI0323	BBB-***)	14 Jun./ Jun. 14, 2016	14 Jun./ Jun. 14, 2023	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	70.808	71.211
				2.372.485	2.428.246	

*) Peringkat untuk efek-efek adalah berdasarkan peringkat yang dikeluarkan Fitch rating. Peringkat untuk Pratama Agung dan TBG Global PTE LTD adalah peringkat internasional dan penyetaraan dengan peringkat lokal yang dikeluarkan oleh Fitch rating.

***) Peringkat untuk efek-efek adalah berdasarkan peringkat yang dikeluarkan Moody's. Peringkat untuk Listrindo Capital B.V adalah peringkat internasional dan penyetaraan dengan peringkat lokal yang dikeluarkan oleh Moody's.

****) Peringkat untuk efek-efek adalah berdasarkan peringkat internasional yang dikeluarkan Moody's untuk Pemerintah Indonesia, obligasi global Jasa Marga, Pertamina, Majapahit Holding BV dan Marga Lingkar Jakarta.

*****) Sukuk XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D merupakan underlying dari reksa dana dimana Perusahaan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki unit reksa dana tersebut.

*) Ratings for securities is based on rating issued by Fitch rating. Ratings for Pratama Agung and TBG Global PTE LTD are international ratings and equivalent local rating issued by Fitch rating.

***) Ratings for securities is based on rating issued by Moody's. Rating for Listrindo Capital B.V is international rating and equivalent local rating issued by Moody's.

****) Ratings for securities is based on international rating issued by Moody's for the Government of the Republic of Indonesia, global bonds of Jasa Marga, Pertamina, Majapahit Holding BV and Marga Lingkar Jakarta.

*****) Sukuk XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D is the underlying security of mutual fund, whereas the Company is the only party who holds the mutual fund unit.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2017
Tingkat bunga per tahun	
Rupiah	7,50 - 11,00%
Dolar Amerika Serikat	3,30 - 8,00%
Euro Eropa	-

Selama tahun 2017 dan 2016, Perusahaan melakukan penjualan sejumlah efek-efek dan membukukan keuntungan bersih sebesar Rp88.963 dan Rp2.614 yang dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Lain-lain

Mutasi keuntungan/(kerugian) belum direalisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017
Saldo awal	(16.683)
Kenaikan/(penurunan) nilai wajar	44.154
Efek pajak	(6.188)
Saldo akhir	21.283

Pada bulan Mei 2017, terdapat pembelian kembali *Senior Unsecured Notes* TBG Global PTE LTD sebesar nilai pasar oleh penerbit sesuai dengan ketentuan penerbitan obligasi.

Tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Rincian transaksi derivatif yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2017					
	Tanggal transaksi/ Transaction date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan/ Counterparty	Nilai nosional/ Notional amount	Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities
Swap					
Pihak ketiga/Third party					
IDR/USD	29 Des./Dec. 29, 2017	11 Des./Dec. 11, 2020	PT Bank ANZ Indonesia	USD15.000.000	1.126
IDR/USD	29 Des./Dec. 29, 2017	20 Jun./Jun. 20, 2018	PT Bank ANZ Indonesia	USD5.000.000	63
IDR/USD	29 Des./Dec. 29, 2017	20 Jun./Jun. 20, 2018	PT Bank ANZ Indonesia	USD7.000.000	415
Pihak berelasi/Related party					
USD/EUR	27 Des./Dec. 27, 2017	29 Jan./Jan. 29, 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	EUR21.061.450	2.870
					4.474
31 Desember/December 31, 2016					
	Tanggal transaksi/ Transaction date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan/ Counterparty	Nilai nosional/ Notional amount	Tagihan derivatif/ Derivative receivable
Swap					
Pihak ketiga/Third party					
USD/EUR	13 Des./Dec. 13, 2016	13 Mar./Mar. 13, 2017	PT Bank ANZ Indonesia	EUR4.953.000	578

6. SECURITIES (continued)

31 Desember/ December 31, 2016
11,00%
3,40 - 6,25%
2,63%

Interest rate per annum
Rupiah
United States Dollar
European Euro

In 2017 and 2016, the Company sold some of its securities and booked net gain of Rp88,963 and Rp2,614, respectively, which was recorded in the current year statement of profit and loss and other comprehensive income.

Others

Movements of unrealized gain/(loss) on available-for-sale securities are as follows:

31 Desember/ December 31, 2016
2.164
(25.129)
6.282
(16.683)

Beginning balance
Increase/(decrease) in fair value
Tax effect

Ending balance

In May 2017, the issuer repurchased Senior Unsecured Notes TBG Global PTE LTD at market value in accordance with the bond issuance terms.

There were no impaired securities as of December 31, 2017 and 2016.

7. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES

The details of outstanding derivative transactions are as follows:

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, transaksi derivatif tidak dimaksudkan untuk keperluan lindung nilai secara akuntansi.

8. INVESTASI SAHAM

Pada tanggal 30 Mei 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dengan PT Maxpower Indonesia ("PTMI"). Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan membeli 1.525 lembar saham kelas B dengan nilai nominal USD52 per lembar atau sebesar 5,747% dari jumlah saham PTMI yang ditempatkan dan disetor. Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan membayar sebesar USD12.500.000 atas pembelian saham tersebut.

Perusahaan menetapkan investasi saham ini sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan juga menandatangani Akta Pertukaran Saham (*Share Exchange Deed*) ("Akta") dengan Maxpower Group Pte Ltd ("MGPL") dan PTMI dimana Perusahaan mendapatkan hak tukar atas kepemilikan saham di PTMI menjadi saham MGPL. MGPL merupakan induk perusahaan dari PTMI. Hak tukar tersebut dapat dieksekusi kapan saja setelah penandatanganan Akta ini.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan mengeksekusi hak tukar atas kepemilikan saham Perusahaan di PTMI, menjadi saham MGPL. Berdasarkan hak tukar tersebut, Perusahaan mendapatkan kepemilikan saham pada MGPL sebesar 5,7844%, dengan melepaskan kepemilikan pada saham PTMI sebesar 5,747%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 Perusahaan menetapkan nilai wajar investasi saham MGPL sebesar RpNihil dengan mempertimbangkan kinerja keuangan MGPL terkini.

Nilai wajar investasi saham pada tanggal 31 Desember 2016 dihitung berdasarkan laporan dari Kantor Jasa Penilai Perusahaan Ihot Dollar & Raymond melalui laporannya tertanggal 6 Februari 2017 yaitu sebesar USD8.492.568 (ekuivalen dengan Rp114.106).

Dengan basis bahwa investasi dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, asumsi yang digunakan oleh penilai independen adalah sebagai berikut:

**7. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES
(continued)**

As of December 31, 2017 and 2016, derivative transactions are not determined as hedging for accounting purposes.

8. EQUITY INVESTMENTS

On May 30, 2014, the Company signed a Shares Subscription Agreement with PT Maxpower Indonesia ("PTMI"). Based on the agreement, the Company subscribed 1,525 Series B shares with nominal value of USD52 per share or equivalent to 5.747% of PTMI's total subscribed and paid-up capital. On July 4, 2014, the Company paid USD12,500,000 for the shares subscription.

The Company designated this equity investment as at fair value through profit or loss (FVTPL).

On July 4, 2014, the Company also signed a Share Exchange Deed ("Deed") with Maxpower Group Pte Ltd ("MGPL") and PTMI where the Company receives an option to exchange its share ownership from PTMI to become MGPL shares. MGPL is a parent of PTMI. The option can be executed at any time after the signing of the Deed.

On June 30, 2016, the Company executed the option to exchange its shares in PTMI to become shares in MGPL. Based on the shares exchange, the Company obtains the share ownership of 5.7844% in MGPL and releases shares ownership of 5.747% in PTMI.

As of December 31, 2017, the Company designated the fair value of equity investment in MGPL of RpNil, considering the latest financial condition of MGPL.

The fair value of equity investment as of December 31, 2016 was based on the report from Independent Valuer Ihot Dollar & Raymond through its report dated February 6, 2017 amounting to USD8,492,568 (equivalent to Rp114,106).

On the basis that the investment was in United States Dollar, the following assumptions are used by independent valuer:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

Perhitungan nilai wajar investasi pada tanggal 31 Desember 2016 dilakukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan berdasarkan rencana bisnis yang disetujui oleh manajemen untuk periode 7 tahun sampai dengan tahun 2023. Berikut adalah asumsi utama yang digunakan:

31 Desember/December 31, 2016		
Pendekatan dan metode yang digunakan	Diskonto arus kas/ Discounted cash flow	Approach and methods used
Tingkat diskonto	7,42%	Discount rate
Pertumbuhan PDB	5,09%	PDB's growth
Pertumbuhan nilai terminal	4,73%	Terminal value growth
Tingkat bunga bebas risiko	4,62%	Risk-free rate
Premi risiko	8,82%	Risk premium
Lack of liquidity discount	30,00%	Lack of liquidity discount

Kemungkinan perubahan *lack of liquidity discount* sebesar 5%, dengan variabel lain dianggap tetap, akan mengakibatkan kenaikan/penurunan nilai wajar investasi saham pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp8.150.

8. EQUITY INVESTMENTS (continued)

The valuation of fair value of investment as of December 31, 2016 was determined by discounting the future cash flow based on the approved business plan by the management for the 7 years period up to 2023. The following key assumptions are used:

Possible change at 5% in lack of liquidity discount rate, with all other variables held constant, would increase/decrease the fair value of equity investment as of December 31, 2016 by Rp8,150.

Komitmen investasi saham

Equity investment commitment

Rincian komitmen investasi saham adalah sebagai berikut:

Details of equity investment commitment are as follows:

31 Desember/December 31, 2017				
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total	
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga Energi	169.350	-	169.350	United States Dollar - Third party Energy
	169.350	-	169.350	

31 Desember/December 31, 2016				
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total	
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga Energi	167.950	-	167.950	United States Dollar - Third party Energy
	167.950	-	167.950	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN

Pinjaman diberikan berdasarkan mata uang dan jenis kredit:

	31 Desember/ December, 31 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Rupiah - Pihak berelasi		
Investasi	1.587.822	601.679
Modal kerja	-	800.000
	1.587.822	1.401.679
Rupiah - Pihak ketiga		
Investasi	2.160.749	1.443.817
Modal kerja	200.000	200.000
	2.360.749	1.643.817
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi		
Investasi	360.685	369.189
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga		
Investasi	1.389.436	1.159.477
	1.750.121	1.528.666
	5.698.692	4.574.162
Ditambah/(dikurangi):		
Piutang bunga	23.011	21.215
Biaya transaksi belum diamortisasi	(30.856)	(25.776)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(144.887)	(60.732)
	5.545.960	4.508.869

9. LOANS

Loans based on currency and type of loans:

Rupiah - Related parties
Investment
Working capital
Rupiah - Third parties
Investment
Working capital
United States Dollar - Related parties
Investment
United States Dollar - Third parties
Investment
Add/(less):
Accrued interest income
Unamortized transaction costs
Allowance for impairment losses

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman diberikan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai:

The table below summarizes the loans that are not impaired and impaired:

	31 Desember/December 31, 2017			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Unimpaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Rupiah - Pihak berelasi				Rupiah - Related parties
Pelabuhan udara	547.080	-	547.080	Airport
Jalan tol	800.000	-	800.000	Toll road
Telekomunikasi	71.517	-	71.517	Telecommunication
Energi	169.225	-	169.225	Energy
	1.587.822	-	1.587.822	
Rupiah - Pihak ketiga				Rupiah - Third parties
Jalan tol	839.273	-	839.273	Toll road
Telekomunikasi	523.333	-	523.333	Telecommunication
Penunjang pelabuhan laut	200.531	-	200.531	Seaport support
Energi	133.253	198.500	331.753	Energy
Air minum	465.858	-	465.858	Drinking water
	2.162.248	198.500	2.360.748	
Dolar Amerika Serikat -				United States Dollar -
Pihak berelasi				Related parties
Pemeliharaan pesawat	164.507	-	164.507	Aircraft maintenance
Pelabuhan laut	172.144	-	172.144	Seaport
Energi	24.034	-	24.034	Energy
	360.685	-	360.685	
Dolar Amerika Serikat -				United States Dollar -
Pihak ketiga				Third parties
Energi	1.040.504	309.502	1.350.006	Energy
Penunjang pelabuhan laut	39.431	-	39.431	Seaport support
	1.079.935	309.502	1.389.437	
	5.190.690	508.002	5.698.692	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman diberikan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai: (lanjutan)

9. LOANS (continued)

The table below summarizes the loans that are not impaired and impaired: (continued)

31 Desember/December 31, 2017			
Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Unimpaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
Ditambah/(dikurangi):			<i>Add/(less):</i>
Piutang bunga	21.057	1.954	<i>Accrued interest income</i>
Biaya transaksi belum diamortisasi	(29.324)	(1.532)	<i>Unamortized transaction costs</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.223)	(109.664)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	5.147.200	398.760	5.545.960
31 Desember/December 31, 2016			
Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Unimpaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
Rupiah - Pihak berelasi			<i>Rupiah - Related parties</i>
Pelabuhan udara	426.679	-	<i>Airport</i>
Jalan tol	800.000	-	<i>Toll road</i>
Energi	175.000	-	<i>Energy</i>
	1.401.679	-	1.401.679
Rupiah - Pihak ketiga			<i>Rupiah - Third parties</i>
Jalan tol	648.017	-	<i>Toll road</i>
Telekomunikasi	447.128	-	<i>Telecommunication</i>
Penunjang pelabuhan laut	207.000	-	<i>Seaport support</i>
Energi	341.672	-	<i>Energy</i>
	1.643.817	-	1.643.817
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi			<i>United States Dollar - Related parties</i>
Pemeliharaan pesawat	217.529	-	<i>Aircraft maintenance</i>
Pelabuhan laut	119.225	-	<i>Seaport</i>
Energi	32.435	-	<i>Energy</i>
	369.189	-	369.189
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga			<i>United States Dollar - Third parties</i>
Energi	931.346	228.131	<i>Energy</i>
	4.346.031	228.131	4.574.162
Ditambah/(dikurangi):			<i>Add/(less):</i>
Piutang bunga	21.129	86	<i>Accrued interest income</i>
Biaya transaksi belum diamortisasi	(24.022)	(1.754)	<i>Unamortized transaction costs</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.755)	(24.977)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	4.307.383	201.486	4.508.869

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Pinjaman diberikan berdasarkan jangka waktu pinjaman:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Rupiah - Pihak berelasi		
Kurang dari 1 tahun	813.010	800.000
5 - 10 tahun	665.900	292.669
Lebih dari 10 tahun	108.912	309.010
Rupiah - Pihak ketiga		
1 - 2 tahun	396.144	279.532
2 - 5 tahun	1.039.293	653.392
5 - 10 tahun	825.408	496.501
Lebih dari 10 tahun	99.904	214.392
	3.948.571	3.045.496
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi		
5 - 10 tahun	360.685	369.189
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga		
1 - 2 tahun	149.473	247.167
2 - 5 tahun	1.042.869	520.686
5 - 10 tahun	135.467	317.739
Lebih dari 10 tahun	61.627	73.885
	1.750.121	1.528.666
	5.698.692	4.574.162
Ditambah/(dikurangi):		
Piutang bunga	23.011	21.215
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(30.856)	(25.776)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(144.887)	(60.732)
	5.545.960	4.508.869

9. LOANS (continued)

Loans based on credit term:

Rupiah - Related parties	
Less than 1 year	
5 - 10 years	
More than 10 years	
Rupiah - Third parties	
1 - 2 years	
2 - 5 years	
5 - 10 years	
More than 10 years	
United States Dollar - Related parties	
5 - 10 years	
United States Dollar - Third parties	
1 - 2 years	
2 - 5 years	
5 - 10 years	
More than 10 years	
Add/(less):	
Accrued interest income	
Unamortized transaction costs	
Allowance for impairment losses	

Pada tahun 2017, terdapat kenaikan atas pinjaman diberikan yang berasal dari bunga dalam masa konstruksi sebesar Rp16.594 (2016: Rp6.313 dan USD27.730).

In 2017, there is an increase in loans from interest during construction amounting to Rp16,594 (2016: Rp6,313 and USD27,730).

Mutasi total pinjaman diberikan:

Movement of total loan outstanding:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Saldo awal	4.574.162	3.376.710	Beginning balance
Pencairan pinjaman selama tahun berjalan	2.991.494	2.093.717	Disbursement during the year
Penerimaan pembayaran pinjaman	(1.863.024)	(846.538)	Loan repayment
Efek selisih kurs	(3.940)	(44.727)	Foreign exchange effect
Saldo akhir	5.698.692	4.574.162	Ending balance

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Movement of allowance for impairment losses:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Saldo awal	60.732	28.426	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan	83.451	32.554	Provision for the year
Efek selisih kurs	704	(248)	Foreign exchange effect
Saldo akhir	144.887	60.732	Ending balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Perusahaan menghitung cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penilaian secara individual dan kolektif.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat pinjaman diberikan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman diberikan telah memadai.

Termasuk didalam pinjaman diberikan merupakan pinjaman dengan perjanjian pembiayaan bersama dengan entitas lain. Keikutsertaan Perusahaan sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 6% sampai dengan 50% pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dari total kredit sindikasi (tidak diaudit). Risiko atas kredit sindikasi ditanggung secara proporsional oleh peserta kreditur.

Komitmen pinjaman diberikan

Rincian komitmen pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:

9. LOANS (continued)

The Company provides allowance for impairment losses based on individual and collective assessments.

As of December 31, 2017 and 2016, there are no past due but not impaired loans.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate.

Included in the loans are loans with syndication agreements with other entities. The Company's participation as a member of syndicated loans were 6% to 50% as of December 31, 2017 and 2016 of the total syndicated loans (unaudited). Risks from syndicated loans are shared proportionately by the participating creditors.

Loan commitment

Details of loan commitment are as follows:

31 Desember/December 31, 2017

	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total	
Rupiah - Pihak berelasi				Rupiah - Related parties
Jalan tol	800.000	-	800.000	Toll road
Pelabuhan udara	547.080	352.920	900.000	Airport
Telekomunikasi	71.517	428.483	500.000	Telecommunication
Energi	169.225	-	169.225	Energy
	1.587.822	781.403	2.369.225	
Rupiah - Pihak ketiga				Rupiah - Third parties
Jalan tol	839.273	50.000	889.273	Toll road
Telekomunikasi	523.333	600.000	1.123.333	Telecommunication
Penunjang pelabuhan laut	200.531	54.192	254.723	Seaport support
Energi	331.753	-	331.753	Energy
Air minum	465.858	731.142	1.197.000	Drinking water
	2.360.748	1.435.334	3.796.082	
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi				United States Dollar - Related parties
Pemeliharaan pesawat	164.507	-	164.507	Aircraft maintenance
Pelabuhan laut	172.144	-	172.144	Seaport
Energi	24.034	-	24.034	Energy
	360.685	-	360.685	
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga				United States Dollar - Third parties
Energi	1.350.006	533.008	1.883.014	Energy
Penunjang pelabuhan laut	39.431	44.708	84.139	Seaport support
	1.389.437	577.716	1.967.153	
	5.698.692	2.794.453	8.493.145	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Komitmen pinjaman diberikan (lanjutan)

Rincian komitmen pinjaman diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

9. LOANS (continued)

Loan commitment (continued)

Details of loan commitment are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2016

	Komitmen yang sudah dicairkan/ <i>Commitment - drawdown</i>	Komitmen yang belum dicairkan/ <i>Commitment - undrawdown</i>	Total	
Rupiah - Pihak berelasi				Rupiah - Related parties
Jalan tol	800.000	-	800.000	Toll road
Pelabuhan udara	426.679	473.321	900.000	Airport
Energi	175.000	-	175.000	Energy
	1.401.679	473.321	1.875.000	
Rupiah - Pihak ketiga				Rupiah - Third parties
Jalan tol	648.017	-	648.017	Toll road
Telekomunikasi	447.128	552.872	1.000.000	Telecommunication
Penunjang pelabuhan laut	207.000	530.000	737.000	Seaport support
Energi	341.672	27.828	369.500	Energy
	1.643.817	1.110.700	2.754.517	
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi				United States Dollar - Related parties
Pemeliharaan pesawat	217.529	-	217.529	Aircraft maintenance
Pelabuhan laut	119.225	686.935	806.160	Seaport
Energi	32.435	-	32.435	Energy
	369.189	686.935	1.056.124	
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga				United States Dollar - Third parties
Energi	1.159.477	572.277	1.731.754	Energy
	4.574.162	2.843.233	7.417.395	

Termasuk dalam total komitmen di atas adalah bunga dalam masa konstruksi (IDC) sebesar Rp184.754 di tahun 2017 serta Rp131.495 dan USD27.730 di tahun 2016.

The total commitment above includes interest during construction (IDC) amounting to Rp184,754 in 2017 and Rp131,495 and USD27,730 in 2016.

Mutasi total komitmen pinjaman diberikan:

Movement of total loan commitment:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Saldo awal	7.417.395	4.628.630	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	3.665.270	3.814.110	Addition during the year
Penerimaan pembayaran pinjaman	(1.863.024)	(846.538)	Loan repayment
Pembatalan fasilitas	(705.968)	(32.484)	Facility cancellation
Efek selisih kurs	(20.528)	(146.323)	Foreign exchange effect
Saldo akhir	8.493.145	7.417.395	Ending balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Komitmen pinjaman diberikan (lanjutan)

Pinjaman diberikan oleh Perusahaan memiliki tingkat bunga tetap dan mengambang dengan suku bunga rata-rata di tahun 2017 dan 2016 sebesar 9,55% dan 10,85% per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah, dan 5,21% dan 5,83% per tahun untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat.

Pinjaman diberikan dapat dijamin dengan agunan berupa salah satu atau kombinasi dari aset tetap, saham, mesin atau peralatan, piutang, rekening bank, jaminan perusahaan atau personal dan jaminan lain yang relevan, serta pengikatan secara hak tanggungan, gadai atau fidusia. Pada beberapa debitur, pemberian pinjaman diberikan secara sindikasi atau *club deal* dengan melibatkan minimal dua kreditur. Dalam hal ini, agunan yang diterima dilakukan pengikatan secara *pari passu* sesuai proporsi nilai fasilitas yang diberikan.

9. LOANS (continued)

Loan commitment (continued)

The Company disbursed the loans at fixed and floating rates whereby the average interest rates in 2017 and 2016 are 9.55% and 10.85% per annum for Rupiah loans, and 5.21% and 5.83% per annum, for United States Dollar loans.

Loans may be secured by collateral in the form of one or a combination of fixed assets, shares, machinery or equipment, accounts receivable, bank accounts, personal and corporate guarantees, or other relevant guarantees as well as a binding mortgage, lien or fiduciary. For some debtors, the loans are syndicated loans or club deal involving at least two creditors. In this case, the collateral received is binded in accordance with the portion of facility amount on *pari passu* basis.

10. PIUTANG BUNGA

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Deposito berjangka	3.472	3.548	Time deposits
Efek-efek	28.364	23.342	Securities
Transaksi derivatif	483	-	Derivative transactions
	32.319	26.890	

10. ACCRUED INTEREST INCOME

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Sewa dan pemeliharaan	1.782	1.950	Rent and service charge
Program kepemilikan mobil	1.026	1.512	Car ownership program
Asuransi	924	521	Insurance
Lain-lain	2.348	1.929	Others
	6.080	5.912	

11. PREPAID EXPENSES

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP

12. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2017	
Harga perolehan						Cost
Kendaraan	2.704	-	-	-	2.704	Vehicles
Komputer	2.935	350	-	200	3.485	Computer
Peralatan kantor	743	1.504	-	-	2.247	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	9.469	-	-	-	9.469	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	350	281.950	-	(200)	282.100	Property and equipment in progress
	16.201	283.804	-	-	300.005	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Kendaraan	2.192	204	-	-	2.396	Vehicles
Komputer	1.570	719	-	-	2.289	Computer
Peralatan kantor	310	496	-	-	806	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	5.202	2.325	-	-	7.527	Office furniture and fixtures
	9.274	3.744	-	-	13.018	
Total tercatat	6.927				286.987	Net carrying value
	1 Januari/ January 1, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2016	
Harga perolehan						Cost
Kendaraan	2.160	544	-	-	2.704	Vehicles
Komputer	2.672	272	(9)	-	2.935	Computer
Peralatan kantor	428	315	-	-	743	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	9.467	2	-	-	9.469	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	-	350	-	-	350	Property and equipment in progress
	14.727	1.483	(9)	-	16.201	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Kendaraan	1.909	283	-	-	2.192	Vehicles
Komputer	903	675	(8)	-	1.570	Computer
Peralatan kantor	147	163	-	-	310	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	2.873	2.329	-	-	5.202	Office furniture and fixtures
	5.832	3.450	(8)	-	9.274	
Total tercatat	8.895				6.927	Net carrying value

Penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 25).

Depreciation of property and equipment is charged to general and administrative expenses (Note 25).

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset tetap dalam penyelesaian sebesar Rp282.100 terutama merupakan unit gedung kantor yang sedang dalam proses pembangunan dengan estimasi penyelesaian di tahun 2018.

As of December 31, 2017, property and equipment in progress amounting to Rp282,100 mainly represents office building unit which is in progress of construction with estimated completion in 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset tetap dalam penyelesaian sebesar Rp350 terutama merupakan komputer dengan persentase penyelesaian sebesar 99% dan estimasi penyelesaian di tahun 2017.

As of December 31, 2016, property and equipment in progress amounted to Rp350 mainly represents computer with percentage of completion of 99% and estimated completion in 2017.

Rincian dari laba atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of gain on sale of fixed assets are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Harga jual	-	4	Selling price
Nilai buku	-	(1)	Book value
Laba penjualan aset tetap	-	3	Gain on sale of fixed assets

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp3.036 (2016: Rp2.308).

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi QBE Pool Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT QBE General Insurance Indonesia dan PT Sinar Mas, yang merupakan pihak ketiga, terhadap risiko kerugian dan kehilangan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp310.387 (2016: Rp15.013). Manajemen berpendapat bahwa perlindungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelaahan penurunan nilai atas aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat terpulihkan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

13. BEBAN TANGGUHAN

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang dibayarkan kepada pihak ketiga berkaitan dengan proses pemberian kredit kepada nasabah dan proses pinjaman diterima oleh Perusahaan. Biaya transaksi akan disajikan sebagai bagian dari pinjaman diberikan atau pinjaman diterima dan kemudian diamortisasi ketika pinjaman diberikan tersebut telah disalurkan kepada debitur atau pinjaman diterima telah ditarik oleh Perusahaan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa beban tangguhan dapat direalisasi pada kegiatan bisnis normal.

14. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp6.717 tahun 2017	31.713	54.890
Perangkat lunak komputer	18.177	22.795
Uang jaminan	2.823	2.955
Uang muka	95	99
	52.808	80.739

Termasuk didalam piutang lain-lain adalah piutang atas pendapatan komitmen terkait pinjaman yang diberikan yang belum ditarik dan piutang pendapatan *advisory*.

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

As of December 31, 2017, the gross amount of property and equipment which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp3,036 (2016: Rp2,308).

As of December 31, 2017, property and equipment were insured with PT Asuransi QBE Pool Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT QBE General Insurance Indonesia and PT Sinar Mas, which are third parties, against damage and loss risks with sum insured of Rp310,387 (2016: Rp15,013). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured assets.

Based on the assessment for impairment of the property and equipment, the Company's management believes that there are no events or changes in circumstances, which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2017 and 2016.

13. DEFERRED CHARGES

Deferred charges represent transaction costs paid to third parties in relation to the processing of the loan to the customers and the processing of the fund borrowings. The transaction cost will be presented as part of the loan or fund borrowings and amortized when the loan is disbursed to the debtors or the fund borrowings have been drawn by the Company.

As of December 31, 2017 and 2016, management believes that the deferred charges are realizable in the ordinary course of business.

14. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Other receivables - net of allowance for impairment loss of Rp6,717 in 2017	31.713	54.890
Computer software	18.177	22.795
Security deposit	2.823	2.955
Advances	95	99
	52.808	80.739

Included in other receivables are commitment income receivables related to undrawn loan facilities and advisory income receivables.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Perangkat lunak komputer

14. OTHER ASSETS (continued)

Computer softwares

31 Desember/December 31, 2017

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Sado akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan	33.056	1.214	34.270	Cost
Akumulasi amortisasi	10.261	5.832	16.093	Accumulated amortization
Nilai buku neto	22.795		18.177	Net book value

31 Desember/December 31, 2016

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Sado akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan	28.167	4.889	33.056	Cost
Akumulasi amortisasi	3.722	6.539	10.261	Accumulated amortization
Nilai buku neto	24.445		22.795	Net book value

15. UTANG LAIN-LAIN

15. OTHER PAYABLES

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2017	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2016	
Pihak berelasi			<i>Related party</i>
Provisi sindikasi pinjaman	-	7.875	Loan syndication fee
	-	7.875	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Jasa profesional	115	1.298	Professional services
Dana pengembalian pinjaman diterima dimuka	61	1.959	Loan repayment fund received in advance
Lain-lain	2.487	605	Others
	2.663	3.862	
	2.663	11.737	

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan utang atas pinjaman sindikasi yang merupakan porsi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Catatan 29).

Other payable to related party as of December 31, 2016 represent amounts due in relation to loan syndication fee which become the portion of PT Sarana Multi Infrastructure (Persero) (Note 29).

Dana pengembalian pinjaman diterima dimuka adalah transfer dana yang diterima di akhir bulan Desember 2017 dan 2016 yang merupakan pembayaran pinjaman dari beberapa debitur yang jatuh tempo pada bulan Januari 2018 dan 2017.

Loan repayment fund received in advance is the incoming transfer received at the end of December 2017 and 2016 which represents loan repayment from several debtors which are due in January 2018 and 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalam lain-lain adalah utang bunga atas transaksi Mandiri Deposit Swap sebesar Rp1.219.

As of December 31, 2017, included in others is interest payable related to Mandiri Deposit Swap transaction amounting to Rp1,219.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**16. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR DAN
LIABILITAS LAIN-LAIN**

16. ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
Program insentif jangka panjang	5.095	2.269	<i>Long term incentives plan</i>
Beban komitmen	3.434	423	<i>Commitment fees</i>
Lain-lain	6	-	<i>Others</i>
	<u>8.535</u>	<u>2.692</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Biaya jasa profesional	9.991	6.309	<i>Professional fee expense</i>
Bonus karyawan dan pengurus	-	17.126	<i>Employee and management bonuses</i>
Pengembangan sistem	846	2.304	<i>System development</i>
Cadangan tunjangan	842	2.390	<i>Benefits provision</i>
Lain-lain	7.274	2.659	<i>Others</i>
	<u>18.953</u>	<u>30.788</u>	
	<u>27.488</u>	<u>33.480</u>	

Beban komitmen kepada pihak berelasi merupakan beban komitmen atas pinjaman yang belum dicairkan oleh Perusahaan, yang diberikan oleh Bank Dunia, melalui mekanisme Pinjaman Subordinasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan oleh International Finance Corporation (Catatan 19 dan 31).

Commitment expenses to related parties represent commitment fees in relation to the undrawn borrowings by the Company, which provided by the World Bank, in form of Subordinated Loan through PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), and by the International Finance Corporation (Notes 19 and 31).

Program Insentif Jangka Panjang (LTIP) sebesar Rp5.095 merupakan LTIP untuk kinerja tahun 2016 yang akan dibayarkan di tahun 2018. Sedangkan LTIP untuk kinerja tahun 2017 dan kinerja rata-rata 3 tahunan (2015-2017) ditetapkan sebesar RpNihil.

Long Term Incentive Plan (LTIP) amounting to Rp5,095 in 2017 represents the LTIP for 2016 performance which will be paid in 2018. While the LTIP for 2017 performance and for 3 years average performance (2015-2017) is determined at RpNil.

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN

17. DEBT SECURITIES ISSUED

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016:			<i>Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016:</i>
Seri A			<i>A Series</i>
Pihak ketiga	690.000	690.000	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	135.000	135.000	<i>Related party</i>
Seri B			<i>B Series</i>
Pihak ketiga	172.000	195.000	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	78.000	55.000	<i>Related party</i>
Seri C			<i>C Series</i>
Pihak ketiga	259.000	259.000	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	166.000	166.000	<i>Related parties</i>
	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Biaya penerbitan belum diamortisasi	(3.892)	(5.679)	Unamortized issuance costs
Beban bunga yang masih harus dibayar	25.614	25.612	Accrued interest expenses
	1.521.722	1.519.933	

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-336/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016. Pada tanggal 19 Juli 2016, Perusahaan telah menerima dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari:

- Seri A sebesar Rp825.000 dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun untuk tenor 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp250.000 dengan tingkat bunga tetap 8,70% per tahun untuk tenor 5 tahun; dan
- Seri C sebesar Rp425.000 dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun untuk tenor 7 tahun.

Pinjaman Seri A, Seri B dan Seri C akan dibayarkan penuh masing-masing pada tanggal 19 Juli 2019, 19 Juli 2021 dan 19 Juli 2023. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, peringkat Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 menurut Pefindo dan Fitch Rating Indonesia adalah idAAA.

Perjanjian obligasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak berelasi, pinjaman, dan penerbitan obligasi.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

On June 29, 2016, the Company obtained effectivity statement from Financial Services Authority through its letter No. S-336/D.04/2016 to conduct public offering on Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016. On July 19, 2016, the Company received the funds from the bonds issuance totaling Rp1,500,000 which consists of:

- Series A amounting to Rp825,000 with a fixed interest rate of 8.25% per annum and tenor of 3 years;
- Series B amounting to Rp250,000 with a fixed interest rate of 8.70% per annum and tenor of 5 years; and
- Series C amounting to Rp425,000 with a fixed interest rate of 9.00% per annum and tenor of 7 years.

The Series A, Series B and Series C Bond shall be fully repaid on July 19, 2019, July 19, 2021 and July 19, 2023, respectively. Interest is paid quarterly.

The trustee for the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2017 and 2016, the Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 is rated idAAA by Pefindo and Fitch Rating Indonesia.

The bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, borrowings, and bonds issuance.

During the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Trustee Agreements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka merupakan provisi yang diterima terkait pinjaman diberikan yang dananya belum ditarik oleh debitur. Pada tanggal 31 Desember 2017, pendapatan diterima dimuka adalah sebesar Rp406 (2016: Rp7.028).

18. UNEARNED REVENUE

Deferred income represents provision received related to loan receivables which have not been drawdown yet by the debtors. As of December 31, 2017, total unearned income amounted to Rp406 (2016: Rp7,028).

19. PINJAMAN DITERIMA

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.200.000	1.000.000
Dolar Amerika Serikat		
International Finance Corporation (USD400.000.000 pada 2017 dan USD250.000.000 pada 2016)	5.419.200	3.359.000
	6.619.200	4.359.000
Ditambah/(dikurangi):		
Beban bunga masih harus dibayar	10.787	7.226
Biaya transaksi belum diamortisasi	(85.416)	(84.743)
	6.544.571	4.281.483

	Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
United States Dollar	
International Finance Corporation (USD400,000,000 in 2017 and USD250,000,000 in 2016)	
Add/(less):	
Accrued interest expenses	
Unamortized transaction costs	

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp1.000.000 (Catatan 29 dan 31).

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mencairkan fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp1.000.000.

Pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan + 1,29% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 16 Desember 2018. Bunga dibayarkan setiap bulan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp1.500.000 (Catatan 29 dan 31).

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah mencairkan fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp200.000.

Pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan + 1,44% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 30 Mei 2020. Bunga dibayarkan setiap bulan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp1,000,000 (Notes 29 and 31).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company had drawdown the loan facility amounting to Rp1,000,000.

This loan has an interest rate of 1-month JIBOR + 1.29% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on December 16, 2018. Interest is payable monthly.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp1,500,000 (Notes 29 and 31).

As of December 31, 2017, the Company had drawdown the loan facility amounting to Rp200,000.

This loan has an interest rate of 1-month JIBOR + 1.44% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on May 30, 2020. Interest is payable monthly.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman Bank Mandiri I dan II tersebut, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan keuangan dan persyaratan negatif (*negative covenants*).

Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah pemenuhan rasio Utang terhadap Modal sebesar maksimum 5 kali.

Persyaratan negatif mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan transaksi tertentu diluar kegiatan usaha normal Perusahaan dan pembatasan tertentu untuk melakukan transaksi tertentu jika Perusahaan melanggar persyaratan keuangan.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

International Finance Corporation

International Finance Corporation I

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari International Finance Corporation dengan jumlah sebesar USD250.000.000 yang terdiri dari pinjaman A + MCPP (*Managed Co-lending Portfolio Program*) sebesar USD52.500.000 dan pinjaman B sebesar USD197.500.000 (Catatan 29 dan 31).

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pokok pinjaman yang sudah ditarik dari fasilitas pinjaman tersebut sebesar USD250.000.000.

Pinjaman A + MCPP memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 2,51% per tahun dengan tenor 7 tahun dan dibayarkan penuh pada tanggal 19 Juni 2021. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 2,21% per tahun dengan tenor 5 tahun dan dibayarkan penuh pada tanggal 19 Juni 2019. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

19. FUND BORROWING (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

Under Bank Mandiri I and II loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain financial covenants and negative covenants.

The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others is to fulfill the maximum debt to equity ratio of 5 times.

The negative covenants include requirement to obtain consent from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to conduct certain transaction outside of the ordinary business activity of the Company and certain restriction to conduct certain transaction when the Company is in breach of financial covenant.

During the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

International Finance Corporation

International Finance Corporation I

The Company obtained loan facilities from International Finance Corporation amounting to USD250,000,000 which consists of A + MCPP (Managed Co-lending Portfolio Program) loans amounting to USD52,500,000 and B loans amounting to USD197,500,000 (Notes 29 and 31).

As of December 31, 2017 and 2016, principal loan drawdown from the loan facilities amounted to USD250,000,000.

A + MCPP loans have an interest rate of 3-month LIBOR + 2.51% per annum with tenor of 7 years and a bullet repayment on June 19, 2021. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B Loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 2.21% per annum with tenor of 5 years and a bullet repayment on June 19, 2019. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation II

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari International Finance Corporation dengan jumlah sebesar USD150.000.000 yang terdiri dari pinjaman A sebesar USD15.000.000 dan pinjaman B sebesar USD135.000.000 (Catatan 29 dan 31).

Pada tanggal 31 Desember 2017, pokok pinjaman yang sudah ditarik dari fasilitas pinjaman tersebut sebesar USD150.000.000 (2016: RpNihil).

Pinjaman A memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,55% per tahun dengan tenor 5 tahun dan dibayarkan penuh pada tanggal 22 Februari 2021. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,15% per tahun dengan tenor 3 tahun dan dibayarkan penuh pada tanggal 22 Februari 2019. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

International Finance Corporation III

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari International Finance Corporation dengan jumlah sebesar USD150.000.000 yang terdiri dari Pinjaman A sebesar USD50.000.000, Pinjaman B1 sebesar USD50.000.000 dan Pinjaman B2 sebesar USD50.000.000 (Catatan 29 dan 31).

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan belum menarik pokok pinjaman dari fasilitas pinjaman tersebut.

Pinjaman A memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun dengan tenor 7 tahun dan dibayarkan penuh 7 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

19. FUND BORROWING (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation II

The Company obtained loan facilities from International Finance Corporation amounting to USD150,000,000 which consists of A Loans amounting to USD15,000,000 and B Loans amounting to USD135,000,000 (Notes 29 and 31).

As of December 31, 2017, principal loan drawdown from loan facilities amounted to USD150,000,000 (2016: RpNil).

A loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.55% per annum with tenor of 5 years and a bullet repayment on February 22, 2021. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.15% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on February 22, 2019. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

International Finance Corporation III

The Company obtained loan facilities from International Finance Corporation amounting to USD150,000,000 which consists of A Loans amounting to USD50,000,000, B1 Loans amounting to USD50,000,000 and B2 Loans amounting to USD50,000,000 (Notes 29 and 31).

As of December 31, 2017, the Company has not drawdown any principal from the loan facilities.

A loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.75% per annum with tenor of 7 years and a bullet repayment 7 years after the date of the first drawdown. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation III (lanjutan)

Pinjaman B1 memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,00% per tahun dengan tenor 3 tahun dan dibayarkan penuh 3 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B2 memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,20% per tahun dengan tenor 5 tahun dan dibayarkan penuh 5 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Dalam perjanjian pinjaman IFC I, II dan III tersebut, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan afirmatif, persyaratan keuangan serta persyaratan negatif (*negative covenants*).

Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi/Description	Limit
a.	<i>Risk weighted capital adequacy ratio</i>	12%
b.	<i>Debt to total capitalization ratio</i>	<=3:1
c.	<i>Current ratio</i>	>1.2:1

Persyaratan negatif mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari International Finance Corporation untuk melakukan transaksi tertentu seperti pembagian dividen, menyediakan program insentif jangka panjang untuk karyawan, memperoleh utang keuangan berdasarkan kondisi tertentu, dan lain-lain.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

19. FUND BORROWING (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation III (continued)

B1 loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.00% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment 3 years after the date of the first drawdown. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B2 loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.20% per annum with tenor of 5 years and a bullet repayment 5 years after the date of the first drawdown. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

Under IFC I, II and III loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain affirmative, financial and negative covenants.

The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others, are as follows:

The negative covenants include requirement to obtain consent from International Finance Corporation for certain transactions such as distribution of dividend, providing long term incentive plan to employees, incur financial debts under certain conditions, etc.

During the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI

20. SUBORDINATED LOANS

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Asian Development Bank (USD92.814.664 pada 2017 dan USD94.970.202 pada 2016)	1.257.453	1.276.020	Asian Development Bank (USD92,814,664 in 2017 and USD94,970,202 in 2016)
World Bank (USD99.880.000 pada 2017 dan 2016)	1.353.174	1.341.987	World Bank (USD99,880,000 in 2017 and 2016)
	<u>2.610.627</u>	<u>2.618.007</u>	
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban bunga masih harus dibayar	19.465	17.969	Accrued interest expenses
Biaya transaksi belum diamortisasi	(7.440)	(7.839)	Unamortized transaction costs
	<u>2.622.652</u>	<u>2.628.137</u>	

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) yang merupakan fasilitas pinjaman penerusan dengan jumlah masing-masing sebesar USD100.000.000 dari Asian Development Bank (ADB) dan USD300.000.000 dari World Bank (WB) (Catatan 29 dan 31).

The Company obtained subordinated loan facilities from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) which represents channeling facilities amounting to USD100,000,000 from Asian Development Bank (ADB) and USD300,000,000 from World Bank (WB) (Notes 29 and 31).

Perusahaan menggunakan fasilitas ini untuk memperkuat struktur modal Perusahaan, serta untuk memberikan pendanaan jangka panjang bagi Perusahaan agar dapat memberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang tanpa mengakibatkan ketidaksesuaian tenor antara aset dan liabilitas.

The Company used this facility to strengthen its capital structure and to provide long-term funding to enable long-term financing without creating mismatch between asset and liability tenors.

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari ADB adalah sebagai berikut:

Details of drawdown of subordinated loan facilities from ADB are as follows:

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		USD	
Penarikan 1	13 Desember/December 13, 2012	71.134.021	1st drawdown
Penarikan 2	13 November/November 13, 2013	16.732.954	2nd drawdown
Penarikan 3	19 November/November 19, 2013	337.886	3rd drawdown
Penarikan 4	6 Desember/December 6, 2013	6.400.000	4th drawdown
Penarikan 5	25 November/November 25, 2014	4.877.000	5th drawdown
		<u>99.481.861</u>	

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari WB adalah sebagai berikut:

Details of drawdown of subordinated loan facilities from WB are as follows:

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		USD	
Penarikan 1	21 Desember/December 21, 2012	10.000.000	1st drawdown
Penarikan 2	12 Juli/July 12, 2013	40.000.000	2nd drawdown
Penarikan 3	3 Desember/December 3, 2013	22.000.000	3rd drawdown
Penarikan 4	23 April/April 23, 2014	20.000.000	4th drawdown
Penarikan 5	25 September/September 25, 2014	5.180.000	5th drawdown
Penarikan 6	23 Juli/July 23, 2015	2.700.000	6th drawdown
		<u>99.880.000</u>	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

SMI - Asian Development Bank

Fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dari ADB memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,45% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034.

SMI - World Bank I

Fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI sebesar USD100.000.000 merupakan pinjaman penerusan dari WB yang memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,52% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2033.

SMI - World Bank II

Pada tanggal 26 September 2017, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi yang merupakan pinjaman penerusan II dari WB dengan nilai sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan USD200.000.000. Risiko nilai tukar pinjaman ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 1 Oktober 2036 dan memiliki batas waktu penarikan (*closing date*) sampai tanggal 28 Februari 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan belum menarik pinjaman dari fasilitas pinjaman SMI - World Bank II tersebut.

Pinjaman subordinasi ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Dalam perjanjian pinjaman subordinasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi persyaratan berikut, diantaranya menjaga persyaratan rasio lancar sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sebesar 12%.

20. SUBORDINATED LOANS (continued)

SMI - Asian Development Bank

The subordinated loan facility from SMI, which represents the channeling from ADB, bears an interest rate of LIBOR 6-month + 1.45% per annum payable semiannually on March 1 and September 1. The first repayment installment of the loan's principal commenced on September 1, 2014 and will mature on March 1, 2034.

SMI - World Bank I

The subordinated loan facility from SMI of USD100,000,000 represents the channeling loan from WB which bears an interest rate of LIBOR 6-month + 1.52% per annum payable semiannually on May 1 and November 1. The first repayment installment of the loan's principal will commence on November 1, 2018 and will mature on November 1, 2033.

SMI - World Bank II

On September 26, 2017, the Company and SMI had signed a Subordinated Loan Agreement which represents the channeling loan II from WB of USD200,000,000. The loan will be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent of up to USD200,000,000. The exchange rate risk for this loan is borne by the Government of the Republic of Indonesia. The loan will mature on October 1, 2036 and has a closing date until February 28, 2022.

As of December 31, 2017, the Company has not drawdown any loan from the SMI - World Bank II loan facility.

The purpose of the subordinated loan is to finance infrastructure projects in Indonesia.

According to the subordinated loan agreement, the Company must satisfy certain financial ratios, which include among others, maintaining a current ratio of 1.2 and a capital adequacy ratio of 12%.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Selain itu, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari SMI, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut, diantaranya:

- i. Menjamin atau bertanggung jawab atas kewajiban utang, baik kontinjen atau dengan cara lain kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha normal Perusahaan dan tetap memenuhi persyaratan rasio *leverage* yang ditetapkan.
- ii. Mengubah tahun fiskal.
- iii. Melakukan penggabungan, pemisahan (*spin off*), konsolidasi atau reorganisasi.
- iv. Membayar kembali atau membayar dimuka, membeli, menebus, mengganti atau melepaskan diri dari kewajiban utang apapun selain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.
- v. Melakukan tindakan yang akan menyebabkan *money laundering* (pencucian uang) dan *financing of terrorism* (pembiayaan terorisme), penipuan, atau tindakan korupsi dan praktek ilegal lainnya.
- vi. Menimbulkan utang subordinasi apapun, jika setelah timbulnya utang subordinasi tersebut rasio utang subordinasi terhadap ekuitas akan lebih besar dari 5 berbanding 1.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

Periode penarikan fasilitas pinjaman subordinasi dari WB I dan ADB telah diperpanjang dari sebelumnya tanggal 31 Desember 2013 menjadi masing-masing 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2014. Oleh karena fasilitas pinjaman subordinasi dari WB I dan ADB telah berakhir per 31 Desember 2014, Perusahaan tidak akan melakukan penarikan sisa fasilitas pinjaman yang belum ditarik masing-masing sebesar USD120.000 dan USD518.139.

20. SUBORDINATED LOANS (continued)

In addition, unless prior written consent of SMI is obtained, the Company is not allowed to carry-out the following, among others:

- i. Guarantee or become liable with respect to any indebtedness, whether contingent or otherwise, unless it is in the ordinary course of the Company's business and in compliance with the leverage ratio requirements.*
- ii. Change its financial year.*
- iii. Undertake any merger, spin off, consolidation or reorganization.*
- iv. Repay or prepay, purchase, redeem, reimburse or discharge any of its indebtedness other than in accordance with the provisions of the Loan Agreement.*
- v. Commit to any act that will cause money laundering, financing of terrorism, fraud, or other corrupt or illegal practices.*
- vi. Incur any subordinated debt, if after the incurrence of such subordinated debt the ratio of subordinated debt to equity shall be greater than 5 to 1.*

During the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

The availability period of the subordinated loans from WB I and ADB has been extended to March 31, 2017 and December 31, 2014, respectively, from the original expiry date of December 31, 2013. As the availability period of the subordinated loan from WB I and ADB expired on December 31, 2014, the Company did not utilize the undrawn facilities amounting to USD120,000 and USD518,139, respectively.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. MODAL SAHAM

21. CAPITAL STOCK

31 Desember 2017 dan 2016/December 31, 2017 and 2016

Nama pemegang saham	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total	Name of shareholders
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	600.000	30.00%	600.000	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Asian Development Bank	399.800	19.99%	399.800	Asian Development Bank
International Finance Corporation	399.800	19.99%	399.800	International Finance Corporation
DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH	302.400	15.12%	302.400	DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	298.000	14.90%	298.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
	2.000.000	100.00%	2.000.000	

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN CADANGAN UMUM

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND GENERAL RESERVES

Tambahan modal disetor pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp29.800 merupakan agio saham yang dibayarkan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Additional paid in capital as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp29,800 represents premium of shares paid by Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tertanggal 23 Maret 2017, Perusahaan mengalokasikan 15% dari laba bersih tahun 2016 yaitu sebesar Rp15.269 sebagai cadangan umum dan mengalokasikan 20% dari laba bersih tahun 2016 yaitu sebesar Rp20.359 sebagai pembayaran deviden. Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada 23 Juni 2017.

Based on Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated March 23, 2017, the Company allocated 15% of net income in 2016 amounting to Rp15,269 as general reserves and allocated 20% of net income in 2016 amounting to Rp20,359 as dividend payment. The Company has paid the dividend on June 23, 2017.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tertanggal 24 Maret 2016, Perusahaan mengalokasikan 15% dari laba bersih tahun 2015 yaitu sebesar Rp11.196 sebagai cadangan umum.

Based on Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated March 24, 2016, the Company allocated 15% of net income in 2015 amounting to Rp11,196 as general reserves.

23. PENDAPATAN BUNGA

23. INTEREST INCOME

Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,

	2017	2016	
Pendapatan bunga pinjaman diberikan	451.986	320.881	Interest income from loans
Pendapatan bunga deposito berjangka	111.163	70.010	Interest income from time deposits
Pendapatan bunga efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	55.864	100.390	Interest income from securities and securities purchased under resale agreement
Pendapatan bunga giro	4.616	3.792	Interest income from current accounts
Pendapatan bunga transaksi derivatif	651	-	Interest income from derivative transaction
	624.280	495.073	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN BUNGA (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdapat pendapatan bunga dari 1 (satu) dan 2 (dua) konsumen eksternal yang mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp71.972 dan Rp145.163.

24. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI

Pendapatan provisi dan komisi merupakan pendapatan yang berkaitan dengan pinjaman diberikan, diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian seperti jasa *mandatory lead arranger*, sindikasi dan jasa perancangan model pembiayaan.

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

23. INTEREST INCOME (continued)

For the years ended December 31, 2017 and 2016, there are interest income from 1 (one) and 2 (two) external customers amounting to 10% or more of the Company's total interest income amounting to Rp71,972 and Rp145,163, respectively.

24. PROVISION AND COMMISSION INCOME

Provision and commission income represents income related to the loans, recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts such as *mandatory lead arranger services*, *syndication* and *structuring of financing scheme services*.

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,

	2017	2016	
Gaji dan tunjangan	84.904	81.374	Salaries and benefits
Sewa	11.537	10.652	Rent
Beban pajak lain	11.000	-	Other tax expense
Jasa profesional	10.635	5.261	Professional fee
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 12 dan 14)	9.576	9.989	Depreciation and amortization (Notes 12 and 14)
Imbalan kerja (Catatan 28)	5.508	4.058	Employee benefits (Note 28)
Akomodasi dan transportasi	3.384	1.934	Accommodation and transportation
Hasil pemeriksaan pajak (Catatan 27)	2.690	-	Tax examination result (Note 27)
Biaya bank dan kustodian	2.472	1.161	Bank and custodian charges
Asuransi	1.993	2.132	Insurance
Promosi dan komunikasi	1.939	1.347	Promotion and communication
Listrik, telepon, air dan internet	1.311	974	Electricity, telephone, water and internet
Pelatihan dan seminar	500	1.475	Training and seminars
Perlengkapan kantor	489	666	Office supplies
Representasi	389	329	Representation
Lain-lain	1.719	1.519	Others
	150.046	122.871	

Beban pajak lain merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang tidak dapat dikompensasi dengan PPN keluaran sehingga dibebankan ke laba rugi tahun berjalan.

Other tax expense represents Value Added Tax (VAT) input which cannot be compensated with VAT output and charged to current year's profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. BEBAN BUNGA

26. INTEREST EXPENSE

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Pinjaman diterima			<i>Fund borrowing</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
International Finance Corporation	211.449	99.491	<i>International Finance Corporation</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	78.357	30.807	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
SMI-World Bank	42.068	30.678	<i>SMI-World Bank</i>
SMI-Asian Development Bank	36.132	31.051	<i>SMI-Asian Development Bank</i>
Derivatif			<i>Derivative</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank ANZ Indonesia	1.689	-	<i>PT Bank ANZ Indonesia</i>
Surat utang yang diterbitkan			<i>Debt securities issued</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Taspen (Persero)	12.982	5.981	<i>PT Taspen (Persero)</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.645	3.987	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.789	3.588	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	1.385	638	<i>PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Lain-lain	96.381	44.797	<i>Others</i>
	498.877	251.018	

27. PERPAJAKAN

27. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Lebih bayar pajak penghasilan badan	9.351	-	<i>Overpayment of corporate income tax</i>
Pajak Pertambahan Nilai	1.762	12.827	<i>Value added tax</i>
	11.113	12.827	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Pajak penghasilan			<i>Income taxes</i>
Pasal 21	2.770	932	<i>Article 21</i>
Pasal 23	55	2	<i>Article 23</i>
Pasal 26	135	27	<i>Article 26</i>
Pasal 4(2)	245	275	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 29	-	5.770	<i>Article 29</i>
	3.205	7.006	
Pajak lainnya	1.674	7	<i>Other tax</i>
	4.879	7.013	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan

c. Income tax

Pajak kini

Current tax

Estimasi pajak penghasilan Perusahaan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan beban pajak final sebagai berikut:

The Company's estimated income tax for the years ended December 31, 2017 and 2016 represents current income tax expense, deferred tax expense and final tax expense as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
(Rugi)/laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(94.452)	137.104	(Loss)/income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Penghasilan tidak kena pajak - reksa dana	(64)	-	Non-taxable income - mutual fund
	(94.516)	137.104	
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Penyisihan program insentif jangka panjang	2.827	(316)	Provision for long term incentives plan
Perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan menurut fiskal dan komersial	(70.775)	20.294	Difference of provision for impairment losses on loan between fiscal and commercial
Akrual bonus dan tunjangan	(15.656)	4.408	Accrued bonus and allowances
Penyisihan imbalan kerja karyawan	5.149	4.012	Provision for employee benefits
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai wajar transaksi derivatif	5.052	(578)	Unrealized gain from fair value of derivative transaction
Perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain menurut fiskal dan komersial	6.717	-	Difference of provision for impairment losses on other receivable between fiscal and commercial
Perbedaan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain menurut fiskal dan komersial	(61)	204	Difference of depreciation of property and equipment and amortization of other assets between fiscal and commercial
Perubahan nilai wajar investasi saham	115.057	(10.544)	Changes in fair value of equity investment
	48.310	17.480	
Perbedaan permanen:			Permanent differences:
Pendapatan bunga dikenakan pajak final	(197.157)	(141.021)	Interest income subject to final tax
Bagian dari beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final	186.160	66.815	Expense related to income subject to final tax
Keuntungan dari penjualan efek-efek	(88.189)	-	Gain on sale of securities
Lain-lain	14.952	6.960	Others
	(84.234)	(67.246)	
Estimasi (rugi)/laba fiskal tahun berjalan	(130.440)	87.338	Current years' estimated fiscal (loss)/income
Rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya	-	(64.259)	Prior years' fiscal loss carryforward
(Rugi)/laba kena pajak	(130.440)	23.079	Fiscal (loss)/income

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Pajak kini (lanjutan)

Current tax (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Beban pajak final	(29.903)	(17.846)	Final tax expense
Pajak penghasilan:			Income tax:
Beban pajak kini	-	(5.770)	Current income tax expense
Revisi pajak penghasilan tahun 2014-2016	(1.954)	-	Revision of corporate income tax years 2014-2016
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	44.687	(11.695)	Deferred tax benefit/(expense)
	42.733	(17.465)	
	12.830	(35.311)	

Estimasi rugi fiskal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 akan menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan 2017.

The Company's estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2017 will be the basis for preparing annual tax return for 2017.

Pada tanggal 28 Desember 2017, Perusahaan menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2014-2016. Berkaitan dengan pembetulan SPT tersebut, Perusahaan telah membayar kurang bayar pajak sebesar Rp1.954.

On December 28, 2017, the Company filed a revision of its Annual Corporate Income Tax returns for fiscal years 2014-2016. In relation with the revision of the tax returns, the Company paid the tax underpayment of Rp1,954.

Pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:

Income tax recognized in other comprehensive income:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
(Beban)/manfaat yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:			(Expenses)/benefit recognized in other comprehensive income:
(Kenaikan)/penurunan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	(6.188)	6.282	(Increase)/decrease in fair value of available-for-sale securities
Kerugian aktuarial	465	173	Actuarial loss
Total pajak yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(5.723)	6.455	Total tax recognized in other comprehensive income

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Aset/(liabilitas) pajak tangguhan

Deferred tax assets/(liabilities)

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

Deferred tax assets as of December 31, 2017
and 2016 consists of the following:

31 Desember/December 31, 2017					
	31 Desember/ December 31, 2016	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 31, 2017	
Akrual bonus dan tunjangan	4.813	(3.914)	-	899	Accrued bonus and allowance
Kenaikan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	5.561	-	(6.188)	(627)	Increase in fair value of available- for-sale securities
Selisih penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain antara fiskal dan komersial	44	(15)	-	29	Difference of property and equipment depreciation and other assets amortization between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan antara fiskal dan komersial	3.748	(17.694)	-	(13.946)	Difference of allowance for impairment losses for loan between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain antara fiskal dan komersial	-	1.679	-	1.679	Difference of allowance for impairment losses between fiscal and commercial
Kenaikan nilai wajar tagihan derivatif	(145)	1.263	-	1.118	Increase in fair value of derivative receivables
Penurunan nilai wajar investasi saham	4.896	28.764	-	33.660	Decrease in fair value of equity investments
Program insentif jangka panjang	570	707	-	1.277	Long term incentive plan
Liabilitas imbalan kerja	2.862	1.287	465	4.614	Employee benefits obligation
Rugi fiskal	-	32.610	-	32.610	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - neto	22.349	44.687	(5.723)	61.313	Deferred tax assets - net
31 Desember/December 31, 2016					
	31 Desember/ December 31, 2015	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 31, 2016	
Akrual bonus dan tunjangan	3.711	1.102	-	4.813	Accrued bonus and allowance
Penurunan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	(721)	-	6.282	5.561	Decrease in fair value of available- for-sale securities
Selisih penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain antara fiskal dan komersial	(7)	51	-	44	Difference of property and equipment depreciation and other assets amortization between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan antara fiskal dan komersial	(1.326)	5.074	-	3.748	Difference of allowance for impairment losses for loan between fiscal and commercial
Kenaikan nilai wajar tagihan derivatif	-	(145)	-	(145)	Increase in fair value of derivative receivables
Penurunan nilai wajar investasi saham	7.532	(2.636)	-	4.896	Decrease in fair value of equity investments
Program insentif jangka panjang	649	(79)	-	570	Long term incentive plan
Liabilitas imbalan kerja	1.686	1.003	173	2.862	Employee benefits obligation
Rugi fiskal	16.065	(16.065)	-	-	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - neto	27.589	(11.695)	6.455	22.349	Deferred tax assets - net

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
(Rugi)/laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan komprehensif lain	(94.452)	137.104
Penghasilan tidak kena pajak - reksa dana	(64)	-
	(94.516)	137.104
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	23.629	(34.276)
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:		
Pendapatan bunga dikenakan pajak final	49.289	35.255
Bagian dari beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final	(46.540)	(16.704)
Lain-lain	18.309	(1.740)
	21.058	16.811
Revisi pajak penghasilan tahun 2014-2016	(1.954)	-
Jumlah manfaat/(beban) pajak penghasilan	42.733	(17.465)

d. Surat Ketetapan Pajak

Tahun pajak 2013 dan 2012

Pada tanggal 11 Desember 2017 dan 20 Desember 2017, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan pajak penghasilan badan, pajak penghasilan (PPH) lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2012 dan 2013. Dari hasil pemeriksaan pajak tersebut, Kantor Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan total kurang bayar pajak sebesar Rp2.690. Perusahaan menerima seluruh hasil pemeriksaan pajak dan membayar kurang bayar jumlah tersebut pada tanggal 27 Desember 2017.

27. TAXATION (continued)

c. Income tax (continued)

Deferred tax assets/(liabilities) (continued)

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2016
(Loss)/income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income	137.104
Non-taxable income - mutual fund	-
	137.104
Income tax at effective tax rate	(34.276)
Tax effect of permanent differences:	
Interest income subject to final tax	35.255
Expense related to income subject to final tax	(16.704)
Others	(1.740)
	16.811
Revision of corporate income tax years 2014-2016	-
Total benefit/(expense) income tax	(17.465)

d. Tax Assessment Letter

Fiscal Year 2013 and 2012

On December 11, 2017 and December 20, 2017, the Company received tax assessment results from the Tax Office regarding the corporate income taxes, other income taxes and Value Added Tax (VAT) for fiscal years 2012 and 2013. Based on those tax assessment results, the Tax Office issued several Tax Underpayment Assessment letter (SKPKB), Nil Tax Assessment letter (SKPN) and Tax Collection letters (STP) with total tax underpayment of Rp2,690. The Company agreed all the tax assessment results and paid the amount on December 27, 2017.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang "Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Pajak dibayar dimuka dapat diterima kembali setelah hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak.

27. TAXATION (continued)

e. Administrative

Based on Law of the Republic of Indonesia No. 28 Year 2007 regarding "Third Amendment of Law No. 6 Year 1983 regarding General Rules and Procedures of Taxation" which is applicable starting 2008, the Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

The prepaid taxes is refundable subject to tax audit by the Tax Office.

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	31 Desember/ December 31, 2017
Liabilitas imbalan pasca-kerja	16.785
Imbalan jangka panjang lainnya	1.674
	18.459

Perusahaan memiliki dua imbalan kerja karyawan yaitu imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya.

Pengungkapan di bawah ini merupakan komponen dari liabilitas bersih yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dalam hubungannya dengan perhitungan liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 oleh aktuaria independen (PT Padma Radya Aktuarial) dalam laporannya masing-masing tertanggal 4 Januari 2018 dan 25 Januari 2017.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki jumlah karyawan tetap masing-masing sebanyak 72 dan 61 orang, yang berhak atas manfaat ini.

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

	31 Desember/ December 31, 2016	
	10.225	Post-employment benefits obligation
	1.224	Other long-term benefits
	11.449	

The Company has two employee benefit plans which include post-employment benefits and other long-term benefits.

The disclosure below summarizes the components of the estimated net liabilities for employee benefits and other long-term benefit recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the amounts recognized in the statement of financial position in relation to the calculation of the estimated liability for employee benefits as of December 31, 2017 and 2016 by independent actuary (PT Padma Radya Aktuarial) in its reports dated January 4, 2018 and January 25, 2017, respectively.

Post-employment benefits obligation

The Company recognizes post-employment benefits obligation based on Labor Law No. 13/2003. As of December 31, 2017 and 2016, the Company had total of 72 and 61 permanent employees, respectively, who are qualified for this plan.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Liabilitas imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Post-employment benefits obligation (continued)

Beban liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the profit or loss in respect of the post-employment benefits are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Beban jasa kini	3.897	2.985	Current service cost
Beban bunga	869	541	Interest cost
	4.766	3.526	

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from post-employment benefits obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	16.785	10.225	Present value of unfunded obligation

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of post-employment benefits obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Saldo awal	10.225	6.007	Beginning balance
Beban jasa kini	3.897	2.985	Current service cost
Beban bunga	869	541	Interest cost
Pembayaran manfaat	(66)	-	Benefits payment
Kerugian aktuarial	1.860	692	Actuarial loss
Saldo akhir	16.785	10.225	Ending balance

Mutasi akumulasi (kerugian)/keuntungan aktuarial yang diakui di saldo laba adalah sebagai berikut:

Movements of accumulated actuarial (loss)/gain recognized in the retained earnings are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Saldo awal	596	1.288	Beginning balance
Kerugian aktuarial	(1.860)	(692)	Actuarial loss
Saldo akhir	(1.264)	596	Ending balance

Historis penyesuaian yang terjadi adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The history of experience adjustments is as follows (unaudited):

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
Nilai kini liabilitas tidak didanai	(90)	146	21	Present value of unfunded obligations
Persentase penyesuaian	(0,53%)	1,43%	0,34%	Percentage of experience

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan cuti besar sebanyak 30 hari kerja kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun. Cuti besar ini dapat diambil pada tahun ke enam. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah karyawan tetap yang berhak mendapatkan program ini masing-masing adalah 72 dan 61 orang.

Sejak tahun 2016, Perusahaan juga memberikan imbalan jangka panjang berupa emas 5 gram kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun. Imbalan ini dapat diambil pada tahun keenam.

Jumlah liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Beban jasa kini	499	353	Current service cost
Beban bunga	105	70	Interest cost
Beban jasa lalu	-	55	Past service cost
Kerugian aktuarial	138	54	Actuarial loss
	742	532	

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Saldo awal	1.224	
Beban jasa kini	499	353	Current service cost
Beban bunga	105	70	Interest cost
Beban jasa lalu	-	55	Past service cost
Kerugian aktuarial	138	54	Actuarial loss
Pembayaran imbalan	(292)	(45)	Benefits paid
Saldo akhir	1.674	1.224	Ending balance

Jumlah liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	1.674	1.224	Present value of unfunded obligation

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Other long-term benefits

The Company provides long service leave (30 working days) for employees who have reached 5 (five) consecutive years of service and further for every 5 (five) years of service period. This long service leave can be taken on the sixth year. As of December 31, 2017 and 2016, the Company had total of 72 and 61 permanent employees, respectively, who are entitled to this program.

Since 2016, the Company also provides long-term benefit in the form of 5 gram of gold for employees who have reached 5 (five) consecutive years of service and further for every 5 (five) years of service period. This benefit can be taken on the sixth year.

Amounts recognized in profit or loss in respect of the post-employment benefits are as follows:

Movements in the present value of other long-term benefits obligation are as follows:

The amounts included in the statements of financial position in respect of other long-term benefits obligation are as follows:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Beban liabilitas imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya di atas dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2017
Tingkat diskonto	7,25%
Tingkat kenaikan gaji	8,00%
Tingkat kematian	100% TMI3
Tingkat cacat	5% TMI3
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 55/ 5% per annum until 35 years old and decreased linearly to 0% at a 55 years old
Tingkat pensiun normal	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age
Umur pensiun normal	55 tahun/years old

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat gaji sebesar 1% dengan variabel lain dianggap tetap terhadap nilai kini liabilitas dan imbalan jangka panjang lainnya (tidak diaudit):

	Kenaikan tingkat tingkat diskonto/ Increase in discount rate	Penurunan tingkat tingkat diskonto/ Decrease in discount rate
2017	(1.538)	1.751
2016	(1.001)	1.142

Berikut adalah ekspektasi pembayaran manfaat liabilitas imbalan kerja di tahun-tahun mendatang (tidak diaudit):

	2017
Kurang dari satu tahun	1.678
2 - 5 tahun	5.252
6 - 10 tahun	34.286
> 10 tahun	143.616

Rata-rata tertimbang durasi dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 13,10 tahun (2016: 13,56 tahun).

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

The cost of providing post-employment benefit and other long-term benefits obligation is calculated using the following key assumptions:

	2016	
Tingkat diskonto	8,50%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	Salary increase rate
Tingkat kematian	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 55/ 5% per annum until 35 years old and decreased linearly to 0% at 55 years old	Resignation rate
Tingkat pensiun normal	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	Normal retirement rate
Umur pensiun normal	55 tahun/years old	Normal retirement age

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change at 1% in discount rate and salary rate with all other variables held constant of the employment benefits obligation and other long-term employee benefit (unaudited):

	Kenaikan tingkat kenaikan gaji/ Increase in salary increase rate	Penurunan tingkat kenaikan gaji/ Decrease in salary increase rate	
2017	1.307	(1.612)	2017
2016	1.190	(1.058)	2016

The following are expected payment periods of the benefits obligation in the future years (unaudited):

	2016	
Kurang dari satu tahun	362	Less than 1 year
2 - 5 tahun	5.703	2 - 5 years
6 - 10 tahun	27.656	6 - 10 years
> 10 tahun	123.439	> 10 years

The weighted average duration of the employment benefits obligation as of December 31, 2017 is 13.10 years (2016: 13.56 years).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

29. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	Pemegang saham Perusahaan/ The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity, Pinjaman subordinasi/Subordinated loans, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense
Asian Development Bank (ADB)	Pemegang saham Perusahaan/ The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity, Pinjaman subordinasi/Subordinated loans, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense
International Finance Corporation (IFC)	Pemegang saham Perusahaan/ The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity, Pinjaman diterima/Fund borrowing, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense
DEG - Deutsche Investition - Und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG).	Pemegang saham Perusahaan/ The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	Pemegang saham Perusahaan/ The shareholder of the Company	Penempatan modal/Equity
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham akhir/ Ultimate shareholder	Efek-efek/Securities, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman diterima/Fund borrowing, Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, Surat utang yang diterbitkan/Debt securities issued, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income, Beban bunga/Interest expense
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, Surat utang yang diterbitkan/Debt securities issued, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income, Beban bunga/Interest expense
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Dikendalikan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/ Controlled by Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

29. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan pemegang saham Perusahaan/ <i>Owned and controlled by the shareholder of the Company</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Shareholder of the Company</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Brantas Adya Surya Energi	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Jasa Marga (persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i>
PT Marga Lingkar Jakarta	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i>

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

29. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (continued)

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat dari hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat dari transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Utama Karya (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Aset lain-lain/ <i>Other assets</i> , Pendapatan jasa advisory/ <i>Advisory income</i>
PT Taspen (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i>
PT PP Energi (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan jasa advisory/ <i>Advisory income</i>
PT Pertamina (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i>
PT Waskita Karya (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Waskita Sangir	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT LEN Telekomunikasi Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loan</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>interest income</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Boards of Commissioners and Directors</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Gaji dan tunjangan/ <i>Salaries and benefits</i>

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

The Company entered into certain transactions with related parties as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
ASET			ASSETS
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
Kas di bank (Catatan 5)	102.747	60.892	Cash in banks (Note 5)
Deposito berjangka (Catatan 5)	1.524.481	1.811.172	Time deposits (Note 5)
Efek-efek (Catatan 6)	2.586.093	1.493.450	Securities (Note 6)
Pinjaman diberikan (Catatan 9)	1.934.597	1.830.159	Loans (Note 9)
Piutang bunga (Catatan 10)	24.990	14.758	Accrued interest income (Note 10)
Beban tangguhan (Catatan 13)	37.611	39.212	Deffered charges (Note 13)
Aset lain-lain (Catatan 14)	-	154	Other assets (Note 14)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**29. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (continued)**

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-
pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

The Company entered into certain transactions with
related parties as follows: (continued)

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
ASET (lanjutan)			ASSETS (continued)
Persentase terhadap total aset			Percentage to total assets
Kas dan setara kas	12,54%	17,35%	Cash and cash equivalents
Efek-efek	19,94%	13,84%	Securities
Pinjaman diberikan	14,91%	16,96%	Loans
Piutang bunga	0,19%	0,14%	Accrued interest income
Beban tangguhan	0,29%	0,36%	Deferred charges
Aset lain-lain	0,00%	0,00%	Other assets
LIABILITAS			LIABILITIES
Utang lain-lain (Catatan 15)	-	7.875	Other payables (Note 15)
Liabilitas derivatif (Catatan 7)	2.870	-	Derivative liabilities (Note 7)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (Catatan 16)	8.535	2.692	Accrued expenses and other liabilities (Note 16)
Surat utang yang diterbitkan (Catatan 17)	379.000	356.000	Debt securities issued (Note 17)
Pinjaman diterima (Catatan 19)	6.544.571	4.281.483	Fund borrowing (Note 19)
Pinjaman subordinasi (Catatan 20)	2.622.652	2.628.137	Subordinated loans (Note 20)
Persentase terhadap total liabilitas			Percentage to total liabilities
Utang lain-lain	-	0,09%	Other payables
Liabilitas derivatif (Catatan 7)	0,03%	-	Derivative Liabilities (Note 7)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	0,08%	0,03%	Accrued expenses and other liabilities
Surat utang yang diterbitkan	3,53%	4,19%	Debt securities issued
Pinjaman diterima	60,89%	50,37%	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	24,40%	30,92%	Subordinated loans

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2017	2016	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan bunga (Catatan 23)	274.739	120.766	Interest income (Note 23)
Pendapatan provisi dan komisi	3.419	1.641	Provision and commission income
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	1.331	684	Advisory income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	58.908	2.614	Realized gain from the sale of securities
Persentase terhadap total pendapatan			Percentage to total revenues
Pendapatan bunga	42,62%	22,22%	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	0,53%	0,30%	Provision and commission income
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	0,21%	0,13%	Advisory income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	9,14%	0,48%	Realized gain from the sale of securities
BEBAN			EXPENSES
Beban bunga (Catatan 26)	400.807	206.221	Interest expenses (Note 26)
Persentase terhadap total beban			Percentage to total expenses
Beban bunga	54,23%	50,74%	Interest expenses

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**29. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (continued)**

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2017		2016		
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	
Gaji dan tunjangan	9.561	23.666	9.330	21.537	Salary and benefits

**30. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**30. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,
aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017 and 2016, monetary
assets and liabilities in foreign currencies are as
follows:

	31 Desember/December 31, 2017		
	Mata uang asal (jumlah penuh)/ Original currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	
Aset moneter			Monetary assets
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Kas dan setara kas	235.183.259	3.186.263	Cash and cash equivalents
Efek-efek	163.311.796	2.212.549	Securities
Pinjaman diberikan	122.388.007	1.658.113	Loans
Piutang bunga	1.909.013	25.863	Accrued interest income
Aset lain-lain	1.436.202	19.458	Other assets
	524.228.277	7.102.246	
Euro Eropa			European Euro
Kas dan setara kas	21.061.500	340.641	Cash and cash equivalents
	21.061.500	340.641	
Total aset moneter		7.442.887	Total monetary assets
Liabilitas moneter			Monetary liabilities
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Utang lain-lain	600	8	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain	397.042	5.379	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	118.392	1.604	Derivative liabilities
Pinjaman diterima	395.076.063	5.352.491	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	193.582.225	2.622.652	Subordinated loans
	589.174.322	7.982.134	
Euro Eropa			European Euro
Liabilitas derivatif	177.427	2.870	Derivative liabilities
	177.427	2.870	
Total liabilitas moneter		7.985.004	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter neto		(542.118)	Net monetary liabilities

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**30. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING (lanjutan)**

**30. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

	31 Desember/December 31, 2016		
	Mata uang asal (jumlah penuh/ Original currency (full amount))	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	
Aset moneter			Monetary assets
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Kas dan setara kas	148.959.413	2.001.418	Cash and cash equivalents
Efek-efek	156.820.096	2.107.035	Securities
Pinjaman diberikan	110.354.360	1.482.721	Loans
Investasi saham	8.492.652	114.106	Equity investments
Piutang bunga	1.553.870	20.878	Accrued interest income
Tagihan derivatif	43.036	578	Derivative receivables
Aset lain-lain	141.077	1.896	Other assets
	426.364.504	5.728.632	
Euro Eropa			European Euro
Efek-efek	5.028.483	71.211	Securities
Piutang bunga	26.395	374	Accrued interest income
	5.054.878	71.585	
Total aset moneter		5.800.217	Total monetary assets
Liabilitas moneter			Monetary liabilities
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Utang lain-lain	230.957	3.103	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain	262.051	3.521	Accrued expenses and other liabilities
Pinjaman diterima	244.488.192	3.284.943	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	195.604.144	2.628.137	Subordinated loans
Total liabilitas moneter	440.585.344	5.919.704	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter neto		(119.485)	Net monetary liabilities

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN

31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

Commercial Loan Agreement - PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"). Berdasarkan perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.

On December 17, 2015, the Company had signed a Loan Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of Rp1,000,000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

Pada tanggal 30 Mei 2017, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri. Berdasarkan perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.

On May 30, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of Rp1,500,000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Komersial - International
Finance Corporation

International Finance Corporation I

Pada tanggal 19 Juni 2014, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation ("IFC"). Berdasarkan perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD250.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD30.000.000.
- Pinjaman MCPP (*Managed Co-Lending Portfolio Program*) sebesar USD22.500.000.
- Pinjaman B sebesar USD197.500.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

International Finance Corporation II

Pada tanggal 22 Februari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan IFC. Berdasarkan perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD150.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD15.000.000.
- Pinjaman B sebesar USD135.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

International Finance Corporation III

Pada tanggal 22 Juni 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan IFC. Berdasarkan perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD150.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD50.000.000.
- Pinjaman B1 sebesar USD50.000.000
- Pinjaman B2 sebesar USD50.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

**31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Commercial Loan Agreement - The International
Finance Corporation

International Finance Corporation I

On June 19, 2014, the Company had signed a Loan Agreement with International Finance Corporation ("IFC"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of USD250,000,000 which consist of:

- A loan amounting to USD30,000,000.
- MCPP (*Managed Co-Lending Portfolio Program*) amounting to USD22,500,000.
- B loan amounting to USD197,500,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

International Finance Corporation II

On February 22, 2016, the Company had signed a Loan Agreement with IFC. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of USD150,000,000 which consists of:

- A Loans amounting to USD15,000,000.
- B Loans amounting to USD135,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

International Finance Corporation III

On June 22, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with IFC. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of USD150,000,000 which consists of:

- A Loans amounting to USD50,000,000.
- B1 Loans amounting to USD50,000,000.
- B2 Loans amounting to USD50,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - Japan
International Cooperation Agency

Pada tanggal 11 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Berdasarkan perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar JPY8.000.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan JPY8.000.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - Bank Dunia

Bank Dunia I

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi Bank Dunia dan selanjutnya, pada 25 April 2011 Bank Dunia telah mengeluarkan surat No. CD-185/IIF/IV/2011 yang menyatakan pemenuhan kondisi preseden berlakunya Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia ("WB") sebesar USD100.000.000. Selain itu, Bank Dunia menyatakan perjanjian pinjaman menjadi efektif sejak 25 April 2011.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari WB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya diantaranya perubahan suku bunga pinjaman, perubahan tanggal pembayaran pokok dan bunga dan ketentuan current ratio sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy requirement*) sebesar 12%.

**31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Subordinated Loan Agreement - Japan International
Cooperation Agency

On December 11, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with Japan International Cooperation Agency (JICA). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of JPY8,000,000,000. The loan can be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent of up to JPY8,000,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

Subordinated Loan Agreement - The World Bank

The World Bank I

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed The World Bank - Subordinated Loan Agreement and subsequently, on April 25, 2011 World Bank has issued letter No. CD-185/IIF/IV/2011 confirming the fulfillment of the conditions precedent to the effectiveness of the Loan Agreement dated January 15, 2010 between the Government of Republic of Indonesia and the World Bank ("WB") in the amount of USD100,000,000. Furthermore, World Bank declared the Loan Agreement to become effective as of April 25, 2011.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from WB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

On December 14, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan, changes in the date of principal and interest payments, and requirements of current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12%.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - Bank Dunia
(lanjutan)

Bank Dunia I (lanjutan)

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan International Bank For Reconstruction And Development (Grup WB) dan SMI. Menurut perjanjian proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaannya serta perusahaan yang dibiayai mematuhi Manual Operasi.

Berdasarkan surat No. S-760/PU/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari WB berkaitan dengan perpanjangan batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman WB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 30 November 2015.

Berdasarkan surat No. S-848/PR.2/2015 tertanggal 27 November 2015 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman WB diperpanjang kembali dari semula tanggal 30 November 2015 menjadi 30 November 2016.

Bank Dunia II

Pada tanggal 26 September 2017, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi kedua dengan nilai sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan USD200.000.000. Risiko nilai tukar pinjaman ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 1 Oktober 2036 dan memiliki batas waktu penarikan (*closing date*) sampai tanggal 28 Februari 2022.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

**31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Subordinated Loan Agreement - The World Bank
(continued)

The World Bank I (continued)

In relation to this agreement, the Company had entered into a Project Agreement with the International Bank For Reconstruction And Development (WB Group) and SMI. According to the project agreement, the Company is obliged to ensure that its own financing activities as well as the operations of the companies to which it provides funding are in compliance with the Operation Manual.

Based on letter No. S-760/PU/2013 dated October 30, 2013 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company has obtained approval from WB regarding the extension of closing date of WB subordinated loan from December 31, 2013 to November 30, 2015.

Based on letter No. S-848/PR.2/2015 dated November 27, 2015 from Directorate General Financing Management and Risk of Ministry of Finance, the closing date of WB subordinated loan was extended again from November 30, 2015 to November 30, 2016.

The World Bank II

On September 26, 2017, the Company and SMI had signed a second Subordinated Loan Agreement for the amount of USD200,000,000. The loan can be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent of up to USD200,000,000. The exchange rate risk for this loan is borne by the Government of the Republic of Indonesia. The loan will mature on October 1, 2036 and has a closing date until February 28, 2022.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB dan kemudian pada tanggal 25 April 2011, ADB telah mengeluarkan surat yang menyatakan pemenuhan persyaratan berlakunya perjanjian pinjaman tanggal 20 Januari 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dan ADB sebesar USD100.000.000. Selain itu, ADB menyatakan bahwa semua kondisi untuk efektivitas pinjaman telah dipenuhi dan menyatakan pinjaman efektif pada tanggal 25 April 2011.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari ADB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

Pada tanggal 28 November 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya diantaranya perubahan suku bunga pinjaman dan ketentuan current ratio sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy requirement*) sebesar 12%.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan ADB dan SMI.

Dalam Perjanjian Proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya:

- i. Untuk menjalankan aktivitas pembiayaannya dengan *due diligence* dan efisien serta melakukan praktek administrasi, keuangan, teknik dan lingkungan yang baik.
- ii. Praktek pengadaan yang sesuai dengan Penuntun Pengadaan ADB.
- iii. Rencana, spesifikasi, jadwal, metode konstruksi yang sesuai dengan praktek terbaik internasional.
- iv. Meyakinkan bahwa tujuan dari pinjaman akan tercapai.

**31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Subordinated Loan Agreement - ADB

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed ADB - Subordinated Loan Agreement and subsequently on April 25, 2011, ADB had issued a letter confirming the fulfillment of the conditions precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated January 20, 2010 between the Government of the Republic of Indonesia and ADB in the amount of USD100,000,000. Furthermore, ADB declared that all conditions to the effectiveness of the loan had been met and declare that the loan was effective as of April 25, 2011.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from ADB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

On November 28, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan and requirements of current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12%.

In relation to this agreement, the Company has entered into Project Agreement with ADB and SMI.

In the Project Agreement, the Company must fulfill the following requirements, amongst others:

- i. Carry out its financing activities with due diligence and efficiency, in accordance with sound administrative, financial, engineering and environmental practices.
- ii. The procurement is in accordance with ADB's Procurement Guidelines.
- iii. Plans, specifications, work schedules and construction methods that meet international best practice.
- iv. Ensure that the purposes of the loan will be accomplished.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham secara bulat menyetujui Perusahaan untuk menandatangani bersama SMI, Perjanjian Perubahan terhadap masing-masing Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan ADB dan WB yang berlaku efektif tanggal 30 November 2012.

Berdasarkan surat No. S-13/PU/2014 tertanggal 7 Januari 2014 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari ADB berkaitan dengan perpanjangan batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman ADB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 31 Desember 2014.

Perjanjian Para Pendiri

Pada tanggal 30 Juni 2009, seluruh pemegang saham pendiri Perusahaan melakukan perjanjian mengenai pendirian Perusahaan.

- a. Para pemegang saham pendiri bermaksud untuk menjadikan Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berbadan hukum perseroan terbatas yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
- b. Para pemegang saham pendiri bermaksud supaya Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp400.000 dengan modal awal yang ditempatkan sebesar Rp100.000 dengan para pemegang saham yang disebut penyertaan awal.

Perjanjian Para Pemegang Saham Awal

Perusahaan bersama-sama dengan para pemegang saham pendiri melakukan perjanjian ini pada 15 Januari 2010.

Para Pemegang Saham Pendiri bermaksud bahwa:

- a. SMI melakukan investasi dalam Perusahaan untuk sejumlah Rp600.000 (jumlah mana termasuk penyeteroran bagian awal SMI). Sebagai bagian dari komitmen SMI di atas, pada tanggal pengambilan bagian, SMI akan memberikan suatu pinjaman subordinasi yang dapat dikonversi ("CSL") kepada Perusahaan dalam jumlah Rp559.700.

**31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Subordinated Loan Agreement - ADB (continued)

Based on Deed No. 7 dated December 13, 2012, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, the shareholders unanimously approved the Company together with SMI to execute the Amendment of each ADB and WB Subordinated Loan Agreements, respectively, effective on November 30, 2012.

Based on letter No. S-13/PU/2014 dated January 7, 2014 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company had obtained approval from ADB regarding the extension of closing date of ADB subordinated loan from December 31, 2013 to December 31, 2014.

The Founders Agreement

On June 30, 2009, all of the Company's founding shareholders entered into an agreement related to the Company's establishment.

- a. The founding shareholders wished to establish the Company as an infrastructure finance company in the form of a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia.
- b. It is the founding shareholders' intention that the Company shall have an authorized share capital of Rp400,000, and an initial issued share capital of Rp100,000 with the shareholders, known as initial subscription.

The Original Shareholders Agreement

The Company, together with the founding shareholders, entered into this agreement on January 15, 2010.

The Founding Shareholders' intention is that:

- a. SMI made an investment in the Company of Rp600,000 (such amount include SMI's initial subscription). As part of the above SMI commitment, SMI will, on the Subscription Date, extend a convertible subordinate loan to the Company in an amount of Rp559,700 pursuant to the SMI Convertible Subordinated Loan Agreement ("CSL").

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Para Pemegang Saham Awal (lanjutan)

- b. Setelah pengambilan bagian awal, (i) ADB dan IFC berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Founders Agreement dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awal mereka masing-masing akan berjumlah, dalam hal IFC sampai dengan USD40.000.000 dan dalam hal ADB, sampai dengan USD40.000.000 dan (ii) DEG bermaksud untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Founders Agreement dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awalnya, akan berjumlah sampai dengan USD20.000.000.

Para pemegang saham pendiri bermaksud agar para investor swasta dapat mengambil bagian dan/atau membeli saham antara tanggal perjanjian ini dan ulang tahun kelima perjanjian ini sampai dengan batas empat puluh lima persen (45%) dari jumlah seluruh modal saham yang dikeluarkan Perusahaan, dengan ketentuan bahwa batas tersebut tidak berlaku setelah Penawaran Saham Perdana.

Para Pemegang Saham mengetahui bahwa pasal 11 dari Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ("Peraturan Menkeu") mensyaratkan Perusahaan yang akan didirikan berdasarkan Peraturan Menkeu tersebut ("Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur"), (i) modal disetor untuk pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sedikitnya Rp100.000 dan (ii) perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetornya sedikitnya Rp2.000.000 dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkannya surat ijin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tersebut.

Untuk memperjelas pada Perjanjian Para Pendiri atau Perjanjian ini:

- i. DEG tidak memiliki janji atau komitmen untuk mengambil bagian atau membayar lebih dari harga pengambilan bagian awalnya (sebagaimana didefinisikan dalam *Founders Agreement*) (mengacu pada Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua); dan

**31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Original Shareholders Agreement (continued)

- b. Subsequent to the initial subscription, (i) ADB and IFC committed to make additional subscription in accordance with the terms and conditions of the founders' agreement and this agreement, which together with their respective initial subscriptions would amount, in the case of IFC, to up to USD40,000,000 and in the case of ADB, to up to USD40,000,000 and (ii) DEG intends to make additional subscriptions in accordance with the term and conditions of the Founders Agreement and this agreement, which together with this initial subscription, would amount to up to USD20,000,000.

It is the founding shareholders' intention that private sector investors may subscribe for and/or acquire shares between the date of this agreement and the fifth anniversary of this agreement up to a limit of forty-five percent (45%) of the total issued share capital of the Company, provided that such limits shall not apply following an Initial Public Offering.

The Shareholders acknowledge that article 11 of Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 Regarding Infrastructure Finance Company (the "MOF regulation") requires, with respect to a company to be established thereunder (an "Infrastructure Finance Company"), (i) the paid-up capital for the establishment of such Infrastructure Finance Company to be at least Rp100,000 and (ii) the Infrastructure Finance Company to increase its paid-up capital to become at least Rp2,000,000 within 5 years as of the issuance of its business license.

For the avoidance of doubt, notwithstanding any other provisions of the Founders' Agreement or this agreement:

- i. *DEG does not have any undertaking or commitment to subscribe and pay more than its initial subscription price (as defined in the Founders Agreement) (refer to Second Amendment of The Shareholders Agreement); and*

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Para Pemegang Saham Awal (lanjutan)

- ii. Setiap investor supranasional memiliki hak dengan pertimbangannya sendiri untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju atas setiap pengeluaran efek baru pada setiap rapat umum sehubungan dengan pengeluaran efek baru tersebut.

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham

Pada tanggal 20 April 2011, Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ("CROS") tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2010. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham.

Perubahan dan pernyataan kembali mengakibatkan dihilangkannya sebuah artikel tentang CSL. Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang terkait dengan CSL yang sejumlah Rp559.700 dalam periode 25 April 2011 sampai 26 April 2011.

Perubahan dan pernyataan kembali juga mengakibatkan pengesampingan permanen terhadap *Put Option*. Perubahan dan pernyataan kembali menyatakan bahwa dengan efek dari awal dalam waktu satu (1) tahun setelah tanggal efektif amandemen pertama dan tanggal dimana Investor Supranasional menjadi pemegang saham Perusahaan, Investor Supranasional akan melepaskan hak-hak mereka secara permanen untuk selama Perjanjian ini berlaku untuk melaksanakan *Put Option* berdasarkan Perjanjian ini. Sehingga tidak akan ada hak lebih untuk *Put* dipertahankan oleh Investor Supranasional satu tahun setelah tanggal 20 April 2011.

Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua

Pada tanggal 16 November 2011, para Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua.

Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua mengakibatkan DEG untuk berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian dalam saham Perusahaan yang bersama-sama dengan modal awal yang disetor menjadi sebesar Rp200.000.

**31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Original Shareholders Agreement (continued)

- ii. Each supranational investor has the right in its sole discretion to vote in favour of, or against, any issuance of new securities at any general meeting in connection with such issuance of new securities.

Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On April 20, 2011, the Shareholders of the Company signed the Circular Resolutions of Shareholders ("CROS") regarding the Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement dated January 15, 2010. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Amended and Restated Shareholders Agreement.

The amendment and restatement resulted in the omission of an article regarding CSL. The Company has returned to SMI the entire amount related to CSL totaling Rp559,700 during the period of April 25, 2011 to April 26, 2011.

The amendment and restatement also resulted in Permanent Waiver of the Put Option. The amendment and restatement stated that with effect from the earlier of the date falling one (1) year after the first amendment effective date and the date on which a Private Sector Investor becomes a shareholder of the Company, the Supranational Investors shall waive their rights, on a permanent basis for so long as this Agreement is in effect, to exercise the Put Option under this Agreement. So that there will be no more right for Put retained by the Supranational Investor one year after April 20, 2011.

Second Amendment of The Shareholders Agreement

On November 16, 2011, the Shareholders of the Company signed the Second Amendment of The Shareholders Agreement. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Amended Shareholders Agreement.

The Second Amendment of The Shareholders Agreement resulted to the commitment of DEG to make additional subscription of the Company's share, which together with its initial subscription, would amount to Rp200,000.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham Ketiga

Pada tanggal 19 Maret 2012, Pemegang Saham Pendiri Perusahaan menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga ("Perjanjian Perubahan Ketiga") terhadap Perjanjian Pemegang Saham Awal tanggal 15 Januari 2010, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 25 April 2011 dan sebagaimana diubah pada tanggal 16 November 2011.

Perjanjian Perubahan Ketiga ini memutuskan hal-hal berikut:

- mengubah dan menyatakan kembali Perjanjian Pemegang Saham Awal.
- menyatakan bahwa Perjanjian Para Pendiri diakhiri.

Perjanjian Pemesanan Saham

Pada tanggal 19 Maret 2012, Perusahaan dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dimana SMBC sebagai pemesan saham telah setuju untuk mengambil bagian sebanyak 175.000 lembar atau mewakili 14,89% dari saham Perusahaan, mewakili dengan harga sebesar Rp192.500 termasuk agio saham sebesar Rp17.500. SMBC telah menyetorkan pemesanan saham tersebut pada tanggal 26 Maret 2012.

Akta Penundukkan

Pada tanggal 26 Maret 2012, Perusahaan dan SMBC menandatangani Akte Penundukkan dimana SMBC sebagai pemegang saham yang baru berjanji kepada Perusahaan sebagai *trustee* untuk pihak-pihak lain yang pada saat ini atau yang setelah ini menjadi terikat pada Perjanjian Pemegang Saham dan kepada Perusahaan sendiri untuk menundukkan diri dan terikat terhadap semua tugas, beban dan kewajiban para Pemegang Saham berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham.

Polis Asuransi

Perusahaan telah memperoleh polis asuransi jenis *Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk* termasuk *Gempa Bumi* dan *Directors and Officers Liability* yang mencakup periode sampai 31 Mei 2018 dan dapat diperpanjang kembali.

**31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Third Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On March 19, 2012, the Founding Shareholders of the Company signed the Third Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement (the "Third Amendment Agreement") to the Original Shareholders Agreement dated January 15, 2010, as amended and restated on April 25, 2011 and November 16, 2011.

The Third Amendment Agreement resulted the following decisions:

- amended and restated the Original Shareholders Agreement.
- stated that the Founders Agreement shall be terminated.

Share Subscription Agreement

On March 19, 2012, the Company and Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") signed a Share Subscription Agreement wherein SMBC as the share subscriber has agreed to subscribe 175,000 shares, representing 14.89% of the total issued shares of the Company at the price of Rp192,500 which included an additional paid-up capital premium of Rp17,500. SMBC has fully paid the shares subscription on March 26, 2012.

Deed of Adherence

On March 26, 2012, the Company and SMBC signed Deed of Adherence where SMBC as the new shareholder covenants to the Company as trustee for all other persons who are at present or who may hereafter become bound by the Shareholders Agreement, and to the Company itself to adhere to and be bound by all the duties, burdens and obligations of a Shareholder imposed pursuant to the provisions of the Shareholders Agreement.

Insurance Policy

The Company has acquired insurance policy for *Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk* including *Earthquake and Director and Officer Liability* covering the period until May 31, 2018 which can be extended.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Jual Beli Ruang Kantor Prosperity Tower

Pada tanggal 26 Mei 2017, Perusahaan dan PT Tunas Titan Maju menandatangani Surat Pernyataan Kehendak untuk membeli ruang kantor di Prosperity Tower lantai 53 dan 55 seluas 3.916 m² dengan total harga pembelian sebesar Rp254.540, belum termasuk PPN 10%, BPHTB, biaya notariil, PNBP dan biaya lain/pajak lain jika dipersyaratkan. Gedung Prosperity Tower terletak di Sudirman Central District Business (SCBD) Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

32. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori dan kelas instrumen keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

31. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Sale and Purchase Agreement of Office Space in Prosperity Tower

On May 26, 2017, the Company and PT Tunas Titan Maju had signed the Letter of Intent to purchase office space in Prosperity Tower on 53th and 55th floors for 3,916 m² with total purchase price of Rp254,540, excluding 10% VAT, BPHTB, notarial fee, PNBP and any other cost/taxes if required. Prosperity Tower Building is located in Sudirman Central District Business (SCBD) Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

32. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below show the categories and classes of financial instruments as of December 31, 2017 and 2016:

31 Desember/December 31, 2017								
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loan and receivables	Aset dimiliki hingga jatuh tempo/ Assets held-to-maturity	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/ Assets at fair value through profit or loss	Aset tersedia untuk dijual/ Assets available-for-sale	Diukur pada biaya perolehan/ Acquisition cost	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized costs	Liabilitas pada nilai wajar/ Liabilities at fair value	Total
Aset keuangan								
Kas dan setara kas	3.965.964	-	-	-	-	-	-	3.965.964
Efek-efek	-	134.808	-	2.832.577	-	-	-	2.967.385
Pinjaman diberikan-neto	5.545.960	-	-	-	-	-	-	5.545.960
Piutang bunga	32.319	-	-	-	-	-	-	32.319
Aset lain-lain	34.631	-	-	-	-	-	-	34.631
Liabilitas keuangan								
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	(2.663)	-	(2.663)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	(27.488)	-	(27.488)
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	(4.474)	(4.474)
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	-	-	(1.521.722)	-	(1.521.722)
Pinjaman diterima	-	-	-	-	-	(6.544.571)	-	(6.544.571)
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	-	(2.622.652)	-	(2.622.652)
	9.578.874	134.808	-	2.832.577	-	(10.719.096)	(4.474)	1.822.689
31 Desember/December 31, 2016								
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loan and receivables	Aset dimiliki hingga jatuh tempo/ Assets held-to-maturity	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/ Assets at fair value through profit or loss	Aset tersedia untuk dijual/ Assets available-for-sale	Diukur pada biaya perolehan/ Acquisition cost	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized costs	Total	
Aset keuangan								
Kas dan setara kas	3.538.279	-	-	-	-	-	3.538.279	Cash and cash equivalents
Efek-efek	-	200.554	-	1.977.692	250.000	-	2.428.246	Securities
Tagihan derivatif	-	-	578	-	-	-	578	Derivative receivable
Investasi saham	-	-	114.106	-	-	-	114.106	Equity investments
Pinjaman diberikan-neto	4.508.869	-	-	-	-	-	4.508.869	Loans-net
Piutang bunga	26.890	-	-	-	-	-	26.890	Accrued interest Income
Aset lain-lain	57.944	-	-	-	-	-	57.944	Other assets
Liabilitas keuangan								
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	(11.737)	(11.737)	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	(33.480)	(33.480)	Accrued expenses and other liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	-	-	(1.519.933)	(1.519.933)	Debt securities issued
Pinjaman diterima	-	-	-	-	-	(4.281.483)	(4.281.483)	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	-	(2.628.137)	(2.628.137)	Subordinated loan
	8.131.982	200.554	114.684	1.977.692	250.000	(8.474.770)	2.200.142	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

Perusahaan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola berbagai risiko yang timbul dari aktivitas usahanya. Perusahaan juga mengadopsi suatu konsep manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh dengan parameter risiko yang terintegrasi yang meliputi antara lain manajemen risiko keuangan dan modal.

Pengawasan aktif atas aktivitas manajemen risiko Perusahaan dilaksanakan melalui beberapa Komite, dimana Komite Eksekutif di bawah pengawasan Direksi terdiri atas Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), dan Dewan Direksi - Komite Investasi (BoD-IC).

RMC adalah komite yang secara langsung berkaitan dengan manajemen atas risiko-risiko, yang membahas dan merekomendasikan kebijakan dan prosedur termasuk pemantauan profil risiko dan mengawasi risiko Perusahaan secara keseluruhan. ALCO merupakan komite yang terkait dengan manajemen risiko dalam penentuan keputusan strategi manajemen atas aktiva dan pasiva, penentuan suku bunga dan likuiditas, serta aspek lainnya dalam rangka manajemen atas aktiva dan pasiva Perusahaan. BoD-IC merupakan komite yang memantau, menganalisis dan menghitung risiko kredit terkait dengan kegiatan investasi Perusahaan.

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola tingkat permodalan untuk memastikan kemampuannya untuk melanjutkan keberlangsungan operasi. Struktur modal Perusahaan yang dicatat dalam ekuitas pemegang saham terdiri dari modal ditempatkan dan disetor (Catatan 21), agio saham, penghasilan komprehensif lain dan saldo laba. Sebagian besar modal Perusahaan saat ini ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas (Catatan 5), efek-efek (Catatan 6), investasi saham (Catatan 8) dan pinjaman diberikan (Catatan 9).

Modal disetor dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar Rp100.000. Perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi persyaratan modal minimum.

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT**

The Company takes proactive measures to manage various risks that arise from its business activities. The Company also adopts an enterprise risk management concept with integrated risk parameters involving among others financial risk and capital risk management.

Active supervision on the Company's risk management activities are implemented through Committees of which the Executive Committee under the supervision of the Board of Directors consists of Risk Management Committee (RMC), Asset & Liabilities Committee (ALCO), and Board of Directors - Investment Committee (BoD-IC).

RMC is the committee directly related to the management of risks, which discusses and recommends policies and procedures as well as monitoring risk profile and managing the entire risks of the Company. ALCO is the risk management committee that is related with the decision making of asset and liabilities management strategy, designation of interest rate and liquidity, along with other aspects related to the management of the Company's assets and liabilities. BoD-IC is the committee that oversees, analyze and quantify credit risk exposure arising from the Company's investment activities.

a. Capital risk management

The Company manages capital level to ensure that it will be able to continue as going concern. The Company's capital structure recorded as shareholders' equity consists of capital stock (Note 21), additional paid-in capital, other comprehensive income and retained earnings. The capital of the Company is mainly placed in form of cash and cash equivalents (Note 5), securities (Note 6), equity investment (Note 8), and loans (Note 9).

Paid-up capital for the establishment of infrastructure financing company is set at least in the amount of Rp100,000. Infrastructure financing company shall increase its paid-up capital to at least Rp2,000,000 within 5 (five) years since the issuance of the business license. As of December 31, 2017 and 2016, the Company has fulfilled the minimum capital requirement.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

- b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman tertentu yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Komite Pengawasan Risiko (ROC) untuk pedoman yang khusus terkait dengan risiko.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan sumber dana Perusahaan yang berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berupa pinjaman subordinasi dan pinjaman komersil, dan juga dalam lingkup lebih kecil terkait dengan beberapa transaksi atas pendapatan dan beban usahanya yang didenominasi dalam mata uang asing.

Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan menjaga, sebisa mungkin, keseimbangan komposisi aktiva dan pasiva moneter dalam mata uang asing. Posisi mata uang asing bersih dikelola pada tingkat yang rendah bila dibandingkan dengan struktur permodalan Perusahaan. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 30.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Perusahaan terutama terekspos terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat.

Perusahaan melakukan analisis sensitivitas Perusahaan terhadap peningkatan dan penurunan 10% dalam Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan, dimana 10% adalah tingkat sensitivitas yang digunakan dalam pelaporan internal mengenai risiko mata uang asing dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing.

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

- b. *Financial risk management objectives and policies*

The Company's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, as well as for managing its exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Company operates within defined guidelines that are approved by the Board of Commissioners and Risk Oversight Committee (ROC) for risk specific guidance.

i. Foreign currency risk management

The Company is exposed to foreign currency exchange rate fluctuation mainly due to the Company's funds which are denominated in United States Dollar from subordinated loan and commercial loan, and to a smaller extent from some of its foreign currency denominated transactions on its revenues and operating expenses.

The Company manages the foreign currency exposure by maintaining, as far as possible, balanced composition between financial assets and liabilities in foreign currency. The net open foreign currency position is managed at a low level compared to the Company's capital. The Company's net open foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 30.

Foreign currency sensitivity analysis

The Company is mainly exposed to the United States Dollar currency.

The Company conducted an analysis of the Company's sensitivity to a 10% increase and decrease in the Rupiah against the relevant foreign currencies, of which the 10% is the sensitivity rate used for internal reporting on foreign currency risk and represents management's assessment of the plausible change in foreign exchange rates.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2017 dan
 untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2017 and
 for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
 RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
 (lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

**i. Manajemen risiko mata uang asing
 (lanjutan)**

Analisis sensitivitas mata uang asing
 (lanjutan)

Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 10% dalam nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas terutama meliputi pinjaman diberikan yang diberikan Perusahaan kepada nasabah dan investasi saham serta pinjaman eksternal yang didapatkan oleh Perusahaan dimana denominasi investasi adalah dalam mata uang selain mata uang fungsional dari pemberi pinjaman atau peminjam.

Jumlah positif di bawah ini menunjukkan peningkatan laba atau ekuitas dimana Rupiah menguat 10% terhadap mata uang yang relevan. Untuk pelemahan 10% dari Rupiah terhadap mata uang yang relevan, akan ada dampak berbanding terbalik pada laba atau ekuitas, sehingga saldo di bawah ini akan menjadi negatif (tidak diaudit).

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Laba rugi	+/(54.212)	+/(8.086)	<i>Profit or loss</i>
Ekuitas	+/(54.212)	+/(8.086)	<i>Equity</i>

Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur terhadap saldo aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada akhir periode pelaporan.

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
 RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
 (continued)**

b. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

**i. Foreign currency risk management
 (continued)**

Foreign currency sensitivity analysis
 (continued)

The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 10% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis mainly includes loans disbursed by the Company to customers and equity investments and external borrowings obtained by the Company where the denomination of the Company's investment is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

A positive number below indicates an increase in profit or equity where the Rupiah strengthens 10% against the relevant currency. For a 10% weakening of the Rupiah against the relevant currency, there would be an inverse impact on the profit or equity, thus the balances below would be negative (unaudited).

This is mainly attributable to the exposure outstanding on United States Dollar denominated assets and liabilities in the Company at the end of the reporting period.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

**i. Manajemen risiko mata uang asing
(lanjutan)**

Analisis sensitivitas mata uang asing
(lanjutan)

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas bukan sepenuhnya representasi dari risiko valuta asing yang melekat, karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

ii. Risiko harga lain

Perusahaan terekspos terhadap risiko fluktuasi harga pasar efek-efek yang diklasifikasi pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan tersedia untuk dijual (AFS).

Analisis sensitivitas harga efek-efek dan
investasi saham

Analisis sensitivitas berikut ditentukan berdasarkan eksposur terhadap risiko nilai wajar efek-efek dan investasi saham pada akhir periode pelaporan.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan jika nilai wajar efek-efek dan investasi saham naik/turun 2%, maka (tidak diaudit):

	31 Desember / December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Investasi saham	-	+/- 2.717	Equity investments
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	+/-56.652	+/- 39.554	Gains/losses from changes in a fair value of available-for-sale securities

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

**i. Foreign currency risk management
(continued)**

Foreign currency sensitivity analysis
(continued)

In management's opinion, the sensitivity analysis is not a full representation of the inherent foreign exchange risk, because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

ii. Other price risks

The Company is exposed to risk of fluctuation in quoted price of securities classified at fair value through profit or loss (FVTPL) and available-for-sale (AFS).

Sensitivity analysis of securities and equity
investments prices

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to securities and equity investments fair value risks at the end of the reporting period.

The table below summarizes if securities and equity investments fair value had been 2% higher/lower, hence (unaudited):

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2017 dan
 untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2017 and
 for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Perusahaan terekspos terhadap dampak perubahan tingkat bunga terutama karena adanya dampak perubahan terhadap pinjaman yang mempunyai tingkat bunga mengambang, serta pinjaman yang diberikan maupun aktivitas investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*) akibat perubahan bunga di pasar.

Sedapat mungkin Perusahaan menyesuaikan bunga yang diberikan untuk pinjaman (baik tetap ataupun mengambang) dengan bunga sumber pembiayaannya. Sedangkan untuk investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*), risiko tingkat bunga dikelola melalui pemantauan terhadap limit durasi secara portofolio yang dilakukan berkala.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iii. Interest rate risk management

The Company is exposed to changes in interest rates mainly due to the impact such changes may have on borrowings that carry floating interest rate, and loans as well as investment activity of idle funds, as a result of changes in market interest rate.

As much as practicable, the Company matches the interest rate for loans it extended (whether floating or fixed) with that of the funding source. Whereas for investment in idle funds, the interest rate risk is managed through periodical monitoring against the duration limit on portfolio basis.

The table below summarizes the Company's exposures to interest rate risk.

31 Desember/December 31, 2017

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year				
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	3.965.949	-	-	-	15	3.965.964	Cash and cash equivalents
Efek-efek	-	-	-	2.967.385	-	2.967.385	securities
Pinjaman diberikan - neto	90.817	207.041	3.328.805	1.919.298	-	5.545.961	Loans - net
Prutang bunga	-	-	-	-	32.319	32.319	Accrued interest income
Aset lain-lain	-	-	-	-	34.631	34.631	Other assets
Total aset keuangan	4.056.766	207.041	3.328.805	4.886.683	66.965	12.546.260	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	2.663	2.663	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	27.488	27.488	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	4.474	-	-	-	-	4.474	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	1.521.722	-	1.521.722	Debt securities issued
Pinjaman diterima	10.787	-	6.533.784	-	-	6.544.571	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	35.125	45.724	2.541.803	-	-	2.622.652	Subordinated loan
Total liabilitas keuangan	50.386	45.724	9.075.587	1.521.722	30.151	10.723.570	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga	4.006.380	161.317	(5.746.782)	3.364.961	36.814	1.822.690	Net interest repricing gap

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga. (lanjutan)

33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

iii. Interest rate risk management (continued)

The table below summarizes the Company's exposures to interest rate risk. (continued)

31 Desember/December 31, 2016

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year				
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	3.538.270	-	-	-	9	3.538.279	Cash and cash equivalents
Efek-efek	-	-	-	2.428.246	-	2.428.246	securities
Tagihan derivatif	-	-	-	-	578	578	Derivative receivables
Investasi saham	-	-	-	-	114.106	114.106	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	60.157	1.172.433	3.124.619	151.660	-	4.508.869	Loans - net
Piutang bunga	-	-	-	-	26.890	26.890	Accrued interest income
Aset lain-lain	-	-	-	-	57.944	57.944	Other assets
Total aset keuangan	3.598.427	1.172.433	3.124.619	2.579.906	199.527	10.674.912	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	11.737	11.737	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	33.480	33.480	Accrued expenses and other liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	1.519.933	-	1.519.933	Debt securities issued
Pinjaman diterima	7.616	-	4.273.867	-	-	4.281.483	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	17.969	28.875	2.581.293	-	-	2.628.137	Subordinated loan
Total liabilitas keuangan	25.585	28.875	6.855.160	1.519.933	45.217	8.474.770	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga	3.572.842	1.143.558	(3.730.541)	1.059.973	154.310	2.200.142	Net interest repricing gap

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada manajemen dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, maka (tidak diaudit):

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared using assumption that the balance of the liability at the end of the reporting period as the amount that was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to management and represents management's assessment of the plausible change in interest rates.

The table below summarizes if interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, hence (unaudited):

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

**iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga
(lanjutan)**

Analisis sensitivitas suku bunga (lanjutan)

	Desember 31/ December 31, 2017
Pendapatan dan beban bunga	+/- 8.952
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	+/- 79.266

iv. Manajemen risiko kredit

Eksposur risiko kredit Perusahaan melekat pada dana tunai di rekening bank, penempatan pada efek-efek serta pinjaman yang diberikan kepada debitur.

Risiko kredit mengacu pada risiko kegagalan pihak rekanan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit atas pinjaman yang diberikan, keputusan untuk memberikan kredit kepada debitur/perusahaan proyek dilakukan melalui proses kredit yang ekstensif yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan persetujuan dari Komite Investasi dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

Untuk aktivitas investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*), Perusahaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan konservatif dimana Perusahaan hanya melakukan penempatan pada efek-efek dengan *underlying investment* yang mendapatkan peringkat kredit eksternal yang layak.

Berkaitan dengan penempatan dana tunai di rekening bank, Perusahaan hanya menempatkan dananya pada institusi keuangan yang memiliki peringkat kredit eksternal yang layak.

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

**iii. Interest rate risk management
(continued)**

Interest rate sensitivity analysis (continued)

	31 Desember/ December 31, 2016	
	+/- 27.830	<i>Interest income and expense</i>
	+/- 27.337	<i>Gains/losses from changes in fair value of available-for-sale securities</i>

iv. Credit risk management

The Company's credit risk exposure is attributed to its cash in banks, placement in securities and loans to debtors.

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company.

In order to manage and minimize credit risk of loans, a decision to provide loans to debtors/project companies is made after going through extensive credit process requiring rigorous assessment, evaluation, and approval process from Investment Committees of Boards of Directors and Commissioners.

For its investment activity on excess idle funds, the Company always implements prudent and conservative principles where the Company only invests its funds on assets with underlying investment that has acceptable external credit rating.

In relation to funds placement at bank accounts, the Company only places its funds with credit worthy financial institutions that have acceptable external credit rating.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Kas dan setara kas	3.965.964	3.538.279	Cash and cash equivalents
Efek-efek	2.967.385	2.428.246	Securities
Tagihan derivatif	-	578	Derivative receivable
Investasi saham	-	114.106	Equity investments
Pinjaman diberikan	5.545.960	4.508.869	Loans
Piutang bunga	32.319	26.890	Accrued interest income
Aset lain-lain	34.631	57.944	Other assets
Total	12.546.259	10.674.912	Total

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, eksposur maksimal risiko kredit sebelum agunan yang diterima atau perangkat kredit lain adalah ekuivalen dengan jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan. Agunan yang diterima dan perangkat kredit lain dijelaskan di Catatan 9.

v. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas terutama berasal dari potensi ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset keuangan Perusahaan dengan liabilitas keuangannya. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan dana simpanan, memperoleh tambahan fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus memonitor arus kas perkiraan dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perusahaan juga melakukan monitor secara berkala posisi likuiditas terhadap limit.

Untuk mengelola risiko likuiditas jangka pendek, Perusahaan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iv. Credit risk management (continued)

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for impairment losses best represents the Company's exposure to credit risk.

As of December 31, 2017 and 2016, the maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements is equivalent to the carrying amounts of the Company's financial assets. The collateral and other credit enhancements are described in Note 9.

v. Liquidity risk management

Liquidity risk mainly arises from the potential maturity mismatch between the Company's financial assets and liabilities. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserve funds, obtaining additional borrowing facilities and by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. The Company also monitors the liquidity position against limit.

In managing short-term liquidity risk, the Company maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

b. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

v. Liquidity risk management (continued)

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The maturities profile of financial assets (without considering the allowance for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

		31 Desember/December 31, 2017							
		0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Aset keuangan/ Financial assets									
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents		3.965.964	-	-	-	-	-	-	3.965.964
Efek-efek/Securities		-	-	-	711.465	1.629.731	140.661	485.528	2.967.385
Pinjaman diberikan/Loans		23.011	966.723	194.120	1.258.096	1.573.463	1.404.992	270.442	5.690.847
Piutang bunga/Accrued interest income		32.319	-	-	-	-	-	-	32.319
Aset lain-lain/Other assets		41.348	-	-	-	-	-	-	41.348
		4.062.642	966.723	194.120	1.969.561	3.203.194	1.545.653	755.970	12.697.863
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities									
Utang lain-lain/Other payables		2.663	-	-	-	-	-	-	2.663
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/ Accrued expenses and other liabilities		27.488	-	-	-	-	-	-	27.488
Liabilitas derivatif/derivative liabilities		4.474	-	-	-	-	-	-	4.474
Surat utang yang diterbitkan/ Debt securities issued		25.613	-	-	823.211	249.458	423.440	-	1.521.722
Pinjaman diterima/ Fund borrowing		10.788	-	991.629	4.640.232	901.922	-	-	6.544.571
Pinjaman subordinasi/ Subordinated loans		35.126	-	45.724	199.096	228.087	730.514	1.384.105	2.622.652
		106.152	-	1.037.353	5.662.539	1.379.467	1.153.954	1.384.105	10.723.570
Selisih jatuh tempo/ Maturity gap		3.956.490	966.723	(843.233)	(3.692.978)	1.823.727	391.699	(628.135)	1.974.293

		31 Desember/December 31, 2016							
		0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Aset keuangan/ Financial assets									
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents		3.538.279	-	-	-	-	-	-	3.538.279
Efek-efek/Securities		-	-	-	198.806	731.609	918.141	579.690	2.428.246
Tagihan derivatif/ Derivative receivable		578	-	-	-	-	-	-	578
Investasi saham/ Equity investments		-	-	-	-	114.106	-	-	114.106
Pinjaman diberikan/Loans		136.770	35.224	1.137.209	912.059	699.608	1.221.399	427.332	4.569.601
Piutang bunga/Accrued interest income		26.890	-	-	-	-	-	-	26.890
Aset lain-lain/Other assets		57.945	-	-	-	-	-	-	57.945
		3.760.462	35.224	1.137.209	1.110.865	1.545.323	2.139.540	1.007.022	10.735.645

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2016								
	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities								
Utang lain-lain/ Other payables	11.737	-	-	-	-	-	-	11.737
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/ Accrued expenses and other liabilities	33.480	-	-	-	-	-	-	33.480
Surat utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	25.613	-	-	821.876	249.053	423.391	-	1.519.933
Pinjaman diterima/ Fund borrowing	7.226	-	-	3.585.782	688.475	-	-	4.281.483
Pinjaman subordinasi/ Subordinated loans	32.054	-	14.790	156.175	211.408	675.256	1.538.454	2.628.137
	110.110	-	14.790	4.563.833	1.148.936	1.098.647	1.538.454	8.474.770
Selisih jatuh tempo/ Maturity gap	3.650.352	35.224	1.122.419	(3.452.968)	396.387	1.040.893	(531.432)	2.260.875

c. Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan, mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dicatat berdasarkan tingkat bunga pasar.

Asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan ditetapkan di bawah ini.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasi (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

v. Liquidity risk management (continued)

The maturities profile of financial assets (without considering the allowance for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2017 and 2016 is as follows (continued):

c. Fair value of financial instruments

Management believes that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements is a close estimation of their fair values, both for those that have short term maturities as well as those that carry at market rates of interest.

The significant assumptions used in determining the fair value of financial assets and liabilities are set out below.

Fair value measurements recognized in the statement of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments as of December 31, 2017 and 2016 that grouped into Level 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

c. Fair value of financial instruments (continued)

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan
posisi keuangan (lanjutan)

Fair value measurements recognized in the
statement of financial position (continued)

- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya berasal dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

31 Desember/December 31, 2017

	Nilai wajar/Fair value				Total	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset yang diukur pada nilai wajar						Assets measured at fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual Efek-efek	2.832.577	2.832.577	-	-	2.832.577	Financial asset at available-for-sale Securities
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						Assets for which fair values are disclosed
Dimiliki hingga jatuh tempo Efek-efek	134.808	138.883	-	-	138.883	Held-to-maturity Securities
Pinjaman yang diberikan dan piutang						Loans and receivables
Kas dan setara kas	3.965.964	-	-	3.965.964	3.965.964	Cash and cash equivalents
Pinjaman diberikan	5.545.960	-	-	5.545.960	5.545.960	Loans
Piutang bunga	32.319	-	-	32.319	32.319	Accrued interest income
Aset lain-lain	34.631	-	-	34.631	34.631	Other assets
	12.546.259	2.971.460	-	9.578.874	12.550.334	
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						Liability for which fair values are disclosed
Utang lain-lain	2.663	-	-	2.663	2.663	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	27.488	-	-	27.488	27.488	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	4.474	-	-	4.474	4.474	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	1.521.722	1.550.419	-	-	1.550.419	Debt securities issued
Pinjaman diterima	6.544.571	-	-	6.544.571	6.544.571	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	2.622.652	-	-	2.622.652	2.622.652	Subordinated loans
	10.723.570	1.550.419	-	9.201.848	10.752.267	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

c. Fair value of financial instruments (continued)

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan
posisi keuangan (lanjutan)

Fair value measurements recognized in the
statement of financial position (continued)

31 Desember/December 31, 2016

	Nilai wajar/Fair value				Total	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset yang diukur pada nilai wajar						Assets measured at fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual						Financial asset at available-for-sale
Efek-efek	1.977.692	1.977.692	-	-	1.977.692	Securities
Tagihan derivatif	578	-	578	-	578	Derivative receivable
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						Financial asset at FVTPL
Investasi saham	114.106	-	-	114.106	114.106	Equity investments
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						Assets for which fair values are disclosed
Diukur pada biaya perolehan						Acquisition cost
Efek-efek	250.000	273.413	-	-	273.413	Securities
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held-to-maturity
Efek-efek	200.554	205.389	-	-	205.389	Securities
Pinjaman yang diberikan dan piutang						Loans and receivables
Kas dan setara kas	3.538.279	-	-	3.538.279	3.538.279	Cash and cash equivalents
Pinjaman diberikan	4.508.869	-	-	4.508.869	4.508.869	Loans
Piutang bunga	26.890	-	-	26.890	26.890	Accrued interest income
Aset lain-lain	57.944	-	-	57.944	57.944	Other assets
	10.674.912	2.456.494	578	8.246.088	10.703.160	
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						Liability for which fair values are disclosed
Utang lain-lain	11.737	-	-	11.737	11.737	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	33.480	-	-	33.480	33.480	Accrued expenses and other liabilities
Surat utang yang diterbitkan	1.519.933	1.512.318	-	-	1.512.318	Debt securities issued
Pinjaman diterima	4.281.483	-	-	4.281.483	4.281.483	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	2.628.137	-	-	2.628.137	2.628.137	Subordinated loans
	8.474.770	1.512.318	-	6.954.837	8.467.155	

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu selain efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dan pada biaya perolehan dan surat utang yang diterbitkan mendekati nilai tercatat, karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar

Fair values of certain financial assets and liabilities other than held-to-maturity and at acquisition cost securities and debt securities issued approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments and due to the interest rate is at market rate.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan
posisi keuangan (lanjutan)

Nilai wajar dari efek-efek yang dimiliki hingga
jatuh tempo dan pada biaya perolehan dan
surat utang yang diterbitkan ditentukan
berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan
2016.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan
2016, tidak terdapat aset keuangan atau
liabilitas keuangan yang ditransfer dari/ke
tingkat 2 dan/atau tingkat 3.

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

c. *Fair value of financial instruments (continued)*

*Fair value measurements recognized in the
statement of financial position (continued)*

*The fair value of held-to-maturity and
acquisition cost securities and debt securities
issued is determined on the basis of quoted
market price as of December 31, 2017 and
2016.*

*As of December 31, 2017 and 2016, there is no
financial assets and financial liabilities transfer
out of or into level 2 and/or level 3.*

34. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan
mengidentifikasi segmen yang dilaporkan
berdasarkan jenis produk. Laba rugi dari masing-
masing segmen digunakan untuk menilai kinerja
masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan
dengan segmen usaha utama disajikan sebagai
berikut:

34. OPERATING SEGMENT

*The Company manages its business activities and
identifies its reported segments based on product
categories. Profit or loss from each segment is used
to measure performance of each segments
information concerning the main segments as set
out as follows:*

31 Desember/December 31, 2017

	Produk Investasi/ Investment products	Produk Tresuri/ Treasury products	Jasa Advisory/ Advisory services	Total	
Pendapatan bunga	451.986	172.294	-	624.280	<i>Interest income</i>
Pendapatan provisi dan komisi	23.084	-	-	23.084	<i>Provision and commission income</i>
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	-	88.963	-	88.963	<i>Realized gain from sale of securities</i>
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	-	3.474	-	3.474	<i>Realized gain from derivative transaction</i>
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	-	(4.474)	-	(4.474)	<i>Unrealized loss from changes in fair value of derivative transaction</i>
Pendapatan jasa advisory	-	-	17.855	17.855	<i>Advisory income</i>
Pendapatan lainnya	5.982	-	-	5.982	<i>Other income</i>
Beban bunga	(312.717)	(186.160)	-	(498.877)	<i>Interest expense</i>
Beban umum dan administrasi	(36.004)	(34.649)	(9.507)	(80.160)	<i>General and administrative expenses</i>
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(89.728)	-	(440)	(90.168)	<i>Provision for impairment losses</i>
Penurunan nilai investasi saham	(115.142)	-	-	(115.142)	<i>Decrease in fair value of equity investment</i>
Beban yang tidak dapat dialokasi - neto	-	-	-	(69.269)	<i>Unallocated expenses - net</i>
Labanya sebelum beban pajak	(72.539)	39.448	7.908	(94.452)	<i>Income before tax expense</i>

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

34. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2016					
	Produk Investasi/ Investment products	Produk Tresuri/ Treasury products	Jasa Advisory/ Advisory services	Total	
Pendapatan bunga	380.646	114.427	-	495.073	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	51.409	-	-	51.409	Provision and commission income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	-	2.614	-	2.614	Realized gain from sale of securities
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	-	15.410	-	15.410	Realized gain from derivative transaction
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	-	578	-	578	Unrealized gain from changes in fair value of derivative transaction
Pendapatan jasa advisory	-	-	7.381	7.381	Advisory income
Kerugian dari investasi saham	(26.690)	-	-	(26.690)	Loss from equity investment
Beban bunga	(184.203)	(66.815)	-	(251.018)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(23.808)	(24.694)	(6.108)	(54.610)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(32.554)	-	-	(32.554)	Provision for impairment losses
Beban yang tidak dapat dialokasikan - neto	-	-	-	(70.489)	Unallocated expenses - net
Laba sebelum beban pajak	164.800	41.520	1.273	137.104	Income before tax expense

35. LABA PER SAHAM

35. EARNINGS PER SHARE

Berikut adalah perhitungan laba bersih per saham
dasar:

The following presents the computations of basic
earnings per share:

31 Desember/December 31,				
	(Rugi)/laba bersih tahun berjalan/Net (loss)/income for the year	Rata-rata Tertimbang jumlah saham dasar/ Weighted average number of ordinary shares outstanding	Laba per saham/ Earnings per share (Dalam ribuan Rupiah/in thousands of Rupiah)	
2017	(81.622)	2.000.000	(41)	2017
2016	101.793	2.000.000	51	2016

**36. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS
AKTIVITAS INVESTASI DAN PEMBIAYAAN NON-
KAS**

**36. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-
CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES**

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Penurunan investasi saham	(115.142)	(26.690)	Decrease in investments in equity
Realisasi kerugian investasi saham	-	(37.235)	Realized loss from investments in equity
Kenaikan/(penurunan) efek-efek tersedia untuk dijual dari perubahan nilai wajar	37.966	(18.847)	Increase/(decrease) in available-for-sale securities from changes in fair value
Kenaikan aset lain-lain dari beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	846	2.304	Increase in other assets through accrued expense and other liabilities
Kenaikan aset tetap dari beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	455	350	Increase in fixed assets through accrued expense and other liabilities

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 18 Januari 2018, Perusahaan menerima surat pengunduran diri dari Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perusahaan yang berlaku efektif pada tanggal 18 Maret 2018.
- b. Pada tanggal 24 Januari 2018, Bapak I Made Wiracita Tantra ditunjuk sebagai Direktur Perusahaan yang berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2018.
- c. Pada tanggal 25 Januari 2018, Bapak Rinaldi Firmansyah diangkat sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perusahaan menggantikan Bapak Zulkifli Zaini.
- d. Pada tanggal 13 Februari 2018, Bapak Muhammad Al Arief diangkat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Robert Pakpahan.

38. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui dan diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2018.

37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On January 18, 2018, the Company received a resignation letter from Mr. Edwin Gerungan as Commissioner/Independent Commissioner of the Company which effective on March 18, 2018.
- b. On January 24, 2018, Mr. I Made Wiracita Tantra was appointed as Director of the Company which will become effective on March 5, 2018.
- c. On January 25, 2018, Mr. Rinaldi Firmansyah was appointed as Commissioner/Independent Commissioner of the Company replacing Mr. Zulkifli Zaini.
- d. On February 13, 2018, Mr. Muhammad Al Arief was appointed as Commissioner of the Company replacing Mr. Robert Pakpahan.

38. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements are the responsibilities of the management and were approved and authorized for issue by the Directors on February 15, 2018.



The Energy Building, 30th Floor
Sudirman Central Business District, Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta - Indonesia
12190
Phone : 62 21 2991 5060
Fax : 62 21 2991 5061
Email : info@iif.co.id

www.iif.co.id